

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
BOSDA JENJANG SMP NEGERI
DI KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

L I S R A N

NIM.500647451

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2016

ABSTRAK

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSDA Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan

Lisran

lisran.28@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya, kemudian untuk memperoleh gambaran tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Sumber informasi terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana BOSDA belum memenuhi syarat akuntabilitas prosedural. Hal ini disebabkan oleh lambatnya penetapan Keputusan Bupati tentang juknis dan alokasi dana BOSDA. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi. Aspek akuntabilitas keuangan menunjukkan belum tertibnya administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban BOSDA. Aspek akuntabilitas manfaat menggambarkan keberadaan dana BOSDA belum sepenuhnya dapat mensejahterakan tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan. Ini ditunjukkan dengan besaran honorarium guru non PNS dan honor penjaga sekolah di SMPN 4 Kecamatan Sembakung sebesar 60 ribu per 3 bulan. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA baik akuntabilitas prosedural maupun akuntabilitas keuangan adalah faktor kewenangan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, serta SOP BOSDA. Upaya pemerintah antara lain pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, peningkatan SDM, keterbatasan staf PNS tata usaha, merevisi juknis, menetapkan SOP BOSDA. Kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOSDA belum menggambarkan akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan dari aspek akuntabilitas manfaat keberadaan dana BOSDA salah satunya dapat meminimalisir angka putus sekolah. Saran peneliti ke Pemda adalah melimpahkan sebagian kewenangan Bupati, meningkatkan SDM, menetapkan staf PNS tata usaha disekolah-sekolah, melaksanakan pengawasan laporan pertanggungjawaban, merevisi juknis serta membuat SOP BOSDA.

Kata Kunci : Akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas manfaat.

Abstract

Accountability The Management Of Funds BOSDA Level Junior High Schools In
Kabupaten Nunukan

Lisran

Lisran.28 @ gmail.com

Graduate Program Universtitas Open

The purpose of this research is to gain an overview of the management accountability BOSDA funding levels of SMP in Nunukan and identifies the factors that influence it, then to obtain a description of the efforts made by the Government of Nunukan district in overcoming barriers to accountability in the management of funds BOSDA levels of SMP in Nunukan both accountability procedural, financial accountability, and accountability benefits. This study used a qualitative approach, descriptive methods. The source of information consists of key informants and informant support. Selection of informants by using techniques nonprobability sampling through purposive sampling technique. Collecting data through interviews, observation and documentation study. Analysis of data through data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the fund management BOSDA yet qualified procedural accountability. This is caused by the slow determination Regent Decision on guidelines and allocation of funds BOSDA. Not optimal socialization. Aspects of financial accountability is not as yet orderly administration BOSDA bookkeeping and accountability. Accountability aspect BOSDA benefits described the existence of the funds have not been fully able to prosper educators and non-educational personnel. This is shown by the amount of non-civil servant teachers honorarium and honor guard school in SMPN 4 Districts Sembakung amounted to 60 thousand per 3 months. Factors affecting the accountability of the fund management accountability BOSDA both procedural and financial accountability is a factor of authority, human resources, training, supervision, and SOP BOSDA. Efforts by the government, among others, the delegation of partial authority Regent, human resource development, the limitations of civil administration staff, revise the guidelines, set BOSDA SOP. The conclusion that the management of funds BOSDA not describe the procedural accountability and financial accountability. While the benefits of the existence of the accountability of funds BOSDA one can minimize the number of dropouts. The researchers suggest the same local government to delegate part of the authority regent, develop human resources, establish civil administration staff in schools, with oversight responsibility report, revised the guidelines and make SOP BOSDA. Keywords: Accountability procedural, financial accountability and accountability benefits.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Mei 2016

Yang Menyatakan



(Lisran)

NIM. 500647451

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama TAPM : Lisran
 Judul TAPM : Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP
 Negeri di Kabupaten Nunukan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar % sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM)

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa

Nunukan, 17 Mei 2016.

Pembimbing II

Dr. Prayekti, M.Pd
 NIP.19580508 198303 2 002

Pembimbing I



Dr. Akadun
 NIP. 19640830 199103 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Lisran
 NIM : 500647451
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP
 Negeri di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Pada :
 Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Juni 2016
 Waktu : 08.00-09.30 Wite

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli
 Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A

Pembimbing I
 Dr. Akadun

Pembimbing II
 Dr. Prayekti, M.Pd

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang
SMP Negeri di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Lisran

NIM : 500647451

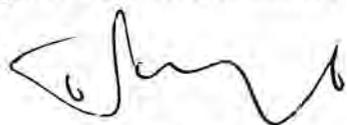
Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu/18 Juni 2016

Menyetujui:

<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. Prayekti, M.Pd NIP.19580508 198303 2 002</p>	<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Akadun NIP.19640830 199103 1 002</p>
<p>Penguji Ahli</p>  <p>Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A</p>	
<p>Mengetahui,</p>	

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik
Program Magister Adminstrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.d
NIP. 19520213 198503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan”. Penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana Program Magister Administrasi Publik (MAP) pada Universitas Terbuka.

Dalam pemilihan tema sebagaimana disebutkan diatas, penulis memilih dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA, yang kemudian penulis juga ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat.

Dalam melakukan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, tentu penulis menyadari bahwa banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi penulis, terutama pada pencarian literatur sebagai bahan pustaka pada penulisan, namun semua itu dapat terpenuhi berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Bapak Dr.Akadun selaku pembimbing I dan ibu Dr.Prayekti,M.Pd selaku pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi menuju proses kesempurnaan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan;

4. Dr.Darmanto.E.Md, Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik;
5. Prof.Dr.Aries Djaenuri,M,A selaku penguji ahli, dan ibu Dr.Tirta Rosita,M.Pd selaku Ketua Komisi pada ujian sidang TAPM
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan materi/ilmu kepada penulis baik dari awal perkuliahan sampai penyelesaian studi sehingga dapat memberikan kontribusi ilmu serta wawasan, cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas sekembali dari studi ini;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya dalam melakukan penelitian di Dinas Pendidikan;
8. Asisten III Setkab.Nunukan Drs.H.Taufiqurrahman,M.Si yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap penelitian saya;
9. Sekretaris beserta seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini;
10. Rekan-rekan seperjuangan calon S2 di MAP-UT yang bersama-sama menempuh studi dalam suka dan duka, yang turut andil mendukung penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan seluruh beban tugas;
11. Orang tua, istri dan anak-anak saya serta keluarga yang telah memberikan dukungan semangat dan spirit;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun material dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata dari saya, semoga bimbingan dan bantuan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan penulisan TAPM ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Nunukan, 17 Mei 2016

Penulis,

BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS



Lisran, S.AP lahir di Nunukan tepatnya tanggal 28 Mei 1974. Dalam menempuh dunia pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) tahun 2002 di SD 002 Nunukan. Dan lulus dari SMP tahun 1990 di Madrasah Tsanawiyah Nunukan, yang kemudian lulus dari SMA tahun 1993 di Madrasah Aliyah Nunukan. Melanjutkan ke Universitas Terbuka S1 program Administrasi Publik dan lulus tahun 2007. Saat ini penulis berprofesi sebagai pegawai negeri sipil daerah sejak tahun 2000 s/d sekarang. Berikut riwayat singkat pekerjaan:

1. Tahun 1995 s/d 1998, sebagai staf honorer di Kantor Desa Nunukan Selatan Kabupaten Bulungan;
2. Tahun 1998 s/d 1999, sebagai Staf honorer di Kantor Camat Nunukan Kabupaten Bulungan;
3. Tahun 1999 s/d 2000, sebagai Staf honorer di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan;
4. Tahun 2000 s/d 2002, sebagai Staf pelaksana di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan;
5. Tahun 2002 s/d 2005, menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.
6. Tahun 2005 s/d 2006, sebagai staf Pelaksana pada Bagian Keuangan Setkab Nunukan.
7. Tahun 2006 s/d 2008, menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Tahun 2008 s/d 2009, sebagai staf pelaksana Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nunukan.
9. Bulan Pebruari 2009, menjabat sebagai bendahara pengeluaran Kantor Bupati Nunukan.

10. Tahun 2010, menjabat sebagai Plt.Kasi Perizinan pada Kantor Perizinan Kabupaten Nunukan.
11. Bulan Pebruari 2011 s/d Nopember 2011, menjabat sebagai Plt.Kasi Perbatasan pada Bagian Perbatasan Setkab.Nunukan.
12. Bulan Nopember 2011 s/d Pebruari 2015, menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan.
13. Bulan Pebruari 2015 s/d sekarang, menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Selain profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehidupan sehari-hari penulis melaksanakan kegiatan keagamaan yang menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Mesjid Al'Muqaddis Kabupaten Nunukan sejak tahun 2011 s/d sekarang. Selain kegiatan keagamaan, penulis juga berkecimpung dalam di kegiatan olah raga Kabupaten Nunukan sehingga masuk pada jajaran pengurus Koni Kabupaten Nunukan yang menjabat sebagai wakil ketua bidang anggaran KONI sejak tahun 2012 s/d sekarang.



DAFTAR ISI

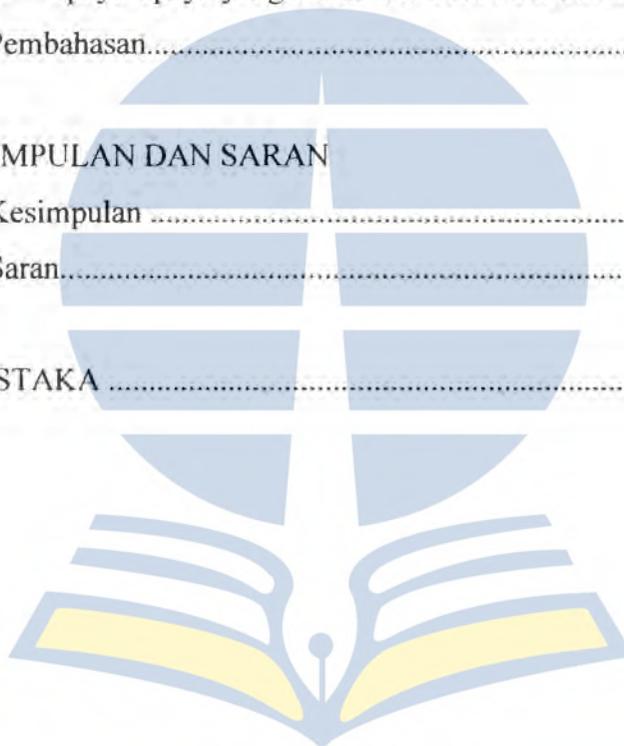
	Halaman
Abstrak.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Halaman Persetujuan Layak Uji.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Lembar Persetujuan TAPM.....	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xviii
Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan teoritis.....	13
2. Kegunaan praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).....	15
B. Azas-Azas <i>Good Governance</i>	17
C. Prinsip <i>Good Governance</i>	20
D. Indikator <i>Good Governance</i>	22
E. Faktor yang Mempengaruhi Perwujudan <i>Good Governance</i>	27
F. Akuntabilitas dalam <i>Good Governance</i>	28

G. Program BOSDA.....	33
H. Tujuan BOSDA.....	34
I. Sasaran Program dan Besaran BOSDA.....	35
J. Sumber dana BOSDA.....	35
K. Tim Koordinasi BOSDA Kabupaten dan tim koordinasi sekolah.....	37
L. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Kab./Kota..	37
M. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA sekolah.....	37
N. Waktu penyaluran BOSDA.....	39
O. Pelaporan tingakt sekolah.....	40
P. Bukti pengeluaran.....	41
Q. Penelitian Terdahulu	41
1. Samsuar (2013)	42
2. Wensislaus Sedan (2013)	45
3. Agus Winarno (2013)	48
4. Tanggapan Peneliti terhadap Penelitian Terdahulu.....	52
R. Kerangka Berpikir	64
S. Operasionalisasi Konsep	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	66
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	67
1. Sumber informasi	67
2. Pemilihan informan	67
C. Instrumen Penelitian	68
D. Prosedur Pengumpulan Data	68
E. Metode Analisis Data.....	69
1. Analisis data sebelum ke lapangan.....	69
2. Analisis data selama dan setelah di lapangan.....	69
F. Lokasi Pelatihan.....	70

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	71
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunuan.....	71
2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.....	72
B. Hasil	73
1. Akuntabilitas Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan.....	73
2. Faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan.....	84
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.....	85
C. Pembahasan.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan : 2.1 Kerangka Berpikir	64



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel : 2.1	Azas-azas <i>Good Governance</i> menurut UU No.28 Tahun 1999.....	19
Tabel : 2.2	Azas-azas <i>Good Governance</i> menurut MTI.....	20
Tabel : 2.3	Prinsip <i>Good Governance</i> menurut Bhatta,Gambir,Tahun 1996.....	20
Tabel : 2.4	Indikator <i>good governance</i> menurut Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah yang Baik.....	25
Tabel : 2.5	Matrik Penelitian Terdahulu	55
Tabel : 4.1	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural pencairan.....	89
Tabel : 4.2	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas prosedural pencairan.....	91
Tabel :4.3	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas keuangan (faktor keterlambatan pencairan).....	93
Tabel :4.4	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas Keuangan (faktor keterlambatan pencairan).....	95
Tabel :4.5	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas Prosedural (sosialisasi).....	97
Tabel :4.6	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas Prosedural (sosialisasi).....	98
Tabel :4.7	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural (SOP)	100
Tabel :4.8	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas Prosedural (SOP).....	101
Tabel :4.9	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban.....	103
Tabel :4.10	Triangulasi teknik pengumpulan data aspek akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban.....	107
Tabel :4.11	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas Prosedural Pertanggungjawaban (Ketepatan waktu)	109

Tabel :4.12	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas Pertanggungjawaban (Ketepatan waktu).....	110
Tabel :4.13	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas keuangan keuangan (jenis belanja)	112
Tabel :4.14	Rekapitulasi hasil studi dokumentasi pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan pada aspek akuntabilitas keuangan.....	113
Tabel :4.15	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas keuangan (jenis belanja)	115
Tabel :4.16	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (meminimalisir angka putus sekolah).....	116
Tabel :4.17	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (meminimalisir angka putus sekolah).....	118
Tabel :4.18	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (peningkatan kesejahteraan).....	119
Tabel :4.19	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (peningkatan kesejahteraan).....	121
Tabel :4.20	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (peningkatan kinerja guru dan non guru).....	122
Tabel :4.21	Daftar rekap peserta UN jenjang SMP/MTs tahun pelajaran 2014/2015 kabupaten Nunukan.....	123
Tabel :4.22	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (meningkatkan kinerja guru dan non guru).....	125
Tabel :4.23	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (operasional).....	126
Tabel :4.24	Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (operasional).....	128
Tabel :4.25	Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (peningkatan mutu pendidikan).....	129

Tabel :4.26 Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (peningkatan mutu pendidikan).....	130
---	-----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar : 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	68
Gambar : 3.2 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Studi dokumentasi
- Lampiran 2.1 Transkrip Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 2.2 Transkrip Wawancara bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 2.3 Transkrip Wawancara bersama Kabid SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 2.4 Transkrip Wawancara bersama PPTK BOSDA Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 2.5 Transkrip Wawancara bersama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 2.6 Transkrip Wawancara bersama Asisten III selaku Plt.Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 2.7 Transkrip Wawancara bersama Inspektorat Pembantu Wilayah IV Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 3.1 Dokumen SMP Negeri 1,2,3 Kecamatan Nunukan
- Lampiran 3.2 Dokumen SMP Negeri 1,2,3 Kecamatan Nunukan Selatan
- Lampiran 3.3 Dokumen SMP Negeri 1,2,3 Kecamatan Sebuku
- Lampiran 3.4 Dokumen SMP Negeri 1,2 Kecamatan Sebatik
- Lampiran 3.5 Dokumen SMP Negeri 1,2 Kecamatan Sebatik Barat
- Lampiran 3.6 Dokumen SMP Negeri 1,2 Kecamatan Sebatik Tengah
- Lampiran 3.7 Dokumen SMP Negeri 1 Kecamatan Sebatik Utara
- Lampiran 3.7 Dokumen SMP Negeri 2 Kecamatan Lumbis
- Lampiran 3.8 Dokumen SMP Negeri 1,2 Kecamatan Tulin Onsoi
- Lampiran 3.9 Dokumen SMP Negeri 1,2,3 Kecamatan Lumbis Ogong
- Lampiran 3.10 Dokumen SMP Negeri 1,2,3,4,5,6 Kecamatan Sembakung
- Lampiran 3.11 Dokumen SMP Negeri 1,2,3,4 Kecamatan Krayan
- Lampiran 3.12 Dokumen SMP Negeri 2,3 Kecamatan Krayan Selatan
- Lampiran 3.13 Dokumen SMP Negeri 2 Kecamatan Seimanggaris
- Lampiran 4.1 Surat Rekomendasi Penelitian Nomor 072.05/83/BKBP-1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Lampiran 4.2 Surat Izin Melaksanakan Penelitian, No.893/226/DISDIK/-II/III/2016.
- Lampiran 4.3 Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/197/III/2015 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima dan Pengalokasian BOSDA Jenjang SD dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran 4.4 Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/198/III/2015 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSDA Jenjang SD dan SMP atau Sederajat Tahun Anggaran 2015.
- Lampiran 4.5 Daftar Rekap Peserta Ujian Nasional.

- Lampiran 4.5 Dokumen Surat Permohonan Pencairan (SPP) No.0098, TU-BOSDA Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 4.6 Dokumen Surat Permohonan Pencairan (SPP) No.0575, TU-BOSDA Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Lampiran 5.1 Dokumen Surat Perintah Membayaran (SPM) No.0098, TU-BOSDA Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 5.2 Dokumen Surat Perintah Membayaran (SPM) No.0575, TU-BOSDA Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 6.1 Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.01852, Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 6.2 Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.06839, Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Lampiran 7 Foto wawancara dan foto-foto kegiatan penelitian di Kecamatan Sembakung.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu tugas pemerintah negara Indonesia adalah mengurus bangsa Indonesia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga dipertegas oleh pandangan Sabeni dan Gozali,1990 (dalam M.Ikhsan, 2014:1) yang menyebutkan bahwa pemerintah adalah organisasi yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas dan kepentingan suatu negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Fungsi-fungsi tersebut, diantaranya: 1. Fungsi pelayanan (*public service*), bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya.

Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang; 2. Fungsi Pengaturan (*Reguling*), pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif; 3. Fungsi pembangunan (*development*), dilakukan apabila sikon, situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya; 4. Fungsi pemberdayaan (*empowering*) dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas sumber daya

manusia atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk mewujudkan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan sebagaimana disebutkan di atas, maka pemerintah menyelenggarakan berdasarkan azas kepastian hukum, azas tertib Penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan amanah, maka akuntabilitas merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik sektor semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif yaitu: 1. akuntabilitas keuangan yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 2. akuntabilitas manfaat

(*efektivitas*) yang memberi perhatian kepada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan; 3. akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Ketiga konsep ini dijelaskan oleh M. Ikhsan, (2014:12.8-9) dalam pandangan LAN dan BPKP, 2008.

Azas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya tersebut, maka diperlukan suatu sistem penyelenggaraan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, *legimate*, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, Nipotisme (KKN).

Pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek dibidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kontribusi sangat

besar terhadap suatu kemajuan. Pendidikan juga merupakan tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin di capai oleh setiap Negara di dunia. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (3) juga dinyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di bidang pendidikan mencakup tentang bagaimana peran pemerintah dalam melakukan penyediaan sarana dan prasarana, bagaimana peran pemerintah dalam melakukan penyediaan sumber daya manusia, dan pembiayaan proses pendidikan. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7 sampai 15 tahun”

Peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, dalam mewujudkan Pendidikan Nasional dapat dilihat dalam Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 yaitu “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju masyarakat yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing “. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu : 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas diseluruh Kabupaten Nunukan; 2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas diseluruh Kabupaten Nunukan; 3. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga dan pengelola pendidikan; 4. Meningkatkan karakter generasi muda dengan membina dan mengembangkan kreativitas olahraga, bahasa, seni dan budaya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan strategik 2011 – 2016, diantaranya: 1. Meningkatnya pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; 2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan; 3. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menengah; 4. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun; 5. Terlaksananya peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik dan kependidikan; 6. Meningkatkan kinerja aparatur; 7. Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi kantor.

Dalam segi pendanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk mewujudkan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka sebagai dasar kebijakan pendanaan, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyediakan anggaran baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) bahwa "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah salah satunya adalah menyediakan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). BOSDA adalah merupakan suatu program pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dana BOSDA diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia

dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOSDA adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (SATAP) baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Program BOSDA yang dimulai sejak bulan Juli 2005.

Meskipun pemerintah telah menyediakan dana BOSDA sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun bukan berarti tersedianya dana BOS akan menghentikan permasalahan pendidikan. Faktanya masalah baru muncul terkait dengan banyaknya penyimpangan dana BOSDA. Pengelolaan dana BOSDA pendidikan dasar di Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

Menurut penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dalam skandal dana BOS, BPK Perwakilan Jakarta, secara nasional ditemukan nilai penyimpangan dana BOS tahun 2007-2009 lebih kurang Rp 28 miliar dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi. Data Kejaksaan dan Kepolisian seluruh Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu adalah rendahnya

transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan rendahnya partisipasi warga atas pengelolaannya.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan BOSDA adalah masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOSDA. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterlibatan orang tua mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dari hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orang tua siswa pernah mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orang tua yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS dimaksud, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya. Penelitian Bank Dunia itu dilakukan terhadap 3.600 orang tua siswa dari 720 sekolah di sejumlah wilayah di Tanah Air. Hasilnya, 71,16 persen orang tua siswa tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. Selain itu, 89,58 persen orang tua siswa tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS (89,58) dan memberikan masukan/saran kepada sekolah (89,69).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOSDA Pendidikan Dasar di Indonesia belum transparansi dan belum dapat dikatakan memenuhi syarat akuntabilitas dalam penggunaan dana BOSDA. Hal ini dapat mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan akhir-akhir ini menjadi masalah nasional, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Nunukan, kualitas pendidikan belum bisa menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu penyebab kualitas pendidikan belum maksimal adalah karena

lambatnya proses pencairan dan penyaluran dana BOSDA ke sekolah-sekolah sehingga mempengaruhi penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Terjadinya pelanggaran pengelolaan dana BOSDA yang dibuktikan dengan lambatnya penyaluran dana BOSDA jenjang SMP Negeri tahun 2015 juga terjadi di Kabupaten Nunukan. Hal ini didukung oleh data dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01852/TU//2015, tanggal 10 Juni 2015. Pencairan pada triwulan berikutnya juga mengalami keterlambatan yang sama dalam pembayaran dana BOSDA jenjang SMP di Kabupaten Nunukan. Hal ini didukung oleh data Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06839/TU/2015, tanggal 3 Nopember 2015. Dengan keterlambatan pencairan dana BOSDA jenjang SMP Negeri tersebut maka, akan mempengaruhi proses kegiatan operasional di sekolah-sekolah, baik dari segi penggunaan dana maupun laporan pertanggungjawabannya.

Permasalahan lain menunjukkan bahwa dalam penyampaian pertanggungjawaban dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya berlandaskan pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan Bupati Nunukan serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Terjadinya dwifungsi wewenang jabatan Kepala Sekolah merangkap selaku bendahara sekolah. Fenomena lain menunjukkan bahwa bendahara sekolah dijabat oleh staf pelaksana UPTD Kecamatan hal ini tentunya tidak sesuai

dengan penempatan PNS. Masalah lain menunjukkan bahwa tingginya biaya transportasi sungai antara sekolah dan ibu kota Kecamatan sehingga menghambat Kepala Sekolah dan bendahara sekolah untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Kecamatan Sembakung. Gambaran permasalahan lain menunjukkan bahwa banyaknya sekolah yang melakukan pelanggaran administrasi keuangan sehingga pengelolaan dana BOSDA belum mengabdikan asas akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan belum dibuatnya buku kas umum, buku pajak, buku bank, dokumen pemeriksaan kas oleh bendahara sekolah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban keuangan dana BOSDA. Dari sisi akuntabilitas manfaat keberadaan BOSDA belum sepenuhnya memberikan kontribusi kepada guru honor dan penjaga sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan besaran gaji yang diterima sangat kecil dibawah standar yang ditetapkan.

Dari gambaran fenomena diatas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dana BOSDA belum mencerminkan akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas keuangan. Dari latar belakang diatas, maka sangat penting untuk peneliti melakukan penelitian dari aspek akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangannya, maupun akuntabilitas manfaatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan

baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat.

3. Untuk memperoleh informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi dunia pendidikan dan atau menjadikan referensi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami studi (penelitian) yang bertema serupa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan, dan menjadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP

Negeri di Kabupaten Nunukan yang bersifat akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pentingnya penerapan *Good Governance* di beberapa negara sudah meluas mulai ± tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam ± tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademis. Sejak terjadinya krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Pemerintah atau “*government*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “*The authoritative direction and administration of the affairs or men women in a nation, state, city, ets*” atau dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya”. Menurut Koimen 1993, (dalam Sedarmayanti, 2013:273) bahwa *governance* lebih merupakan:

“Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Istilah *governannce* tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai kegiatan, tetapi juga berarti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan pemerintahan. Oleh karena itu terdapat istilah *publik governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governanc*. *Governance* sebagai terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan istilah “pemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*good governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*”, berarti “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Paradigma penyelenggaran pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (*publik services*) menurut paradigma “*rule government*” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan “*good governance*” dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar publik (masyarakat).

Secara konseptual pengertian *good* (baik) dalam istilah *good governance* (pemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman yaitu:

1. nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; dan 2. aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2000:34), mengemukakan bahwa *governance* sebagai "*The exercise of political powers to manage a nation's affairs*". Artinya Pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanager masalah-masalah suatu Negara. Menurut LAN 2000, (dalam Sedarmayanti:2002:4) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Senada dengan pandangan yang dilontarkan oleh Thoha (2000:7) bahwa salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tercapainya citra pemerintahan yang demokratis.

B. Azas-Azas *Good Governance*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah perlu menetapkan azas-azas dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah berdasarkan pada:

1. Azas kepastian hukum; yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Azas tertib penyelenggaraan Negara; yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Azas kepentingan umum; yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Azas keterbukaan; yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Azas *proporsionalitas*; yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Azas *profesionalitas*; yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Azas akuntabilitas; yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1
Azas-Azas *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

NO.	AZAS	PENJELASAN
1	Azas kepastian hukum	Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kpatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2	Azas tertib penyelenggaraan Negara	Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
3	Azas kepentingan umum	Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif
4	Azas keterbukaan	Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
5	Azas <i>proporsionalitas</i>	Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6	Azas <i>profesionalistas</i>	Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Azas akuntabilitas	Azas yang menentukan bahwa setiap

		kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	---

Sedangkan menurut pandangan dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam “Membangun Pondasi *good governace* di Masa Transisi”, MTI Jakarta, Mei 2000, menyatakan bahwa *good governance* mensyaratkan 4 azas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, kewajaran atau kesetaraan, dan kesinambungan.

Tabel 2.2
Azas-azas *good governance* menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)

NO.	AZAS-AZAS
1	Transparansi
2	Pertanggungjawaban
3	Kewajaran atau kesetaraan
4	Kesinambungan

C. Prinsip *good governance*

Menurut *United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA)*, 1993 bahwa prinsip *good governanc* terdiri dari:

1. Legitimasi, artinya menekan pada kebutuhan terhadap sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan

persetujuan dari yang diperintah (rakyat), dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut;

2. Akuntabilitas, artinya mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media;
3. Kompetensi, artinya pemerintah harus menunjukkan kepastiannya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan publik yang efisien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial seperti; antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan;
4. Penghormatan terhadap hukum/hak-hak asasi manusia, artinya pemerintah memiliki tugas (bukan hanya yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional) untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan institusi.

Pandangan ini juga diperkuat oleh pandangan Gambhir Bhatta, (1996:7) bahwa prinsip dari *good governance* diantaranya: akuntabilitas

(*accountability*), transparansi (*transparance*), keterbukaan (*openess*), dan kepastian hukum (*rule of law*), manajemen kompetensi (*management of competency*), Hak asasi manusia (*human right*). Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, maka hal yang penting dalam karakteristik *good governance* yaitu transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsif.

Tabel 2.3:
Prinsip *good governance* menurut Gambir Bhatta tahun 1996.

NO.	PRINSIP
1	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)
2	Transparansi (<i>transparance</i>)
3	Keterbukaan (<i>openess</i>)
4	Kepastian hukum (<i>rule of law</i>)
5	Manajemen kompetensi (<i>management of competency</i>)
6	Hak asasi manusia (<i>human right</i>)

D. Indikator *good governance*

Menurut Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah yang Baik untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan yang baik, maka sangat dibutuhkan suatu indikator-indikator dari *good governance*. Adapun indikator-indikator dari *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Indikator partisipatif

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

2. Indikator penegakan hukum

Berkurangnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (*living law*) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.

3. Indikator transparansi

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Indikator kesetaraan

Berkurangnya kasus diskriminasi, adanya kesetaraan jender, dan meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan.

5. Indikator daya tangkap

Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya jumlah pengaduan.

6. Indikator wawasan ke depan

Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.

7. Indikator akuntabilitas

Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN).

8. Indikator pengawasan

Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.

9. Indikator efisiensi dan efektivitas

Meningkatnya kesejateraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

10. Indikator *profesionalisme*

Meningkatnya keajahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan msyarakat, berkurangnya Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN), mendapatkan ISO pelayanan, dan dilakukannya "*fit and proper*" tes terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 2.4:
**Indikator *good governance* menurut Musyawarah Konferensi Nasional
Kepemerintahan Daerah yang Baik**

No.	Prinsip	Indikator
1	Partisipatif	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.
2	Penegakan hukum	Berkurangnya praktet Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (<i>living law</i>) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.
3	Transparansi	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan

		perundang-undangan.
4	Kesetaraan	Berkurangnya kasus diskriminasi, adanya kesetaraan jender, dan meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan.
5	Daya tangkap	Meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya jumlah pengaduan.
6	Wawasan ke depan	Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
7	Akuntabilitas	Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus KKN.
8	Pengawasan	Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui media massa dan berkurangnya penyimpangan.
9	Efisiensi dan efektivitas	Meningkatnya kesejateraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan dan mendapatkan ISO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari pelayanan masyarakat.

10	<i>Profesionalisme</i>	Meningkatnya keajahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan msyarakat, berkurangnya Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN), mendapatkan ISO pelayanan, dan dilakukannya " <i>fit and proper</i> " tes terhadap PNS.
----	------------------------	--

E. Faktor yang Mempengaruhi Perwujudan *Good Governance*

Menurut Effendi (2005:3) faktor-faktor mempengaruhi perwujudan *good governane* adalah:

1. Integritas pelaku pemerintahan. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan berpengaruh walaupun ada kesempatan untuk meakukan penyimpangan, misalnya korupsi.
2. Kondisi politik dalam negeri. Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik bagiterwujudnya *good governance* konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.
3. Kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi sosial masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan

riil *good governance*. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum berdaya dihadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan *anarkisme* kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *good governance* bisa ditegakkan.

F. Akuntabilitas dalam *Good Governance*

Salah satu indikator keberhasilan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah indikator akuntabilitas. Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Hal ini diperkuat oleh pandangan LAN RI dan BPKP (2001: 22) bahwa: “Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban”. Ide dasar dari akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Semua unit organisasi, apakah dipilih atau ditunjuk, dikatakan akuntabel ketika mereka mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan/kegiatan yang mereka lakukan, dan menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang

"*checks and balance*" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. "*The Oxford Advance Learner's Dictionary*" sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2002:21), bahwa akuntabilitas diartikan sebagai "*required of expected to give an explanation for one's action*". Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Menurut pandangan Chandler and Plato (dalam Sundarso, 2014: 9.25) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari 5 macam yaitu :

1. *Fiscal acoountability*, merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan;

2. *Legal acoountability*, tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. *Program acoountability*, tanggungjawab atas pelaksanaan program;
4. *Process acoountability*, tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur;
5. *Outcome acoountability*, tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas.

Salah satu landasan teori dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan adalah dengan menggunakan konsep LAN RI dan BPKP.2008 yang dikemukakan oleh M.Ikhsan, (2014:12.8) yaitu :

1. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses;

2. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah;

3. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

Dari penjelasan diatas bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan pandangan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang berkaitan dengan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka azas akuntabilitas adalah merupakan salah satu azas yang tepat dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan dana BOS SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan. Azas akuntabilitas dimaksud adalah azas akuntabilitas keuangan, azas akuntabilitas prosedural, dan azas akuntabilitas manfaat, (LAN RI dan BPKP, 2001: 29). Sedangkan salah satu prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas, artinya mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstituional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat

pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media, menurut *United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA)*, 1993. Hal ini juga diperkuat dengan salah satu prinsip *good governance* yang di kemukakan oleh Gambir Bhatta (1996) yaitu prinsip akuntabilitas (*accountability*). Salah satu indikator *good governance* yang tepat untuk dijadikan indikator penelitian akuntabilitas pengelolaan dana BOS SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan adalah indikator akuntabilitas menurut Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik yaitu meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN). Dengan demikian dalam melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pemerintah harus memahami tentang aspek-aspek akuntabilitas, antara lain:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak;

2. Akuntabilitas berorientasi hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada *outcome*;

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas;

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi;

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja.

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

Secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan, prosedur, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

G. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan adalah melalui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). BOSDA adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan

dibiayai dengan dana BOSDA. Menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOSDA. Dasar Pelaksanaan program BOSDA diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun 2015.
2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

H. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)

Secara umum program BOSDA bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOSDA bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

I. Sasaran program dan besaran bantuan BOSDA

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD, SMP negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| 1. SD | : Rp. 15.000,-/ siswa/bulan x 12 bulan |
| | : Rp. 180.000,-/ siswa/tahun |
| 2. SMP | : Rp. 25.000,-/ siswa/bulan x 12 bulan |
| | : Rp. 300.000,-/ siswa/tahun |

J. Sumber dana BOSDA

Sumber Dana BOSDA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Implementasi BOSDA. Ketentuan bagi sekolah penerima BOSDA adalah sebagai berikut:

1. Semua SD dan SMP Negeri maupun swasta di Kabupaten Nunukan yang sudah memiliki NPSN berhak menerima dana BOSDA.
2. Semua sekolah SD dan SMP negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
3. SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;
4. Semua sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
6. Semua sekolah yang menerima BOSDA harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemda
7. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
8. Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara profesional, transparan dan akuntabel;

9. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Anggaran Sekolah (RKAS).
10. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh kepala dinas.

K. Tim Koordinasi BOSDA Kabupaten dan tim koordinasi sekolah

Tim koordinasi BOSDA Kabupaten terdiri dari :

1. Pembina Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan;
2. Penanggung Jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten;
3. Ketua, Sekretaris SKPD Pendidikan Kabupaten;
4. Sekretaris, Kabid Pendidikan Dasar SKPD Pendidikan Kabupaten;
5. Unit pendataan dan pelayanan dari SKPD Pendidikan;
6. Penanganan pengaduan dan pelaporan masyarakat.

Tim koordinasi BOSDA sekolah terdiri dari

1. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
2. Anggota terdiri dari : bendahara sekolah

L. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota

1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
2. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Dapodik;

3. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
4. Menyiapkan panduan juknis pengelolaan dana BOSDA sebagai kerangka acuan kerja selama;
5. Mengusulkan penetapan SD dan SMP penerima dana BOSDA dan alokasi dana BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
6. Melakukan sosialisasi kepada sekolah tentang tata cara pengelolaan dana BOSDA;
7. Mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah;
8. Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dana BOSDA dari sekolah;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
10. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dan BOSDA.

M. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Koordinasi BOSDA sekolah

1. Membuat RKAS BOSDA
2. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
3. Mengelola dana BOSDA secara bertanggungjawab dan transparan;
4. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOSDA semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

5. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA yang diterimanya;
6. Membuat dan menandatangani laporan berita acara pemeriksaan penutupan kas;
7. Melakukan pembukuan secara tertib;
8. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
9. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOSDA yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOSDA.

N. Waktu penyaluran dana BOSDA

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2015, dana BOSDA akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOSDA oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;

2. Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat;
3. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

O. Pelaporan tingkat sekolah

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOSDA Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah. Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOSDA. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulisan tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.

P. Bukti pengeluaran

Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,- .

Q. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan oleh:

1. Samsuar (2013) dengan judul “Impelementasi Kebijakan Program BOS dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang”
2. Wensislaus Sedan (2013) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Dasar Negerii swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012”.
3. Agus Winarno (2013), dengan judul “Impelentasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Berikut hasil ringkasan uraian penelitian terdahulu:

1. Samsuar (2013)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program BOS dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang”. Adapun pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar cakupan dana BOS SMP Negeri dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan mampu bagi seluruh SMP Negeri di Kabupaten Sintang?
- b. Bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang?

Tujuan Penelitian untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program BOS, sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Menganalisis seberapa besar cakupan dana BOS SMP Negeri dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu;
- b. Menganalisis seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *observasi* (pengamatan), dan wawancara. Model

pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menetapkan wilayah-wilayah populasi sebagai anggota populasi untuk membentuk populasi kecil yang lebih homogen. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain:

- a. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan BOS tahun 2011 oleh lembaga sekolah SMP Negeri Kabupaten Sintang telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa masalah. Hasil evaluasi ternyata BOS tahun 2011 hampir semua 72 SMP Negeri Kabupaten Sintang sebesar Rp.21.390.458,- dari jumlah tersebut ternyata yang paling besar (30%) untuk pembayaran tenaga honor/GTT/PPT, Tenaga Harlap, (25%) untuk belanja barang dan jasa, (20%) untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan, dan (10%) dan pemeliharaan gedung.
- b. Cakupan dana BOS bagi siswa keluarga miskin, terdapat jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 20% - 33% dari total siswa. Dari totalitas siswa keluarga miskin baru dapat terlayani sekitar 20%

- 25 % hal ini disebabkan dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin. Meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu kelancaran operasional sekolah, bagaimanapun kenyataan dana BOS memberikan kontribusi sekolah cukup besar jika dibandingkan dengan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kecil. Bentuk pelayanan terhadap siswa miskin masih terbatas pada pemberian beasiswa (khusus) yaitu pembebanan biaya SPP (Rp.55.000– Rp.60.000) dan sumbangan BP 3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah.

- c. Berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban keuangan BOS dari 72 SMP Negeri di Kabupaten Sintang telah terungkap penggunaan dana BOS oleh sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman/panduan BOS yang antara lain pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan, untuk transportasi lomba guru, untuk bayar tenaga harlep yang sudah dibiayai pemerintah kabupaten, penerimaan murid baru masih dikenakan berbagai pungutan, rehab gedung, pembelian peralatan yang tidak terkait dengan proses pendidikan komputer dan perbaikan kecil gedung sekolah. Untuk mengetahui dampak program BOS peneliti melakukan pengumpulan data kuantitatif hasil secara umum bahwa BOS dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam

memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada manajemen dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- d. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan BOS adalah pencairan dana BOS sering terlambat atau tidak tepat waktu. Sesuai dengan ketentuan pada awal bulan triwulan, tetapi yang terjadi untuk dana BOS tahun 2011. Karena pencairan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama Juli-Desember 2011 dan tahap kedua yaitu Januari- Juni 2012. Hal ini menjadi masalah bagi sekolah karena akan mengganggu pelaksana kegiatan belajar mengajar, padahal kegiatan belajar dituntut harus berjalan akan tetapi disisi lain dana untuk operasional belum tersedia. Persolaan ini yang sering menjadikan pihak sekolah menjadi pusing karena harus mencari dana dengan berbagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
- e. Terdapat kecenderungan oleh kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS maupun dalam pengelolaan dana BOS hampir semua orang tua murid tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, sedangkan komite sekolah hanya bersifat formalitas untuk membutuhkan tanda tangan terhadap RAPBS yang telah disusun oleh kepala sekolah sehingga fungsi kontrol masih sangat lemah.

2. Wensislaus Sedan (2013)

Penelitiannya Wensislaus Sedan yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Dasar Negeri swasta di Kabupaten

Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012". Rumusan masalah dalam penelitian:

- a. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?
- b. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?
- c. Bagaimana kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan Kabupaten Sumba Barat Daya?
- d. Bagaimana pemerataan (pemerataan) penggunaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?
- e. Bagaimana reponsivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?
- f. Bagaimana ketetapan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu :

- a. Menjelaskan efektivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Efisiensi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. Kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- d. Pemerataan (pemerataan) penggunaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya;

- e. *Reponsivitas* pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- f. Ketetapan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deduktif kualitatif dengan jenis studi kasus. Penentuan kasus dengan teknik *purposife*, dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian Wensislaus Sedan di Kabupaten Sumba Barat Daya menemukan berbagai persoalan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya, diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan dana BOS tidak efektif dan tidak efisien;
- b. Dana yang tersedia per triwulan pun belum dapat digunakan secara tepat sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- c. Pemanfaatan dana BOS terkesan tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak patuh pada RABS, atau RABS itu sendiri tidak mengakomodir item kegiatan yang seharusnya mendapatkan prioritas pembiayaan, atau kebutuhan sekolah yang begitu dinamis sehingga prioritas kebutuhan begitu cepat bergeser;
- d. Penggunaan dana BOS dinilai tidak merata dan tidak cukup;
- e. BOS yang tersedia belum dapat didistribusikan ke semua kebutuhan yang diperiode (triwulan) yang bersangkutan;

- f. Dana yang tersedia belum dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekolah;
- g. Dana yang tersedia belum bisa digunakan oleh sekolah untuk memenuhi semua masalah yang dihadapi secara *proporsional*;
- h. Pengelolaan dana BOS dikatakan belum responsif;
- i. Dinilai tidak *responsif* karena daya tanggap dari pengelola dana BOS terhadap kebutuhan sekolah yang dihadapi masih rendah;
- j. Pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya dinilai tidak tepat karena rencana yang dibuat belum dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah karena belum mampu mengakomodir kebutuhan sekolah secara tepat;
- k. Dana yang digunakan di sekolah belum dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah;
- l. Pengelolaan dana BOS dinilai tidak tepat karena rencana yang dibuat belum dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah dan tahap pelaporan dana BOS juga dinilai belum efektif, efisien, cukup, merata *responsif* dan tepat.

3. Agus Winarno (2013)

Penelitiannya yang berjudul “Impelentasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2011?
- b. Faktor-faktor pendukung/penghambat implementasi penggunaan dana BOS?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2011;
- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kendala dan pendorong kebijakan dana BOS Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *observasi* (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan interaktif. Hasil penelitian Agus Winarno di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kaitannya dengan program BOS antara lain:

- a. Ada kesesuaian implementasi kebijakan Program BOS dengan pedoman BOS tahun 2012 pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat;

- b. Proses implementasi selama 7 tahun sudah menunjukkan indikasi bahwa program BOS dapat terimplementasi pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat;
- c. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS);
- d. Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan standar implementasi (panduan BOS);

Sosialisasi program BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat pada saat pertama kali dilakukan tahun 2005 mengalami hambatan atau berjalan kurang optimal, namun berjalan sampai tahun 2012 sudah berjalan secara optimal walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, kondisi demikian didukung oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran komite sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang telah digariskan dalam panduan BOS. Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat, antara lain:

- a. Pengalaman manajemen sekolah yang sudah memadai karena pihak sekolah sudah pernah menjalankan program BOS;
- b. Responsif positif dari masyarakat Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat terhadap kebijakan BOS dengan tidak adanya penolakan khususnya oleh pihak sekolah dan anggota masyarakatnya;
- c. Birokrasi kebijakan pemerintah dalam penyaluran dan pengelolaan dana langsung ditangani oleh pihak sekolah sehingga birokrasi dan koordinasi pelaksanaannya tidak terlalu rumit.

Faktor penghambat hanya dijumpai disaat pertama program BOS diluncurkan pada tahun 2005, diantara:

- a. Kurangnya tersedia waktu yang cukup pada awal diluncurkan program BOS pada tahun 2005;
- b. Kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS;
- c. Kurangnya *partisipatif* instansi pendukung seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat *profit oriented*, sedangkan kebijakan BOS kurang menyediakan pendanaannya;
- d. Ketidakpedulian masyarakat terhadap program BOS, sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali mengenai program BOS;

- e. Adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.

4. Tanggapan peneliti terhadap penelitian terdahulu

Dari hasil pengamatan terhadap penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Samsuarbaha pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sintang pada tahap pelaporan dana BOS dinilai belum efektif, efisien, cukup, merata *responsive* dan tepat waktu dalam menginformasikan hasil penggunaan dana BOS sehingga pengelolaan dana BOS tersebut belum dapat dikatakan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh peran Komite Sekolah belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peran orang tua yang tidak pernah dilibatkan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan penggunaan dana BOS di Kabupaten Sintang. Hal yang lain adalah masih adanya pungutan pembayaran sekolah. Disamping itu penggunaan belanja belum tepat sasaran sesuai dengan ketentuan juknis BOS.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wensislaus Sedan, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS tidak efektif dan tidak efisien, dana yang tersedia per triwulan juga belum dapat digunakan secara tepat sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pemanfaatan dana BOS terkesan tidak cukup, tidak merata, belum dapat

digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekolah. Wensislaus Sedan juga mengemukakan bahwa dana yang tersedia belum bisa digunakan oleh sekolah untuk memenuhi semua masalah yang dihadapi secara proporsional. Pengelolaan dana BOS dikatakan belum *responsif* yang disebabkan SDM. Pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya dinilai tidak tepat tahap pelaporan dana BOS juga dinilai belum efektif, efisien, cukup, merata *responsif* dan tepat.

Hasil penelitian Agus Winarno menggambarkan bahwa pengelolaan dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sangat baik. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya kesesuaian implementasi kebijakan Program BOS dengan pedoman BOS tahun 2012. Proses implementasi selama 7 tahun sudah menunjukkan indikasi bahwa program BOS dapat terimplementasi. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS). Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan standar implementasi (panduan BOS). Sosialisasi program BOS tahun 2005 mengalami hambatan atau berjalan kurang optimal, namun berjalan sampai tahun 2012 sudah berjalan secara optimal. Tim Manajemen BOS Kabupaten, penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran komite sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang telah digariskan dalam

panduan BOS. Meskipun hasil penelitian Agus Winarno menunjukkan pengelolaan dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sangat baik, namun tidak menepis bahwa hasil penelitian program BOS tahun 2005 mengalami hambatan atau berjalan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya waktu yang cukup pada awal diluncurkan program BOS pada tahun 2005. Kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS. Kurangnya partisipatif instansi pendukung seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat profit oriented, sedangkan kebijakan BOS kurang menyediakan pendanaannya. Ketidakpedulian masyarakat terhadap program BOS, sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali mengenai program BOS. Adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dari gambaran ketiga penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan BOS masih belum menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.5
Matrik Penelitian Terhadap

NO.	SUMBER DAN JUDUL	RUMUSAN MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN, METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	<p>Samsuar (2013), Dengan judul "Impelementasi Kebijakan Program BOS Dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Sintang".</p>	<p>a. Seberapa besar cakupan dana BOS SMP Negeri dala rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan mampu bagi seluruh SMP Negeri di Kabupaten Sintang?</p> <p>b. Bagaimanakah dampak pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang?</p>	<p>Tujuan Penelitian untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program BOS, sedangkan tujuan khususnya adalah:</p> <p>a. Menganalisis seberapa besar cakupan dana BOS SMP Negeri dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu;</p>	<p>a. Pembayaran tunjangan honor lebih besar (30%) dari pada pembayaran yang seharusnya lebih besar misalnya (25%) belanja barang dan jasa, (20%) untuk kegiatan belajar mengajar, (15%) kegiatan kesiswaan, dan (10%) dan pemeliharaan gedung;</p> <p>b. Dana BOS belum dapat menjangkau bagi seluruh siswa miskin. Bentuk pelayanan terhadap siswa miskin masih terbatas pada pemberian beasiswa (khusus) yaitu pembebanan biaya SPP yaitu sebesar (Rp.55.000-</p>

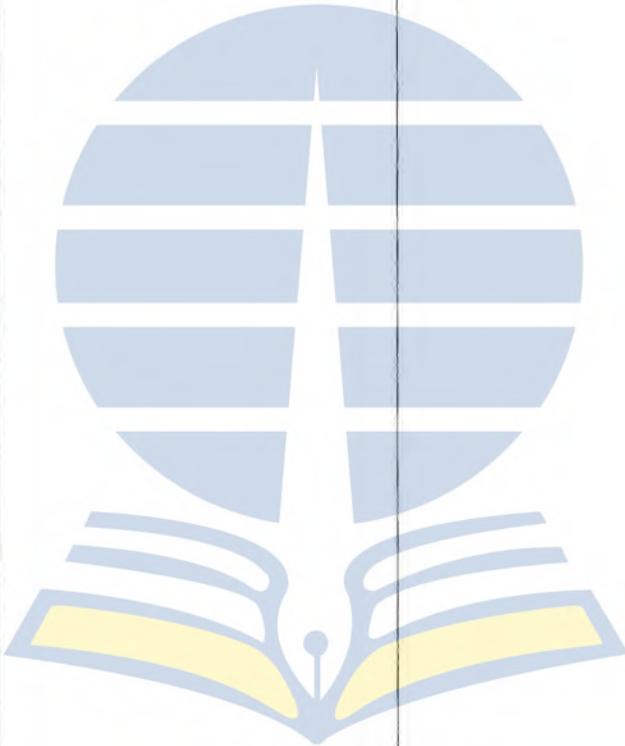
			<p>b. Menganalisis seberapa besar dampak pelaksanaan program BOS bagi SMP Negeri terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Sintang.</p>	<p>Rp.60.000); c. Pemberian transportasi siswa miskin belum dilaksanakan secara maksimal, penerimaan Murid Baru masih dikenakan berbagai pungutan; d. Pencairan dana BOS sering terlambat atau tidak tepat waktu disebabkan Karena pencairan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama Juli-Desember 2011 dan tahap kedua yaitu bulan Juli-3 Desember 2012; e. Hampir semua orang tua murid tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, sedangkan komite sekolah hanya bersifat formalitas untuk membutuhkan tanda tangan terhadap RAPBS.</p>
			Pendekatan deskriptif	

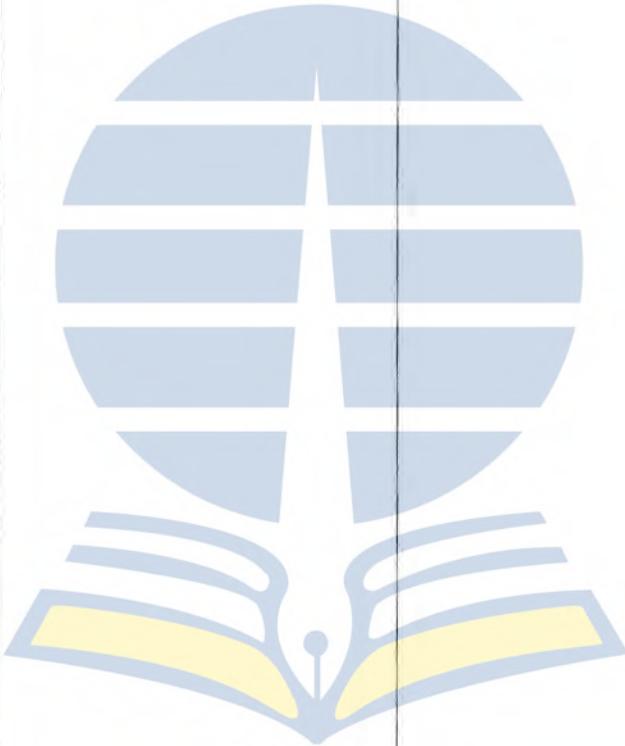
			kualitatif.	
2.	<p>Wensislaus Sedan (2013) Dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Dasar Negerii swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012”.</p>	<p>a. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya? b. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya? c. Bagaimana kecukupan dana BOS dalam memenuhi kebutuhan Kabupaten Sumba Barat Daya? d. Bagaimana pemerataan (pemerataan) penggunaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya? e. Bagaimana reponsivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya? f. Bagaimana ketetapan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu :</p> <p>a. Menjelaskan efektivitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya; b. Efisiensi pengelolaan dana BOS; c. Kecukupan dana dalam memenuhi kebutuhan Kabupaten Sumba Barat Daya; d. Pemerataan (pemerataan) penggunaan dana BOS di Kabupaten</p>	<p>a. Pengelolaan dana BOS tidak efektif dan tidak efisien; b. Dana yang tersedia per triwulan pun belum dapat digunakan secara tepat sesuai rencana yang telah ditetapkan; c. Pemanfaatan dana BOS terkesan tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak patuh pada RABS, atau RABS itu sendiri tidak mengakomodir item kegiatan yang seharusnya mendapatkan prioritas pembiayaan, atau kebutuhan sekolah yang begitu dinamis sehingga prioritas kebutuhan begitu cepat bergeser; d. Penggunaan dana BOS dinilai tidak merata dan tidak cukup; e. BOS yang tersedia belum</p>

		<p>pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya?</p>	<p>Sumba Barat Daya;</p> <p>e. <i>Reponsivitas</i> pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya;</p> <p>f. Ketetapan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya.</p>	<p>dapat didistribusikan ke semua kebutuhan yang diperiode (triwulan) yang bersangkutan;</p> <p>f. Dana yang tersedia belum dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekolah;</p> <p>g. Dana yang tersedia belum bisa digunakan oleh sekolah untuk memenuhi semua masalah yang dihadapi secara <i>proporsional</i>;</p> <p>h. Pengelolaan dana BOS dikatakan belum responsif;</p> <p>i. Dinilai tidak <i>responsif</i> karena daya tanggap dari pengelola dana BOS terhadap kebutuhan sekolah yang dihadapi masih rendah;</p> <p>j. Pengelolaan dana BOS di Kabupaten Sumba Barat Daya dinilai tidak tepat karena rencana yang dibuat belum</p>
--	--	--	--	--

				<p>dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah karena belum mampu mengakomodir kebutuhan sekolah secara tepat;</p> <p>k. Dana yang digunakan di sekolah belum dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah;</p> <p>l. Pengelolaan dana BOS dinilai tidak tepat karena rencana yang dibuat belum dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah Tahap pelaporan dana BOS juga dinilai belum efektif, efisien, cukup, merata <i>responsif</i> dan tepat.</p>
				
			Pendekatan deduktif kualitatif dengan jenis studi kasus.	
3.	Agus Winarno (2013), Dengan judul "Impelentasi	a. Bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011?	a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis	Tahun 2005: a. Kurangnya tersedia waktu yang cukup pada awal

	<p>Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”.</p>	<p>b. Faktor-faktor pendukung penghambat implementasi penggunaan dana BOS?</p>	<p>implementasi kenijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011;</p> <p>b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kendala dan pendorong kebijakan dana BOS Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2010.</p>	<p>diluncurkan program BOS pada tahun 2005;</p> <p>b. Kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS;</p> <p>c. Kurangnya <i>partisipatif</i> instansi pendukung seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat <i>profit oriented</i>, sedangkan kebijakan BOS kurang menyediakan pendanaannya;</p> <p>d. Ketidakpedulian masyarakat terhadap program BOS, sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali mengenai program BOS;</p> <p>e. Adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan</p>
--	--	--	--	---

			<p>operasionalnya.</p> <p>Tahun 2006-2012:</p> <p>a. Ada kesesuaian implemmentasi kebijakan Program BOS dengan pedoman BOS Tahun 2012 pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat;</p> <p>b. Proses implementasi selama 7 tahun sudah menunjukkan indikasi bahwa proram BOS dapat terimplementasi pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat;</p> <p>c. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan pedoman standar</p>
--	--	---	---

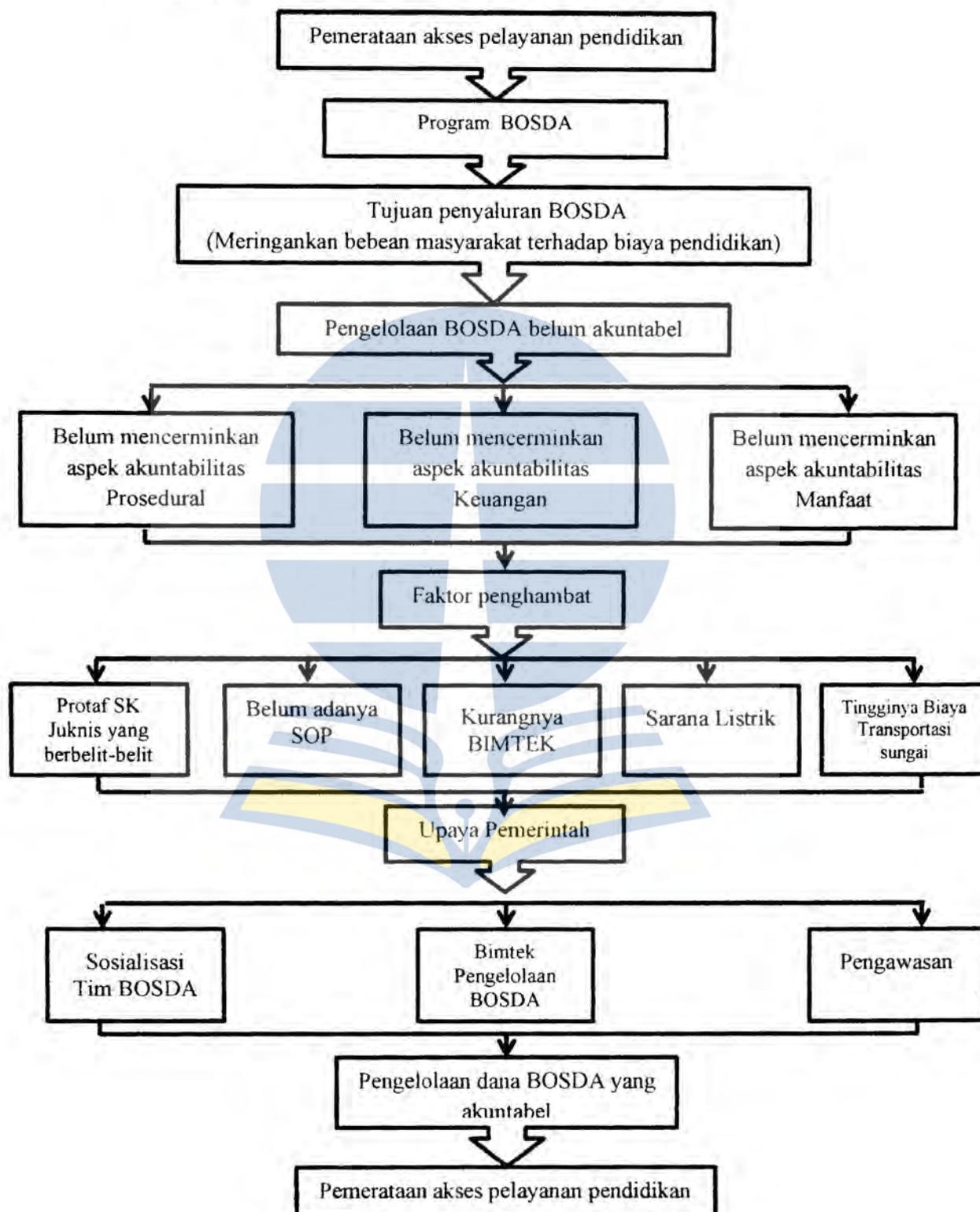
			<p>implemtasi (panduan BOS);</p> <p>d. Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat sejak tahun 2005-2012 sudah sesuai dengan standar implementasi (panduan BOS);</p> <p>e. Sosialisasi program BOS pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat pada saat pertama kali dilakukan tahun 2005 mengalami hambatan atau berjalan kurang optimal, namun berjalan sampai tahun 2012 sudah berjalan secara optimal walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, kondisi demikian didukung oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten,</p>
--	--	---	---

				penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran komite sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang telah digariskan dalam panduan BOS.
			Pendekatan kualitatif.	



R. Kerangka Berpikir

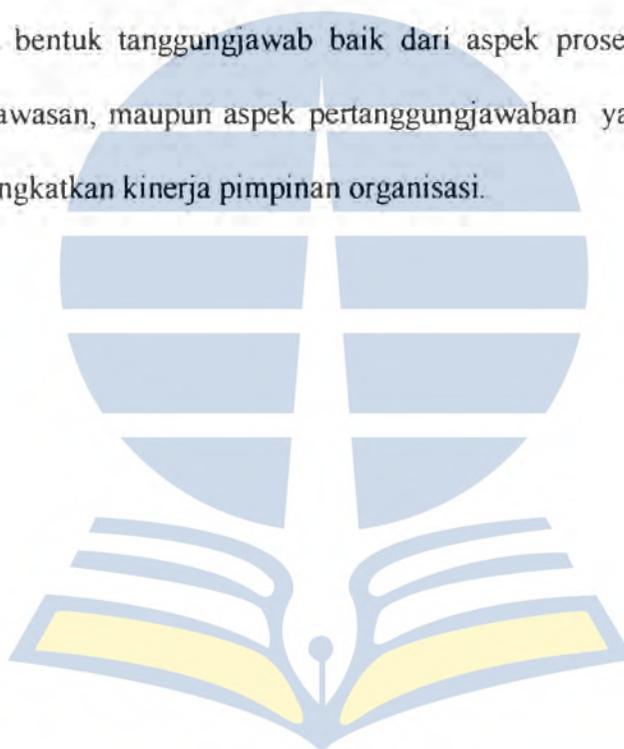
Kerangka pikir yang peneliti bangun adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1 : Kerangka Berpikir

S. Operasionalisasi Konsep

1. BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan adalah bantuan operasional sekolah daerah pada jenjang SMPN yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.
2. Akuntabilitas Pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan adalah suatu bentuk tanggungjawab baik dari aspek prosedur, aspek belanja, pengawasan, maupun aspek pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pimpinan organisasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membuat desain penelitian sesuai judul penelitian akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan, yang diawali dengan penentuan pokok permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam latar belakang. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka penulis mencoba merumuskan suatu masalah tersebut ke dalam 3 rumusan pokok permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam latar belakang pada bab 1, sehingga penulis mudah untuk merumuskan tujuan penelitian. Dengan adanya konsep tujuan penelitian tersebut maka, penelitian tersebut diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka, penulis menggunakan teori yang dikutip dalam buku M.Ikhsan dalam pandangan LAN RI dan BPKP (2001) yang konsepnya terdiri dari Akuntabilitas Prosedural, Akuntabilitas Keuangan, dan Akuntabilitas Manfaat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J.Moleong, (2006:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya) secara *holistik*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti membuat prosedur pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber informasi dan pemilihan informan adalah sebagai berikut :

1. Sumber informasi

Dalam penelitian ini sumber informasinya terdiri dari sumber informasi utama dan pendukung. Sumber informasi utama terdiri dari Kepala dinas, Sekretaris dinas, Kepala bidang pendidikan SD dan SLB, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BOSDA; dan bendahara pengeluaran dinas. Sedangkan sumber informasi pendukung terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan Kasubbag Tata Usaha UPTD, Kepala Insfektorat Kabupaten Nunukan dan Infektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Nunukan.

2. Pemilihan informan

Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik yang pengambilan sampelnya tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dari peneliti.

C. Instrumen Penelitian

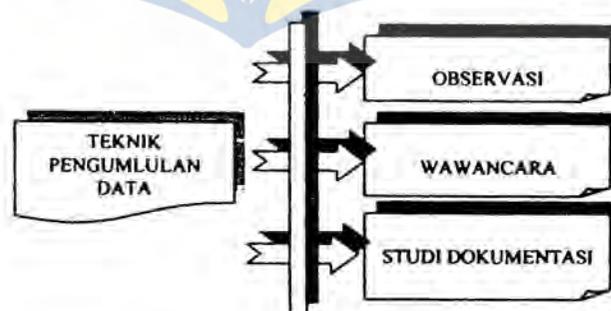
Adapun instrumen yang digunakan adalah melalui pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan instrumen penelitian.
2. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan instrumen seperti, *hend pone* yang dijadikan *tape recorder* dan kamera, *note book*, dan polpen.
3. Menjalin hubungan dengan informan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan pengumpulan data yang dimulai dari observasi (pengamatan) kemudian proses wawancara ke informan dilanjutkan dilanjutkan dengan melakukan studi dokumentasi.

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berikut gambar 3.1 teknik pengumpulan data:



Gambar: 3.1 Teknik Pengumpulan Data

E. Metode Analisis Data

Adapun Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan sebelum, selama dan setelah di lapangan. (Sugiono: 2007:89-116). Rincian pelaksanaan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Data Sebelum ke Lapangan

Hal-hal yang dalam melakukan analisis data sebelum ke lapangan yaitu:

- a. Menelaah dokumen laporan, yang terkait dengan objek penelitian;
- b. Menentukan instrumen yang akan dibuat;
- c. Melakukan pengamatan awal secara intensif terhadap gejala sosial;
- d. Menyusun perencanaan kegiatan penelitian.

2. Analisis Data Selama dan Setelah dilapangan

Menurut Miles and Huberman, (2007:16-21) proses analisis melalui 3 proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Proses I : Reduksi data

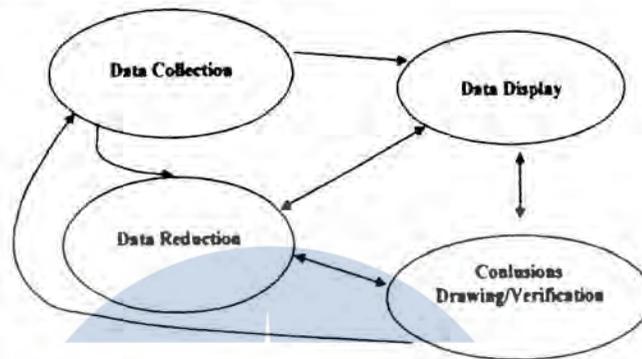
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Proses II : Data display penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Proses III : Penarikan kesimpulan

Penarikan Kesimpulan berupa mencari dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Berikut gambar Model Analisis Interaktif Miles and Huberman:



Gambar : 3.2 Model Analisis Interaktif Miles and Huberman

F. Lokasi Penelitian

Lokus penelitian adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan ini di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Kabupaten Nunukan dengan luas $\pm 14.268,68$ Km² atau 1.426.368 Ha yang terdiri dari 16 Kecamatan diantaranya Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik tengah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, dan Kecamatan Seimanggaris.

2. **Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan. Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pengelolaan dan pelayanan pendidikan, telah ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yaitu “Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan menuju masyarakat yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing “. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai berikut : a. meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas di seluruh Kabupaten Nunukan; b.meningkatkan penyelenggaraan pengembangan potensi anak secara utuh; c. meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga dan pengelola pendidikan; d. meningkatkan karakter generasi muda dengan membina dan mengembangkan kreativitas olahraga, bahasa, seni dan budaya.

Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang TK/Paud, Kasi, Kasubag, KA UPT Pengelola Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. Hasil

Hasil penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan sebagaimana hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan dapat digambarkan dalam 3 aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang meliputi aspek prosedural, aspek keuangan dan aspek manfaat. Adapun gambaran hasil penelitian dari masing-masing aspek tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Aspek Prosedural

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek prosedur pencairan dana BOSDA belum berjalan sesuai dengan prosedur. Ini ditunjukkan dengan tahapan prosedur yang dilakukan oleh pengelola dana BOSDA berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara yang

menunjukkan bahwa pada aspek prosedur pencairan dana BOSDA belum sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Tahapan-tahapan prosedur pencairan dana BOSDA meliputi tahapan sebagai berikut: Sekolah melakukan pendataan siswa melalui sistim dapodik sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan RKAS. Kemudian sekolah melakukan verifikasi jumlah dana yang diusulkan dengan data peserta didik yang ada. Pada penyusunan RKAS, pihak sekolah harus melibatkan Komite Sekolah sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis. Namun kenyataannya bahwa berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi pada tahap penyusunan RKAS, masih banyak sekolah yang belum memahami tentang penyusunan RKAS sebagaimana tugas pokok dan fungsi sekolah sebagai tim manajemen sekolah. Ini ditunjukkan dengan pengajuan RKAS yang bersifat *copy paste* dokumen tahun sebelumnya. Selain itu terjadinya ketidak sinkronan data siswa terhadap jumlah dana yang diusulkan. Padahal kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RKAS tidak selalunya sama seperti tahun sebelumnya, demikian juga jumlah siswa setiap tahun mengalami perubahan jumlah. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi besaran dana BOSDA masing-masing sekolah.

Disisi lain dalam penyusunan RKAS masih ada sekolah yang tidak melibatkan Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS, sehingga dalam pelaksanaannya, Komite Sekolah tidak mengetahui

kegiatan sekolah tersebut. Ini ditunjukkan dengan hasil studi dokumentasi SMPN 2, 4, 6 Kecamatan Sembakung. Padahal dalam ketentuan juknis pengelolaan dana BOSDA harus diketahui oleh Komite Sekolah.

Dalam penyampaian RKAS, seharusnya sekolah menyampaikan sesuai dengan jumlah peserta didik tahun pelajaran sebelumnya, sehingga dalam penyampaian RKAS tepat waktu. Namun kenyataannya bahwa masih ada sekolah yang mengusulkan RKAS pada bulan Januari 2015 yang salah satunya adalah SMPN 2 Kecamatan Sembakung. Padahal pengusulan RKAS untuk periode Januari-Juni 2015 didasarkan pada jumlah peserta didik tahun pelajaran 2014-2015, sedangkan periode Juli-Desember 2015 didasarkan pada data tahun pelajaran 2015-2016. Kondisi ini diperparah dengan sering terjadinya keterlambatan pejabat Dinas Pendidikan (tim manajemen) dalam memverifikasi RKAS. Hal ini disebabkan karena jaranganya pejabat ditempat sehingga kondisi ini berpengaruh pada tahap pengesahan RKAS.

Lambatnya pengesahaan RKAS menyebabkan lambatnya pengusulan penetapan anggaran dana BOSDA. Sebelum pengajuan anggaran dana BOSDA, Dinas Pendidikan dalam hal ini tim manajemen BOSDA Kabupaten mengajukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penetapan petunjuk teknis dan penetapan alokasi dana BOSDA masing-masing sekolah. Namun pada kenyataannya

yang terjadi adalah keterlambatan penyaluran dana BOSDA ke sekolah-sekolah yang disebabkan karena lambatnya penandatanganan petunjuk teknis dan dokumen penetapan alokasi dana BOSDA bagi tiap-tiap sekolah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati. Seharusnya dokumen petunjuk teknis ditetapkan pada tahun sebelumnya dan dokumen penetapan alokasi dana BOSDA disampaikan pada bulan Januari 2015. Keterlambatan ini pula dibarengi dengan panjangnya birokrasi protaf penetapan Surat Keputusan Bupati, mulai dari Kasubag Bagian Perundang-undangan, kemudian ke Kabag Hukum, dilanjutkan ke Asisten III yang kemudian di paraf oleh Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati. Salah satu penyebab terlambatnya penetapan Surat Keputusan Bupati adalah pejabat yang berwenang sering berangkat yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses protaf.

Dengan lambatnya penandatanganan juknis dan dokumen pembagian alokasi dana BOSDA tersebut sangat mempengaruhi pada proses pengajuan SPM pada Bendahara Umum Daerah, yang juga berdampak pada lambatnya penerbitan SP2D. Lambatnya penerbitan SP2D akan berdampak pula pada lambatnya penyaluran dana BOSDA ke rekening masing-masing sekolah. Padahal pencairan dana BOSDA tersebut berdasarkan petunjuk teknis pencairan triwulan pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari 2015, triwulan kedua

(April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2015, triwulan ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2015, kemudian untuk triwulan Keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015. Namun kenyataannya bahwa dokumen pencairan dana BOSDA terbit pada bulan Juni tahun berjalan.

Dalam pengelolaan dana BOSDA di masing-masing sekolah, seharusnya Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana BOSDA menunjuk seorang staf pelaksana (PNS) selaku bendahara sekolah. Namun pada kenyataannya bahwa dari 38 sekolah di Kabupaten Nunukan, hanya 2 wilayah Kecamatan (Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan) yang bendahara sekolahnya dijabat oleh staf pelaksana (PNS), sedangkan 33 sekolah bendaharannya dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Sedangkan 3 sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOSDA tahun 2015. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Disatu sisi keterbatasan staf pelaksana (PNS) mendorong kepala sekolah untuk menunjuk staf honor sebagai bendahara sekolah demi kelancaran proses administrasi pengelolaan dana BOSDA. Seharusnya Kepala Sekolah menunjuk salah satu guru PNS selaku bendahara sekolah, sehingga pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan secara

jabatan PNS. Disisi lain masih rendahnya tingkat pemahaman pengelola dana BOSDA. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemerintah memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Sekolah dan bendahara sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOSDA secara teknis.

Dalam pengelolaan dana BOSDA oleh masing-masing sekolah selaku penerima dana BOSDA wajib mengumumkan penggunaan dana BOSDA dipapan pengumuman. Hal ini sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa sekolah yang belum melaksanakan pengumuman pada papan pengumuman adalah SMPN 1,2,3,4,5,6 Kecamatan Sembakung, namun hanya diumumkan melalui rapat sekolah. Hal ini menggambarkan kurangnya transparansi sekolah dalam pengelolaan dana BOSDA kepada publik. Padahal sesuai juknis, sekolah wajib mengumumkan dana BOSDA pada papan pengumuman.

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan dari aspek prosedur pelaporan pertanggungjawaban dana BOSDA oleh masing-masing sekolah belum sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dari 35 sekolah masih belum tepat waktu sedangkan 3 sekolah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban di tahun 2015.

Lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban dari sekolah-sekolah disebabkan oleh faktor lambatnya penyaluran dana BOSDA dari Dinas Pendidikan. Ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi pencairan dana BOSDA triwulan I dan II pada bulan Juni 2015, sehingga mempengaruhi bentuk laporan pertanggungjawaban secara per triwulan. Seharusnya penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh sekolah sesuai dengan penerimaan dana BOSDA secara per triwulan.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa sebanyak 38 SMPN di Kabupaten Nunukan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab sebagai salah satu bukti dokumen laporan pertanggungjawaban sekolah. Disisi lain masih ada sekolah yang belum membuat dokumen laporan pertanggungjawaban seperti buku bank, buku pajak, berita acara penutupan kas, register penutupan kas sebagaimana yang disyaratkan dalam petunjuk teknis. Padahal dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban harus melampirkan dokumen dimaksud, sehingga laporan pertanggungjawaban dapat disebut akuntabel.

Hal lain menunjukkan bahwa masing-masing sekolah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOSDA melalui masing-masing UPTD di tiap-tiap Kecamatan dengan maksud agar terciptanya efisiensi anggaran. Namun hal ini belum diatur dalam petunjuk teknis, sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban

masing-masing sekolah masih sebagian ada yang mengantar langsung ke Dinas Pendidikan dan sebagian melalui UPTD setempat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana operasional sekolah dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengantar dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut ke Dinas Pendidikan, serta tidak adanya SOP tentang mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban BOSDA.

b. Aspek Keuangan

Prosedur penggunaan belanja dana BOSDA oleh masing-masing sekolah dirinci sesuai jenis belanja, baik jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, maupun jenis belanja modal. Ketiga jenis belanja tersebut harus melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Dalam aspek akuntabilitas keuangan, penggunaan anggaran BOSDA oleh sekolah belum memenuhi juknis. Dari sisi pembelanjaan masih didapat penyimpangan belanja dimana belanja barang yang bukti-bukti administrasinya terlampir dalam laporan ternyata tidak didukung dengan bukti fisik dilapangan. Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan hasil observasi yang menunjukkan ketidaksinkronan antara barang yang dibelanja dengan bukti administrasi dalam laporan. Selain itu terdapat belanja-belanja yang tidak diatur dalam juknis pengelolaan dana BOSDA, akan tetapi di tingkat lapangan hal ini dilakukan oleh pengelola dana BOSDA di sekolah.

Fakta lain menunjukkan bahwa penggunaan dana BOSDA masing-masing sekolah masih belum sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan bukti dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh sekolah yang berkaitan dengan belanja modal. Padahal hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana belanja modal tidak diperbolehkan. Namun kenyataannya masih ada sekolah yang melaksanakan belanja modal, salah satunya SMPN 1 Kecamatan Sebatik Utara.

Disisi lain masih banyak sekolah yang menggunakan materai tidak pada tempatnya. Ini ditunjukkan dengan bukti kwitansi pembayaran honorarium menggunakan materai. Seharusnya penggunaan meterai diperuntukkan pada jenis belanja barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tim manajemen BOSDA menunjukkan bahwa adanya kebijakan penggunaan belanja dana BOSDA dimasing-masing sekolah sebesar 40 % belanja Pegawai dan 60 % belanja Barang dan jasa, sedangkan belanja modal tidak ada. Kebijakan ini tidak dituang dalam petunjuk teknis. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa penggunaan belanja tidak berdasarkan pada persentase sebagaimana kebijakan yang disyaratkan oleh Tim Manajemen BOSDA, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah pada saat tertentu.

Dari aspek akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil studi dokumentasi, pencairan dana BOSDA

dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Perseiaan (SPP-TU). Dengan diberlakukannya SPP-TU maka pencairan dana BOSDA triwulan berikutnya harus melampirkan seluruh laporan pertanggungjawaban triwulan pertama. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan pada pencairan triwulan berikutnya. Jika salah satu dari 38 SMPN di Kabupaten Nunukan terlambat atau belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban maka akan berdampak pada semua sekolah sehingga pencairan triwulan berikutnya harus menunggu laporan sekolah lain. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam pencairan triwulan berikutnya. Padahal pencairan dana BOSDA dapat dilakukan berdasarkan wilayah kerja UPTD Kecamatan, sehingga dalam pencairan triwulan berikutnya tidak menghambat sekolah yang ada di wilayah Kecamatan lain.

Fakta lain juga menunjukkan bahwa belum efektifnya tim manajemen dalam menetapkan sekolah yang tidak mencukupi jumlah 60 siswa. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang tidak mencukupi jumlah 60 siswa, sehingga pembayaran berdasarkan jumlah siswa. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran

2015, menjelaskan bahwa bagi sekolah yang tidak mencukupi jumlah 60 siswa dapat dibayarkan sesuai jumlah 60 siswa.

Selain itu pencairan dana BOSDA masih belum sesuai dengan juknis. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sekolah yang berada didaerah terisolir yang penyaluran dananya diberlakukan sama dengan daerah yang kondisinya normal yaitu secara per triwulan (3 bulan) sekali. Pada hal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 161 tahun 2014 menjelaskan bahwa bagi sekolah yang berada di daerah terpencil/terisolir penyaluran dana BOS dapat dilakukan persemester (6 bulan). Namun kenyataannya pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum mempertimbangkan pada kondisi suatu daerah baik terpencil atau terisolir, sehingga pencairan dana hanya dilakukan per triwulan.

c. Aspek Manfaat

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan berdasarkan azas manfaatnya bahwa sesuai petunjuk teknis keberadaan dana BOSDA harus dapat bermanfaat bagi peserta didik terutama dalam meminimalisir angka putus sekolah. Selain itu keberadaan dana BOSDA harus mampu meningkatkan kesejahteraan kepala sekolah selaku penanggungjawab dana BOSDA, bendahara sekolah, guru honorer, pegawai administrasi (TU), Pustakawan, penjaga sekolah,

Satpam/wakar, serta pegawai kebersihan, narasumber/instruktur. Pembayaran jenis belanja pegawai berdasarkan standar harga yang wajar. Namun kenyataannya bahwa berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum mampu membayar wakar/penjaga sekolah sesuai standar harga. Rendahnya honorarium yang diterima oleh pengelola dana BOSDA dapat menyebabkan turunnya efektivitas kerja. Disisi lain ketersediaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penyediaan anggaran sarana dan prasarana sekolah. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa keberadaan dana BOSDA mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kelulusan siswa dari 2.199 siswa yang terdaftar dalam mengikuti UN terdapat 38 siswa yang tidak mengikuti UN sehingga jumlah siswa yang mengikuti UN sebanyak 2.161. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa yang tidak lulus. Total kelulusan siswa SMPN se-Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 2.158 siswa.

2. Faktor-faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat, antara lain:

- a. Panjangnya birokrasi menyebabkan lambatnya penetapan petunjuk teknis dan pembagian alokasi dana BOSDA oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA.
- c. Belum optimalnya tim manajemen BOSDA dalam melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban secara 3 bulan oleh sekolah-sekolah.
- d. Belum optimalnya penerapan juknis BOSDA di sekolah-sekolah.
- e. Kurangnya penempatan staf pelaksana PNS di tiap-tiap sekolah.
- f. Belum tersedianya SOP BOSDA pada Dinas Pendidikan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas prosedural, keuangan, dan manfaat dalam pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan dengan peningkatan SDM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, yang meskipun sosialisasi tersebut hanya dilakukan oleh PPTK (individu) kepada pengelola dana BOSDA di beberapa sekolah. Hal ini sebagaimana yang disarankan dari Asisten III Sekretariat Kabupaten Nunukan selaku Plt.Kepala Insfektorat Kabupaten Nunukan. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana BOSDA di sekolah-sekolah secara pertriwulan serta membuat SOP BOSDA yang dijadikan sebagai standar prosedur/mekanisme.

C. Pembahasan

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, baik dari aspek prosedural, aspek keuangan, maupun aspek manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*. Padahal salah satu indikator keberhasilan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas juga dijelaskan oleh Gambir Bhata (1996;7) bahwa salah satu prinsip *good governance* adalah prinsip akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas ini dipandang sangat penting dalam rangka tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas juga dipandang sebagai sebuah tanggungjawab yang sangat penting. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Chandler and Plato (dalam Sundarso, 2014:9.25) menyatakan bahwa akuntabilitas itu merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan; tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; tanggungjawab atas pelaksanaan program; tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur; dan tanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas. Menurut *United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA)*, 1993 bahwa salah satu prinsip *good governance*, adalah akuntabilitas, artinya mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta

keterhubungannya dengan kebebasan media. Hal ini sejalan dengan pandangan Mustopadidjaja,1997 (dalam Sedarmayanti,2009:284) yang mengatakan bahwa salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good Governanse*) adalah transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, baik dari aspek prosedural, aspek keuangan, maupun aspek manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam tahapan prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sangat perlu mempertimbangkan pada aspek akuntabilitas prosedural. Salah satu indikator keberhasilan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prinsip akuntabilitas prosedural. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep pandangan LAN dan BPKP.2008, dalam buku M.Ikhsan (2014:12.8-9), bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dilihat dari aspek akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas prosedural yang dimaksud adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana BOSDA belum sesuai dengan petunjuk teknis. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala

Dinas yang mengatakan bahwa prosedur atau mekanisme pencairan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa mekanisme pencairan dana BOSDA sudah berdasarkan juknis. Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris yang mengatakan bahwa:

“Prosedur pencairan dana BOSDA dimulai dari pengajuan RKAS dari sekolah kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui PPTK BOSDA kemudian PPTK mengajukan ke bendahara untuk mencairkan dana sehingga terbit SPM kemudian SP2D. Selanjutnya masuk ke rekening dinas dan bendahara menyalurkan ke rekening masing-masing sekolah”.

Pernyataan Sekretaris dikuatkan dengan pernyataan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa:

“Prosedur pencairan dana BOSDA adalah dimulai dari sekolah mengajukan RKAS kemudian disampaikan ke dinas, dinas dalam hal ini Tim Manajemen BOSDA memverifikasi kemudian membuat SK Bupati untuk di tetapkan oleh Bupati sebagai dasar pengajuan pencairan. PPTK dan bendahara mengajukan untuk dibuatkan SPM kemudian diajukan ke BUD untuk dibuat SP2D. Berikutnya dana masuk ke rekening dinas yang kemudian disalurkan ke rekening sekolah yang sudah ditetapkan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh PPTK BOSDA bahwa:

“Prosedur pencairan dana BOSDA dimulai dari sekolah mengajukan RKAS ke UPTD kemudian UPTD menyampaikan ke Dinas Pendidikan kemudian dinas menyampaikan dokumen pencairan ke BUD yang kemudian terbit SP2D selanjutnya atas dasar SP2D dana masuk ke rekening dinas selanjutnya bendahara dinas melakukan pencairan ke rekening masing-masing sekolah”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.1

Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural pencairan

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Bagaimanakah prosedur/mekanisme pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan?	Kadis	Prosedur atau mekanisme pencairan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	Prosedur/mekanisme pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
2		Sekretaris	Tahap 1 sekolah harus membuat RKAS atau RAPBS dalam 1 tahun di sampaikan ke Dinas Pendidikan melalui PPTK kemudian PPTK mengajukan ke bendahara, bendahara sehingga terbitlah SPM, terus SP2D. Kemudian masuk ke rekening Dinas Pendidikan setelah itu dinas menyalurkan ke sekolah.	
3		Kabid	Pendataan untuk mekanisme pencairan itu diawali dari data penerima. Setelah cocok data pokok pendidikan itu kita ambil, kemudian di dalam mekanisme prosedur atau pencairan itu adalah melalui juknis.	
4		PPTK	Prosedur pencairan dana BOSDA yang pertama kita melakukan beberapa hal diambil dari data Dapodik di tingkat sekolah kemudian UPTD dan dilanjutkan	

			ke Dinas Pendidikan, kemudian data tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati/kemudian menjadi RKA dan dijadikan dasar pencairan.
5		Bendahara pengeluaran Dinas	Setiap sekolah di dalam membuat RKAS kemudain menyampaikan Dinas. Membuat Surat Permintaan Pembayaran SPP tambahan uang persediaan TU UP Setelah proses di Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan melalui keluarlah SP2D TU UP Bendahara mentransper ke rekening sekolah.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan petunjuk teknis. Hasil studi dokumentasi ditunjukkan dengan lambatnya pencairan dana BOSDA tahun 2015 yang dibuktikan dengan dokumen SPP-TU nomor 0098/SPP-TU/101011.16.63/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, dan SPP-TU nomor 0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015". Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun anggaran 2015, menyebutkan bahwa

alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap triwulan didasarkan data dapodik dengan ketentuan bahwa triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada dapodik tanggal 30 Nopember 2014; (2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada dapodik tanggal 15 Februari 2015; (3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada dapodik tanggal 15 Mei 2015; (4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada dapodik tanggal 21 September 2015. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Nunukan nomor 188.45/198/III/2015 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSDA jenjang SD dan SMP atau sederajat tahun anggaran 2015. Dijelaskan bahwa penyaluran dana BOSDA dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu penyaluran triulan 1 bulan Januari-Maret, penyaluran triwulan 2 bulan April-Juni, penyaluran triwulan 3 bulan Juli-September dan penyaluran triwulan 4 bulan Oktober-Desember.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pencairan dana BOSDA belum mencerminkan pada aspek akuntabilitas tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Chandler and Plato (dalam Sundarso, 2014:9.25) bahwa akuntabilitas itu merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan prosedur.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.2
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas prosedural pencairan

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum bahwa prosedur pencairan	Terdapat keterlambatan pembayaran dana BOSDA	Dokumen (SPP-TU) nomor 0098/SPP-

dana BOSDA sudah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam juknis.	jenjang SD dan SMP Negeri tahun 2015 di Kabupaten Nunukan yang menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana BOSDA Triwulan I,II,III dan IV belum sesuai dengan petunjuk teknis.	TU/101011.16.63/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, dan SPP-TU nomor 0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015”.
--	--	--

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas prosedural pencairan, bahwa menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pencairan dana BOSDA tahun 2015. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas terjadinya keterlambatan pencairan dana BOSDA tahun 2015 disebabkan oleh “Lambatnya sekolah-sekolah dalam menyusun RKAS, lambatnya ekstensi dari tim BOSDA Kabupaten, dan belum siapnya penandatanganan juknis dari Pemerintah Daerah”.

Pernyataan Kepala Dinas diperkuat oleh pernyataan Sekretaris yang mengatakan bahwa “lambatnya pencairan dana BOSDA tahun 2015 disebabkan oleh lambatnya penandatanganan juknis oleh Bupati”. Pernyataan Sekretaris juga dikuatkan oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang menyatakan bahwa “keterlambatan pencairan dana BOSDA salah satunya adalah pembuatan SK dan juknis”. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh PPTK BOSDA bahwa keterlambatan pencairan disebabkan oleh “proses birokrasi di dalam menunggu Surat Keputusan Bupati pencairan ini kita menunggu surat keputusan Bupati”.

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh pernyataan bendahara pengeluaran dinas bahwa “keterlambatan tersebut disebabkan oleh: lambatnya pihak

sekolah telah menyampaikan RKAS dan lambatnya penetapan SK Bupati”.

Pernyataan bendahara pengeluaran juga dikuatkan oleh pernyataan kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang menyatakan bahwa “pencairan dana BOSDA triwulan 3 dan 4 tahun 2015 terjadi keterlambatan, sehingga biaya operasional sekolah dibantu dengan dana BOS pusat”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.3
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas Keuangan
(faktor keterlambatan pencairan)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Faktor apa yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SMPN sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS Triwulan I pada bulan Juni 2015?	Kadis	Keterlambatan sekolah-sekolah dalam menyusun RKAS. Lambatnya ekstensi dari tim BOSDA Kabupaten Belum siapnya penandatanganan juknis dari Pemerintah Daerah.	Terjadinya keterlambatan pencairan dana BOSDA disebabkan oleh lambatnya penandatanganan juknis dari Bupati.
2		Sekretaris	Pertama ini kita penunjukkan PPTK, PPTK yang saat ini di Dinas Pendidikan saat ini tidak sesuai dengan tupoksi yang ada di Dinas. Kemudian juknis ditetapkan oleh Bupati.	
3		Kabid	Keterlambatan pertama salah satunya adalah pembuatan SK dan juknis.	
4		PPTK	Birokrasi di dalam	

		BOSDA	menunggu Surat Keputusan Bupati pencairan ini kita menunggu Surat Keputusan Bupati.
5		Bendahara pengeluaran Dinas	Lambatnya pihak sekolah telah menyampaikan RKAS Lambatnya penetapan SK Bupati.
		Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung	Pencairan dana BOSDA triwulan 3 dan 4 tahun 2015 terjadi keterlambatan, sehingga operasional sekolah dibantu dengan dana BOS pusat.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedural pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan menggambarkan terjadinya keterlambatan proses pencairan dana BOSDA tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh panjangnya birokrasi yang di terapkan pada kantor Bupati Nunukan dalam hal protaf surat Keputusan Bupati tentang petunjuk teknis dan surat Keputusan Bupati tentang pembagian alokasi dana BOSDA pada tiap-tiap sekolah, sehingga sangat mempengaruhi pada proses pelaksanaan pencairan dana. Panjangnya birokrasi membuat pekerjaan tidak efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana yang dijelas oleh Osborne dan Plastrik.1996, (dalam Sudarmayanti, 2009:312) bahwa birokrasi dipangkas untuk menuju birokrasi yang lebih efektif dan efisien, dengan prinsip utama pemerintah yang paling sedikit mengatur adalah pemerintah yang paling baik.

Keterlambatan pencairan dana BOSDA ini dibuktikan dengan hasil studi dokumentasi yang antara lain: a. Dokumen Surat SPP-TU nomor 0098/SPP-TU/101011.16.63/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015; b. Dokumen SPP-TU nomor 0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015” tanggal 2 Nopember 2015; c. SPM Nomor 0098/SPM-TU/101011.16.63/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015; d. Dokumen SPM Nomor 0575/SPM-TU/101011.16.63/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015; e. SP2D Nomor 01852/TU/2015, tanggal 10 Juni 2015; f. SP2D Nomor 006839/TU/2015, tanggal 3 Nopember 2015. Gambaran ini tentunya mencerminkan ketidakefektifan pelaksanaan pengelolaan dana BOSDA tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA dan PPTK BOSDA.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.4
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas keuangan
(faktor keterlambatan pencairan)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum bahwa faktor keterlambatan pencairan dana BOSDA tahun 2015 disebabkan oleh lambatnya penandatangan juknis oleh Bupati.	1. Secara umum digambarkan bahwa adanya keterlambatan pencairna dana BOSDA tahun 2015 disebabkan oleh lambatnya penandatangan juknis dan pembagian alokasi dana oleh Bupati. 2. Belum efektifnya pelaksanaan pencairan dana BOSDA dalam mengajukan permohonan pembayaran.	Bahwa pencairan dana BOSDA triwulan I baru dilakukan pada bulan Juni 2015 sesuai : 1. SPP-TU) nomor 0098/SPP-TU/101011.16.63/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015. 2. SPP-TU nomor 0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015” tanggal 2 Nopember 2015. 3. SPM Nomor

			0098/SPM-TU/101011.16.63/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015.
			4. SPM Nomor 0575/SPM-TU/101011.16.63/XI/2015, tanggal 2 Nopember 2015.
			5. SP2D Nomor 01852/TU/2015, tanggal 10 Juni 2015.
			6. SP2D Nomor 006839/TU/2015, tanggal 3 Nopember 2015.

Akuntabilitas prosedur pencairan dapat terwujud apabila didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Salah satu untuk mewujudkan peningkatan SDM pengelola dana BOSDA adalah melalui sosialisasi dan bimtek. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan utama menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi BOSDA sangat rutin dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas yang mengatakan bahwa “sering dilakukan sosialisasi-sosialisasi, dan mengadakan bimtek-bimtek”. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris bahwa “itu sudah pasti yang namanya tim koordinasi itu harus bagaimana mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah sebelum dana BOSDA itu cair”. Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kabid SD dan SMP bahwa “untuk anggaran 2015 kita lakukan sosialisasi”. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh PPTK BOSDA bahwa “telah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana

BOSDA”. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa “sering di lakukannya sosialisasi”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.5
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural (sosialisasi)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi tentang penggunaan dan pertanggungja waban dana BOS jenjang SMPN di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan?	Kadis	Sering dilakukan sosialisasi-sosialisasi, dan mengadakan bimtek-bimtek	Secara umum pelaksanaan sosialisasi secara tim di Kecamatan-kecamatan sudah dilakukan secara berkesinambungan.
2		Sekretaris	Itu sudah pasti yang namanya tim koordinasi itu harus bagaimana mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah sebelum dana BOSDA itu cair.	
3		Kabid	Untuk anggaran 2015 kita lakukan sosialisasi.	
4		PPTK BOSDA	Telah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana BOSDA.	

5		Bendahara pengeluaran Dinas	Sering di lakukannya sosialisasi.	
---	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara terhadap informan pendukung menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi BOSDA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOSDA di tiap-tiap Kecamatan. Salah satunya adalah di Kecamatan Sembakung. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubbag TU UPTD Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “Tim Manajemen BOSDA tidak pernah melaksanakan sosialisasi BOSDA, yang ada hanya disampaikan oleh pak Jamal selaku PPTK”. Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala SMPN 4 Kecamatan Sembakung bahwa “kalau yang biasa sosialisasi hanya pak Jamal, kalau Tim belum pernah”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan informan utama terhadap informan pendukung, menggambarkan suatu pernyataan yang menyimpang/perbuatan yang tidak etis (tidak jujur). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nigro dan Nigro (dalam The Liang Gie,dkk.2012:7.26) yang menyatakan bahwa salah satu bentuk penyimpangan/perbuatan tidak etis adalah ketidak jujuran (*Dishonesty*).

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.6
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas prosedural (sosialisasi)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan secara	Masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi secara tim manajemen BOSDA di tiap-tiap	Tidak ditemukannya dokumen hasil rapat sosialisasi tim Koordinasi BOSDA

	berkesinambungan.	Kecamatan, namun pelaksanaan sosialisasi masih bersifat individu (PPTK).	di SMPN Kecamatan Sembakung.
2	Kasubbag TU UPTD Kecamatan Sembakung	Tim manajemen BOSDA tidak pernah melaksanakan sosialisasi BOSDA, yang ada hanya pak Jamal selaku PPTK.	
3	Kepala SMPN 4 Kecamatan Sembakung	Kalau yang biasa sosialisasi hanya pak Jamal.	
4	Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung	Tidak pernah dilakukan sosialisasi secara tim, tetapi hanya pak Jamal yang sering datang.	

Dalam pelaksanaan prosedural pencairan, Tim Manajemen BOSDA sangat perlu memperhatikan SOP. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sudah mengacu pada SOP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas bahwa:

“Proses pencairan dana BOSDA jenjang SMP otomatis harus, mengacu ke SOP yang di gariskan terutama juknis. Artinya bahwa SOP tersebut adalah juknis sebagaimana yang sudah dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris bahwa:

“Mekanismenya pencairan harus mengacu pada SOP. Tanpa dilaluinya SOP itu tidak mungkin dana itu akan cair. Juknis itu sudah mewakili SOP bagaimana prosedur atau mekanisme pengelolaan dari pencairan mulai dari pengusulan, pencairan sampai ke pertanggungjawaban yang ada di dinas”.

Senada dengan pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “antara SOP dengan juknis itu hampir sama”. Hal ini juga didukung oleh pandangan PPTK yang mengatakan bahwa “tahun 2015 dan sampai saat

ini proses pencairan dana BOSDA sudah mengacu pada SOP. Dan SOP yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan di sebut juknis”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.7
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural (SOP)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SMPN sudah mengacu pada SOP BOS?	Kadis	Proses pencairan dana BOSDA jenjang SMP sudah mengacu ke SOP terutama juknis.	Prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN sudah mengacu pada SOP BOSDA.
2		Sekretaris	Pencairan harus mengacu pada SOP.	
3		Kabid	Antara SOP dengan juknis itu hampir sama	
4		PPTK	Tahun 2015 dan sampai saat ini proses pencairan dana BOSDA sudah mengacu pada SOP.	

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedural pencairan belum mengacu pada SOP. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Pemerintahan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan.

Namun kenyataannya bahwa dalam prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum mengacu pada SOP. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa “Tim Manajemen BOS belum membuat SOP”. Pernyataan ini juga dipertegas dengan pernyataan Kasubbag TU UPTD Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “juknis memang pernah ada, sedangkan SOP tidak ada”. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan kepala SMPN 4 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “SOP itu tidak pernah ada, yang ada hanya juknis”. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bendahara SMPN 1 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “kalau SOP saya tidak tau yang saya tau juknis”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOSDA belum mengacu pada SOP.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.8
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas prosedural (SOP)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum prosedur pencairan dana BOSDA jenjang SMPN menurut informan utama sudah mengacu pada SOP.	Bahwa adanya anggapan dari tim Manajemen BOSDA terhadap pemahaman juknis sebagai SOP.	Tidak ditemukannya SOP sebagai pedoman pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan.
2	Bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa tim manajemen BOSDA belum membuat SOP.		

3	Kasubbag TU UPTD Kecamatan Sembakung mengatakan bahwa juknis memang pernah ada, sedangkan SOP tidak ada.		
4	Kepala SMPN 4 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa SOP itu tidak pernah ada, yang ada juknis.		
5	Bendahara SMPN 1 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa kalau SOP saya tidak tau yang saya tau juknis.		

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas prosedural penyampaian pertanggungjawaban dana BOSDA sudah sesuai dengan juknis. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pertanggungjawaban sudah sesuai prosedur sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas bahwa:

“Prosedural pertanggungjawaban dana BOSDA dimulai pada tahap dimana sekolah harus membuat sebuah RKAS atau RAPBS dalam 1 tahun berdasarkan jumlah murid-murid yang ada di sekolah. Kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini PPTK yang menangani kegiatan. PPTK mengajukan ke bendahara, bendahara mencairkan dana triwulan pertama. Bendahara memproses sehingga terbitlah yang namanya SPM, terus SP2D. Kemudian masuk ke rekening Dinas Pendidikan dari DPKAD atau BUD setelah itu Dinas menyalurkan ke sekolah”.

Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris bahwa :

“Pertanggungjawaban otomatis apa yang mereka sudah terima pada triwulan pertama tentunya sekolah mengelola dana itu dengan baik. Pengeluaran dibuktikan dengan kwitansi dan nota-nota serta daftar honor dan SK dan sebagainya”.

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa ”pertanggungjawabannya itu harus menyesuaikan dengan RKAS”. Hal ini juga dipertegas oleh PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa “pelaporan sesuai dengan RKAS”. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa ”sekolah menyampaikan laporan terhadap penggunaan dana BOSDA sesuai petunjuk teknis”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.9
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Bagaimanakah prosedur/mekanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap penggunaan dana BOS jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan?	Kadis	Bahwa pertanggungjawaban dana BOSDA berdasarkan RKAS yang telah diajukan dan ditetapkan dinas.	Prosedur pertanggungjawaban Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2		Sekretaris	Pertanggungjawaban otomatis apa yang mereka sudah terima pada triwulan pertama tentunya	

			sekolah mengelola dana itu dengan baik.
3		Kabid	Pertanggungjawabannya itu harus menyesuaikan dengan RKAS.
4		PPTK	Pelaporan sesuai dengan RKAS.
5		Bendahara pengeluaran Dinas	Sekolah menyampaikan laporan terhadap penggunaan dana BOSDA sesuai petunjuk teknis.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedur pertanggungjawaban dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan belum sesuai dengan petunjuk teknis. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa prosedur pertanggungjawaban masih banyak penyimpangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rangkap jabatan Kepala Sekolah sebagai bendahara sekolah. Ini dibuktikan dengan dokumen BKU bulan April s/d Juni 2015 yang ditandatangani oleh orang yang sama dalam hal ini Kepala Sekolah SMPN 4 Kecamatan Sembakung selaku bendahara sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya integritas Kepala Sekolah dalam pengambilan sikap. Padahal menurut Menurut Effendi (2005:3), salah satu faktor yang mempengaruhi perwujudan *good governane* adalah Integritas pelaku pemerintahan. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan berpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Sedangkan tanggungjawab atas ketaatan pada perundang-undangan sangat penting. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Chandler and Plato (dalam Sundarso, 2014: 9.25) yang mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk tanggungjawab atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pandangan ini diperkuat oleh pandangan dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bahwa salah satu azas untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pertanggungjawaban.

Penyalahgunaan wewenang juga terjadi pada SMPN 1 Kecamatan Seimanggaris, bahwa Kepala Sekolah menunjuk staf honor sebagai bendahara sekolah. Seharusnya kepala sekolah menunjuk salah satu guru PNS selaku bendahara sekolah, sehingga pengelolaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan secara jabatan PNS. Hasil studi dokumentasi juga menunjukkan adanya penyimpangan wewenang dimana Kepala Sekolah menunjuk dan mengangkat staf UPTD Kecamatan Sembakung selaku bendahara sekolah pada SMPN 2 Kecamatan Sembakung. Padahal pegawai UPTD tersebut adalah selaku PNS struktural. Ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung nomor 01/SK-BS/SMPN-2/2015, tanggal 20 Mei 2015, tentang penunjukkan pemegang kas sekolah/bendahara. Bentuk penyimpangan tersebut sangat bertentangan dengan azas larangan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo (dalam Puji Astuti,dkk. 2007:3.11-3.12), bahwa untuk menciptakan pemerintah yang benefid maka dalam keputusan-keputusannya pemerintah ataupun alat perlengkapan tata usaha negara harus memperhatikan azas-azas pemerintahan yang baik, salah salah

satunya adalah azas larangan penyalahgunaan wewenang yaitu dalam pengambilan keputusan tidak boleh wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dipergunakan untuk tujuan lain yang bertentangan atau menyimpang dari yang dimaksud oleh Undang-undang.

Fakta lain menunjukkan bahwa bukti laporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan juknis. Ini dibuktikan dengan beberapa sekolah yang salah dalam penggunaan materai. Hal ini dibuktikan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban SMPN 2 Kecamatan Nunukan, SMPN 2 Kecamatan Sebatik Barat, SMPN 1 & 2 Kecamatan Sebatik Tengah, SMPN 1 Kecamatan Sebatik Utara, SMPN 2 Kecamatan Tulin Onsoi, SMPN 1, 2, 4 Kecamatan. Padahal dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa penggunaan materai diperuntukan untuk belanja barang dan jasa dengan ketentuan nilai belanja Rp.250.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya materai Rp.3.000, sedangkan diatas Rp.1.000.000 dikenakan biaya materai Rp.6.000. Dengan demikian kesalahan ini akan berdampak pada pemborosan materai, sehingga dapat dikatakan belum efektifnya tanggungjawab dana yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pandangan Chandler and Plato (dalam Sundarso, 2014: 9.25) menyatakan bahwa salah satu akuntabilitas adalah *Fiscal acoountability*, akuntabilitas merupakan tanggungjawab atas dana publik yang digunakan. Pernyataan ini diperkuat oleh pandangan dari Musyawarah Konferensi Nasional Pemerintahan Daerah yang baik (dalam Sedarmayanti,2009:285-286) yang mengatakan bahwa salah satu prinsip *good*

governance adalah prinsip Efisiensi dan Efektivitas dimana prinsip ini salah satunya menekan pada berkurangnya penyimpangan pembelajaran.

Seharusnya pengelola dana BOSDA harus taat pada peraturan yang sudah ditetapkan dalam juknis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOSDA dari aspek prosedural pertanggungjawaban belum mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan aspek ketaatan pada keputusan politis. Padahal akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban sangat dibutuhkan dalam sebuah lembaga pemerintahan.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.10
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas prosedural pertanggungjawaban

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum informan utama mengatakan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan petunjuk teknis.	<p>1. Prosedur Laporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Adanya rangkap jabatan Kepala Sekolahmerangkap sebagai bendahara sekolah.</p> <p>2. Kepala Sekolah menunjukkan guru Non PNS selaku bendahara sekolah.</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban ditandatangani oleh staf</p>	<p>1. Dokumen BKU bulan April s/d Juni 2015 yang ditandatangani oleh orang yang sama dalam hal ini Kepala Sekolah SMPN 4 Kecamatan Sembakung selaku bendahara sekolah</p> <p>2. Kwitansi pembayaran baju olahraga pada tanggal 21 Nopember 2015, oleh SMPN 2 Kecamatan Seimanggaris.</p> <p>3. Surat Keputusan kepal SMPN 2 Kecamatan</p>

	UPTD Kecamatan Sembakung.	Sembakung, nomor 01/SK-BS/SMPN-2/2015, tanggal 20 Mei 2015.
	4. Banyaknya sekolah yang salah dalam penggunaan materai sehingga terjadi pemborosan materai.	4. Bukti laporan pertanggungjawaban SMPN 2 Kecamatan Nunukan, SMPN 2 Kecamatan Sebatik Barat, SMPN 1 & 2 Kecamatan Sebatik Tengah, SMPN 1 Kecamatan Sebatik Utara, SMPN 2 Kecamatan Tulin Onsoi, SMPN 1, 2, 4 Kecamatan.

Akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas prosedural penyampaian pertanggungjawaban dana BOSDA belum tepat waktu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas bahwa “laporan pertanggungjawaban dana BOSDA jarang tepat waktu”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris bahwa “kalau kita bilang tepat itu belum”. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Kabid yang mengatakan bahwa 60 % tepat waktu, tapi 40% belum. Demikian juga pernyataan yang sama oleh PPTK BOSDA bahwa “belum tepat waktu untuk wilayah Nunukan, Nunukan Selatan dan Sebatik itu sudah tepat waktu”. Pernyataan lain juga disampaikan oleh bendahara pengeluaran bahwa “kalau kita berbicara tepat waktu sangat sulit atau belum tepat”.

Dari pernyataan diatas, dikuatkan dengan hasil studi dokumentasi yang menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang lambat dalam penyampaian

laporan pertanggungjawaban dana BOSDA. Salah satunya adalah SMPN 3 Kecamatan Sembakung pada laporan triwulan I,II,III, dan IV tahun 2015. Ini dibuktikan dengan dokumen surat pengantar No.421.3/025/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015. Surat pengantar No.421.3/027/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 dan surat pengantar No.421.3/029/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.11
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas Prosedural
(Ketepatan waktu)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan?	Kadis	Jarang tepat waktu.	Secara umum penyampaian lapaoran pertanggungjawaban dana BOSDA tahun 2015 belum tepat waktu.
2		Sekretaris	Kalau kita bilang tepat itu belum.	
3		Kabid	60 % tepat waktu, tapi 40% belum.	
4		PPTK	Belum tepat waktu Untuk wilayah Nunukan, Nunukan Selatan dan Sebatik itu sudah tepat waktu	
5		Bendahara pengeluaran Dinas	Kalau kita berbicara tepat waktu sangat sulit atau belum tepat.	

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan menggambarkan bahwa belum tepat waktu. Hasil studi dokumentasi menunjukkan lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA yang dibuktikan dengan salah satu dokumen surat pengantar nomor 421.3/025/SMPN3-SBKG/XI/2015 tanggal 31 Desember 2015, tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA triwulan II dan III oleh SMPN 3 Kecamatan Sembakung.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.12
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas Prosedural Pertanggungjawaban (Ketepatan Waktu)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA tahun 2015 belum tepat waktu.	Terdapat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA bulan April s/d Juni 2015, Juli s/d September 2015, dan Oktber s/d Dseember 2015, oleh SMPN 3 Kecamatan Sembakung	1. Surat Pengantar No.421.3/025/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015. 2. Surat Pengantar No.421.3/027/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015 3. Surat Pengantar No.421.3/029/SMPN3-SBKG/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015.

Dalam tahapan pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sangat perlu mempertimbangkan pada aspek akuntabilitas keuangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep

pandangan LAN dan BPKP.2008, dalam buku M.Ikhsan (2014:12.8-9), bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dilihat dari aspek akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan yang dimaksud adalah akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas keuangan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Terutama pada jenis belanja yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris bahwa:

“Dana BOSDA ada 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam DPA Dinas Pendidikan hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sementara belanja modal tidak ada”.

Pernyataan ini dipertegas oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “ada 2 item belanja yaitu belanja pegawai, kemudian belanja barang jasa. Senada dengan pandangan PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa “hanya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dapat dibelanjakan, sementara belanja modal dari dana BOS pusat”. Pandangan ini juga diperkuat oleh bendahara pengeluaran yang mengatakan bahwa “petunjuk teknis sudah diatur ada 2 jenis belanja, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa”. Sedangkan menurut Kepala Dinas mengatakan bahwa “kalau itu soal teknis konfirmasi saja ke manajer BOSDA”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.13

Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas keuangan (jenis belanja)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan?	Kadis	Kalau itu soal teknis konfirmasi saja ke manajer BOSDA.	Jenis belanja dana BOSDA yang diperbolehkan adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
2		Sekretaris	Jenis belanja ada 2 yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.	
3		Kabid	Jenis belanja ada 2 yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.	
4		PPTK BOSDA	Jenis belanja ada 2 yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.	
5		Bendahara pengeluaran	Jenis belanja ada 2 yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.	

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dalam peruntukkan jenis belanja modal masih dilakukan. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan dari beberapa informan utama yang menyatakan bahwa tidak diperkenankannya penggunaan belanja modal. Namun faktanya berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan dari 38 SMPN di Kabupaten Nunukan terdapat satu SMPN 1 Kecamatan Sebatik Utara yang melakukan transaksi terhadap jenis belanja modal (pembelian lemari). Disatu sisi larangan penggunaan

belanja modal tidak diatur dalam perunjuk teknis, sehingga terjadi kesimpangsiuran pemahaman/pandangan terhadap penggunaan belanja modal. Fakta lain menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa dari aspek akuntabilitas keuangan, masih menggambarkan kurang tertibnya administrasi pengelolaan dana BOSDA disekolah-sekolah. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa dari 38 SMPN yang ada di Kabupaten Nunukan, hanya 1 sekolah (SMPN 3 Kecamatan Sembakung) yang membuat dokumen berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas. Sedangkan sekolah lainnya belum membuat dokumen berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas, buku bank dan buku pajak. Berikut tabel rekapitulasi hasil studi dokumentasi pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.14

Rekapitulasi hasil studi dokumentasi pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan pada aspek akuntabilitas keuangan

No.	SMPN per Kecamatan	BKU	Buku Bank	Buku Pajak	Dokumen pemeriksaan kas	Kesalahan penggunaan materai
1	Kecamatan Nunukan					
	a. SMPN 1	v	x	x	x	-
	b. SMPN 2	v	x	v	x	s
	c. SMPN 3	v	x	x	x	-
2	Kecamatan Nunukan Selatan					
	a. SMPN 1	v	v	v	x	-
	b. SMPN 2	v	x	x	x	-
	c. SMPN 3	v	x	x	x	-
3	Kecamatan Sebatik					
	a. SMPN 1	v	v	x	x	s
4	Kecamatan Sebtik Barat					
	a. SMPN 1	v	v	v	x	s
	b. SMPN 2	v	v	x	x	s
5	Kecamatan Sebatik Utara					
	a. SMPN 1	v	v	v	x	s
6	Kecamatan Sebatik Tengah					

	a. SMPN 1	v	x	x	x	s
	b. SMPN 2	v	v	v	x	s
7	Kecamatan Sebuku					
	a. SMPN 1	v	x	x	x	-
	b. SMPN 2	v	x	x	x	-
	c. SMPN 3	v	x	x	x	-
8	Kecamatan Tulin Onsoi					
	a. SMPN 1	v	x	x	x	-
	b. SMPN 2	v	x	x	x	-
9	Kecamatan Sembakung					
	a. SMPN 1	v	v	x	x	-
	b. SMPN 2	v	v	x	x	-
	c. SMPN 3	v	v	x	v	-
	d. SMPN 4	v	v	x	x	-
	e. SMPN 5	v	v	x	x	-
	f. SMPN 6	v	v	x	x	-
10	Kecamatan Lumbis					
	a. SMPN 2	x	x	x	x	-
11	Kecamatan Lumbis Ogong					
	a. SMPN 1	v	x	x	x	-
	b. SMPN 2	v	x	x	x	-
	c. SMPN 3	v	x	x	x	-
12	Kecamatan Seimenggaris					
	a. SMPN 2	x	x	x	x	-
13	Kecamatan Krayan					
	a. SMPN 1	v	x	x	x	s
	b. SMPN 2	v	x	x	x	-
	d. SMPN 3	v	x	x	x	-
	e. SMPN 4	v	x	x	x	s
14	Kecamatan Krayan Selatan					
	a. SMPN 2	v	x	x	x	s
	b. SMPN 3	v	x	x	x	-
Keterangan :						
1. v = dibuat						
2. x = tidak dibuat						
3. s= pemborosan materai						

Dari hasil rekapitulasi diatas, menunjukkan bahwa masih lemahnya pelaksanaan administrasi di sekolah-sekolah. Padahal administrasi itu sangat penting dalam menjalankan sebuah birokrasi pemerintahan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Siagian (1971.11-15) bahwa:

“Tegak robohnya sautu negara, maju mundurnya peradaban manusia serta timbul tenggelamnya suatu bangsa-bangsa di dunia tidak

dikarenakan perang nuklir atau malapetaka, akan tetapi akan tergantung pada baik buruknya administrasi yang dimiliki”.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.15
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas keuangan (jenis belanja)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum pada dasarnya bahwa penggunaan dana BOSDA hanya diperuntukkan terhadap jenis belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa masih banyak sekolah yang kurang tertib administrasi. 2. Berdasarkan hasil observasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang melakukan kegiatan belanja modal dalam hal ini pembelian lemari kaca. Adapun sekolah dimaksud adalah SMPN 1 Kecamatan Sebatik Utara. 3. Adanya larangan terhadap penggunaan belanja modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil studi menunjukkan 38 Sekolah masih kurang tertib administasi. 2. Kwiansi pembayaran SMPN 1 Sebatik Utara. 3. Berdasarkan studi dokumentasi pada SK Bupati nomor 188.45/198/III/2015 pada BAB V : penggunaan dana BOSDA, bahwa tidak ada larangan secara tertulis tentang larangan melakukan belanja modal.

Dalam tahapan pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan sangat perlu mempertimbangkan pada aspek akuntabilitas manfaat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep pandangan LAN dan BPKP.2008, dalam buku M.Ikhsan (2014:12.8-9), bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dilihat dari aspek akuntabilitas manfaatnya. Akuntabilitas manfaatnya yang

dimaksud adalah akuntabilitas manfaat (*efektivitas*) yang memberi perhatian kepada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan.

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan berdasarkan azas manfaatnya, bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris bahwa "tujuan dari pada diberikan dana BOS tidak lain adalah untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah dengan gratis". Pernyataan Sekretaris ini diperkuat oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa "untuk minim angka putus sekolah itu sudah dan BOSDA untuk SMP itu sudah cukup". Pandangan Kabid SD dan SMP senada dengan pandangan PPTK yang mengatakan bahwa "keberadaan dana BOSDA sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah, tetapi juga masih juga ada juga angka putus sekolah". Pernyataan PPTK juga diperkuat oleh pernyataan bendahara pengeluaran yang mengatakan bahwa "saat ini sangat kita rasakan azas manfaat". Pandangan disampaikan oleh Kabid dan PPTK BOSDA juga diperkuat oleh pernyataan Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa "tidak ada yang putus sekolah, kalau yang lain karena menikah".

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.16
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat
(meminimalisir angka putus sekolah)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah keberadaan	Sekretaris	Tujuan dari pada diberikan dana	Secara umum keberadaan dana

	dana BOS jenjang SMPN sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah?		BOSDA adalah untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah dengan gratis.	BOSDA jenjang SMPN sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah khususnya di
2		Kabid	Untuk minim angka putus sekolah itu sudah. BOSDA daerah untuk SMP itu sudah cukup.	Kecamatan Sembakung.
3		PPTK	Sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah, tetapi masih ada juga angka putus sekolah	
4		Bendahara pengeluaran dinas	Saat ini sangat kita rasakan azas manfaat	
5		Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung	Tidak ada yang putus sekolah, kalau yang lain karena menikah ada.	

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dari aspek akuntabilitas manfaat menggambarkan bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah. Hasil studi menunjukkan bahwa angka putus sekolah tidak ada, namun putus sekolah disebabkan karena sesuatu hal (menikah). Namun dari beberapa pandangan diatas bertolak belakang dengan pandangan Kepala Dinas yang mengatakan bahwa "dana BOSDA bukan untuk kepada putus sekolah, tetapi dana BOSDA untuk operasional jalannya pembelajaran". Meskipun demikian, berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa keberadaan dana sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah. Ini ditunjukkan dengan data hasil kelulusan siswa SMPN tahun 2014/2015 di Kabupaten Nunukan.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan data studi dokumentasi

yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.17
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (meminimalisir angka putus sekolah)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum keberadaan dana BOSDA jenjang SMPN sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah.	Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa dapat digambarkan angka putus sekolah tidak ada, namun angka putus sekolah terjadi disebabkan karena siswa menikah.	Data kelulusan siswa SMPN tahun 2014/2015 di Kabupaten Nunukan.
2	Kepala Dinas menyatakan bahwa dana BOSDA ini dalam rangka pembantuan dana operasional untuk operasinya jalannya pembelajarannya. Dana BOSDA bukan untuk kepada putus sekolah.		

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas manfaat dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan utama bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris yang mengatakan bahwa "tenaga pendidik kita ini Alhamdulillah sudah cukup".

Namun pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa "dana BOSDA ini bukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan.

Pernyataan Kepala Dinas ini diperkuat oleh pandangan PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa "belum mampu maksimal". Pernyataan ini senada dengan pandangan bendahara pengeluaran yang mengatakan bahwa "kalau kita berbicara sejahtera sampai kapanpun kita namanya manusia kita belum tentu sejahtera". Pernyataan bendahara pengeluarn ini dipertegas oleh pandangan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa "sekarang kalau dibilang cukup ya tidak, tergantung manajemen-menajemen dari sekolah". Pernyataan PPTK BOSDA juga diperkuat oleh pernyataan kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa "sangat kecil untuk kesejahteraan".

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.18
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat
(peningkatan kesejahteraan)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor?	Sekretaris	Tenaga pendidik kita ini Alhamdulillah sudah cukup.	Secara umum keberadaan dana BOSDA belum mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa akuntabilitas manfaat pada aspek peningkatan kesejahteraan, menggambarkan bahwa keberadaan dana BOSDA belum mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga

pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Dinas yang mengatakan bahwa:

“Dana BOSDA ini bukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan; Dana BOSDA untuk operasional jalannya pembelajaran di sekolah; Tidak ada sekolah bilang tidak mampu; Bukan untuk kegiatan guru, namun dana itu juga bisa terutama guru-guru honor yang mengajar membantu sekolah yang guru-guru kurang di daerah, terutama di daerah yang pedalaman, di daerah tertinggal”.

Pernyataan Kepala Dinas ini diperkuat oleh pandangan PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa “belum mampu maksimal”. Pernyataan ini senada dengan pandangan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa “kalau kita berbicara sejahtera sampai kapanpun kita namanya manusia kita belum tentu sejahtera”. Pernyataan bendahara pengeluarn ini dipertegas oleh pandangan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “sekarang kalau dibilang cukup ya tidak, tergantung manajemen-menajemen dari sekolah”. Pernyataan PPTK BOSDA juga diperkuat oleh pernyataan kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “sangat kecil untuk kesejahteraan”. Ini ditunjukkan dengan salah satu hasil studi dokumentasi terhadap daftar penerimaan honorarium SMPN 4 Kecamatan Sembakung bulan April s/d Juni 2015, tanggal 30 Juni 2015; dan daftar honor penjaga sekolah bulan April s/d Juni 2015, tanggal 30 Juni 2015.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.19
Triangulasi Teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat
(peningkatan kesejahteraan)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum keberadaan dana BOSDA belum mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor.	Berdasarkan hasil observasi bahwa pembayaran honorarium guru honorer selama 3 bulan sangat kecil. Jumlah honor selama 3 bulan sebesar Rp.60.000,00. Dan Honor penjaga sekolah selama 3 bulan sebesar Rp.60.000,00.	Berdasarkan dokumen daftar penerimaan honoarium SMPN 4 Kecamatan Sembakung bulan April s/d Juni 2015, tanggal 30 Juni 2015. Daftar honor penjaga sekolah bulan April s/d Juni 2015, tanggal 30 Juni 2015.
2	Kadis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana BOSDA ini bukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Dana BOSDA untuk operasional jalannya pembelajaran di sekolah. 3. Tidak ada bilang tidak mampu. 4. Bukan untuk kegiatan guru, namun dana itu juga bisa terutama guru-guru honor yang mengajar membantu sekolah yang guru-guru kurang di daerah, terutama di daerah yang pedalaman, didaerah tertinggal 	
3	Kabid	Sekarang kalau dibilang cukup dan tidak, tergantung manajemen-menajemen dari sekolah.	
4	PPTK	Saya lihat dana BOSDA ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan.	

5	Bendahara pengeluaran dinas	Kalau kita berbicara sejahtera sampai kapanpun kita namanya manusia kita belum tentu sejahtera.	
6	Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung	Sangat kecil untuk kesejahteraan.	

Pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas manfaat, menunjukkan bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas yang mengatakan bahwa “di harapkan dana BOSDA tersebut bisa membantu operasional, dia juga dapat meningkatkan kinerja guru-guru dalam proses belajar mengajar”. Pernyataan Kepala Dinas tersebut didukung oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “kalau untuk meningkatkan kinerja guru pasti meningkat, kalau kepala sekolahnya bisa memenets dengan baik. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa ”keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kesejahteraan”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.20
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat
(meningkatkan kinerja guru dan non guru)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah?	Kadis	Di harapkan dana BOSDA tersebut bisa membantu operasional dia juga dapat meningkatkan kinerja guru-guru dalam proses belajar mengajar.	Bahwa secara umum keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah.

2		Kabid	Kalau untuk meningkatkan kinerja guru pasti meningkat, kalau kepala sekolahnya bisa memenets dengan baik	
3		PPTK	Sudah mampu meningkatkan kinerja guru.	

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas manfaat menggambarkan bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kinerja guru. Ini ditunjukkan dengan hasil studi dokumentasi yang menunjukkan tingkat kelulusan siswa sesuai daftar kolektif hasil ujian nasional SMPN di Kabupaten Nunukan tahun 2015, adalah baik. Dari 2.199 siswa yang terdaftar dalam mengikuti UN terdapat 38 siswa yang tidak mengikuti UN sehingga jumlah siswa yang mengikuti UN sebanyak 2.161. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa yang tidak lulus. Total kelulusan siswa SMPN se-Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 2.158 siswa. Berikut tabel Rekap Peserta Ujian Nasional tahun 2015:

TABEL 4.21
DAFTAR REKAP PESERTA UJIAN NASIONAL
JENJANG SMP/MTS TAHUN PELAJARAN 2014/2015 KABUPATEN NUNUKAN

No.	Nama Sekolah	Jumlah Peserta UN Terdaftar	Jumlah Peserta Tidak Mengikuti UN	Jumlah Peserta Mengikuti UN	Jumlah Peserta Tidak Lulus UN	Jumlah Lulus Ujian
1	SMPN 1 Nunukan	254	3	251	-	251
2	SMPN 2 Nunukan	274	4	270	-	270
3	SMPN 3 Nunukan	70	4	66	-	66
4	SMPN 1 Nunukan Selatan	215	2	213	-	213
5	SMPN 2 Nunukan Selatan	40	-	40	-	40
6	SMPN 3 Nunukan Selatan	19	1	18	-	18

7	SMPN 1 Krayan	98	1	97	-	97
8	SMPN 2 Krayan	24	-	24	-	24
9	SMPN 3 Krayan	20	-	20	-	20
10	SMPN 4 Krayan	8	-	8	-	8
11	SMPN 1 Krayan Selatan	8	-	8	-	8
12	SMPN 2 Krayan Selatan	12	-	12	-	12
13	SMPN 3 Krayan Selatan	16	-	16	-	16
14	SMPN 1 Sebatik Utara	230	2	228	3	225
15	SMPN 1 Sebatik Barat	86	-	86	-	86
16	SMPN 2 Sebatik Barat	42	1	41	-	41
17	SMPN 1 Sebatik	48	1	47	-	47
18	SMPN 2 Sebatik	17	-	17	-	17
19	SMPN 1 Sebuku	43	-	43	-	43
20	SMPN 2 Sebuku	22	-	22	-	22
21	SMPN 3 Sebuku	10	1	9	-	9
22	SMPN 1 Lumbis	149	1	148	-	148
23	SMPN 2 Lumbis	12	-	12	-	12
24	SMPN 1 Sembakung	65	2	63	-	63
25	SMPN 2 Sembakung	9	-	9	-	9
26	SMPN 3 Sembakung	12	1	11	-	11
27	SMPN 4 Sembakung	6	2	4	-	4
28	SMPN 5 Sembakung	6	-	6	-	6
29	SMPN 6 Sembakung	20	6	14	-	14
30	SMPN 1 Lumbis Ogong	19	-	19	-	19
31	SMPN 2 Lumbis Ogong	14	2	12	-	12
32	SMPN 3 Lumbis Ogong	8	-	8	-	8
33	SMPN 1 Tulin Onsoi	128	3	125	-	125
34	SMPN 2 Tulin Onsoi	25	-	25	-	25
35	SMPN 1 Sebatik Tengah	88	-	88	-	88
36	SMPN 2 Sebatik Tengah	16	-	16	-	16
37	SMPN 1 Sei. Menggaris	23	1	22	-	22
38	SMPN 2 Sei. Menggaris	43	-	43	-	43
TOTAL		2,199	38	2.161	3	2.158

Meskipun pernyataan beberapa informan utama mengatakan keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan kinerja guru yang dibuktikan dengan hasil capaian ujian nasional SMPN di Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebagaimana yang dituangkan dalam tabel diatas, namun faktanya bertolak belakang dengan pernyataan Sekretaris bahwa “dana BOSDA bukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam upaya peningkatan kesejahteraan”. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa “untuk meningkatkan kinerjanya belum maksimal”. Hal ini juga senada dengan pandangan Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa “kalau dana BOSDA ini masih belum mampu meningkatkan kinerja guru”.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diatas dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.22
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (meningkatkan kinerja guru dan non guru)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum sudah mampu meningkatkan kinerja guru.	Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Sembakung menunjukkan bahwa kinerja guru sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil output atau standar kelulusan yang menggambarkan nilai ketuntasan siswa dalam ujian akhir sekolah.	Berdasarkan daftar kolektif hasil ujian nasional tahun pembelajaran 2015/2016, SMPN di Kabupaten Nunukan.
2	Menurut Sekretaris dana BOSDA bukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam upaya peningkatan		

	kesejahteraan.		
3	Bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerjanya belum maksimalnya.		
4	Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa kalau dana BOSDA ini masih belum mampu meningkat kinerja guru.		

Gambaran pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan dari aspek akuntabilitas manfaat, dapat digambarkan pula bahwa keberadaan dana BOSDA sudah mampu meningkatkan operasional sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas bahwa "dengan adanya dana BOSDA ini pasti mampu".

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.23
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat (operasional)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran?	Kadis	Dengan adanya dana BOSDA ini pasti mampu.	Sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional sekolah.
2		Sekretaris	Sekolah yang notabenenya besar itu sangat cukup dari pada	

			anggaran yang dia terima malah kadang-kadang keluhan apa mau di pakai apa. Bagi sekolah yang kecil terutama yang di luar sana itu masih belum.
3		Kabid	Ini relatif ya, relatif saja. Tidak bisa kita menyatakan ya ini kuncinya relatif tergantung dari Kepala Sekolah komitmen dari sekolah.
4		PPTK	Kebutuhan operasional dana BOSDA sudah saya lihat sudah mencukupi, mampu sudah menopang dan membantu kegiatan operaional.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dari aspek akuntabilitas manfaat, keberadaan dana BOSDA belum mampu menunjang operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya sarana dan prasarana SMPN 2 Kecamatan Sembakung. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan bendahara pengeluaran dinas yang mengatakan bahwa "belum maksimal keberadaan dana BOSDA untuk dapat menunjang secara keseluruhan operasional sekolah". Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang mengatakan bahwa "belum mampu, karena dana yang diterima sangat minim". Hasil studi dokumentasi ditunjukkan dengan foto ruangan SMPN 2 Kecamatan Sembakung yang menggambarkan sarana dan prasarana.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.24
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat (operasional)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Secara umum belum mampu memenuhi operaional sekolah.	Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Sembakung khususnya di SMPN 2 bahwa masih minimnya sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang operasional sekolah.	Foto ruangan kantor tata usaha SMPN 2 Kecamatan Sembakung menunjukkan bahwa keberadaan dana BOSDA untuk operasional sekolah masih minim.
2	Bendahara Dinas	Belum maksimal untuk dapat menunjang secara keseluruhan operasional sekolah.	
3	Kepala SMPN 2 Kecamatan Sembakung.	Belum mampu, karena dana yang diterima sangat minim.	

Pengelolaan dana BOSDA dari aspek akuntabilitaas manfaat, bahwa keberadaan dana BOSDA mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris bahwa ”dampak dari adanya dana BOSDA itu sangat membantu untuk bagaimana peningkatan mutu pendidikan itu selalu didepan itu yang diharapkan oleh pemerintah”. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan PPTK BOSDA yang mengatakan bahwa ”sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran sekolah”.

Berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas yang mengatakan bahwa “relatif tergantung dari situasi sekolah itu sendiri”. Pandangan ini dipertegas oleh pandangan Kabid yang mengatakan bahwa ”tergantung dari menajemen kepala sekolah”.

Deskripsi data dari hasil wawancara tersebut dapat diringkas dengan tabel triangulasi sumber data dibawah ini:

Tabel : 4.25
Triangulasi sumber data pada aspek akuntabilitas manfaat
(Peningkatan mutu pembelajaran)

No.	Pertanyaan	Informan	Reduksi data	Kesimpulan
1	Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah?	Sekretaris	Dampak dari adanya dana BOS itu sangat membantu untuk bagaimana peningkatan mutu pendidikan itu selalu didepan itu yang diharapkan oleh pemerintah.	Keberadaan dana BOSDA mampu meningkatkan mutu pendidikan.
2		PPTK	Sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran sekolah	

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dari aspek akuntabilitas manfaat, menggambarkan bahwa keberadaan dana BOSDA belum sepenuhnya mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Ini dibuktikan dengan minimnya siswa yang berprestasi di Kecamatan. Hal ini dipertegas oleh pandangan bendahara pengeluaran bahwa “belum sepenuhnya mampu meningkatkan mutu pembelajaran”. Sedangkan pernyataan Kepala Dinas mengatakan bahwa keberadaan dana BOSDA meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah relatif tergantung dari situasi sekolah itu sendiri. Pernyataan di dipertegas oleh pernyataan Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “tergantung dari manajemen Kepala Sekolah”.

Gambaran hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dituang dalam triangulasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel : 4.26
Triangulasi teknik pengumpulan data pada aspek akuntabilitas manfaat
(Peningkatan mutu pembelajaran)

No.	Hasil Wawancara	Observasi	Studi dokumentasi
1	Keberadaan dana BOSDA mampu meningkatkan mutu pendidikan	Berdasarkan hasil observasi di Kabupaten Nunukan siswa yang berprestasi masih sangat sedikit.	Tidak menunjukkan data hasil berprestasi di SMPN Kecamatan Sembakung.
2	Kadis	Relatif tergantung dari situasi sekolah itu sendiri.	
3	Kabid SD dan SMP	Tergantung dari manajemen Kepala Sekolah.	
4	Bendahara Dinas	Belum sepenuhnya mampu meningkatkan mutu pembelajaran.	

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat, antara lain:

1. Panjangnya birokrasi penetapan petunjuk teknis dan penetapan alokasi dana BOSDA

Panjangnya birokrasi yang di terapkan pada kantor Bupati Nunukan dalam hal protaf surat Keputusan Bupati tentang petunjuk teknis dan pembagian alokasi dana BOSDA pada tiap-tiap sekolah sangat mempengaruhi proses pengajuan permintaan pembayaran, surat perintah membayar, serta SP2D yang pada akhirnya akan penyampaian pertanggungjawaban dana BOSDA. Adapun gambaran jalur protaf Keputusan Bupati mulai dari level Kasi, Kepala Bagian, Kepala DPKAD, Asisten, Sekda, sampai ke Bupati. Jika salah satu diantara pejabat tersebut tidak ada ditempat, maka akan memperlambat proses yang lain.

Padahal pemerintah perlu memperhatikan aspek akuntabilitas prosedural dengan pertimbangan moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam pandangan LAN dan BPKP.2008, dalam buku M.Ikhsan (2014:12.8-9), bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dilihat dari aspek akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas prosedural yang dimaksud adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA.

Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan dana BOSDA oleh TIM Manajemen BOSDA menyebabkan sekolah-sekolah belum sepenuhnya memahami penggunaan jenis belanja, maupun bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai petunjuk teknis. Sedangkan sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi yang bersifat individu dalam hal ini sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPTK BOSDA. Materi yang disampaikan hanya bersifat umum tidak bersifat teknis. Hal ini tentu berdampak pada pengelolaan dana BOSDA yang belum akuntabel baik dalam aspek prosedural, aspek keuangan maupun aspek manfaatnya. Padahal

sosialisasi tersebut harus dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA. Menurut Nasution. 2010, (dalam M.Ikhsan, 2014:12.17) salah satu penyebab lemahnya SDM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabel fiskal di Indonesia adalah pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada tidak dirancang dan dilaksanakan dengan program yang jelas dan terjadwal.

3. Belum optimalnya penerapan juknis BOSDA di sekolah-sekolah.

Belum optimalnya penerapan juknis BOSDA di sekolah-sekolah menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan tentang tata cara penggunaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOSDA. Ini ditunjukkan dengan belum optimalnya pelaksanaan penyaluran pencairan dana BOSDA melalui dokumen SPP TU. Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa pencairan dana BOSDA menggunakan dokumen SPP TU bagi seluruh sekolah SMPN di Kabupaten Nunukan. Dengan terbitnya SPP TU secara keseluruhan, maka proses pencairan dana BOSDA triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila semua laporan pertanggungjawaban dana BOSDA triwulan sebelumnya terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan menghambat proses pencairan dana BOSDA triwulan berikutnya yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan operasional sekolah lain.

Faktor lain adalah belum terakomidinya tentang tata cara pembagian dana BOSDA bagi sekolah yang tidak mencapai 60 siswa dalam juknis. Padahal bagi sekolah yang tidak mencapai 60 siswa dapat dibayarkan berdasarkan jumlah 60 siswa. Selain itu bagi sekolah yang berada di daerah terpencil/terisolir dapat dilakukan pencairannya secara 6 bulan (per semester).

4. Kurangnya penempatan staf pelaksana PNS di beberapa sekolah.

Kurangnya pendistribusian staf pelaksana PNS di beberapa sekolah oleh Pemerintah Daerah sehingga merupakan salah satu faktor penyebab belum efektifnya pengelolaan dana BOSDA di tiap-tiap sekolah. Kondisi ini tentu akan menimbulkan suatu kebijakan baru yang tidak didasari oleh peraturan. Salah satu bentuk penyimpangan kebijakan adalah Kepala Sekolah dalam menunjuk guru non PNS sebagai bendahara sekolah. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap jabatan bendahara sekolah yang dijabat oleh tenaga honorer, salah satunya di SMPN di Kecamatan Seimenggaris. Padahal bendahara sekolah harus dijabat oleh staf pelaksana PNS. Jika kondisi staf pelaksana PNS tidak ada maka dapat ditunjuk guru PNS sebagai bendahara sekolah. Dampak lain dari kurangnya penempatan staf pelaksana PNS adalah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan Kepala Sekolah menunjuk salah satu staf UPTD untuk menjadi bendahara sekolah di wilayah Kecamatan Sembakung.

5. Belum tersedianya SOP BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Belum tersedianya SOP BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebabkan pelaksanaan prosedur, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya tidak sesuai. Baik dari prosedur pencairan, penggunaan, maupun dari aspek pertanggungjawaban dana BOSDA.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi beberapa faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMPN di Kabupaten Nunukan baik dari aspek akuntabilitas prosedural, keuangan, maupun manfaat adalah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya pemerintah dari aspek akuntabilitas prosedural

- a. Pemerintah melakukan perbaikan sistem pendataan siswa secara sistem dapodik, dan menyarankan kepada masing-masing sekolah agar tepat waktu dalam penyampaian RKAS, sehingga proses pengusulan anggaran sesuai agenda pengusulan anggaran dinas.
- b. Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal proses percepatan penyampaian RKAS oleh sekolah-sekolah yang geografisnya sulit dijangkau, sehingga tidak menghambat proses pengusulan anggaran dinas ke Pemerintah Daerah.
- c. Pemerintah mempermudah prosedur penetapan juknis dan penetapan pembagian alokasi dana BOSDA pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati.

- d. Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam hal pembimbingan melalui sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana BOSDA oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah secara kontinyu. Hal ini sesuai pernyataan Kepala Dinas yang mengatakan bahwa “perlu memimbing Kepala Sekolah dengan jajarannya dengan sosialisasi terus, bimtek-bimtek”. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris bahwa “kita lakukan sosialisasi yang secara detail”. Pernyataan dari Kabid SD dan SMP yang mengatakan bahwa “juknisnya harus di perbaiki karena melihat situasi dan kondisi”. pernyataan PPTK BOSDA bahwa ”melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap kepala sekolah, pihak UPTD maupun bendahara secara langsung”. Pernyataan lain disampaikan oleh bendahara pengeluaran bahwa ”akan memperjuangkan dalam APBD dan perlunya Tim Koordinasi dalam rangka untuk sosialisasi atau monitoring ke sekolah-sekolah”. Sosialisasi merupakan salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Asisten III Sekretariat Kabupaten Nunukan selaku Plt.Kepala Inspektorat Kabupaten Nunukan bahwa “sosialisasi itu penting untuk peningkatan SDM terutama Kepala Sekolah dan bendahara sekolah”. Agar pengelolaan dana BOSDA di Kabupaten Nunukan terlaksana secara akuntabel, maka Tim Manajemen BOSDA perlu melakukan suatu langkah/tindakan dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan

pengelolaan dana BOSDA sehingga pengelola dana BOSDA di sekolah-sekolah dapat memahami secara baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh YPAP.2004, (dalam M.Ikhsan,2014:12.8) bahwa salah satu bentuk dari akuntabilitas adalah akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), artinya bahwa setiap pimpinan dalam berbagai kegiatan harus selalu mengkomunikasikan dan mesosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

- e. Pemerintah perlu menetapkan SOP BOSDA sebagai standar operasional prosedur.

2. Upaya-upaya pemerintah dari aspek akuntabilitas Keuangan

- a. Pemerintah melakukan percepatan proses pengajuan SPP TU, SPM, dan penerbitan SP2D sehingga proses penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOSDA ke sekolah-sekolah sesuai dengan petunjuk teknis serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pemerintah melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pelaksanaan pengelola dana BOSDA di sekolah-sekolah secara pertriwulan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memberikan suatu jaminan pada pihak tertentu bahwa aktivitas-aktivitas organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengawasan dalam pengelolaan dana BOSDA bertujuan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh

bawahannya sesuai dengan rencana. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Handayani, 1980:127 yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses di mana pimpinan berupaya untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sondang Siagian (dalam Puji Astuti, dkk. 2007:5.4) bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Upaya-upaya pemerintah dari aspek akuntabilitas manfaat

- a. Pemerintah meminimalisir angka putus sekolah.
- b. Pemerintah melakukan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian honorarium sesuai dengan standar Pemerintah Daerah bagi pengelola dana BOSDA, guru honorer, pegawai administrasi (TU), Pustakawan, penjaga sekolah, Satpam/wakar, serta pegawai kebersihan, narasumber/instruktur.
- c. Pemerintah melakukan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik dari aspek akuntabilitas prosedural, aspek akuntabilitas keuangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOSDA dari 38 SMPN yang ada di Kabupaten Nunukan, terdapat 3 sekolah (SMPN 1 Kecamatan Lumbis, SMPN 1 Kecamatan Seimanggaris, SMPN 1 Kecamatan Krayan Selatan) yang belum menunjukkan laporan pertanggungjawaban ke Dinas Pendidikan. Sedangkan 35 sekolah yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban belum memenuhi unsur akuntabilitas baik dari aspek akuntabilitas prosedural dan keuangan. Dari aspek prosedural salah satunya adalah terjadinya keterlambatan proses pencairan dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan, sedangkan dari prosedur penyampaian laporan pertanggungjawaban masih ada sekolah yang belum tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Melihat dari aspek keuangan, pengelolaan dana BOSDA yang dilakukan oleh sekolah-sekolah belum sesuai dengan petunjuk teknis. Sedangkan dari aspek manfaat keberadaan dana BOSDA sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kelulusan siswa pada tahun 2015, pada daftar kolektif hasil ujian nasional

SMPN di Kabupaten Nunukan. Meskipun keberadaan dana BOSDA sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah, namun dari sisi peningkatan kesejahteraan pegawai honor, keberadaan dana BOSDA belum mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai honor. Kondisi diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat, yang antara lain:

- a. Panjangnya birokrasi sehingga mengakibatkan lambatnya penetapan Surat Keputusan Bupati tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOSDA dan Surat Keputusan Bupati tentang pembagian alokasi dana BOSDA.
- b. Belum optimalnya sosialisasi dan bimbingan teknik yang dilakukan oleh tim manajemen BOSDA.
- c. Belum optimalnya tim manajemen BOSDA dalam melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban secara 3 bulan sekali (per triwulan) ke sekolah-sekolah.
- d. Belum optimalnya penerapan juknis BOSDA di sekolah-sekolah.
- e. Kurangnya penempatan staf pelaksana (PNS) sebagai tata usaha di tiap-tiap Sekolah.
- f. Belum tersedianya SOP BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOSDA jenjang SMP Negeri di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Dinas Pendidikan dalam hal penandatanganan juknis BOSDA. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan nomor 12 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada pasal 28 ayat (2) bahwa: "Kepala SKPD atas nama Bupati Nunukan naskah dinas meliputi : dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati Nunukan.
- b. Melaksanakan sosialisasi serta bimtek-bimtek kepada pengelola dana BOSDA di sekolah-sekolah.
- c. Melaksanakan pengawasan laporan pertanggungjawaban secara per triwulan (3 bulan) sekali ke sekolah-sekolah.
- d. Merevisi petunjuk teknis dalam hal tata cara penyaluran dana BOSDA.
- e. Menambah staf pelaksana (PNS) tata usaha yang diperbantukan sebagai bendahara sekolah di sekolah-sekolah.
- f. Membuat SOP BOSDA.

B Saran

Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan perlu melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Dinas Pendidikan khususnya dalam hal penetapan juknis dan penetapan alokasi dana BOSDA;
- b. Meningkatkan pemahaman pengelola dana BOSDA baik dari aspek prosedural, aspek keuangan, maupun aspek manfaatnya;

- c. Melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sekali, (per triwulan) di sekolah-sekolah;
- d. Melakukan revisi juknis dalam hal penyaluran dana BOSDA yang antara lain:
 - 1) Menetapkan alokasi dana bagi sekolah yang berada di daerah terpencil/terisolir yang kurang dari 60 siswa dengan memberikan kebijakan alokasi 60 peserta didik.
 - 2) Menetapkan tata cara penyaluran dana BOSDA bagi daerah terpencil disalurkan secara per semester (6 bulanan).
 - 3) Menetapkan pengajuan SPP TU dana BOSDA sesuai pembagian wilayah kerja UPTD di tiap-tiap Kecamatan.
- e. Memenuhi kebutuhan SDM sebagai tenaga tata usaha untuk diperbantukan sebagai bendahara sekolah.
- f. Membuat SOP BOSDA pada Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Alex MA (2005) *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya:Penerbit Karya Harapan.
- Akhmad. (2013). *Analisis Kinerja Pengawas Sekolah Dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Nunukan*. Universitas Terbuka.
- Agus Winarno (2013), *Impelentasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Dana BOS di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat*.
- Bhatta, Gambhir .(1996). *Capacity Building at the local Level for Effective Governance, Empowerment Without Capaciry*.
- Dwiyanto. Agus. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daryanto, H.M. (2006). *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Eko, Prasojo,dkk. (2011). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Handyaningrat, Suwarno. (1980). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung.
- Hardiansyah, (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Heru Wihartopo. (2013). *Implementasi Penyuluhan Perikanan Dalam Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur*. Universitas Terbuka.
- Irfan, Muhammad H. (2007). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tatalaksana.
- Irawan, Prasetya. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ibrahim, Amin. (2008a). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*.Bandung: Mandar Maju.

- Istianda, Meita, (2012). *Studi Mandiri*. Cet.8; Ed.1, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ikhsan, M. (2014). *Administasi Keuangan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kooiman, Jan (1993). *Modern Governance, New Government Society Interactions*. London: Sage Publications.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen Pemasaran : Analisis perencanaan, implementasi dan kontrol (Jilid 1 dan 2)*. Jakarta: PT Prenhallido.
- Keputusan Bupati Nunukan nomor 188.48/196/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi BOSDA Jenjang SD dan SMP Tahun Anggaran 2015.
- Keputusan Bupati Nunukan nomor 188.48/197/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, Tentang Penetapan Sekolah Penerima dan Pengalokasian BOSDA Jenjang SD dan SMP pad Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.
- LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- LAN dan BPKP. 2001. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- LAN dan BPKP. (2008). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Lexy J, Moleong. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H.A.S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia Modern*. Bandung: Rosda Karya
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajamen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Nasution, (1992), *Metode Penelian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

- Nazir ,M. (1988). Metode Peneitian, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Agung. (2015), Nunukan Dalam Angka 2015, Penerbit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puji Astuti,dkk.(2007), Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pemerintah Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Daerah Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 03 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dinas pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penetapan Mutasi Guru Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
- Petunjuk teknis Nomor 188.45/198/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- Ramli, Rusli. Adi Warsidi. (1999). Asas-Asas Manajemen, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septi.(2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Soeprpto. MS,DR.H.R., (2002). Bahan ajar 1 “Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik”. Malang: Program Magister Ilmu Adminisrasi Negara Universitas Brawijaya.
- Siagian, Sondang, P. 1971. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

- Sampara, Lukman. (2000). *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Stamatis.D.H (1996). *Total Quality Service: Principle, Praktices, and Implemetation*. Florida : ST.Luice Press.
- Sulistyarini. Sri. Tjokroamidjojo, Bintoro, (2000), *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta:UI Press.
- Sugiono, (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet.III.Bandung : Alfabeta
- Sedarmayanti, (2013). *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : PT.Rfika Aditama.
- Samsuar (2013) *Impelementasi Kebijakan Program BOS dalam Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang*.
- Sulistyarini, Sri. dkk (2014). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Progam Magister (TAPM)*. Cet.8; Ed.1, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sundarso,dkk. (2014). *Teori Administasi-Cet.8;Ed.1*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni, Kismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sulistyarini. Siti, dkk. (2014). *Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Progam Magister (TAPM)*. Cet.8; Ed.1, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Tjiptono, Fandy. (1995). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Tjiptono, Fandy. (1996). *Manajemen Jasa*. Jakarta : Penerbit Bumi Angkasa.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (2000). *Good Govrnance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Thoah, Miftah. 2000. *Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Keperintahan yang baik*. Yogyakarta:PPs UGM.
- The Liang Gie. dkk (2012). Cet.1; Ed.3, *Etika Administrasi Pemerintahan*. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.

- UNDP.(1997). *Governance For Suitable Development-A Policy Document*.New York:UNDP.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Wasistiono, Sadu. (2001). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung:Alqa Print.
- Wakhyudi Ak.,M.Comm. (2011). *Diklat Pembentukan Auditor Anggota Tim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AIP)*, Edisi Keenam. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Wensislaus Sedan (2013) *Evaluasi Pelaksanaan Program BOS Sekolah Dasar Negerii swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012*.
- Zeithhaml , Valarie A., A. Parasuraman & Leonard L. Berry. (1990). *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.
- _____. 1993, *United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA)*.
- _____. 2008, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Kepemimpinan Tingkat IV, Dasar-Dasar Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- _____. 2000, *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik Bagian kedua Edisi Revisi*. Jakarta, LAN RI.
- _____. 2008, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- _____. 2011, *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

_____. 2014, Tim Pengembangan Program Pascasarjana UT. (2014). Pedoman Bimbingan Tugas Akhir Program Magister. Cet.2; Ed.2, Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

_____. Buku Petunjuk Kabupaten Nunukan, Bagian Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

<http://www.scribd.com/doc/233550836/Teori-Pelayanan-Dan-Konsep-Pelayanan#scribd>

<http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2010/09/teori-kualitas-pelayanan.html>

<http://edukasi.kompas.com/read/Transparansi.Dana.BOS.Rendah.Jakarta,Kompas.com>

<https://mukhsonrofi.wordpress.com/2011/07/07/bos-dan-pungutan-sekolah-quadis-pendidikan-indonesia>.



LAMPIRAN 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal :
Jam :

A. ASPEK AKUNTABILITAS PROSEDUR

1. Bagaimanakah prosedur/mekanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ?
2. Bagaimanakah prosedur/mekanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ?
3. Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) BOS?

B. ASPEK AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan?
2. Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS jenjang SLTP/SMP di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan?
3. Faktor apa yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SLTP/SMP sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS Triwulan I pada bulan Juni 2015?
4. Apakah setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SLTP/SMP d Kabupaten Nunukan?
5. Bagaimana upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan?

C. ASPEK AKUNTABILITAS MANFAAT

1. Apakah keberadaan dana BOS jenjang SLTP/SMP sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah?
2. Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan non pendidik yang berstatus tenaga honor?
3. Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah?
4. Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran?
5. Apakah keberadaan dana BOS sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

1. Dokumen petunjuk teknis
2. Dokumen SK penetapan alokasi dana
3. Dokumen Surat Permohonan Pencairan-TU (SPP-TU)
4. Dokumen Surat Perintah Mencairkan (SPM)
5. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6. Dokumen Contoh SK pelimpahan
7. Dokumen SK bendahara SMPN 2 dan SMPN 4 Kecamatan Sembakung
8. BKU, Buku Bank, Buku Pajak, kwitansi pada SMPN se-Kabupaten
9. Dokumen daftar kelulusan siswa tahun 2014/2015



Lampiran 2.1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ir.Zainuddin Palantara
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016

A. Aspek Akuntabilitas Prosedur

1. Pertanyaan kami yang pertama bagaimanakah prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Kalau prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS yang sudah dilakukan di Nunukan khususnya lagi di SD/SLTP ya di SMP itu tetap mengacu kepada e...aturan-aturan yang sudah di gariskan terutama juknis yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan kita juga membuat suatu... apa juknis kita sendiri dengan mengacu juknis yang di tetapkan pemerintah daerah, e...maupun nasional dan tetap melakukan e...penilaian terhadap RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Itu mungkin yang, yang kami, kami laksanakan menggunakan itu. Sebetulnya kaau untuk bagaimana prosedur penyampaian-penyampaian pertanggungjawaban, itu tetap lagi kalau sekolah, kalau kepala sekolah menerima dana BOS otomatis segera di, di cairkan di belanjakan dan kalau sudah dibelanjakan harus bertanggungjawab terhadap apa yang dibelanjakan. artinya setelah belanja, belanja pertanggungjawabannya harus di buat dan di antar disampaikan ke, ke Dinas Pendidikan. Mungkin minta maaf pak ini pak kadis, ee...mungkin saya harus bertanya dulu pak. Oo.. gitu!

2. Baik pak...e...minta maaf sebelumnya, e...kami lanjutnya pertanyaannya! Bagaimanakah prosedur atau mekanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah pak terhadap penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Kalau prosedur mekanisme penyampaian pertanggungjawaban adalah semua sekolah kepala sekolah yang telah ee...mendapatkan dana BOSDA atau di cairkan dana BOSDA dan di belanjakan sesuai dengan RKAS yang sudah di tentukan yang sudah di tentukan yang sudah di programkan. Setelah itu e...kepala sekolah harus segera membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas Pendidikan yang menangani tentang dana BOS. Jadi tetap begitu selesai belanja 3 bulan harus dipertanggungjawabkan.

3. Ya baik pak kami lanjut pertanyaan pak! Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur atau SOP BOS pak?

Jawab:

Otomatis harus, cuma, anu..mengacu ke standar oepasional prosedur yang di gariskan terutama yang juknis yang tadi saya bilang harus mengikuti ee...belanjanya berdasarkan RKAS yang di programkan yang sudah disetujui oleh tim. Itu.

B. Aspek Akuntabilitas Keuangan

1. Baik pak, pertanyakan selanjutnya! Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Kalau jenisnya sesuai dengan kebutuhan pertama yang sudah digariskan diprogramkan dengan RKAS yang disetujui oleh tim BOSDA daerah dan tetap mengacu melihat e...RKAS yang...kan dana BOS ini kan ada juga BOSNAS, BOSDA, BOSDA Provinsi. Jangan sampai RKAS tumpang tindih. Tetap kita mengacu ee.. RKAS yang digariskan oleh Kabupaten khusus Kabupaten. Ya mungkin pak saya sedikit menambahkan pak ee... maksud kami pak ada jenis belanja, ada 3 jenis belanja itu pak, e...belanja pegawai,

barang barang dan jasa dan belanja modal pak. Apakah, maksud kami apakah, apa saja belanja yang pak dilakukan di tingkat SMP ini?

Jawab:

Itu saya bilang tadi mau rinci silakan saja tanya ke bagiannya yang menangani terutama disana kan ada menejer BOS nah jadi disana mungkin teknis lebih tau. Kalau saya Cuma ke 3 jenis itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan di garis-garis peturan yang sudah ditetapkan.

2. Baik pak kami lanjut! Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi pak tentang penggunaannya dan pertanggungjawaban dana BOS jenjang SMP pak di tiap-tiap sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Selalu memimbing kepala sekolah dengan jajarannya dengan sosialisasi-sosialisasi terus bimtek-bimtek dan cara-cara membuat laporan. Kalau itu sering. Tiap tahun pasti ada.

3. Baik, kami lanjutkan pak! Faktor apa pak yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SMP pak sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS pak pada Triwulan I di bulan Juni 2015 ini pak?

Jawab:

Maksud kami pak ada keterlambatan pembayaran di tahun 2015 bulan Juni pak! Kalau setahu saya keterlambatan-keterlambatan itu sebenarnya e...tergantung pertanggungjawaban kepala sekolah. Masing-masing karena e...masing-masing keterlambatan ini, ee...merekalah yang lebih tau. Kedua...memang terutama yang di daerah-daerah pedalaman ini, e...yang sering keterlambatan karena kadang-kadang kepala sekolahnya itu kerja sendiri. Karena keterlambatan tenaga khususnya untuk pelaporan-pelaporan keuangan.

4. Baik pak kami sedikit tambahkan pak, maksud kami tadi faktor di triwulan I yang...pak di awal tahun pak yang membuat lambat hingga pembayaran ini terjadi di bulan Juni tahun 2015 pak!

Jawab:

Ya tadikan memang begini kalau keterlambatan asalnya dari Januari, Pebruari, nah kalau Januari, Pebruari ini sebenarnya karena pertama, mereka masih menyusun RKAS, RKAS itu e... ekstensi dengan tim-tim BOSDA belum lagi juknis-juknis yang dari keuangan Kabupaten yang masih belum siap, masih banyak yang harus di benahi sehingga Januari, Pebruari itu berpengaruh terhadap triwulan I. Kalau saya melihat disitu. Jadi dari kesiapan sekolah itu masing-masing. Persiapan dari Dinas Pendidikan sendiri, kesiapan dari Pemerintah Daerah khususnya di keuangan daerah.

5. Baik pak kami lanjutkan pak ! Apakah pak setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Nomor, 4...nomor 5 pak!. Maksud kami apakah setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak? Kalau saya e...kendalanya ya, maksudnya apakah sudah tepat artinya disemua sekolah ini, sudah e...tepatkah menyampaikan SPJnya pak? Kalau tepat waktu memang jarang tepat waktu. Kalau cara penyampaiannya, penulisannya, kalau saya anggap sekarang sudah e...memenuhi standar namun tetap kita mengharapkan kepala sekolah itu tetap belajar dalam penyampaian SPJ, karena takutnya kita ada saja tiap-tiap tahun yang kurang mengerti, sehingga dalam penyampaian dala penulisan SPJ itu e...kurang maksimal, jadi tetap kit amengharapkan kepala sekolah itu e...dalam penyampaian penulisan administrasinya harus benar-benar teliti dan e...bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan bagus sehingga dalam pemeriksaan kita tidak lagi ada perubahan. Mungkin itu.

6. Baik, kami lanjut pak! Bagaimanakah upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten pak dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak? Apa upaya-upaya pak dari dinas dari tim sendiri pak?

Jawab:

Kalau upaya-upaya itu sudah jauh, terutama selalu memimbing kepala sekolah dengan jajarannya dengan sosialisasi-sosialisasi terus bimtek-bimtek dan cara-cara membuat laporan. Kalau itu sering. Tiap tahun pasti ada. Dalam hal e...bisa meningkatkan mutu

pelaporan, harus ada pembimbing tiap tahun nya itu, tiap tahap kala adakepala sekolah yang bertanya dan ada yang kurang mengerti.

C. Aspek Akuntabilitas Manfaat

1. Baik, kami lanjut pak! Ee...apakah keberadaan dana Bos jenjang SLTP/SMP sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah pak?

Jawab :

Kalau dibilang mampu meminimalisir angka putus sekolah, saya rasa tujuan ini bukan kesana. BOSDA ini dalam rangka pembantuan dana operasional untuk operasinya jalannya e...pembelajaran. Jadi bukan e... kepada putus sekolah. Jadi ini dana untuk sekoah itu bisa melayani e...pendidikan kita.

2. Baik pak kami lanjut pak! Apakah pak keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau non pendidik yang berstatus tenaga honor pak?

Jawab :

Pertama sebenarnya dana BOS ini bukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru pendidik dan tenaga kependidikan. Dana BO untukS ini untuk dana BOS pemerintah daerah, ini sebenarnya nya untuk e...operasional jalannya e...pembelajaran di sekolah. Jaddi tidak ada sekolah itu bilang tidak mampu dalam e...mengelola apa..dalam kekuarangan-kekurangan terutama alat tulis menulis, alat pembelajaran, sehingga kita e...membantu mereka untuk mengarahkan ke saana. Bukan untuk kegiatan guru. Namun dana itu juga bisa terutama guru-guru honor yang mengajar membantu sekolah yang e...guru-guru kurang di daeah, terutama di daerah yang pedalaman, didaerah tertinggal, banyak sekali diwilyah 3 itu dalam arti kekurangan.

3. Baik pak...kami lanjut pak! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah pak?

Jawab:

Ee...harusnya dana ini memang harus mampu memenuhi kebutuhan operasional peningkatan guru, jadi di harapkan dana BOS tersebut istilah untuk supaya e...dana ini bisa membantu operasional dia juga dapat meningkatkan kinerja guru-guru dalam proses belajar mengajar. Harusnya memang mampu dia e...apa tanda-tanda pembelajaran itu.

4. Baik pak kami lanjutkan pak! E...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran?

Jawab:

Dari segi operasionalnya kalau saya melihat relatif, tergantung dari situasi di sekolah itu sendiri. Tapi ada yang mampu meningkatkan banyak. Cuma e...sampai ke tingkat nasional. Begitu juga guru. Mungkin minta maaf pak saya sedikit bertanya ulang pak, apakah keberadaan dana BOS sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional. Dengan adanya dana BOSDA ini pasti mampu. Jadi kepala sekolah pintar-pintar membuat RKASnya mengingat apa-apa yang dibutuhkannya harusnya mampu, kan dana itu untuk mengarah ke sana.

5. Baik kami lanjut pak! E...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah?

Jawab:

Seharusnya itu, tapi relatif tergantung dari e...situasi sekolah itu sendiri. Karena sekolah-sekolah yang di pedalaman yang tinggal diperbatasan itu agak sulit, tetapi kita masih ada, masih ada sekolah yang mampu meningkatkan itu. Terutama kita saja yang sering juara-juara di tingkat provinsi, dan nasional kita anak-anak kita sudah sampai di daerah-daerah pedalaman. Maklumlah kita sudah guru kurang, daerah e...apa lagi terpencil, transportasi yang menghambat kita juga karena situasi kondisi kita berpariasi daerah kita yang di pedalaman itu tertinggal, di perbatasan yang sangat jauh.

Lampiran 2.2

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ahkmad, S.IP.M.Si
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan/Manajer BOS Daerah
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2016

A. Aspek Akuntabilitas Prosedur

1. Bagaimanakah prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS pak jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Baik terima kasih saudara Lisran ee...dengan penelitian mengangkat masalah akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di Kecamatan Sembakung ya. Jadi kalau kita lihat proses atau mekanisme dari pencairan dana BOS untuk SLTP ya...aanu SMP lah ya maksud SMP ee...dana BOSDA itukan ee...rencana kegiatannya ada di...ada di...ya baik maaf saya ulang pak Lisran! Jadi kembali lagi untuk mekanisme prosedur pencairan dana BOSDA bahwa dana inikan memang tercantum dalam RKA atau DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun 2015 lalu ya maupun tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam proses pencairannya itu sendiri yang tahap satu itu memang sekolah harus membuat sebuah rencana kegiatan sekolah atau RKAS atau RAPBS juga itu hampir sama. Intinya terkait tergantung berapa jumlah yang ia terima. Nah... dari data jumlah yang diterima itu tentunya sekolah harus tau jumlah murid-murid yang ada di sekolah itu. Itulah dasar dia menerima dari pada beberapa banyaknya dana yang akan diterima oleh sekolah masing-masing. Nah...dari jumlah yang akan diterima tentunya sekolah itu tadi membuat Rencana kegiatan Anggaran sekolah dalam satu tahun. Nah...itu tahap awal, sehingga dengan adanya itu secara otomatis nanti di sampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini PPTK yang menangani kegiatan itu, aa... setelah itu nanti PPTK mengajukan ke bendahara, bendahara untuk menyampaikan atau mengajukan dari pada pencairan dana triwulan yang pertama, nah...itu. Jadi besaran itu tentunya dari jumlah siswa kali nilai jumlah nominal berapa dalam setahun di bagi empat. Itulah yang akan dia terima dalam triwulan satu. Itu mengenai proses pencairan. Setelah itu nanti bendahara memproses tentunya dengan segala dokumen yang harus disiapkan ya intinya terbitlah yang namanya pokoknya yaitu tadi ya yang namanya SPM, terus SP2D, itulah proses itu sehingga nantinya setelah itu nanti dan itu masuk ke rekening Dinas Pendidikan dari DPKAD atau BUD di Kabupaten Nunukan masuk ke rekening dinas setelah itu dari dinas nanti menyalurkan ke sekolah sesuai dengan rekening sekolah masing-masing yang ada di dalam di bank di wilayah Kabupaten Nunukan.

2. Baik pak saya lanjut pak! Ee...bagaimanakah pak prosedur atau mekanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah pak terhadap penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan pak, menyangkut masalah pertanggungjawabannya pak?

Jawab:

Nah...terkait dengan pertanggungjawaban otomatis bagaimana apa yang mereka sudah terima pada triwulan pertama tadi. Tentunya sekolah mengelola dana itu dengan baik ia kan...? Dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibuktikan dengan kwitansi dan nota-nota serta daftar honor dan SK dan sebagainya artinya berkas-berkas pertanggungjawaban yang harus di lengkapi oleh sekolah. Ya bapak tau sendiri apa sih dokumen dari pada pelaporan pertanggungjawaban ya macam-macam bentuknya. Nah tatkala itu data penerima honor haruslah di lampiri SK dari kepala sekolah lalu apa ya kan... selaku apa, berapa besar honorinya harus di lampirkan surat keputusan kepala sekolah. Nah kalau misalnya pembelian barang khususnya kwitansi dan nota harus di lampirkan termasuk pajak-pajak yang harus, nah...tatkala berkas dari semua penggunaan keuangan yang sudah dibuat oleh sekolah tentunya sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada triwulan satu tadi itu ke Dinas Pendidikan dalam hal ini melalui PPTK. Nah... dalam PPTK itu sendiri juga itu ada di dalam pengelolaan dana

BOS dari Dinas Pendidikan ada yang namanya Tim koordinasi. Tim koordinasi inilah yang nanti membantu PPTK itu bagaimana laporan pertanggungjawaban sekolah yang sudah di buat itu apakah sesuai atau tidak, inilah yang membantu memverifikasi laporan pertanggungjawaban itu. Itu yang kita lakukan.

3. Baik pak...kami lanjut pak! Apakah sejauh ini pak proses pencairan dana BOS jenjang SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) BOS?

Jawab:

Saya rasa kalau pencairan itu mekanismenya kan sudah jelas, harus bukan lagi sudah harus mengacu pada SOP. SOP disini tentunya ketentuan-ketentuan tentang sebuah pencairan dari pada keuangan daerah, keuangan negara, keuangan khususnya keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan itu kan sudah pasti melalui mekanisme sesuai dengan SOP yang ada. Tanpa dilaluinya SOP itu tidak mungkin proses...tanpa dilakukannya atau di...lakukannya prosedur tidak di lakukannya proses ngga mungkin dana itu akan cair. Jelas SOP sudah jelas dan itu sudah pasti karena ketentuan menurut aturan yang sudah ada itu yang terjadi.

B. Aspek Akuntabilitas Keuangan

1. Baik pak kami lanjut...pertanyaan pak! Jenis belanja apa saja pak yang dapat di lakukan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Kalau penggunaan dana BOS...itu ada tiga belanja yang memang bisa di akomodir melalui eee...dana BOS ya yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, ya kan? Nah akan tetapi di dalam RKA kita di dalam DPA Dinas Pendidikan yang saat ini memang yang kita alokasikan itu hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa saja. Sementara belanja modal tidak ada. Nah belanja modal ini bisa di suport melalui dana BOS yang notabenenya yang bersumber BOS pusat. Itu yang kita lakukan...di Kabupaten Nunukan.

2. Baik pak! Ee...apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi pak maupun evaluasi tentang penggunaannya dan pertanggungjawaban dana BOS SMP di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan pak?

Jawab:

Itu sudah pasti yang namanya tim koordinasi itu harus bagaimana menyampaikan harus mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah sebelum dana BOS itu cair. Tentunya terkait dengan mekanisme atau petunjuk teknis dari pada pengelolaan dana itu. Tanpa adanya sosialisasi tentunya kita mengkhawatirkan sekolah itu akan melenceng dari pada rambu-rambu yang harus di laksanakan sekolah terhadap petunjuk teknis yang nantinya harus mereka taati di dalam pengelolaan dana BOS. Itu sudah pasti sosialisasi jadi tetap kita lakukan setiap saat baik itu secara langsung kita kumpulkan dalam satu tempat di aula Dinas Pendidikan maupun sosialisasi itu dilakukan di kecamatan-kecamatan itu sudah kita lakukan. Nah terkait dengan evaluasi yang jelas di dalam verifikasi pasti ada beberapa sekolah yang memang di dalam membuat laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan...ee...petunjuk teknis. Tentunya kita verifikasi dan itu tetap kita lakukan pak ...Lisran!

3. Kami ingin tanyakan pak! Faktor apa saja yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SMP sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS di Triwulan I bulan Juni 2015 pak?

Jawab:

Saya rasa keterlambatan dari pada pertanggungjawaban dana BOS atau pencairan dana BOS untuk triwulan kedua, itu tidak karena tim koordinasi yang memang mengalami keterlambatan, tapi dari pihak sekolah sendiri yang terlambat untuk bagaimana membuat pertanggungjawaban. Perlu kita ketahui pak Lisran... tatkala kita mau mencairkan dana BOS triwulan kedua otomatis pertanggungjawaban dari pada dana BOS triwulan satu itu harus secara lengkap di sampaikan ke Dinas Pendidikan. Jadi dari jumlah misalnya di ee...di Kabupaten Nunukan khususnya yang SMP ini kan ada sekitar ambil saja 50 ya! Nah...dari 50 sekolah ini tentunya semuanya harus mereka punya laporan. Satu sekolah yang tidak menyiapkan laporan otomatis mengalami atau mempengaruhi sekolah lain yang nantinya akan juga melakukan untuk menerima itu. Kerena apa pencairan dilakukan sekaligus. Jadi pertanggungjawaban di

lakukan...sekaligus...ee...misalnya dari jumlah 50 semua harus melaporkan pertanggungjawaban. Kalau misalnya ada salah satu sekolah yang terlambat otomatis terlambat juga pencairannya dana triwulan yang kedua, itu yang angkat mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat saat ini ya memang kondisi geografis teman-teman kita yang ada di wilayah luar ya? Kaya disembakung contohnya...yaitu memang kadang-kadang kita akui bahwa Sembakung itu kan juga ada SMP satu satap yang notabene jauh dari jangkauan. Oke dia dalam membuat pertanggungjawaban yakan di dalam membuat...e...dokumen-dokumen itu terpengaruh dengan adanya infrastruktur yang ada misalnya saja ya listrik ngga nyala, listrik bisa di anukan sehingga ia harus ke kota ya kan... na...dia membeli barang harus ke kota dulu seterusnya. Terus yang sangat mempengaruhi teman-teman kita di SMP yang ada di luar sana, sehingga akhirnya juga menghambat dari pada SPJ sekolah ee...SPJ untuk tingkatan SMP dan pengaruhnya terhadap pencairan dana BOS di tingkat selanjutnya, gitu.

4. Baik pak! Ee...apakah setiap sekolah pak sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS SMP pak di Kabupaten Nunukan ini?

Jawab:

Ya itu tadi saya katakan...kalau kita bilang tepat itu belum ya terus terang kalau di...di SMP di Kabupaten Kota dan di Kota perkotaan ya itu ya kita maklum saja itu istilahnya bisa tepat waktu karena kondisi dia apa yang dia butuhkan ada, mau butuh ini ada butuh itu ada di kota...ya. Itu tadi pak Lisan yang di luar kota yang terpencil seperti di luar sana tadi ya...kan seperti SMP daerah Tepian misalnya SMP Satap itu kan jauh-jauh sekali jangkauannya, itulah yang memper...apa mempengaruhi pembuatan SPJ-SPJ yang akan disampaikan ke Dinas Pendidikan. Itu yang jelas keterlambatan itu pengaruhnya dari sekolah-sekolah yang memang notabene berada di luar sana karena letak geografis dimana mereka ada kesulitan-kesulitan tertentu infrastruktur, termasuk listrik dan apa sebagainya yang pernah kami sampaikan tadi itu kurang tersedia disana.

5. Baik! Ee...bagaimana pak upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten pak dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Yang jelas...kita menghendaki adanya pengelolaan dana BOS yang akuntabel di setiap sekolah. Itu sudah kewajiban kita ya...kan...untuk mengharapkan adanya itu. Nah...tentunya upaya-upaya yang kita lakukan ya itu tadi sosialisasi yang secara detail. Bagaimana sih pengelolaan yang sebenarnya, tentunya yang di bilang akuntabel di sini itu kan mereka ya...kan... tepat sasaran ya...kan, tepat waktu ya kan, tepat...ee...manfaat dari segi manfaat juga pas semuanya pas dalam arti itu. Jadi pengelolan mulai penerimaan ya kan...pelaksanaan pengelolannya tepat, pembelanjaan pun tepat, sesuai dari petunjuk teknis yang ada ya kan..., pelaporannya pertanggungjawabannya pun tepat sesuai dengan mekanisme atau sesuai tepat peraturan ee...pengelola keuangan daerah ya kan... penyampaian tepat waktu. Nah inilah yang kita anggap akuntabel-akuntabel di dalam pengelolaan dana BOS di sekolah itu. Yaitu...itu yang jelaskan harapan-harapan kami di Tim Koordinasi selalu-selalu mengharapkan adanya itu sehingga tetap sosialisasi itu yang selalu kita sosialisasi yang selalu kita berikan kepada mereka aa...sehingga harapan kita akuntabilitas ini bisa terwujud...begitu.

C. Aspek Akuntabilitas Manfaat

1. Baik pak kami ingin tanyakan dari sisi manfaat pak! Apakah keberadaan dana Bos jenjang SMP pak sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah di sekolah-sekolah pak?

Jawab:

Ya...yang jelas kalau kita melihat apa sih tujuan dari pada diberikan dana bantuan operasional sekolah. Ini tidak lain adalah untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa sekolah dengan gratis. Dengan adanya sekolah gratis otomatis itu sangat mempengaruhi juga anak-anak yang akan bersekolah, yang tadinya tidak mampu dan dia harus membayar...sebelum ada dana BOS ya? Dia harus membayar karena operasional sekolah untuk operasional dengan adanya operasional sekolah dari bantuan pemerintah itu sekolah gratis mereka ngga bayar, itu dampaknya memang sangat luar biasa terhadap ee...peningkatan atau pengurangan dari pada anak putus sekolah. Itu sudah jelas!

2. Baik pak ee...kami ingin tanyakan pak apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidiknya pak dan non pendidik yang berstatus tenaga honor pak?

Jawab:

Kalau kita lihat...ya kan untuk peningkatan kesejahteraan...ya...dinamakan sejahtera itu kan cukup ya...Kalau saya lihat tenaga pendidik kita ini Alhamdulillah sudah cukup, cukup dari pada tunjangan-tunjangan yang dia terima . Dan itu juga dana BOS tidak boleh diberikan kepada guru-guru khususnya pegawai negeri yang notabenehnya dijadikan tugas pokok mereka. Aa...itu tidak...tidak terpengaruh sekali kalau kita untuk pegawai negeri guru khususnya, Akan tetapi ini sangat berpengaruh terhadap guru atau tenaga kependidikan sifatnya honor di sebuah sekolah. Kenapa? Memang salah satu sumber dana yang diberi bisa membantu atau membiayai atau menggaji guru-guru yang honor atau tata usaha honor itu adalah melalui dana BOS itu yang sangat dirasakan sekolah, itu!

3. Baik pak ee... terkait tadi tentang kesejahteraan pak kami ingin menanyakan apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru pak di sekolah pak?

Jawab:

Saya rasa kembali lagi kinerja guru bukan hanya dipengaruhi oleh kesejahteraan. Jadi saya garis bawahi disini dana BOS bukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam upaya peningkatan kesejahteraan bukan! Akan tetapi dan BOS sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru tatkala sebuah sarana dan prasarana itu terpenuhi, itu yang harus kita garis bawahi. Jadi bukan semata-mata kinerja guru di pengaruhi adanya kesejahteraan. Apalagi kalau pegawai negeri tadi ngga ada pengaruh sama sekali, hanya saja yang sangat berpengaruh disini tatkala guru membutuhkan sebuah sarana atau prasarana untuk pembelajaran itu tersedia di sekolah itulah yang akan bisa meningkatkan dari pada kinerja guru, sehingga guru termotivasi juga untuk bagaimana mengajar dengan peralatan yang tersedia itu. Itu yang jelas yang harus kita garis bawahi bukan hanya kesejahteraan dapat meningkatkan tapi sarana atau fasilitas yang ada di sekolah sangat berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam memberikan materi pembelajaran.

4. Baik pak kami lanjut ak ee...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran pak?

Jawab:

Kalau kita lihat, sekolah yang notabenehnya besar ya, sekolah yang tadinya besar, itu sangat cukup dari pada anggaran yang dia terima malah kadang-kadang kualahan apa mau di pakai apa aa... dengan dengan ee...mekanisme atau petunjuk teknis yang memang sedikit ya tidak bisa sembarangan juga kadang-kadang sekolah yang besar itu bingung, mau menghabiskan kadang-kadang bingung. Kita lihat saldo akhir tahun masih sisa. Akan tetapi bagi sekolah yang kecil ya...yang terutama yang di luar sana itu masih belum...masih belum ee...sesuai dengan harapan sekolah untuk bagaimana operasional setelah itu bisa berjalan dengan baik, karena terus terang ya kalau jumlahnya murid sedikit ya kan ya berapa sih dia terima dengan mungkin bisa membayar honor guru yang honor-honor tadi belum lagi untuk ini untuk itu, masih banyak yang kita rasakan kurang di luar sana. Kalau yang di dalam kota saya yakin itu hampir semua sekolah itu cukup untuk dana BOS yang dia terima. Itu perbedaannya, maka kami terus terang dalam kesempatan ini juga tolong di angkat juga bahwa penerimaan dana BOS itu harus kita klasifikasikan sesuai dengan regional atau letak geografis wilayah kita. Contoh! Misalnya di Nunukan perorang misalnya misalnya saja ya untuk SMP itu misalnya Rp.750.000,- misalnya ya... Saya berharap untuk wilayah yang ada di dalam bukan lagi Rp.750.000,- tapi Rp.1.000.000,-. Karena kembali lagi kalau kita lihat dari pada harga yang ada di dalam dengan harga yang ada disini ya...jelas jauh, mereka mau beli barang harus ke kota karena dana yang di terima sama dengan jumlah kecil ya kan... nominal...nominal yang diterima sama otomatis ya...nah tapi kalau misalnya dari pemerintah itu ada kebijakan tatkala dana BOS yang mereka terima di wilayah dua atau tiga disana itu lebih besar, ya saya rasa itu bisa menyeimbangi kebutuhan yang ada di sekolah itu.

5. Baik pak ini...kami lanjut pak..apakah keberadaan dana Bos sudah mampu pak meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah pak khususnya di sekolah-sekolah pak?

Jawab:

Ya...saya rasa...kembali lagi dana bantuan operasional kita berharap...kita berharap bahwa tentunya ada manfaat, ada dampak, ada output maupun outcome yang lebih tepat outcomenya dampak dari pada diberikannya dana BOS. Harapan kami tentunya ee...dengan BOS yang cukup di sekolah dengan tersedianya semua sarana yang ada di sekolah ya kan...ya saya berharap mutu itu akan juga terjamin cukup dengan peningkatannya. juga sudah di suport dengan dana BOS mutunya ngga akan meningkat. Nah...saya rasa sekolah berkeinginan yang sama bahwa berkeinginan untuk bagaimana mutu di sekolah itu bisa meningkat. Nah tentunya ya...kan...dengan dimanfaatkannya dikelola dngan maksimal mungkin ya...saya yakinlah ya...kan. guru yang honor terjamin ya kan... terus anak yang tidak mampu bisa sekolah misalnya kan itu bisa juga digunakan untuk pembelian atau transport anak-anak sekolah ya kan...yang di daerah-daerah luar sana tu kan mungkin transport naik ketinting pun, boleh itu di biaya oleh dana BOS kita itu. Jadi intinya yang jelas dampak dari pada adanya dana BOS itu sangat membantu untuk bagaimana peningkatan mutu pendidikan itu selalu didepan itu yang diharapkan oleh pemerintah, minimal seperti itu. Yang pertama tujuan itu bagaimana anak-anak itu yang usia sekolah bisa sekolah. Yang kedua terkait dengan itu juga, itu juga di dalamnya berjalan dengan ee...bagaimana mutu pendidikan itu tetap bisa meningkat dengan adanya dana BOS, itu...pak Lisran.

6. Baik pak ee...saya pak sedikit tertarik tadi masalah SOP pak saya tambahkan, apakah pak Dinas Pendidikan pak sudah melakukan pak atau membuat SOP khususnya dana BOS pak?

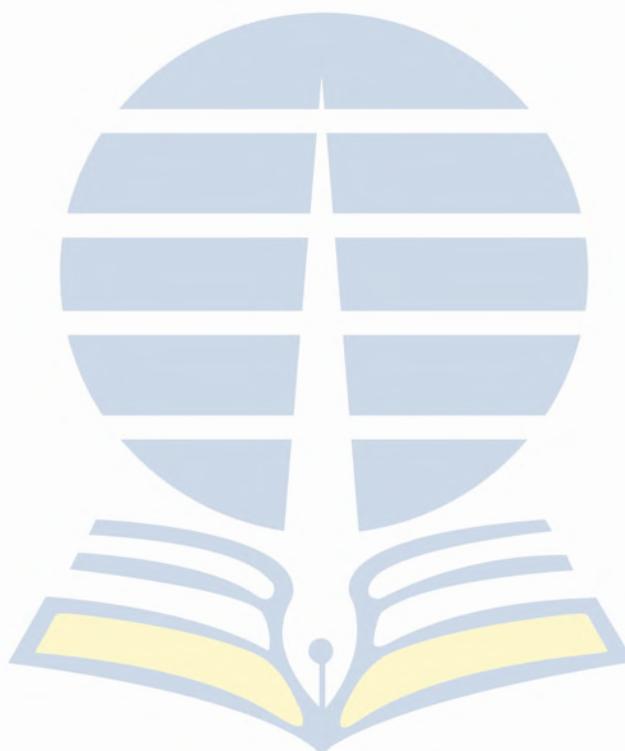
Jawab:

Saya rasa kalau SOP itu sudah jelas ya...kalau kita, kita di dalam rentetan di dalam anu...di dalam di dalam apa namanya prosedurnya, ya itu memang secara tertulis kita ngga mencantumkan, akan tetapi secara tidak langsung kita itu memang sudah melakukan SOP itu...gitu loh. Kalaupun kita maupun cantumkan mekanisme seperti SOP-SOP yang lain bisa saja, ya...sekolah misalnya membuat yang ini disampaikan kepada ini bisa saja dan seterusnya nah itu bisa kita tuliskan. Akan tetapi kembali lagi secara tertulis memang kita belum menyiapkan. Tetapi kembali lagi prosedur itu tentunya sudah ada di dalam juknis kelihatan juga. Jadi di juknis itu sudah mewakili SOP dari pada bagaimana prosedur atau mekanisme ya kan...pengelolaan dari pada pencairan dari...mulai dari pengusulan ya...kan, pencairan sampai ke pertanggungjawaban yang ada dinas. Itu lah yang kita pegang, jadi SOP secara rinci khusus SOP ini ngga ada. Maka tadi mekanisme sudah kita lakukan sesuai dengan SOP yang ada.

7. Baik pak mohon maaf pak sedikit kami tertarik tadi pak untuk yang masalah pak triwulan pertama pak. Ditahun 2015 memang pak terjadi keterlambatan pencairan kesekolah-sekolah pak, maksud kami pak mengapa pak keterlambatan itu terjadi pak, saya bukan bicara masalah Triwulan II pak , tapi triwulan star pertama pak ini terjadi keterlambatan di bulan Juni pak apa yang mempengaruhinya pak?

Yah...itu ya...itu memang saya rasa seperti ... jangankan kemarin yang saat ini, ini seharusnya bulan...paling ngga tidak bulan...Pebruari kemarin ini kadang masih belajar. Itu sudah. Bahkan ssat ini belum cair, seharusnya sudah cair. Bapak lihat kondisi dinas sampai saat ini belum cair apa pengaruh apa mengapa? Pertama...ya...kan...ini kita penunjukkan PPTK, PPTK yang saat ini ada di Dinas Pendidikan saat ini tidak sesuai dengan tupoksi yang ada di Dinas itu sendiri. Contoh ini seharusnya PPTK yang menangani untuk BOS itu harus ada di bidang masing-masing. Bukan yang lain orang lain menangani lain itu diibidang itu...itu nah sekarang mulai kita atur itu. Itu yang pertama, yang kedua pengaruhnya di dalam proses pencairan ini kan harus ada dasar-dasar yang bisa dipakai untuk menaungi atau mendasari pencairan itu Contoh juknis harus kita buat ya...kan, SK tim harus kita buat, Nah kalau ini semua inikan perlu waktu. Juknis yang harus menetapkan Bupati... mekanismenya ini bapak tahu sendiri, tatkala mekansime pembuatan juknis ini ya kan...dari kita sudah kita secara detail, kita seleksi ya...kan..., kita verifikasi kalimat demi kalimat ya kan yang harus mengacu kepada aturan pengelolaan keuangan kalau sudah tepat kita baru berangkat menuju ke

SK yang akan di bertbikatn berupa SK peraturan bupati...bukan hari ini dinaikkan ke atas hari ini cair anu hari ini apa...terbit. Ada protap yang harusnya ini sesuai dengan meknaisme. Dari protap ini sendiri terus terang naik ketas kadang ada si A, ada si B ngga ada, dan seterusnya belum lagi yang ee...pimpinan pak Bupati mungkin lagi ngga ada intinya gitu, proses dari pada dokumen-dokumen itu ya mengakibatkan keterlambatan dari pada pencairan triwulan yang pertama, seperti yang saat ini anda lihat sendiri Dinas Pendidikan masih belum ya itu tadi masih bergulir tentang juknis kita masih mengkonsep, kita masih dan seterusnya... itu.



Lampiran 2.3

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Sapto Hari Sampurno, M.Pd
 Jabatan : Kabid Pendidikan SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Hari/Tanggal : Jumat/18 Maret 2016

A. Aspek Akuntabilitas Prosedur

1. Yang pertama yang ingin kami tanyakan! Bagaimanakah prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Terima kasih ya adalah satu pertanyaan yang sudah dilandaskan prosedur mekanisme awalnya itu kita pendataan dulu. Pendataan untuk mekanisme pencairan itu diawali dari data penerima. Nah...data penerima itu di ambil dari data pokok pendidik. Nah setelah cocok data pokok pendidik itu kita ambil, kemudian di dalam mekanisme prosedur atau pencairan itu adalah melalui juknis yang kita buat, yang salah satunya adalah dasar hukumnya untuk mencairkan untuk dana BOS dengan petunjuk teknis yang sekolah atau penerima sekolah satuan pendidikan yang kita ambil salah satunya adalah tadi, melalui dana BOS. Data pokok pendidik disitu kita lihat besaran atau jumlah penerima dana BOS untuk jenjang SLTP atau SMP. Itu adalah mekanisme prosedur seluruhnya adalah melalui tadi. Ada satu dasar hukumnya yaitu melalui juknis yang kita buat tahun 2015-2016. Perhitungannya kan 2015-2016 tahun pembelajaran itu mungkin jadi prosedur melalui mekanisme petunjuk teknis tadi. Landasan-landasan kita, mungkin itu, apalagi yang.

2. Baik pak kami lanjutnya! Ee...bagaimanakah prosedur atau mekanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah pak terhadap penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Untuk prosedur pertanggungjawabannya salah satunya mendasar lagi terhadap dana BOS yaitu dengan mekanisme tadi mengambil dari data Dapodik yaitu besarnya kalau untuk SMP besarnya adalah untuk dana BOS daerah itu adalah 25 ribu per siswa. Nah...pertanggungjawabannya itu melalui tadi seperti salah satunya adalah kita harus menyesuaikan dengan RKASnya dua. RKAS ini adalah yang buat sekolah dari data yang ada kemudian dari, kemudian dari anggaran di berikan 25 ribu per siswa. Nah dalam hal ini pertanggungjawabannya seperti tadi dikatakan sesuai petunjuk teknis yang ada item-item apa yang ada yang harus kita belanjakan sehingga kita pertanggungjawabkan. Salah satunya yaitu dari belanja pegawai, barang dan jasa, dan kemudian yang kedua belanja jasa dan barang. Nah 2 item itu ada di dalam e...lingkup petunjuk teknis. Nah sekarang itu untuk penggunaan pelaporan tadi sekolah mempertanggungjawabkan apa-apa yang dipergunakan dalam e...adaptasi dana yang diberikan. Nah, pertanggungjawabannya itu adalah pertriwulan. Di sekolah sendiri mempertanggungjawabkan kemudian nanti setelah itu diserahkan kepada Dinas Pendidikan, ia dalam hal ini adalah PPTK yang menangani dana BOS daerah.

3. Baik pak kami lanjut pak! Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur atau SOP BOS pak?

Jawab:

Nah, saya kira itu tadi...juknis sudah mengacu, karena kita tidak bisa lepas dari juknis atau kesepakatan atau petunjuk teknis yang kita buat. Yaitu salah satunya adalah perjanjian standar operasional prosedur bagaimana menggunakannya, kemudian mencairkannya, kemudian yang ketiga itu mempertanggungjawabkannya.

B. Aspek Akuntabilitas Keuangan

1. Baik pak, kami ingin tanyakan pak! Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Seperti tadi halnya saya sudah kasih gambaran tadi bahwa pertanggungjawaban itu ad 2 item artinya penggunaannya yaitu belanja pegawai, kemudian belanja barang jasa dan belanja barang dan jasa. Dua, sebenarnya intinya 2 itu tadi di dalam belanja pegawai ada beberapa item disitu yang terutamanya peningkatan mutu tenaga pendidik dan non pendidikan, itu belanja pegawai. Nah, disitu sebenarnya atau kita sampai saat ini belum ada edaran berapa kisarannya, tapi disitulah kita uraikan beberapa di dalam juknisnyaitu, apa-apa yang boleh dipergunakan dalam belanja pegawai, kemudian yang kedua itu belanja barang dan jasa itu sudah juga kita tuangkan juga di dalam juknis karena nominalnya agak...ya bukan terlalu besar ya saya kira sedang, cukuplah entar nanti tidak bisa menggunakan belanja barang dan jasa tadi terlalu signifikan. Kemungkinan ada beberapa misalnya penggunaan pembelian laptop dibatasi i dalam satu tahun itu hanya 1 laptop salah satunya item yang ada di dalam juknis. Mungkin itu.

2. Baik pak kami lanjut pak! Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi tentang penggunaannya dan pertanggungjawaban dana BOS jenjang SLTP/SMP di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan pak?

Jawab:

Kalau untuk anggaran 2015 ya kita lakukan untuk 2016 ini kan masih dalam proses berjalan jelas akan kita di dalam skejul di dalam program rencana dan kegiatan itu ada sosialisasi kemudian kita salah satu dalam sosialisasi itu kan salah satunya adalah memberikan pembinaan di dalam pertanggungjawaban atau penggunaan dana BOS yang di cairkan itu. Nah, kalau setiap kecamatan-kecamatan akan kita lakukan di kecamatan. Kalau disini kan kan bagi beberapa. Sebenarnya kit abagi kepada UPTD, ada yang lebih, lebih signifikan kita lakukan melalui UPTD Dari setiap UPTD, kalau Nunukan itu kan sudah 2 UPTD kita kumpulkan kepala sekolah kemudian kalau Sebatik 2 UPTD, Sebuku 1, Sembakung 1, Lumbis 1, Krayan 1. Untuk Semenggaris yang, yang sampai saat ini agak kesulitan untuk mensosialisasikan, tetapi untuk tahun ini kita usahakan akan tetap bukan hanya melalui UPTD tetapi kita akan coba e...Semenggaris salah satunya.

3. Baik, kami lanjutkan pak! Pertanyaannya bahwa faktor apa yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SLTP/SMP sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS pada Triwulan I pada bulan Juni 2015 ini pak? Maksud kami pak 2015 itu pernah terjadi keterlambatan pembayaran, menurut bapak gimana pak?

Jawab:

Keterlambatan itu kemarin yang pertama yang saya lihat yang jelas salahsatunya adalah pembuatan SK dan juknis. Artinya SK tim, kemudian SK penerima itu yang kemarin yang mengalami keterlambatan dan yang kedua adalah juknisnya petunjuk teknis di dalam penggunaan dna pertanggungjawaban keuangan dana BOS itu yang pertama ku lihat kendalanya yang kedua itu salah satunya adalah keterlambatan dalam hal ini adalah masalahnya bukan terlambat sih, seperti kalau SMP yang di daerah-daerah yang jauh biasanya agak kesulitan untuk mencairkan itu. Dalam artian begini etkos yang dipergunakan untuk mengambil anggaran misalnya Tau Lumbis atau misalnya Krayan, Krayan Selatan itu agak kesulitan. Bukan berarti terlambat, tetapi ketika mencairkan dia mulai hitung-hitung tadi. Misalnya anggaran dia terima adalah 6 juta tetapi ketika dia mau keluar mengambilnya habis operasionalnya adalah lebih dari 6 juta misalnya Tau Lumbis. Tau Lumbis SMP berapa SMP 2 kaya Krayan Selatan kebanyakan seperti itu tadi etkos untuk pengambilan oerasional dana BOS karena tadi ya perorang 25 ribu beda dengan BOS pusat, kalau BOS pusat itukan pukul rata. Kalau sekolah kecil itu 60 siswa tetapi kalau dana BOS daerah itu di hitung persiswa . Kalau misalnya siswa 5 yaitu tadi. Nah seperti tadi ada salah satu kendala pencairan tadi adalah salah satu adalah jarak tempuh.

4. Baik pak kami lanjutkan pak ! Apakah pak setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ di dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Tujuh puluh %, e...60% tepat waktu, tapi 40% belum. Nah seperti tadi yang kami saran salah satunya adalah jarak tempuh, apa yang diambil untuk dibelanjakan tidak sesuai dengan pengambilan anggaran tadi. Terutama daerah-daerah yang jauh contoh Sembakung. Sembakung misalkan di transperkan misalkannya e...di BPD, BPD dia harus ngambil ke Tulin Onsoi. Nah itu salahsatunya kalau misalnya Sembakung ee...

Lumbis Ogong itu ngambilnya kan harus ke Lumbis. Dan jadwal untuk pengambilan itu untuk ada namanya BPD, BPD apa...itulah yang bis, bis keliling itu, nah itu kan terjadwal berapa mil ketika mereka turun kemudian tak terjadwalnya kadang kesulitan kemudian tadi disampaikan pertanyaannya adalah apakah tadi 60% memang daerah-daerah yang ini cepat. Sedangkan 40% untuk daerah-daerah yang jauh, karena tadi sesuai dengan keuangan yang di ambil.

5. Baik, pak kami lanjutkan! Bagaimanakah upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak? Maksud itu upaya-upaya dilakukan untuk , lebih akuntabel lagi?

Jawab:

Salah satu upaya-upaya tadi ya apa ya...kalau pak Bun apa ya? Dari pengalaman yang tadi dari hal-hal kita dapatkan kemarin, ada hal-hal yang kurang yang kita upayakan salah satunya apa, saya belum bisa memberikan apakah juknisnya harus di perbaiki karena melihat situasi dan kondisi pak apakah memang ada hal-hal teknis yang menurut bapak harus dirubah. Ya memang juknisnya sudah pas. Juknisnya persoalannya yang tadi agak kesuitan kita, kitajuga komunikasikan dengan, dengan apa , dengan bank sendiri. Salah satunya adalah kendala yang tadi bagaimana dengan daerah yang, yang, yang artinya tidak ada akses bank, sarana bank, kita upayakan kita minta kemarin salah satu kepada BPD itu adalah untuk bisa mengakomodir untuk dimana sekolah-sekolah yang jarak tempuhnya tidak bisa terjangkau. Itu salah satu untuk, untuk mencegah pengelolaan dana BOS, nah BOS sehingga apa yang yang ketika pengambilan pencairan dana BOS itu, e...tidak memerlukan etkos yang tinggi.

C. Aspek Akuntabilitas Manfaat

1. Baik, kami ingin tanyakan pak dari sisi akuntabilitas manfaatnya! Apakah keberadaan dana Bos jenjang SLTP/SMP sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah pak, menurut bapak?

Jawab :

Saya kira sudah, untuk minim angka putus sekolah itu sudah...hanya sekarang e...apa ya...kalau dilihat dari dalam etkos kemudian dana BOSDA daerah, BOS nasional, BOS daerah untuk SMP itu sudah cukup, bahkan lebih kalau memang bisa di kelola dengan baik, kalau memang meminim angka putus sekolah itu memang tapi ada satu fenomena yang agak aneh juga. Nah seharusnya kalau memang dilihat dari nominalnya yang diberikan kepada staf tadi 60 per siswa di kalikan 1 juta pertahun lalu kita ada berupa ini tahan. Itu siswanya berapa pertahun 300 ribu. Nah 300 ribu 25 ribu dalam artian di katakan putus sekolah kan di dalam anggaran itu, misalnya orang tak mampu pun ada anggaran. 3 Program Indonesia Pintar, sekarang kalau misalnya di dalam daerah itu sampai anak putus sekolah nah itu kan hal yang menjadi pertanyaan. Padahal sekolah itu sendiri anggaran-anggaran beasiswa miskin ada, baik beasiswa dari pemerintah daerah ada, sekarang persoalan memang fenomena muncul, salah satu contoh misalnya kenapa yang ikut ujian di di sekolah formal lebih banyak yang di paket B ini untuk SMP. Contohnya yang di daerah-daerah dalam misalnya di Binter di mana di di Tau Lumbis yang formalnya pesertanya lebih sedikit dari paket B nya. Misalnya formalnya itu ada 10 paket B nya itu lebih dari 10. Nah persoalannya ini bukan masalah tadi ngga BOS tadi, bukan tetapi persolannya adalah ngga tau fenomenanya dimana. Kalau sasaran untuk ke sekolah formal cukup sudah cukup saya kira sudah cukup. Karena anggaran-anggaran untuk prestasi ini kan sudah mencukupi. Nah sekarang persoalannya fenomena yang tadi, angka putus sekolah, kalau putus sekolah tidak ada sebenarnya. Kalau dilihat dari anggaran yang ada. Nah pertanyaannya kenapa kok sampai ada putus padahal alokasinya cukup besar.

2. Baik pak kami lanjut pak! Apakah pak keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau non pendidik yang berstatus tenaga honor pak? Maksudnya guru honor dan TU nya?

Jawab :

Ya seperti tadi makanya alokasinya untuk dana BOS pusat dan BOS, BOS daerah sudah dialokasikan BOS daerah. BOS daerah itu kan 60 % untuk belanja pegawai ya sekarang kalai dibilang cukup dan tidak...itu tergantung tadi manajemen-menajemen dari sekolah. Nah, rata-rata sekolah say atadi mengatakan kurang, padahal salahsatu tujuan subsidi

provinsi, 500 tapi tunjangan Hari Lindung 500. Nah kemudian ada salah satu syarat tunjangan fungsional, tapi tunjangan fungsional itu agak ketat untk kriterianya. Nah di dalam hal ini kan dana BOS 60% ini dana BOS daerah.

3. Baik pak...kami lanjut pertanyaannya pak! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah pak? Ini menyangkut maalah kinerjanya pak!

Jawab:

Itu tadi salah satunya kalau untuk meningkatkan pasti meningkat, kalau misal di beberapa sekolah yang memang kepala sekolahnya bisa memenets dengan baik. Tetapi ada sekolah ada beberapa sekolah yang tidak bisa memenets dengan baik anggaran BOS pusat tadi. Ya seperti tadi karena apakah tidak ada kompetensinya kepala sekolah, atau bagaimana. Tapi kalau tidak ada kompetensinya kepala sekolah kenapa? Misalnya anggaran 100 lebih kok bisa di dalam peng SPJ an apakah itu SPJ benar atau tidak tetapkan habis. Untuk pengelolaan kesejahteraan tadi di bagi-bagi kinerja guru. Contoh misalnya kalau kita lihat sekolah yang paling terendah itu rata-rata kan 60 juta. Ia kan? Enam puluh untuk mengoperasikan 60 juta kemudian di tambah dengan BOS daerah sekitar tergantung ininya 310-an. Nah 70-an dalam hal ini kan untuk anak-anak yang misalnya di daerah-daeah pedalaman daerah ini kan tadi ada rata-rata dapat PIP (Program Indoensia Pintar) atau BSM (Bantuan Siswa Miskin). Nah artinya dalam hal ini artinya dalam pengelolaan kinerja guru dan guru kepala sekolah saya kira ya, ya tergantung dari sekolah tadi. Ya kita terbuka saja bahwa sekarang ini banyak kepala sekolah rata-rata terbuka dengan keuangan BOS tadi. Hanya segelintir sekolah saja beberpa sekolahsaja yang mendapatkan sekitar 60% lah yang bisa menstransper lebih dari itu tidak pernah transparan. Lalu dikatakan tidak ada uangnya tidak ada uangnya.

4. Baik pak, kami lanjutkan pak! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran? Maksudnya operasionalnya?

Jawab:

Ini relatif ya, relatif ssaja. Tidak bisa kita menyatakan ya...ini kuncinya relatif tergantung dari kepala sekolah-kepala sekolah kalau dibilang cukup ya ngga cukup, dibilang lebih juga ngga lebih, relatif tergantung, tergantung komitmen dari sekolah tadi. Kalau di dalam secara umumnya ya cukup, secara umum ya cukup, tetapi di dalam artian cukup standar minimalnya ngga terpenuhi. Terutama yang di daerah-daerah pedalaman tadi. Kalau di katakan keberadaan dana sudah memenuhi kebutuhan ya, yaitu tadi relatif, Kalau yang di sekolah itu bisa memenets transparans cukup. Tetapi kalau yang tidak transparan karena selama ini tidak bisa kita, ya kita hanya tau, tau gitu saja.

5. Baik kami lanjutkan pertanyaan, selanjutnya! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah? Sejauhmana dana BOS itu bisa menunjang untuk mutu pembelajaran pak? Maksud kami adalah sudah yang apakah dengan adanya dana BOS ini pak sekolah itu sudah bisa e...mengangkat namanya?

Jawab:

Ya, tadi tergantung dari, dari manajemen kepala sekolah. Ada juga kepala sekolah yang pokoknya yang penting jalan. Nah persoalan yang utama adalah ketika tadi, untuk Kabupaten Nunukan kepala sekolah pengangkatannya kan berdasarkan suku dan suka tidak suka tidak ada dasar untuk mengangkatnya kepala sekolah dan pada kepala sekolah yang diberikan sangat berat sekarang. Nah kitakan tidak perlu tidak hanya melalui dana BOS saja. Sekarang ada blokgreen yang tiba-tiba masuk melebihi dapodik. Ya kan, ya kan. Sekolah-sekolah kecil tiba-tiba masuk kerekening. Nah kalau dikatakan tadi dana BOS tadi cukup meningkatkan kalau memang di dalam proses pembelajaran yang ada, ya dari hasil oleh lomba desain ada juga beberapa daerah pedalaman yang masuk. Nah pengaruhnya salah satunya adalah pengiriman adalah menggunakan dana BOS juga. Dan BOS ini dan yang di Lumbis Ogong yang masih ada ada masuk, Sembakung ada yang masuk, salah satunya kan pengaruhnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satunya adalah melalui dana BOS. Tergantung dari kembali lagi tergantung dari satuan pendidikan dana rata-rata pendidikan kepala sekolah. Nah selama ini kepala sekolah yang tadinya tanpa pokoknya juga diangkut begitu saja. Kemampuan kompetensi para kepala sekolah tidak pernah diperhitungkan. Ada beberapa sekolah yang rata-rata dari kepala sekolah yang tidak...ya... tidak punya

berkompetensi, kemudian kita angkat menjadi kepala sekolah. Nah kita berharap untuk tahun depan 2016 ini kita mencoba salah satunya kepala sekolah yaitu di yaitu dengan rekrutmen kepala sekolah sesuai dengan aturan. Paling tidak sudah memiliki S1 sudah bersertifikasi. Sudah...dari salah satunya. Coba dari beberapa sekolah yang ada di setiap kecamatan, itulah adalah salah satu yang mungkin kita kembalikan, upaya-upaya tim koordinasi Kabupaten, bukan tim kerja tetapi harus sinergis dengan bidang-bidang yang apa dengan kasi-kasi yang lain. Untuk mengupayakan dana BOS ini, salah satunya adalah tadi pengangkatan kepala sekolah. Saya tertarik pak apakah juknis ini sama statusnya dengan SOP kami, tadi ternyata tadi apakah juknis ini sama statusnya dengan SOP kami kan tadi tanyakan selama ini kan e...apakah memang SOP itu sama statusnya dengan jukni pak? Ngga juknis ini kita mengarah ke SOP. Karena standar itu. Bagaimana kita membuat juknis sama dengan standar. Saya kita gini antara SOP dengan juknis itu kan hampir sama saja kalau standar operasional prosedur kalau juknisnya ini kan dari gambaran SOP ini. SOP itu kan standar operasional prosedurnya. standar operasionalnya kaya apa misalnya pendataan, kan di dalam juknisnya kaya misalnya apa ya di dalam SOP pasti akan masuk di dalam juknis. Kalau dilihat dari bobotnya juknisnya lebih, lebih luas cakupannya mencakup kalau ini SOP kan khusus saja, itu kan hanya standar operasional tetapi kalau dituangkan di dalam juknis itu lebih rinci lagi. Bagaimana pencairannya prosedurnya, bagaimana pertanggungjawabannya ada kalau SOP kan hanya garis besarnya. Apa sih yang perlu dilakukan kalau untuk mendapatkan dana BOS. Kalau itu SOP kan standar operasional prosedur, perbedaannya dalam hal ini kan misalnya kita ungkapkan melalui Dapodik. Dalam pencairan tadi SOP ada pengajuan dari kepala sekolah. Tetapi di dalam SOP inikan hanya secara umum, tetapi secara khususnya di dalam juknis. Kalau juknis itu adalah SOP juga sebenarnya. Tetapi SOP tidak bisa dikatakan juknis lo...ya, tetapi juknis pasti dikatakan bisa di katakan juknis. Karena mencakup secara khusus secarannya umum juga, tetapi kalau SOP itu kan secara umum saja.



Lampiran 2.4

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Jamaluddin
 Jabatan : Staf Bagian Pendidikan Menengah / PPTK Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Hari/Tanggal : Jumat/18 Maret 2016

A. Aspek Akuntabilitas Prosedur

1. Bagaimanakah prosedur/mechanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ?

Jawab:

Baik untuk prosedur pencairan dana BOS ee...SLTP di di...Kabupaten Nunukan, yang pertama kita melakukan beberapa hal diambil dari data Dapodik di tingkat e...sekolah kemudian UPTD dan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, kemudian data tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Bupati e...setelah itu dari data tersebut kita sesuaikan dengan dana yang mereka terima berdasarkan DIPA dan RKA dana BOS jenjang SMA...ee...SMP. Ee...Kemudian kita melakukan untuk ee...permintaan pencairan dana melalui e...bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan atau BUD setelah disetujui akan kita transfer dana langsung masuk ke rekening Dinas Pendidikan dan dari rekening Dinas Pendidikan langsung di transfer ke rekening sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi mekanismenya kita hanya mengajukan nomor rekening dan BPD langsung mentransfer...ya mungkin itu...pola pencairan.

2. Baik pak...e...lanjut kami ingin tanyakan! Bagaimanakah prosedur/mechanisme penyampaian pertanggungjawaban kepala sekolah pak terhadap penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Ya...untuk pelaporan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan yang pertama sekolah melakukan...ee...pelaporan sesuai dengan RKAS yang mereka telah...e...rapatkan bersama dengan Dewan Sekolah termasuk Komite Sekolah di dalam Ya. Ee...setelah mereka setuju bersama dan mereka melakukan pembelanjaan dan membuat pelaporan...e...kemudian laporan tersebut diserahkan ke UPT setempat dan UPT melanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, ya.

3. Baik pak...e...kami lanjutkan kembali! Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur BOS pak?

Jawab:

Ee...sepanjang tahun 2015 dan sampai saat ini proses pencairan dana BOS sudah mengacu pada SOP dan BOS yang telah...e...kita buat bersama yaitu... e...dimana pencairan itu kita lakukan per tiga bulanan yang dikenal juga dengan triwulan.

B. Aspek Akuntabilitas Keuangan

1. Baik pak...e... kami ingin tanyakan! Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah pak terkait penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Ee... untuk jenis belanja yang dapat di belanjakan oleh sekolah di dana BOS daerah di Kabupaten Nunukan...e...kita mengacu pada RKA yang tersedia, dimana belanja yang boleh dilakukan oleh sekolah jenjang SLTP hanya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mungkin saja dana untuk belanja modal tidak ada di anggarkan.

2. Baik pak...e...pertanyaan selanjutnya! Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi pak tentang penggunaannya dan pertanggungjawaban dana BOS jenjang SMP pak di tiap-tiap sekolah yang ada di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Ee...untuk tim korrdinasi sudah melakukan tahapan-tahapan yang pertama rekonsialisasi data, ee... yang kedua melakukan sosialisasi mengenai penggunaan dana BOS...ee.kemudian dilanjutkan juga dengan monitoringdan evaluasi pengelolaan dana BOSSampai dengan pelaporan yang adasekolah baik itu melalui UPT dan langsung juga dengansekolah terkait.

3. Baik pak...ee...kami lanjut pak! Faktor apa pak yang mempengaruhi Tim Koordinasi BOS jenjang SMP pak sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana di Triwulan I pada bulan Juni 2015 pak?

Jawab:

Ee...Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada pencairan dana BOS di tingkat SLTP di Kabupaten Nunukan, yang pertama SPJ yang mereka laporkan ke kita sering terlambat. Kemudian mungkinhal ini di pengaruhi oleh faktor geografis dan ee...kemampuan dana yang mereka terima sehingga di dalam pelaporan mereka mengalami hambatan ..e..di dalam pencairan.

4. Baik pak! Ee...apakah pak setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Ee...untuk tepat waktu dalam penyampaian SPJ...e...untuk di Kabupaten Nunukankita melihat beberapa wilayah, kita sudah bagi berapa titik. Untuk wilayah Nunukan, Nunukan Selatan dan Sebatik ee...itu sudah tepat waktu. Tetapi ada berapa kepala sekolah yang mungkin...e...lambat dipengaruhi oleh faktor geografis tadi yaitu wilayah...e...Lumbis, Sembakung, Sebuku, dan Krayan yang sering menghambatdi mana di dalam pelaporan ini kita menuggunu semuanya masuk baru kita bisa proses untuk pencairan tahap berikutnya.

5. Bagaimana upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten pak dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan?

Jawab:

Ee...upaya-upaya yang dilakukan yang pertama kami melakukan pembinaan-pembinaan baik terhadap e...kepala sekolah maupun pihak UPT maupun bendahara ..e...secara langsung...e...menganai hal-hal yang penting dan wajib di lakukan oleh sekolah terutama azas akuntabilitas yaitu...e...kepalitan ..e...laporan, transparansi dan profesionalisme di dalam pengelolaan dana BOS sehingga tidak memunculkan suatu permasalahan...e...yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau juknis yang telah di tetapkan di dalamnya.

C. Aspek Akuntabilitas Manfaat

1. Baik pak...kami ingin tanyakan pak dari sudut manfaat! Apakah keberadaan dana Bos jenjang SMP sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah pak di sekolah-sekolah?

Jawab :

Ee...baik dampak dari dana BOS ini memang kalau kita lihat dari APK yang sudah diluncurkan oleh Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan...ee...sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah, tetapi juga masih juga ada juga angka putus sekolah dan ini juga sudah di akomodir oleh pendidikan non formal yaitu melalui Paket.

2. Baik...pertanyaan kami! Ee...apakah pak keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau non pendidik yang berstatus tenaga honor di sekolah pak?

Jawab :

Ee...untuk dana BOS ini...ee...berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan pendidikan yang berstatus tenaga honorarium, honorer. Untuk saat ini mungkin ...e...belum mampu maksimal di dalam meningkatkan kesejahteraan terkait dana yang kita kucurkan juga sesuai dengan kempuan daerah ...ee...kalau masuk ke sekolah apa ya...masih kuranglah kalau kita sesuai dengan standar daerah yang ada rata-rata di sekolah mereka...ee...memiliki tingkat pendidikan...ee...S1...dimana di standarisasi mereka itu minimal menerima satu juta setengah sementara dana BOS yang kita kuncurkan berdasarkan jumlah siswa yang diterima rata-rata di sekolah untuk

sekolah besar mungkin bisa mencapai delapan ratusan. Tapi kalau sekolah kecil biasanya sampai dua ratusan atau tiga ratus ribu saja.

3. Baik pak! Ee...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah pak?

Jawab:

Ya...untuk dapat dana BOS pada peningkatan kinerja guru dan non guru di sekolah...e...selama ini ...ee...guru saya lihat sudah berjibaku di dalam melaksanakan tugas mereka juga...e...tidak tergantung kepada honor yang mereka terima tapi mereka berupaya meningkatkan kinerja mereka, tapi saya lihat dana BOS ini juga sudah mampu meningkatkan karena kita lihat dari ujian nasional dari rata-rata siswa itu memiliki prestasi yang cukup baik diwilayah Kabupaten Nunukan.

4. Kami ingin tanyakan! Ee...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajaran pak?

Jawab:

Ee...Untuk kebutuhan operasional dana BOS sudah saya lihat sudah mencukupi...e...mampu sudah menopang dan membantu kegiatan operaional yang ada di tingkat sekolah.

5. Pertanyaan kami selanjutnya pak! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah pak?

Jawab:

Ee...untuk dana BOS sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran sekolah ini sudah kita lihat sudah mampu karena selain dana BOS juga mungkin ada sumber-sumber lain yang sangat membantu dan mendukung sekali. Jadi peningkatan mutu pembelajaran di tingkat sekolah.

6. Baik ee...sedikit tambahkan tadi...ee...terkait masalah standar operasional prosedur pak. Yang kami ingin tanyakan apakah Dinas Pendidikan sudah membuat ...ee...SOP khusus tentang BOS pak?

Jawab:

Ee...untuk SOP BOS Dinas Pendidikan juga sudah membuat...ee...dengan mengadopsi dari pada beberapa BOS yang ada selama ini sudah di canangkan. Ee...SOP yang kita buat ini kalau di Dinas Pendidikan Kaupaten Nunukan kita sebut Juknis petunjuk teknis penggunaan dan BOS dan di semua di dalamnya sudah tercantum baikitu dari perencanaan, sampai di pelaporan dana BOS

7. Baik pak...kami sedikit tambahkan ini pak, pak terkait tadi pencairan tahun 2015 ee...triwulan satu pak ,kami ingin tanyakan mengapa terjadi keterlambatan pencairan di awal awal tahun pak sedangkan ee...proses ini yang mungkin seyogyanya menurut kami di bulan Maret, tapi yang terjadi di bulan Juni 2015 pak, yang kami tanyakan pak apa yang mempengaruhi sehingga terjadi keterlambaan pak?

Jawab:

Ee...baik untuk keterlambatan di dalam pencairan di awal tahun khususnya di triwulan pertama 2015, ee...yang pertma ..ee. kita di Dinas Pendidikan jug masih di dalam proses mempersiapkan data. Ee...yang kedua juga proses birokrasi di dalam menugu surat keputusan Bupati pencairan ini kita menunggu surat keputusan Bupati selaku pengguna anggaran daerah untuk menandatangani dari surat keputusan terkait. Karena dari surat keputusan tersebut adalah dasar dari penaciaran dana BOS untuk triwulan I dapat di lakukan pencairan.

Lampiran 2.5

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ibrahim, SIP
 Jabatan : Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan
 Hari/Tanggal : Jumat/18 Maret 2016

A. Aspek Akuntabilitas Prosedur

1. Baik kami mulai pak ! E...bagaimanakah prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Jadi gini bapak Lisran, sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuk teknis, sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya berkaitan masalah bagaimana prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP atau SMP di Kabupaten Nunukan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama pihak sekolah selaku penerima dana BOS itu membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKAS. Dalam RKAS yang dibuat oleh sekolah itu, itu mencerminkan kebutuhan sekolah operasional masing-masing. Setiap sekolah di dalam membuat RKAS tersebut tentunya berbeda-beda kenapa sebab? Karena RKAS itu nantinya akan mencerminkan jumlah murid berupa jumlah nominal masing-masing sekolah berapa. Karena jumlah murid itu akan menggambarkan nanti jumlah besaran dana BOS yang akan di erima oleh sekolah, itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam hal ini tim manajemen BOS yang diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan. Setelah sekolah SLTP atau SMP tersebut menyampaikan RKAS tersebut yang diketahui Komite atau Sekolah tadi, maka Dinas Pendidikan dalam menghimpun, merekap seluruh dari jumlah sekolah SMP yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, RKAS tadi di rekap terus di verifikasi. Apakah pembuatan-pembuatan RKAS tersebut sudah memenuhi unsur-unsur aturan-aturan, kaidah-kaidah, tersebut yang mengaturnya atau tidak. Apabila RKAS yang dibuat oleh sekolah tersebut sudah diverifikasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Nunukan maka, kalau mereka yang telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan aturan-aturan yang menaunginya, RKAS tersebut oleh Tim Manajemen BOS atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan itu di kembalikan di sekolah untuk dilakukan revisi ulang. Nah nantinya sekolah akan merevisi ulang hal-hal apa saja yang belum memenuhi unsur-unsur, kaidah-kaidah sesuai dengan aturan setelah diterima oleh pihak sekolah di perbaiki selanjutnya RKAS tersebut di sampaikan kembali ke Dinas Pendidikan atau Tim Manajemen BOS. Setelah di himpun di rekap keseluruhan ternyata RKAS sekolah tadi sudah oke semua. Maka Tim Menejemen BOS akan membuat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan jumlah dana atau anggaran yang akan diterima sekolah selama 1 tahun anggaran. Nah sehingga nantinya dengan SK Kepala Daerah tersebut itu tadi menjadi kan dasar Dinas Pendidikan untuk melakukan proses atau prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS tersebut. Nah saya ulang setelah adanya SK Bupati terebut tadi itulah dasar Dinas Pendidikan untuk melakukan proses atau mekanisme pencairan dana BOS. Namun masih ada lagi dokumen-dokumen lain yang harus dipersiapkan oleh Tim Menajemen BOS dalam rangka untuk pencairan dana BOS untuk jenjang SPM. Salah satunya adalah Tim Manajemen BOS membuat telaahan staf kepada pengguna anggaran membuat surat kepada Bupati Nunukan untuk meminta persetujuan proses pencairan dana BOS untuk tersebut. Nah oleh pengguna anggaran membuat surat kepada Bupati Nunukan untuk meminta persetujuan proses pencairan dana BOS untuk jenjang SMP setiap triwulan. Setelah telaahan staf atau surat tersebut disetujui oleh Kepala Daerah atau Bupati Nunukan, maka Tim Manajemen BOS atau bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk membuat dokumen-dokumen kelengkapan lainnya untuk pencairan dana BOS jenjang SMP tadi . Yang harus dipersiapkan bendahara adalah pertama membuat Surat Permintaan Pembayaran SPP tambahan uang persediaan TU UP dengan lampiran-lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan alokasi tadi. Yang kedua e.untuk melampirkan daftar rekapitulasi para penerima sekolah SMP tadi disertai dengan nomor rekening bank giro masing-masing sekolah.

Setelah proses tadi di tandatangan oleh bendahara dan di tandatangi oleh pengguna anggaran dokumen tersebut disampaikanlah kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan. Setelah itu proses di Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan melalui verifikasi-verifikasi masing-masing sehingga keluarlah yang namanya SP2D TU UP. Nah dimana dalam SP2D TU uP tersebut itu sesuai permintaan kita, maka keluarlah uang. Bergeserlah uang pemindah bukuan dari Kas Daerah Kabupaten Nunukan ke bank rekening giro banknya bendahara pengeluaran. Berarti uang TU BOSDA untuk jenjang SMP tadi sudah masuk pada rekening bendahara. Nah untuk selanjutnya langkah selanjutnya untuk proses pentransperan ke masing-masing rekening sekolah, maka yang harus dipersiapkan oleh Tim Manajemen BOSDA adalah membuat telaaahan staf kepada pengguna anggaran kembali untuk pentransperan atau pencairan ke masing-masing sekolah sesuai dengan Keputusan Bupati tadi. Selanjutnya telaaahan staf tadi di ketahui dana di setuju oleh pengguna anggaran memerintahkan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau Tim Manajemen BOS untuk mentransper ke masing-masing sekolah dengan di lampiri di lengkapi dengan bukti slip penyetoran sesuai dengan masing-masing bank sesuai dengan jasa...ee.. sesuai dengan jasa giro banknya masing-masing sekolah tersebut. Setelah itu bendahara atau Tim Manajemen BOS mentransperlah ke rekening sekolah-sekolah tersebut. Setelah kita anggap dis oke maka kita akan menginformasikan kembali kepada sekolah-sekolah untuk menanyakan apakah sekolah-sekolah sudah menerima apa belum. Apabila dia belum, diharapkan oleh Tim Manajemen BOS pihak sekolah untuk menkonfirmasi ualng ke Dinas Pendidikan. Artinya untuk menanyakan kenapa mereka belum menerima pentransperan dari Dinas Pendidikan. Bisa saja errornya kekeliruan nomor rekening banknya atau mungkin bisa saja kliring. Namun dalam hal ini Alhamdulillah kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari jumlah sekolah yang menerima pentransperan dana BOS jenjang SMP Alhamdulillah tidak ada kendala, karena proses prosedur kita ikuti sesuai dengan aturan yang berlaku setelah itu dana BOS tadi masuklah sudah ke rekening giro masing-masing sekolah. Berarti proses mekanisme pencairan jenjang SMP oleh Dinas Pendidikan kami anggap klir kami anggap selesai. Nah jadi itulah e...prosedur atau mekanisme pencairan dana BOS jenjang SLTP atau SMP di Kabupaen Nunukan. Mungkin ee...untuk sementara itu dulu yang bisa kami berikan keterangan untuk mendukung e...bapak Lisran untuk menyelesaikan program studi Pascasarjana, demikian bapak.

2. Baik pak, kami lanjutnya pertanyaan pak! Bagaimanakah prosedur atau mekanisme dalam menyampaikan e...pertanggungjawaban sekolah pak atas dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ?

Jawab:

Baik pak, ee...berkaitan dengan masalah prosedur atau mekanisme penyampaian pertanggungjawaban oleh pihak sekolah terhadap pengguna dana BOS tadi, yang untuk jenajng SLTP atau SMP di Kabupaten Nunukan itu sudah di atur dalam petunjuk teknis yang di tandantangi oleh Bupati Nunukan. Dalam petunjuk teknis itu sudah dijelaskan secara rinci, secara detail, bagaimana sekolah dalam hal untuk menyampaikan atau sekolah dalam hal untuk penggunaan dana BOS tersebut. Artinya pihak sekolah di harapkan oleh Tim Manajemen BOS atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan agar selalu mempedomani atau mengikuti aturan-aturan yang sudah di tuangkan dalam juknis tersebut. Artinya apa, artinya sepala sekolah dan bendahara sekolah dalam hal penggunaan dana BOSDA atau BOS jenjang SMP tadi itu dalam hal membelanjakan dalam hal membuat pertanggungjawaban tentunya harus mengikuti norma-norma, kaidah-kaidah, hukum sesuai dengan petunjuk teknis tadi. Nah artinya diharapkan kepada sekolah dan bendahar asekolah agar betul-betul memahmi, betul-betul mempedomani petunjuk teknis tersebut. Supaya apa? Supaya penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS itu dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah tadi kepada Tim Manajemen BOS atau Dinas Pendidikan oleh Tim Manajemen akan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dn BOS oleh sekolah-sekolah. Apakah penggunaan, pertanggungjawabannya tadi sudah sesuai atau tidak dengan juknis. Apabila tidak sesuai oleh Tim Manajemen BOS, maka Tim Manajemen BOS untk mengkonfirmasi, jumlah kepadapihak sekolah. Artinya laporan pertanggungjawaban dana untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Bagi sekolah yang

laporan pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan aturan, maka oleh Tim Manajemen selanjutnya akan dibuatkan yang namanya pertanggungjawaban TU Nihil. Semua yang diterima oleh Dinas Pendidikan yang di transfer dari Dinas Pendidikan yang dibuat dalam pertanggungjawabannya harus sesuai dengan apa yang di terima maka, dibuatlah SPP TU Nihil. Artinya uang yang kita terima katakan 100 juta yang kita pertanggungjawabkan juga harus 100 juta. Namun dalam kenyataannya dalam praktek kenyataannya dari nilai yang di terima belum tentu di SPJ kan juga sama dengan nilai yang di nilai terima. Artinya apa artinya sesuai dengan atur petunjuk teknis katakan yang diterima Dinas Pendidikan 100 yang ditransfer 100, 100 namun oleh pihak sekolah hanya mampu di pertanggungjawabkan katakan 90 ribu saja maka, sisanya itu harus di kembalikan dulu ke Kas Daerah. Sehingga nantinya antara nilai yang di pertanggungjawab dengan nilai yang dikembalikan ke Kas Daerah itu klop atau *balance* atau sama nilainya. Sehingga Dinas Pendidikan di dalam membuat SPJ TU Nihil yang akan disampaikan ke DPKAD dapat di sahkan. Nah jadi ee...itu berkaitan proses atau mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Terhadap penggunaan dan BOS juga SMP disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Artinya dalam juknis sudah diatur kewajiban-kewajiban pihak sekolah karena mereka yang menerima dana tersebut maka mereka punya kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Apabila bagi sekolah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka Dinas Pendidikan ee...tidak akan memproses dana BOSDA tahap berikutnya. Ini sudah menjadi konsekuensi, ini sudah menjadi ee...apa namanya sudah menjadi ee...aturan yang baku. Kenapa sebab apabila sekolah yang lalai atau lambat menyampaikan laporan tersebut, Dinas Pendidikan punya sikap yang tegas tidak memberikan dana BOSDA kepada sekolah untuk tahap ke 2 ke 3 tahap ke 4 sepanjang kewajiban sekolah kalau mereka tidak penuhi Dinas Pendidikan akan memberikan ee...apa namanya semacam *warning* lah atau peringatan lah kepada kepala sekolah tersebut. Jangan sampai kegiatan operasional sekolah terlambat gara-gara pihak sekolah tersebut tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang sudah mereka terima apa yang mereka kelola. Jadi itu bapak Lisran, itu berkaitan dengan masalah proses dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban dari sekolah terhadap penggunaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan.

3. Baik kami lanjut pertanyaan pak Ibrahim! Ee... Apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur atau SOP BOS?

Jawab:

Pak berkaitan pertanyaan bapak apakah sejauh ini proses pencairan dana BOS jenjang SLTP/SMP sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur. Ee...kita jujur saja pak sebenarnya kalau kita mengacu pada standar operasional prosedur secara 100% itu saya rasa pak apa namanya ee...tidak mungkin pak! Kenapa sebab, karena apa ya memang sudah dibuat standar operasional prosedur atau SOP dana BOS namun kadang kendala-kendalanya sering kita, sering kita alami dilapangan. Katakan contoh apa namanya kita mau mencairkan dana BOS tepat waktu atau tepat sasaran atau mungkin ee...apa namanya sesuai dengan keinginan kita namun kadang ada saja faktor-faktor ee...kadang-kadang bisa keterlambatan dalam proses pencairan dana BOS tersebut. Salah satunya katakan kita berkeinginan pencairan dana itu tepat waktu namun karena alasannya beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan sehingga proses pencairan dana mengalami keterlambatan, sehingga dengan keterlambatan tadi kadang apa ya...e...boleh dikatakan tidak sama atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP BOS tadi. Salah satu contoh misalnya ada kewajiban kita harus membuat telaahan atau surat kepada bapak Bupati untuk minta proses pencairan dana BOS, tepat waktu, namun karena kesibukan beliau sebagai Kepala Daerah, sebagai Pejabat Negara sehingga ee...kita menunggu beliau. Dengan menunggu beliau tadi sehingga berpengaruh, kadang kitaketerlambatan dalam proses pencairan dana BOS tersebut. Belum lagi ee...kadang Kepala Dinas dengan kesibukannya dengan dinas luar beliau sehingga kadang proses pencairannya kadang mengalami keterlambatan. Nama kita manajemen di Manajemen BOS Kabupaten selalu berupaya maksimal bagaimana supaya proses pencairan dana BOS itu bisa mengacu secara makKedepannya juga kita akan coba nantinya lebih mengkedepankan agar mengikuti standar operasional prosedur tersebut bapak Lisran, demikian.

B. Aspek Akuntabilitas Keuangan

1. Baik pak, kami lanjut! Ee..Jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan ini?

Jawab:

Ee...jadi begini bapak, sehubungan dengan apa yang bapak tanyakan kepada kami, e...jenis belanja apa saja yang dapat di laksanakan oleh sekolah terkait penggunaan dana BOS jenjang SLTP/SMP itu di dalam petunjuk teknis sudah diatur ada 2 jenis belanja pak. Itu sudah diatur juga dlam peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya jenis belanja untuk dana BOS SMP itu pak ada 2, yang pertama jenis belanja pegawai. Yang kedua jenis belanja barang dan jasa pak. Kenapa sebab karena e...apa namanya jenjang SMP in dia juga menerima dana BOS pusat disitu sudah diatur belanja pegawai 20% belanja barang jasa 60% belanja modal 20%. Itu untuk BOS pusat ak. Namun kalau untuk bapak Lisran ini e...karena ini jenjang BOS SLTP/SMP adalah BOS daerah Kabupaten Nunukan, maka jenis belanjanya hanya ada 2 pak, jenis belanja pegawai dan jenis belanja barang dan jasa. Maksudnya dari BOS pusat tadi kekurangan-kekurangan itu ditutupi dari dana BOS daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangan pusat oleh SMP tadi diambilkanlah dari BOSDA Kabupaten dengan pasti ee...40% belanja pegawai 60% barang dan jasa pak. Jadi BOS pusat sekolah tadi kekurangan ditutupi oleh daerah. Boleh dikatakan juga ini dana sering pendampingan dan ini juga merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk ee...supaya tidak ada di sekolah-sekolah itu tidak ada pungutan-pungutan kepada siswa dengan program kepala derah ee...artinya...e...bebas biaya pungutan untuk pendidikan di Kabupaten Nunukan pak. Jadi itu pak ada 2 jenis pak ya jenis belanja pak.

2. Baik pak kami lanjutkan pertanyaan! Apakah Tim Koordinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi maupun evaluasi pak tentang penggunaannya pertanggungjawaban dana BOS SMP pak di tiap-tiap sekolah yang ada di Kecamatan pak?

Jawab:

Ee... jadi gini pak, berkaitan dengan apa yang tanyakan, apakah tim koodinasi BOS Kabupaten pernah melakukan sosialisasi pak ya? Sebenarnya kalau sosialisasi itu sering pak di lakukan di tiap-tiap kecamatan. Sering di lakukan sosialisasi pak ya. Sebenarnya oleh tim koordinasi BOS Kabupaten Nunukan sosialisasi tersebut dilakukan oleh tim dalam rangk untuk mengevaluasi apakah penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh SMP tadi sudah sesuai dengan juknis atau tidak. Nah namun kadang pada saat sosialisasi itu harapan Tim Manajemen BOS tadi atau Dinas Pendidikan itu para kepala sekolah atau bendahara sekolah. Dimana sih mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Dan ini juga nantinya akan menjadikan barometer atau menjadikan ukuran oleh Tim Manajemen BOS. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan Tim Manajemen BOS selanjutnya dalam rangka upaya untuk perbaikan-perbaikan tadi. Nah, memang kadang jujur saja untuk mendukung Tim Manajemen BOS dalam rangka untuk melakukan sosialisasi dalam APBD Kabupaten Nunukan. Sangat minim anggarannya. Namun Tim Manajemen BOS tidak putus semangat, tetap akan melakukan sosialisasi secara inten di Kecamatan-kecamatan. Kenapa Sebab? Karena hal ini sesuai dengan program yang telah dirumuskan oleh Tim Manajemen BOS. Artinya kita untuk menghemat anggaran atau waktu maka kita membagi tim dalam rangka sosialisasi, kita bagi per wilayah, kita atur waktunya, kita atur tempatnya sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi secara efektif dan efisien. Memang jujur bapak, setiap kita melakukan sosialisasi atau evaluasi terhadap penggunaan pertanggungjawaban dana BOS itu di tiap-tiap sekolah pada kecamatan kita dari Tim Manajemen BOS sangat banyak seklaai mendapatkan masukan-masukan atau saran-saran atau kritikan-kritikan dari pihak sekolah, dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban BOS tadi. Namun Alhamdulillah e...bagi daerah-daerah yang bisa jangkau, kita sudah lakukan sosialisasi pak. Nah tergantung kembali terpulang kembali kepada pihak sekolah bagaimana daya serap mereka terhadap sosilalisasi tersebut. Sehingga dengan sosialisasi tersebut itu melalui media itu...e...apa namanya e...pelaksanaan program dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu bapak Lisran! Jadi itu bapak Lisran e...apa namanya Tim memang e...tim koordinasi BOS pernah melakukan sosialisasi di

Kecamatan-kecamatan, namun masih ada juga pak Kecamatan yang belum terjangkau karena mengingat waktu, mengingat biaya, mengingat kesibukan Tim Manajemen BOS dari Dinas Pendidikan, melihat juga secara geografik, dimana Kabupaten Nunukan ini secara geografisnya e...banyak atau sangat sulit kita jangkau bapak Lisran, demikian bapak!

3. Baik, pak kami lanjut pak! Faktor apa pak yang mempengaruhi Tim BOS jenjang SMP pak sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana BOS di triwulan pertama tahun 2015 pak?

Jawab:

Ee...Jadi begini pak, bisa kami sampaikan e...faktor apa yang berpengaruh kepada Tim Koordinasi BOS untuk jenjang SMP sehingga terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS. Seyogyanya untuk triwulan pertama itu pak, itu dicairkan seharusnya sesuai juknis itu pada triwulan pertama itu harusnya paling lambat bulan Maret pak 2015. Namun kenyataannya oleh kita bisa pada saat waktu baru bisa kita laksanakan di bulan Juni, midionya Juni 2015. Faktor-faktor nya pak yang pertama lambatnya pihak sekolah telah menyampaikan RKAS untuk tahun 2015. Faktor-faktor apa saja yang pertama lambatnya pihak sekolah telah menyampaikan RKAS untuk tahun 2015. Yang kedua dari Tim Manajemen BOS juga apa namanya dalam hal memverifikasi RKAS tadi juga mengalami kesulitan-kesulitan karena tidak mudah juga pak kita melakukan verifikasi terhadap RKAS pak. Bayangkan untuk SMP di Kabupaten. Nah dengan jumlah sekolah yang cukup banyak pak. Ketiga Tim Manajemn BOS juga e...apa namanya dalam hal memverifikasi ya ada juga teman kadang-kadang yang kurang memahami, nomenklatur-nomenklatur apa yang diusulkan oleh sekolah melalui RKAS tadi ya pak. Yang berikutnya juga faktornya e... kadang adanya e...keterlambatan dalam hal penetapan SK Bupati karena mengingat kesibukan Kepala Daerah sehingga penetapan Keputusan Bupati tadi tentang penetapan alokasi tiap-tiap sekolah itu pak mengalami keterlambatan bahkan sudah selesai pelaksanaan ujian nasioanan SMP pak. Padahal dana BOS ini oleh pihak sekolah tadi, sangat di nanti-nantikan oleh sekolah dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan ujian nasional pak, untuk jenjang SMP. Namun karena keterlambatan-keterlambatan tadi sehingga berpengaruh terhdap lambatnya pencairan dana BOS triwulan pertama di 2015. Belum lagi e...apa namanya kesibukan Kepala Dinas sehingga ini juga sangat berpengaruh terhadap proses pencairan dana BOSDA triwulan pertama 2015. Belum juga pesyaratannya haru dipenuhi oleh pihak-pihak sekolah, sehingga faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh, faktor-faktor inilah yang membuat keterlambatan triwulan pertama dana BOS 2015. Padahal kita berharap pak proses pencairan dana itu tepat waktu, tpat sesuai dengan petunjuk teknis yang kita buat. Namun apakah daya kita pak karena prosesnya ini elibatkan e...institusi-institusi lain sehingga proses pencairannya juga mengalami keterlambatan. Namun pa intinya pak keterlambatan tidak manguangi ini dai pihak-pihak sekolah-sekolah bapak!

4. Baik pak kami lanjut pertanyaannya pak! Apakah pak setiap sekolah sudah tepat waktu dalam menyampaikan SPJ dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan ini pak?

Jawab:

Nah...ini bapak Lisran saya sangat tertarik pertanyaan bapak! Memang pak...sebenarnya saya sendiri secara pribadi ya pak bendahara pengeluaran lama kadang saya merenung, lama kadang saya berpikir, kadang saya...kadang-kadang kami suka diskusi pak ya dengan Tim Manajemen BOS. Saya sangat tertarik pak dengan pertanyaan bapak ini! Dan saya katakan apa ya dengan pertanyaan bapak ini, ini sangat kami butuhkan dalam hal untuk memotivasi pak Lisran. Ee...jadi gini pak memang benar sekolah itu pak kadang dalam hal menyampaikan SPJ pak...jujur pak ya tidak munafiq kenyataannya banyak sekolah yang menyampaikan SPJ nya itu pak tidak tepat waktu. Artinya kena pak? Kita Tim Manajemen BOS berulang kali mengingatkan dengan sekolah, wakil sekolah mana pertanggungjawaban SPJ mu. Jawabannya sia. Ya baik, namun itulah pak kenyataan dilapangan, kami tidak paham juga kenapa pihak seperti itu lelet. Namun dari hasil inventarisasi kita, pihak, hampir tiap sekolah bahkan yang dekat denganDinas sendiri atau di dalam kota sendiri pak. Itu pun lambat dalam hal menyampaikan SPJ nya...jujur pak Lisran. Ya kenapa sebab? Ya kita paham sekolah inikan dia di tugaskan untuk mengatur kurikulum. Bagaimana peningkatan mutu kependidikan. Namun oleh pemerintah daerah di berikan tugas tambahan untuk mengelola dana BOS. Sementara

figur baigron kita bukan seperti pak Lisran! Mereka inikan bagaimana di tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan pak. Namun dengan diberikannya juga dana BOS mereka dibebani dengan tugas tambahan itu pak. Sehingga, sehingga mereka juga tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban itu pak Lisran. Iya. Kenapa sebab? Contoh bendahara BOS itu kadang pak, itu seorang guru. Dimana mengajar dengan jumlah jam yang sudah di tetapkan, dia juga disuruh mengurus mengelola mempertanggungjawabkan dana BOS sehingga pintar-pintar sekolah dalam hal membagi waktu. Nah, namun akhirnya kadang keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban dana BOS itu pak Lisran. Nah kalau kita berbicara tepat waktu pak sangat sulit pak. Kita bayangkan saja ya, contoh yang sangat sederhana kita di...e...kantor Dinas Pendidikan yang hanya membutuhkan waktu cukup 15 atau 20 menit pak. Nah itu pun kadang terlambat pak dalam hal penyampaian SPJ. Apalagi sekolah kita yang ada di wilayah 2, wilayah 3, apalagi wilayah Krayan dijangkau dengan menggunakan jasa transportasi udara pak. Yang di dekat saja penyampaiannya lambat pak, apalagi yang wilayah menggunakan sarana transportasi udara. Bapak bisa bayangkan sendiri pak bagaimana itu pak. Nah, namun, e...dari...dari manajemen BOS tidak bosan-bosannya mengingatkannya sekolah-sekolah dalam hal untuk menyampaikan pertanggungjawaban itu kalau bisa tepat waktu. Kenapa sebab, ini nanti akan berpengaruh untuk tahap berikutnya sebagaimana yang sudah saya katakan terdahulu tadi, itu pak Lisran. Ya jujur pak kalau tepat waktu pak kita tidak munafiq pak hampir rata-rata tiap-tiap sekolah itu lambat dalam menyampaikan pertanggungjawaban pak. Itu kita akui pak disitulah mungkin kelemahan-kelemahan kita. Tapi untuk kedepannya pak nanti kita akan coba e,,,melakukan pembenahan, kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan bagaimana supaya tepat waktu, supaya apa supaya proses untuk selanjutnya itu pak e...sesuai dengan apa yang di karena itu pal Lisran apa namanya. Inilah perlu e...apa namanya kekompakan baik dari dinas baik itu Tim Manajemen BOS baik itu dari pihaksekolah yang menerima artinya mereka ini apa namanya kita upayakan supaya tepat waktu gitu na...pak Lisran Mungkin demikian pak Lisran.

5. Baik pak kami lanjut! E..bagaimanakah upaya-upaya Tim Koordinasi BOS Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS jenjang SMP di Kabupaten Nunukan pak?

Jawab:

Nah ini pak Lisran, saya jujur pak belum pernah mempertanyakan seperti ini kepada kami selaku Tim Manajemen BOS. Kami sangat berterima kasih kepada pak Lisran untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan nanti dengan apa namanya e...bapak menyelesaikan program Pasca Sarjana ini pak nantinya e...dari hasil bapak itu menjadikan e...rekomendasi kepada kami Tim Manajemen BOS untuk perbaikan-perbaikan. Jadi berkaitan apa-langkah-langkah oleh Tim Koordinasi untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan BOS. Apa yah...salah satunya pak kita meningkatkan kompetensi pak. Kita meningkatkan kompetensi e...Tim Manajemen BOS itu sendiri dulu pak. Itu salah satu ya pak. Nonsen kita berbicara program bisa terlaksana kalau kompetensi para Tim Manajemen BOS tidak ditingkatkan pak, itu yang pertama. Yang kedua e...kita berupaya pak e...memperjuangkan dalam APBD ini supaya di anggaran pak. Biaya untuk pelaksanaan, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah. Termasuk juga dengan pengurus barang pak. Supaya apa supaya kepala sekolah dan bendahara sekolah dan pengurus barang itu pak ee...bisa ee...menambah pengetahuan bagaimana pengelolaan dana BOS pak, sesuai dengan aturan-aturan. Nah kita memperjuangkan melalui Pemerintah Daerah e...artinya dianggarkan biaya bimtek pak kepa kepala sekolah, bendahara atau pengurus barang. Nah artinya dalam bimtek itu pak kita nanti bisa berupaya mengharapakan untuk sebagai narasumbernya pak bisa saja nanti kita mintakan dari pajak dari Tim Insfektorat, atau dari BPK atau dari BPKP atau mungkin saja dari DPKAD yang mungkin juga dari Dinas Pendidikan itu seniri e...untuk menyampaikan kepada pihak sekolah berkaitan masalah bagaimana denan proses penganggaran, bagaimana prses e...pertanggungjawaban dan sebagainya pak. Nah itu salah satu upaya tim kita untuk mewujudkan akuntabilitas itu yang ee...itu yang kedua pak. Yang ketiga e...kita untuk mencoba dalam hal apa namanya e...setiap mengagendakan 3 bulan, kita akan melakukan yang apa namanya e...rapat-rapat pertemuan, rapat-rapat pertemuan baik itu

tim koordinasi maupun rapat-rapat dengan pihak sekolah/ ee... artinya e... nantinya e... apa namanya kita bisa mengetahui e... dimana letak 1 kelemahan-kelemahan kita itu yang ke tiga pak upaya-upaya yang dilkakukan Tim Koordinasi. Yang ke empat e... yang kita lihatkan Tim Koordinasi pak kita nanti megumumkan-mengumumkan dalam rangka untuk sosialisasi atau monitoring ke lapangan ke sekolah-sekolah dalam rangka untuk menyampaikan mungkin ada perubahan regulasi-regulasi atau mungkin sekalian juga kita pak jemput bola laporan-laporan sekolah dengan melibatkan e... UPTD yang ada , ada di Kecamatan-kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pihak Dinas Pendidikan. Dimana UPTD itu juga pak bagian dari pada Tim Koordinasi kami di Kabupaten Nunukan pak Lisran. Yan gselanjutnya e... apa namanya yang dilakukan oleh Tim Koordinasi itu adalah dalam rangka mewujudkan akunabilitas pengelolaan dana BOS, tentunya e... tim Korodrdinasi juga nanti mungkin bisa berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi atau pusat.. Mungkin apa namanya ada aturan-aturan regulaasi yang tidak diketahui oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, sehingga e... dikhawatirkan kalau kita tidak mengetahui pak, takut kita sudah dalam aturan-aturan yang kita sampaikan kepada pihak sekolah, pak Lisran. Namun jujur pak e... apa namanya memang untuk saat ini kita baru bisa melakukan pertemuan-pertemuan karena mungkin itu tadi mungkin masih minimnya anggaran, mungkin e... SDM dari pada Tim Manajemen BOS juga mungkin masih ee... kurang sehingga kita akui pak apa namanya ee... secara akuntabilitas memang apa namanya e... belum memenuhi standar pak. Tapi upaya-upaya yang kita lakukan untuk ke arah sana untuk kebaikan-kebaikan terhadap kita lakukan. Insyaallah saja nanti Tim Koodinasi nanti lebih-lebih inten. Lebih insten, lebih sering mungkin kita apa namanya saling diskusi bagaimana untuk memberikan solusi-solusi kepada kepala sekolah. E... bagaimana artinya supaya pengelolaan dana BOS itu khusus secara akuntabilitas bisa dapat dipertanggungjawabkan pak, itu pak Lisran.

C. Aspek Akuntabilitas Manfaat

1. Baik, Pak e...kami bertanya dari segi mafnat ini pak! Ee...manurut bapak apakah keberadaan dana BOS jenjang SMP sudah mampu meminimalisir angka putus sekolah yang ada di sekolah-sekolah pak?

Jawab :

Nah...jadi gini pak, sehubungan dengan pertanyaan bapak ini, apakah dengan dana BOS ini sudah bisa untuk meminimalisir e... angka putus sekolah? Jadi intinya gini pak, ini sebenarnya program e... oleh Kepala Daerah dimana pada saat penyampaian misi dan visi nya Kepala Daerah , agar e... biaya pendidikan itu gratis. Ini salah satu pak, oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menuntaskan e... buta aksara pak. Dengan program wajib e... dulu 9 tahun sekarang 12 tahun pak Namun Alhamdulillah untuk di Kabupaten Nunukan dengan jumlah penduduk mungkin sekita 120 ribu lebih Alhamdulillah kita Dinas Pendidikan ada program-program salah satu adalah melalui pemberian dana BOS jenjang SMP. Nah berikut juga saat sangat kita rasakan azas manfaat Alhamdulillah e... masyarakat kita dengan bebasnya biaya sekolah tadi pak mereka apa namanya denan antusiaslah mengetahui untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga apa sehingga program memeriahkan menuntaskan rabun buta aksara. Alhamdulillah pak e... sudah kita rasakan juga pemerintah itu melalui program pemberian dana BOS jenjang SMP pak. Pemerintah juga membuat program yang artinya bisa membuat bilamana namanya paket A, pake B, paket C e... bahkan juga kita membuat program yang namanya pendidik SMP. Gini pak nah pak artinya apa, hal ini dilakukan pemerintah daerah dalam rangka upaya untuk ee... meminimalisir buta aksara pak Lisran. Nah salah satunya adlah pemerintah daerah mengalokasikan dana BOS jenjang SMP supaya anak-anak e... orang tua tidak terbebani dalam hal untuk mengecam pendidikan wajib belajar tadi pak Lisran. Nah namun, masih banyak juga masyarakat kita belum paham yang belum ngerti sehingga anak-anak mereka masih belum disekolahkan mungkin faktor lain pak. Mungkin faktor ap namanya yang kultur, budaya, atau dan sebagainya pak Lisran. Demikian pak Lisran.

2. Baik pak kami lanjut pak! E...menurut bapak apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau non pendidik yang berstatus honor di sekolah ini pak?

Jawab :

Nah jadi gini pak Lisran. Kalau kita berbicara itu pak masalah sejahtera sampai kapanpun kita namanya manusia terburu kita belum tentu sejahtera! Namun paling tidak dengan adanya dana BOS itu paling tidak mengurangi beban seorang guru pak khususnya guru yang non PNS, Kenapa sebab karena pak guru non PNS untuk pembayaran gaji ya ini diambilkan dari pak. Itu yang saya katakan tadi pak, BOS pusat dengan presentasi 20% kekurangan di ambil dari daerah untuk belanja pegawinya untuk mencukupi gaji guru non PNS. Dimana tiap-tiap sekolah itu pak pada bervariasi karena mereka mengajar berdasarkan jumlah jam mengajar. Dan itu dibayarkan diambilkan dari dana BOS pusat dan BOS daerah. Pak Lisran. Kalau kita berbicara sejahtera pak saya yakin masih banyak pak, guru kita belum sejahtera. Apalagi dengan porsi pembinaan BOS yang begitu kecil sekali apalagi dengan porsi yang begitu kecil sehingga apa namanya gaji mereka masih di bawah upah minimum regional. Kami yakin itu pak, kenapa sebab karena kadang-kadang guru kita menyampaika kepada kita masalah masih kecilnya gaji mereka yang mereka terima dari dana BOS pusatnya. Otomatis dengan sendirinya kecilnya mereka terima pak otomatis mereka belum sejahtera pak Lisran, gitu pak Lisran.

3. Baik pak e...kami ingin tanyakan pak! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan kinerja guru dan non guru di sekolah pak, yang khususnya honor?

Jawab:

A... jadi gini pak, kami rasa pak dalam rangka meningkatkan kinerja guru, seharusnya seorang guru jangan berpangku tangan dana BOS pak. Kenapa sebab karena dana BOS itu pak dalam petunjuknya secara perpersinya. Kami yakin pak dengan adanya dana BOS itu kadang...e...belum maksimalnya pak untuk apa namanya hanya e...para guru kita bisa meningkatkan kinerjanya. Namun aling tidak ya itulah mungkin e...e... perhatian dan ucapan terima kasih pemerintah kepada guru-gurukita yang non PNS dalam rangka e...mereka menyampaikan kepada anak-anak didik pak. Walau bagaimanapun juga pak pemerintah daerah nanti akan diperhatikan bagaimana pemerintah daerah akan memberikan riwot atau panisment kepada guru-guru kita non PNS pak. Namun ya e. apa namanya mungkin ee...kita pak mungkin itu artinya gini untuk memberikan itu kan kita melihat kemampuan keuangan daerah. Artinya kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah kita berapa mampunya daerah untuk diberikan dana BOS e...dalam upaya untuk membayar e...gaji dari pada guru non PNS tersebut pak. Tapi kedepannya Insyaallah pemda akan selalu memperhatikan itu bapak Lisran.

4. Baik pak e...kami ingin tanyakan selanjutnya pak! Menurut bapak ini...apakah keberadaan dana Bos sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam proses pembelajarannya, operasionalnya ini pak?

Jawab:

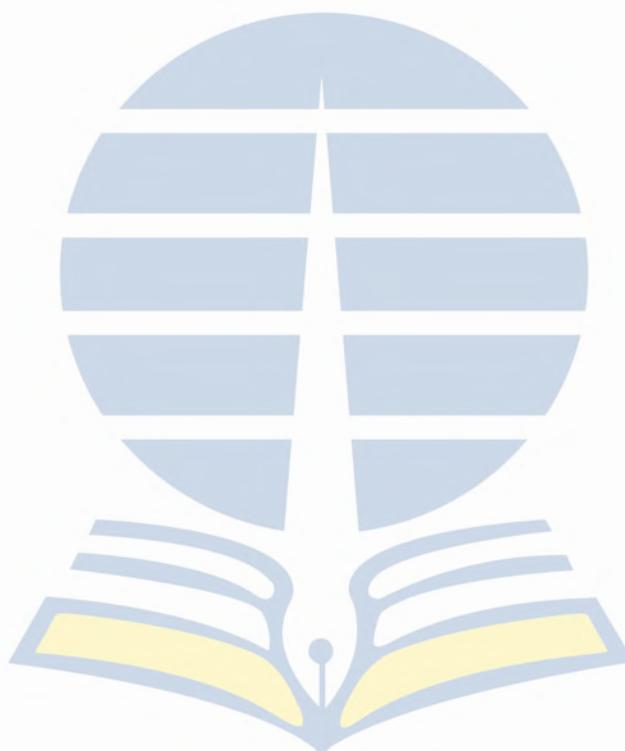
Jadi gini ya pak ya keberadaan dana BOS itu pak apa yang sudah diterima sekolah itu belum maksimal pak. Belum maksimal e. e. untuk dapat menunjang secara keseluruhan operasional sekolah itu pak. Kenapa sebab, karena antara mereka terima dengan apa yang mereka sangat butuhkan jauh-jauh pak. Apalagi sekolah yang begitu besar, apalagi dengan jumlah gurunya, upahnya, belum lagi tenaga kependidikannya yang digaji non PNS dana BOS. Kami yakin pak e...apalagi e...dari nilai yang mereka terima tidak semuanya bisa menutupi biaya operasional sekolah tersebut pak. Demikian pak.

5. Baik pak, kami ingin tanyakan! Apakah keberadaan dana Bos sudah mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah pak? Mutu pembelajarannya, apakah sudah mampu?

Jawab:

E...apa ya pak ya? Kalau kita berbicara mutu pembelajaran pak dengan dana BOS itu pak, berat sekali rasanya, Kenapa sebab karena e. dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Memang sekolah itu harus ada yang pahit untuk menung dengan e...anggaran yang cukup ya pak. Kenyataan dari dana yang mereka terima sangat jauh pak. Apa yang mereka...nah artinya dalam rangka untuk meningkatkan mutu tadi itu pak dari dana BOS kami rasa e...apa namanya belum sepenuhnya pak, belum bisa terpenuhi. Kenapa sebab karena persinya kecil pak sementara dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tadi pak itu harus

di dukung dengan *budgetting* atau anggaran yang cukup, pak itu pak. Baik pak,...sedikit kami tambahkan pak di pertanyaan, saya tertarik tadi tentang SOP pak. yang kami ingin tanyakan kembali pak Dinas Pendidikan sudah buat SOP tadi pak? Oya ya...pak baik pak...jadi begini kalau untuk standar operasional prosedur tentang BOS itu ya pak, setahu saya manajemen BOS belum membuat itu pak. Saya yakin karena ini juga belum, karena melihat standar operasional prosedur. Namun yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS adalah dalam membuat petunjuk teknisnya pak. Petunjuk teknis yang diputuskan dengan Kepala Daerah dan yang satunya jadi, untuk sementara kita yang namanya jukninya. Standar operasional prosedur untuk saat ini kita belum pak. Namun upaya-upaya kita dari manajemen BOS nanti untuk kedepan harus kita coba akan merumuskan. Kita akan coba membuatkan supaya ada standar operasional prosedur SOP nya pak Lisran.



Lampiran 2.6

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs. H. Taufiqurrahman, M. Si
 Jabatan : Asisten III Setkab Nunukan merangkap Plt. Inspektoriat Kabupaten Nunukan
 Tempat : Di ruang kerja kantor Bupati Nunukan
 Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016

Pertanyaan!

1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS SLTP/ SMP di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat?

Jawab:

Soal dana BOS? Jadi dana BOS SD, SMP, ya, tapi kita bilang dana BOS sajarah ya. Jadi kita ini Inspektoriat sebenarnya, kan ee... banyak juga tugas yang kita lakukan, yaitu audit tentang pemanfaatan dana BOS. Dana BOS ini memang kita, semua itu... kita bisa ambil sampel apa sebenarnya, tapi dari sample itu mungkin kita bisa, kata kan lah ambil kalau ada masalah kita simpulkan dari situ, misalnya apa sih bisa terjadi kekurangan, apa sih masalahnya. Di situ kita bisa lihat, nanti kita kasih saran. Saran begitu teman-teman yang terkait tentang pelaksanaan dana BOS. Tetapi Dinas Pendidikan yang nanti secara tertulis bisa memberikan apa namanya... ee semacam Juknislah. Karena memang ada juknisnya. Ee... itu yang dilaksanakan masing-masing mengelolah itu. Nah sekarang yang banyak kita hadapi ini sekarang ada di sekolah-sekolah. Katanya di SD itu banyak SD itu memang tenaganya memang ngga ada. Yang ada Kepala Sekolah di sana, mungkin ada juga guru yang jadi bendahara gitu. Memang kekurangan tenaga kita sehinggah akhirnya tugas ini di rangkap-rangkap. Bahkan dirinya sendiri menjadi bendahara. Sehinggah kadang-kadang sudah jadi masalah sebenarnya. Mau tidak mau ini harus tetap jalan, sayang kalau dana BOS ini tidak bisa di manfaatkan. Nah itu tidak mungkin pasti banyak lagi. Kemudian pengetahuan dari pemahaman pengelolaan dana BOS. Ini juga mungkin perlu bimbingan. Nah itu yang kita perlukan sekarang ini. Tapi juga ini bukan satu tempat. Kadang mewakili, banyak semua. Inilah yang terjadi. Nah ada dana BOS yang tidak bisa bergerak. Karena saking takutnya kepala sekolah tidak berani mengeluarkan. Ada, begitu hasil kita di lapangan. Jadi dana BOS tidak bisa di serap gitu. Ternyata ada yang takut, tidak berani gurunya memanfaatkan. Sedikit saja tidak berani, banyak... banyak. Jadi akhirnya tidak habis-habis. Sayang gitu! Mngkin salah satunya mungkin artinya berikan juknis-juknis apa ya penyusunan, selain itu pemberian pemahaman, pelatihan-pelatihan, pada sekolah yang mengelolah dana BOS itu. Semua nanti dana BOS itu Bisa benar-benar sasarannya sesuai dengan juknis. Nah mungkin ada juknis yang memang terlambat gitu pak ya? Ya mungkin belum turun juknisnya, sehinggah tidak di gunakan kadang-kadang begitu, di bilang tidak ada aturannya. Tetapi juga memang perlu di fahami, mungkin protapnya tidak ada informasi gitu ya. Bisa saja sebenarnya tetapi kenapa bisa lambat? Kita lihat masalahnya, terlambat apa mungkin kurang pas, tetapi ini memang pengalaman sebenarnya. Akan datang juknis lebih awal lagi! Supaya dana nanti bisa di manfaatkan dengan baik seperti itu. Bisa saja mungkin ada namanya undangan lagi. Seperti itu ngak ada masalah, mungkin ada juga transparan. Ya di situ ditutupi ee... tidak bisa jalan. Soal-soal pemantauan sendiri deh selalu di maklumi saja. Kita memang sekarang ini namanya guru kekurangan. Apalagi kita lihat sendiri kan! Memang Nunukan ini lihat sendiri kan guru-gurunya cuma dua. Di dalam... dalam sana itu gurunya honor semua, yang PNS 1, 2 biasanya kepala sekolah dan guru yang lainnya honor semua. Nah ini bagaimana masalah juga yang perlu di atasi sebenarnya. Mungkin juga yang lain-lainnya seperti itu. Kita masalah banyak kekurangan juga, mesti bisa di maklumi saja. Mungkin nanti juknisnya kan lebih apa namanya... lebih mempermuda mereka menyerap dana BOS itu. Nah mungkin juga yang lain-lainnya itu seperti itu sama kita. Kalau SMP itu masih lumayan, kan masih bisa ini! Kalau SD nya agak masalah, kalau di kota-kota tidak ada masalah. Tapi kalau SD ada yang di wilayah, wilayah-wilayah daratan sana. Apa istilahnya Dapil, Wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, belum lagi tanah Krayan, belum lagi wilayah mana saja. Nah itulah banyak masalah di sana. Ada gurunya cuma 1 lainnya PNS, yang

lainnya semua tenaga honor, kan begitu. Jadi bagaimana menghadapinya? Nah ini perlu kita semua mungkin dari pak lisran ada yang mungkin masukan, dari sana seperti apa itu idenya nanti bisa membantu pemerintah nanti. Tetapi memang namanya pegawai, reformen bagaimana jadi namanya pengelolaan uang ini memang harus transparan, harus benar-benar sesuai dalam arti, tetapi kondisi bagaimana lagi seperti itu. Kita juga memeriksa mengingatkan ini harus begini. Gitu! Kita sifatnya pembinaan juga ada gitu. Mungkin kalau dari dananya itu sendiri, turunnya mungkin, ini ya kalau ada kendala. Mungkin Nopember atau Desember. Tapi kita lihat ini mungkin, ada masalah. Kalau dana itu cepat turun pak ya? Nah itu yang kita atasi kenapa sampai lambat. Itu mungkin kendalanya dapat kita informasikan nanti. Masalahnya di mana? Tapi biasanya kalau dana itu APBD tidak ada masalah. Biasanya ee...itu lancar saja semua gitu. Saya kira itu.



Lampiran 2.7

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Muhammad Rifai, SE
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Nunukan
Tempat : Di ruang kerja Infektorat Kabupaten Nunukan
Tanggal : Selasa, 3 Mei 2016

Pertanyaan!

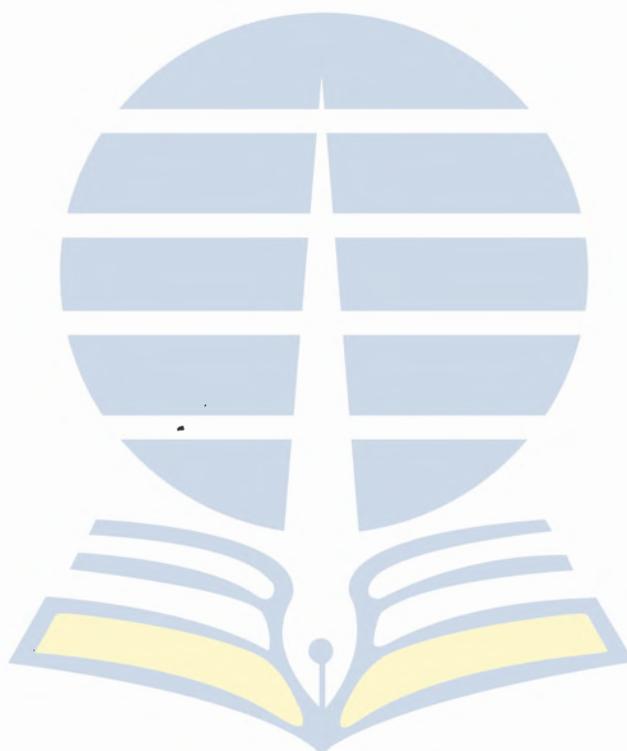
1. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan-hambatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS SLTP/ SMP di Kabupaten Nunukan baik akuntabilitas prosedural, akuntabilitas keuangan, dan akuntabilitas manfaat?

Jawab:

Sebelum kita masuk langkah-langkah Perda. Lalu disini kita gambarkan dulu hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Contohnya begini ada dana BOS, kita anggap terlalu lambat sampai ke sekolah nah...ini mungkin kita ke depannya akan potong. Maksudnya potong itu dari pada system itu yang terlalu panjang ke sekolah, dari sekolah ke Diknas, dari Diknas ke keuangan. Nah kita potong. Kedua Masalah Izin, tidak usahlah kita ke Bupati, ee...yang mengeluarkan dalam hal ini ke Dinas Pendidikan. Dalam menyusun itu langkah-langkah kecil. Masalah peng SPJ an, Peng SPJ an itu kan anggap kemarin kan masuk ke wilayah 3, itu kan Banyak Kepala sekolah masalah keuangan ke bendahara tidak mengerti atau kurang mengerti. Nah langkah kami itu bagaimana? Kita melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan Diklat masalah peng SPJ an dana BOS. Dalam hal ini kita prioritisasikan kepada bendahara dan kepala sekolah. Banyak dana-dana anggaran itu tidak sampai tepat sasaran. Contohnya begini...untuk dana BOS sampai ke tangan murid yang ada contohnya pembelian kursi dan meja ruang kepala sekolah. Nah itu tidak nyambung kepada langsung kepada murid-muridnya. Itu kita anggap salah. Nah itulah mestinya ada diklat untuk bendahara dan kepala sekolah. Nah pernah kita lihat ada di wilayah 3. Kebanyakan di sekolah-sekolah itu hanya PNS nya se dikit. Otomatis sempat sebuah sekolah hanya kepala sekolah nya yang PNS, yang lainnya honor semua, maka di situlah kita anggap terlalu sulit guru, Kepala Sekolah itu untuk menjalankan langkah-langkah, untuk membelanjakan apa-apa di SPJ nya.



**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN NUNUKAN**



Bulan : DESEMBER 2015

SMPN 1 Nunukan
Nunukan Barat / Nunukan
Nunukan
Kalimantan Utara

UNIVERSITAS

No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (RP)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (RP)
	Saldo tahun lalu (November 2015)	12.905.540,00	01/12/2015		1	Dibayar 1 Bh SSP Pajak Bulan Desember 2015	45.000
			01/12/2015		2	Dibayar pembelian Materai 6.000 dan Materai 3.000	890.000
			01/12/2015		3	Dibayar Honorarium Tenaga Kependidikan Honoror Bulan Desember 2015	6.300.000
			01/12/2015		4	Dibayar Honorarium Bendahara Bosda Bulan Desember 2015	600.000
			01/12/2015		5	Dibayar Biaya Foto Copy dan Penjilitan Laporan Bosda Tw 4 Bulan Okt s.d Des 2015	573.140
			01/12/2015		6	Dibayar 1 Bh Spanduk Kegiatan Lomba Melukis Bulan Desember 2015	240.000
			01/12/2015		7	Dibayar 1 Set Piala Kegiatan Lomba Melukis	310.000
			01/12/2015		8	Dibayar 15 Lbr Kertas Karton Kegiatan Lomba Melukis Bulan Desember 2015	45.000
			01/12/2015		9	Dibayar Konsumsi Kegiatan Lomba Melukis Bulan Desember 2015	2.754.000
			01/12/2015		10	Dibayar Konsumsi Rapat Kepala Sekolah Bulan Desember 2015	632.400
			01/12/2015		11	Dibayar 1 Lbr Spanduk Kegiatan Perayaan Natal Agama Katolik Bulan Desember 2015	150.000
			01/12/2015		12	Dibayar Honor Kegiatan Perayaan Natal Agama Katolik Bulan Desember 2015	150.000
			01/12/2015		13	Dibayar Konsumsi Kegiatan Perayaan Natal Agama Katolik Bulan Desember 2015	216.000
	Penerimaan bulan ini	12.905.540,00	31/12/2015			Pengeluaran bulan ini	12.905.540
	Penutupan	12.905.540,00				Saldo Penutupan	12.905.540

nis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Umum/Tunal ditutup dengan keadaan saldo, sbb :
Rp 12.905.540.000,00



Universitas terbuka
198602 2 008

Dibuat Oleh :
Bendahara Sekolah,

SARINA

NIP. 19820210 200801 2 018



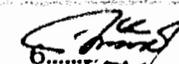
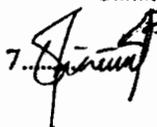
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NUNUKAN
SSN, AKREDITASI: A NPSN : 304000537

Jalan Iskandar Muda RT.X, Nunukan 77422, Telepon (0556) 21736 –emailsmplnunukan@yahoo co.id

DAFTAR TANDA TERIMA
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI (PKS) BBM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BULAN : OKTOBER 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 NUNUKAN
KECAMATAN : NUNUKAN
KABUPATEN : NUNUKAN

No	Nama	Uraian	Jumlah Sebelum Pajak (Rp)	Pph	Jumlah Setelah Pajak (RP)	Tanda Tangan
1.	Nurhayati	Peningkatan Administrasi Sekolah	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	1.
2.	Silas	Peningkatan Administrasi Sekolah	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	2.
3.	Neny Matius	Peningkatan Administrasi Sekolah	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	3.
4.	Heru Susanto	Peningkatan Administrasi Sekolah	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	4.
5.	Enci Ridwan	Peningkatan Kebersihan Sekolah	Rp 1.000.000,0	-	Rp 1.000.000,00	5.

6.	Sopianto	Peningkatan Keamanan Sekolah	Rp 1.000.000,00	-	Rp 1.000.000,00	
7.	Sabri Sade, S.Pd.SD	Peningkatan Teknisi Dapodik	Rp 1.300.000,00	-	Rp 1.300.000,00	
		Jumlah	Rp 7.300.000,00	-	Rp 7.300.000,00	

Nunukan, 30 Oktober 2015

Bendahara



Sarina

NIP.19820210 200801 2 018



**BUKU PEMBANTU PAJAK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Nunukan
Desa /Kecamatan : Nunukan Barat / Nunukan

Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara

Bulan : Oktober - Desember 2015

Tanggal	No kode	No Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)			Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPn	PPH 21	PPH 22		
	001	1	Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan semester PNS			160.500		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan semester PNS				160.500	
			Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan semester Non PNS			66.000		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan semester Non PNS				66.000	
	002	2	Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan Tengah semester PNS			112.000		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan Tengah Semester PNS				112.000	
			Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan Tengah semester Non PNS			62.500		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan Tengah Semester Non PNS				62.500	
			Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan semester PNS			160.500		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan semester PNS				160.500	
			Diterima setoran Pajak honorarium Panitia Ulangan semester Non PNS			66.000		
			Dibayarkan Pajak honorarium Panitia Ulangan semester Non PNS				66.000	
	003	2	Diterima setoran Pajak honorarium penganggung jawab bosda bulan Oktober -Desember			337.500		
			Dibayarkan Pajak honorarium penanggung jawab bosda Oktober - Desember				337.500	
	004	3	Diterima setoran Pajak honorarium bendahara bosda Oktober - Desember			270.000		
			Dibayarkan Pajak honorarium bendahara bosda Oktober - Desember				270.000	
	005	5	Diterima setoran Pajak Pembelian ATK Bulan Oktober - Desember	1.500.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian ATK Oktober - Desember				1.500.000	
	006	6	Diterima setoran Pajak Pembelian Alat kebersihan	800.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian Alat kebersihan				800.000	
	007	7	Diterima setoran Pajak Pembelian Alat listrik	260.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian Alat listrik				260.000	
	008	8	Diterima setoran Pajak Pembelian kipas angin	150.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian kipas angin				150.000	
	009	9	Diterima setoran Pajak Pembelian Printer	150.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian Printer				150.000	
	010	10	Diterima setoran Pajak Pembelian Spanduk	50.000				
			Dibayarkan setoran Pajak Pembelian Spanduk				50.000	

BUKU KAS UMUM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
TRI WULAN KE EMPAT TAHUN ANGGARAN 2016

Bulan : Desember 2015

Tanggal	Uraian	Jumlah	Tanggal	Kode	Uraian	Jumlah
01-Des-15	Saldo bulan lalu	18.230.000	07-Des-15	5.2.1.02.03	Di Bayarkan biaya pengantian Honorarium Panitia Ulangan Semester 2	2.390.000
			07-Des-15	5.2.2.14.04	Di Bayarkan biaya pengantian Konsumsi Kekuatan Maulid Nabi	3.500.000
			07-Des-15	5.2.2.14.04	Di Bayarkan biaya pengantian Konsumsi Kegiatan Natal	1.000.000
			30-Des-15	5.2.1.02.02	Di Bayarkan biaya pengantian Honorarium Guru Bulan Desember	5.040.000
			30-Des-15	5.2.1.02.02	Di Bayarkan biaya pengantian Honorarium Tenaga kependidikan Bulan Desember	1.250.000
			30-Des-15	5.2.1.02.03	Di Bayarkan biaya pengantian Honorarium Penanggung Jawab Bosda Bulan Desember	750.000
			30-Des-15	5.2.1.02.03	Di Bayarkan biaya pengantian Honorarium Bendahara Bosda Bulan Desember	600.000
			30-Des-15	5.2.2.06.02	Di Bayarkan biaya pengantian Konsumsi Rapat Bulan Desember	2.000.000
			30-Des-15	5.2.2.30.02	Di Bayarkan biaya pengantian Pengandaan Berkas Dokumen Sekolah	500.000
			30-Des-15	5.2.2.30.02	Di Bayarkan biaya pengantian Pengandaan Berkas Laporan PKG	400.000
			30-Des-15	5.2.2.30.02	Di Bayarkan biaya pengantian Pengandaan Berkas Uangan Tengah Semester	200.000
			30-Des-15	5.2.2.30.02	Di Bayarkan biaya pengantian Pengandaan Laporan	500.000
			30-Des-15	5.2.2.30.02	Di Bayarkan biaya pengantian Penjilidan Laporan	100.000
31-Des-15	Jumlah Penerimaan	18.230.000	31-Des-15	Jumlah Pengeluaran		18.230.000
			31-Des-15	Saldo Akhir bulan desember		
31-Des-15	Jumlah Penutupan	18.230.000	31-Des-15	Jumlah Penutupan		18.230.000

Mengetahui
Kepala Sekolah


Gumolung Bonta S.Pd

NIP.19601223 198401 1 001

Nunukan, 31 Desember 2015

Bendahara


Djadmoko Budi Santoso S.Pd

NIP.19720416 200012 1 004

BUKU KAS UMUM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
SMP NEGERI 3 NUNUKAN
TRIWULAN IV
BULAN DESEMBER 2015



NO. JRUT	TANGGAL DIBAYAR LUNAS	Kode Rek.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
			SALDO BULAN NOVEMBER 2015	Rp 347.000,00	
1	03/12/2015	5.2.2.11.01 (5.3)	Konsumsi Rutin Guru Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 (3 hari)		Rp 347.000,00
JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SAMPAI BULAN INI				Rp 347.000,00	Rp 347.000,00
JUMLAH KESELURUHAN TUNAI BOSDA					Rp -

Pada Hari ini, Kamis 31 Desember 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan

Penerimaan : Rp 347.000

Pengeluaran : Rp 347.000-

Saldo : Rp 0



Atasan Langsung,
Kepala SMP Negeri 3 Nunukan,

Mardiana, S. Pd

NIP. 19860725 199412 1 004

Nunukan, 31 Desember 2015

Bendahara SMP Negeri 3 Nunukan,

Harah, S. Pd

Nip : 19700612 200212 2 009

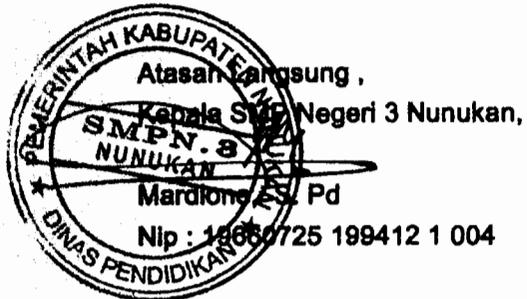
12/11/2015	5.2.2.01.02	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan		Rp	700.000,00
19/11/2015	5.2.2.11.01 (5.3)	Konsumsi Rutin Guru Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 (8 hari)		Rp	930.000,00
20/11/2015	5.2.2.06.02 (5.2)	Belanja Makan dan Minum Tamu		Rp	378.000,00
25/11/2015	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan		Rp	532.000,00
26/11/2015	5.2.2.01.01	Belanja ATK		Rp	715.000,00
30/11/2015	5.2.2.11.01 (5.3)	Konsumsi Rutin Guru Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 (9 hari)		Rp	913.000,00
		Pajak Insentif Bendahara BOSDA		Rp	31.500,00
		Pajak UTS 2015/2016		Rp	96.500,00
		Pajak Panitia Ulangan Semester Ganjil 2015/2016		Rp	93.500,00
JUMLAH KESELURUHAN PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SAMPAI BULAN INI				Rp	21.225.000,00
JUMLAH KESELURUHAN TUNAI BOSDA				Rp	20.878.000,00

Pada Hari ini, SENIN 30 NOVEMBER 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan

Penerimaan : Rp 21.225.000

Pengeluaran : Rp 20.878.000 -

Saldo : Rp 347.000



Nunukan, 30 November 2015

Bendahara SMP Negeri 3 Nunukan,

Mardiono
Mardiono, S. Pd

Nip : 19700612 200212 2 009

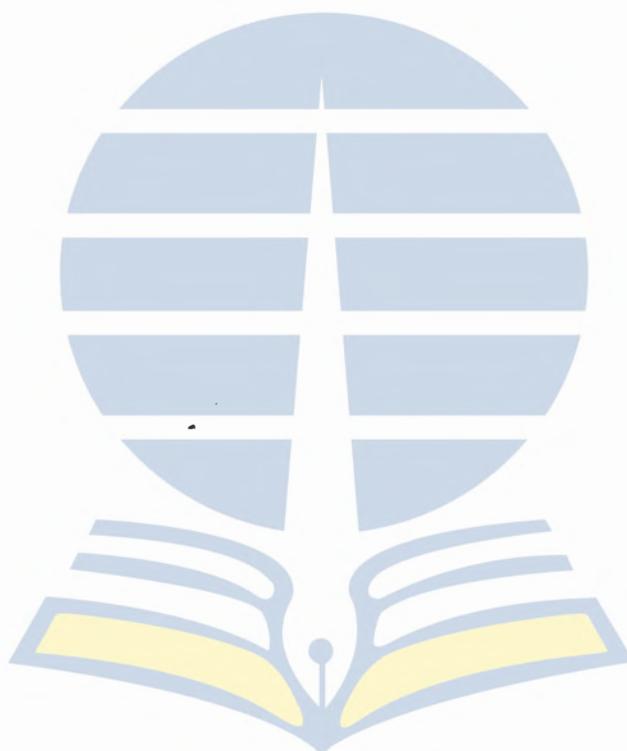


BUKU KAB UMUM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
SMP NEGERI 3 NUNUKAN
TRIWULAN IV
BULAN NOVEMBER 2015



NO. URUT	TANGGAL DIBAYAR LUNAS	Kode Rek.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
			BOSDA TRIWULAN IV 2015	Rp 21.225.000,00	
	09/11/2015	5.2.1.02.02	Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Tahun ajaran 2015/2016 BULAN OKTOBER 2015		Rp 3.100.000,00
		5.2.1.01.03 (2.3.2)	Honorarium Panitia Ulangan Tengah Semester Ganjil SMPN 3 NNK TA.2015/2016		Rp 1.303.500,00
		5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan		Rp 864.000,00
		5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan		Rp 600.000,00
		5.2.2.06.02 (5.2)	Belanja Makan dan Minum Tamu		Rp 368.000,00
		5.2.2.03.03	Belanja Rekening Listrik		Rp 505.000,00
		5.2.2.01.01	Belanja ATK		Rp 780.000,00
		5.2.2.06.02 (5.2)	Belanja Makan dan Minum Tamu		Rp 389.000,00
	09/11/2015	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan		Rp 864.000,00
		5.2.1.02.02	Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Tahun ajaran 2015/2016 BULAN NOVEMBER 2015		Rp 2.350.000,00
		5.2.1.01.03 (2.4.2)	Honorarium Panitia Ulangan Semester Ganjil SMPN 3 NNK Tahun Pembelajaran 2015/2016		Rp 1.336.500,00
		5.2.2.06.02 (5.1)	Konsumsi Rapat Persiapan Ulangan Semester Ganjil tahun ajaran 2015/2016		Rp 600.000,00
		5.2.1.01.03 (1)	Insentif Bendahara BOSDA		Rp 178.500,00
		5.2.2.03.03	Belanja Rekening Listrik		Rp 1.010.000,00
	10/11/2015	5.2.2.03.03	Belanja Rekening Listrik		Rp 1.010.000,00
	10/11/2015	5.2.2.11.01 (5.3)	Konsumsi Rutin Guru Semester Genap tahun ajaran 2015/2016 (8 hari)		Rp 930.000,00
	12/11/2015	5.2.2.01.01	Belanja ATK (Pembelian Materiel)		Rp 300.000,00

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN**



BOS DAERAH TRIWULAN IV (OKTOBER S/D NOPEMBER)
TAHUN ANGGARAN 20152

42414.pdf

Tanggal	No. Rekening	No. Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
2015			Saldo Awal			
2015			Tarik Tunai Dana BOS Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2015	58.200.000		58.200.000
2015	5.2.1.02.02	2.1	Bayar Honor Panitia Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		4.900.000	53.300.000
2015			Disetor PPh Pasal 21 15 & 5 % atas pembayaran Honor Panitia Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		280.000	53.020.000
2015			Diterima PPh Pasal 21 15 & 5 % atas pembayaran Honor Panitia Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016	280.000		53.300.000
2015	5.2.1.02.02	2.1	Bayar Honor Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		6.000.000	47.300.000
2015			Disetor PPh Pasal 21 15 & 5 % atas pembayaran Bayar Honor Pengawa Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		340.500	46.959.500
2015			Diterima PPh Pasal 21 15 & 5 % atas pembayaran Bayar Honor Pengawa Ujian Tengah Semester Ganjil Bulan Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016	340.500		47.300.000
2015	5.2.2.06.02	2	Bayar Konsumsi Tamu Bulan Oktober 2015		574.700	46.725.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 05 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	45.885.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 06 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	45.045.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 07 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	44.205.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 08 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	43.365.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 09 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	42.525.300
2015	5.2.2.11.04	2	Bayar Konsumsi Panitia dan Pengawas Ujian Tengah Semester Ganjil Tanggal 10 Oktober 2015 Tahun Pelajaran 2015/2016		840.000	41.685.300
2015	5.2.2.11.04	1	Bayar Konsumsi siswa dan pendamping mengikuti kegiatan Latihan Gabungan PMR di SMPN 2 Nunukan Selatan Tanggal 20 Nopember 2015		697.000	40.988.300
2015	5.2.2.11.04	1	Bayar Konsumsi siswa dan pendamping mengikuti kegiatan Latihan Gabungan PMR di SMPN 2 Nunukan Selatan Tanggal 21 Nopember 2015		697.000	40.291.300
2015	5.2.2.11.04	1	Bayar Konsumsi siswa dan pendamping mengikuti kegiatan Latihan Gabungan PMR di SMPN 2 Nunukan Selatan Tanggal 21 Nopember 2015		697.000	39.594.300

5 2 2 06 02	2	Bayar Konsumsi Tamu Bulan Nopember 2015		500.000	39.094.300
5 2 2 06 14	5	Bayar Fotocopy Soal Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 Bulan Nopember 2015		13.780.800	25.313.500
		Disetor PPn 10 % Atas Pembayaran Fotocopy Soal Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 Bulan Nopember 2015		1.252.800	24.060.700
		Diterima PPn 10 % Atas Pembayaran Fotocopy Soal Ulangan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 Bulan Nopember 2015	1.252.800		25.313.500
		Pengeluaran s.d Bulan ini		34.759.800	
		Saldo			25.313.500

Saldo awal pada tanggal Tiga Puluh bulan Nopember tahun dua ribu limabelas,

dan pada tanggal ditutup dengan keadaan saldo sebesar

Rp 25.313.500

diuraikan dari:

Rekening Bank Rp

Rekening Kas Rp

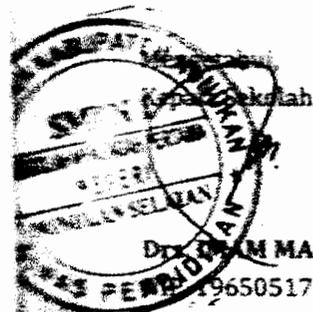
Rekening Perseorangan Rp

25.313.500

Rp 25.313.500

Rp

terbilang seluruh:



Dibuat Oleh
Bendahara,

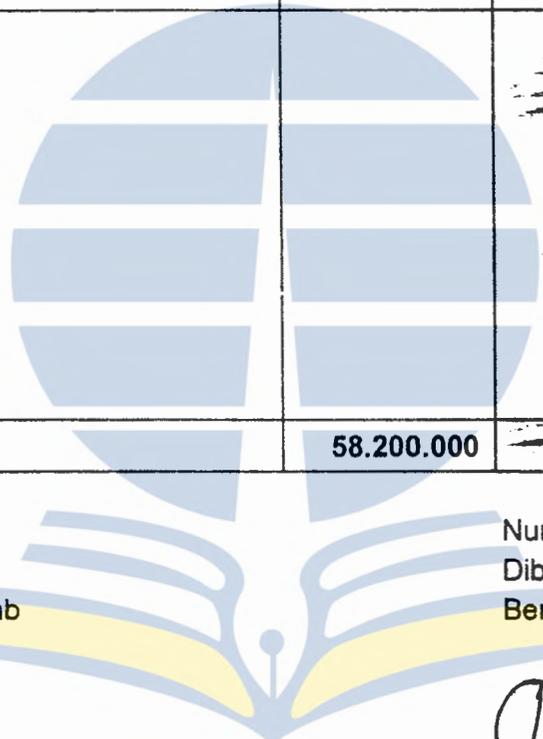
CAPPE

NIP. 19690218 200701 1 012

BUKU BANTU BANK

42414.pdf

BOS DAERAH TRIWULAN IV (OKTOBER S/D NOPEMBER) TAHUN ANGGARAN 20152

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
19/11/2015	01	Saldo Bank	58.200.000		58.200.000
19/11/2015	02	Tarik Tunai		58.200.000	-
19/11/2015	03	Bunga bank			-
19/11/2015	04	Pajak			-
19/11/2015	05	Administrasi			-
					
30/11/2015	Penutupan		58.200.000	58.200.000	-

Nunukan, 30 Nopember 2015

Dibuat Oleh
Bendahara,



CAPPE

NIP. 19690218 200701 1 012



Drs. HADI MALIK

19650517 199702 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMPN 2 Nunukan Selatan

42414.pdf

KWITANSI

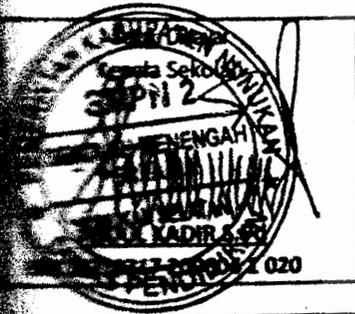
Nomor : 002

Telah Terima dari : Bendahara SMP Negeri 2 Nunukan Selatan

Uang Sejumlah : Enam Ratus Ribu Rupiah

Untuk Kepentingan : Pembayaran Honorarium Bendahara Pengelola BOSDA SMPN 2 Nunukan Selatan
Oktober s/d Desember Tahun Anggaran 2015

Nunukan, 07 Desember 2015



BUKU KAS UMUM						
Nama Sekolah : SMPN 3 Nunukan Selatan		Kabupaten : Nunukan			Provinsi : Kalimantan Timur	
No. Kode		No. Bukti			Uraian	
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
11/11/2015			Diterima Dana BOSDA Semester IV Tahun 2015 (Langsung Tank)	Rp 5.100.000,00		Rp 5.100.000,00
11/11/2015			Dibayarkan Honorarium Pegawai Non PNS Bulan Oktober s.d November 2015		Rp 1.300.000,00	Rp 3.800.000,00
11/11/2015			Dibayarkan Alat Kebersihan		Rp 1.513.000,00	Rp 2.287.000,00
11/11/2015			Dibayar Komsumsi Tamu		Rp 665.000,00	Rp 1.622.000,00
01/12/2015			Dibayar Honararium Pegawai Non PNS Bulan Desember 2015		Rp 650.000,00	Rp 972.000,00
03/12/2015			Dibayarkan Pulsa Token Listrik Bulan Oktober s.d Desember 2015		Rp 306.000,00	Rp 666.000,00
03/12/2015			Dibayarkan Pembelian Alat Listrik		Rp 174.000,00	Rp 492.000,00
03/12/2015			Dibayarkan Foto Copy Kantor dan SPJ BOSDA TW IV Tahun 2015		Rp 492.000,00	Rp -
PENUTUPAN				Rp 5.100.000,00	Rp 5.100.000,00	Rp -

Pada hari ini, 03 Desember 2015, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi buku sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum

Terdiri dari:

- Saldo Bank Rp -

- Saldo Kas Tunai Rp -

Jumlah Rp -

Perbedaan = Rp -

Mengetahui

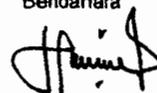
Kepala Sekolah


Rochmatul S.Pd

NIP. 19800103 200502 1 001

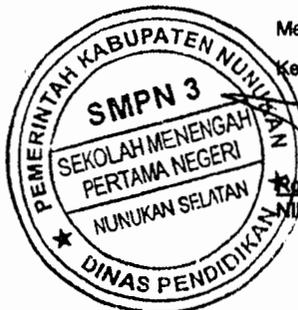
Dibuat oleh:

Bendahara



Irwan Susilo, S.Pd

NIP. 19851030 201001 1 004



BUKU PEMBANTU PAJAK
TRIWULAN 2 BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2015
SMP NEGERI 3 NUNUKAN SELATAN

Form
BOS K-6

Nama Sekolah : SMPN 3 Nunukan Selatan
 Kel/Kecamatan : Tg. Harapan/Nunukan Selatan

Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uralan	Penerimaan (Debit)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengeluaran Pajak						
31/03/2015			Dibayar Pajak Belanja makan dan minum tamu Bulan Juli s.d September 2015				Rp 26.600		
31/03/2015			Dibayar Pajak Belanja Peralatan Kebersihan Bulan Juli s.d September 2015	Rp 151.300					
				Rp 151.300	Rp -		Rp 26.600	Rp 177.900	

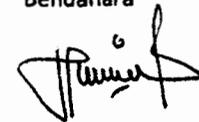
Mengetahui
Kepala Sekolah

Rochmatdi, S.Pd
 Rochmatdi, S.Pd
 NIP. 19800103 200502 1 001

Nunukan, 01 Desember 2015

Dibuat oleh:

Bendahara



Irwan Susilo, S.Pd

NIP. 19851030 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 NUNUKAN SELATAN

Alamat :Jln. Dewi Sartika RT.05 RW 02 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan

HONORAIUM PEGAWAI NON PNS BULAN DESEMBER 2015

NO	NAMA	Uraian	Satuan	Volume	Jumlah	TANDA TANGAN
1	Fatmawati, S.Pd	Guru Honoror	Rp. 350.000	2	Rp. 350.000	
2	Salmiah	Cleaning Servis	Rp. 100.000	2	Rp. 100.000	
3	Selvi Dirmawana	Tenga Adminitrasi/ Perpustakaan	Rp. 200.000	2	Rp. 200.000	

Nunukan, 01 Desember 2015

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Rochmatdi, S.Pd

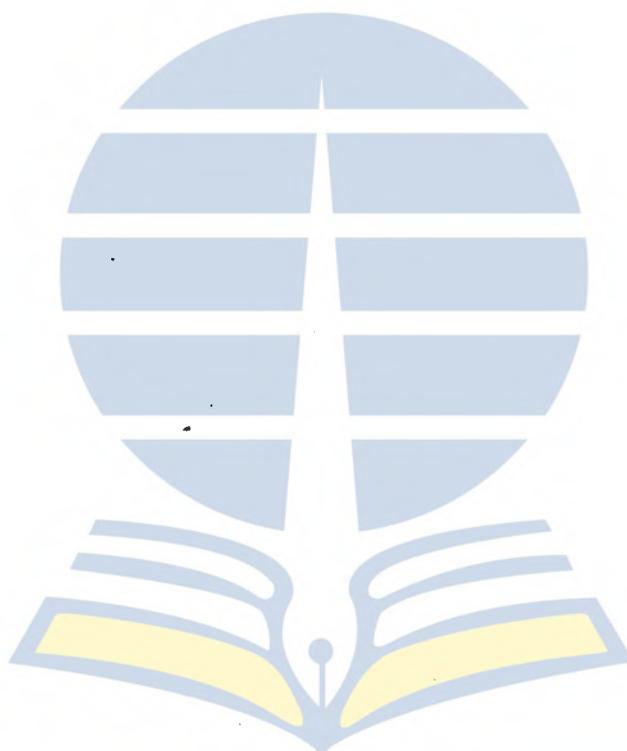
NIP. 19800103 2005 1 001

Dibayar Bulan April s/d Juni Pada Tanggal 01 Desember 2015
Bendahara

Irwan Susilo, S.Pd

NIP. 19851030 201001 1 004

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN SEBUKU**



BUKU KAS UMUM
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2015

LOKASI SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SEBUKU
CAMATAN : SEBUKU
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
PERIODE : IV PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER

TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
/11/2015			Saldo Bulan Lalu	Rp 0	Rp 0	Rp 0
/11/2015	5.2.1.01.03		Terima Dana Bosda Triwulan IV	Rp 9,300,000.00	Rp 0	Rp 9,300,000.00
/11/2015	5.2.2.02.02		Pelunasan Belanja Pegawai (Honorarium Rutin) Pegawai tidak tetap 4 Orang x 3 bulan Honor pegawai Administrasi (TU) Bulan : Oktober s/d Desember 2015		Rp 3,720,000.00	
/11/2015			Pelunasan atas belanja barang dan jasa		Rp 5,580,000.00	Rp 0

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 bulan Desember tahun dua ribu lima belas Buku ditutup dengan Rincian sebagai berikut:

Uang Tunai : 9,300,000.00
Saldo Bank : 9,300,000.00
Saldo Tunai : -
Jumlah Penutup : -



Sebuku, 31 Desember 2015
Bendahara

PRAYOGI, S.Pd
NIP. 198410092009021002

Sekolah : SMP Negeri 2 Sebuku
 Kecamatan : Kunyit / Sebuku
 Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
10/11/2015			Saldo Kas 10 November 2015	Rp 8.400.000	Rp -	Rp 8.400.000
10/11/2015	5.2.2.01.05	002	Bayar belanja untuk Kebersihan tgl. 03 Oktober 2015, Nota Bon 01		Rp 388.000	Rp 8.032.000
10/11/2015	5.2.2.11.02	003	Bayar Belanja Konsumsi Rapat guru , Tgl. 8 Agustus 2015, nota bon 02		Rp 250.000	Rp 7.782.000
10/11/2015	5.2.2.03.02	004	Bayar belanja 2 galon Air minum dan 2 kotak air aqua gelas, tgl. 10 Oktober 2015, nota bon 03		Rp 80.000	Rp 7.702.000
10/11/2015	5.2.2.01.06	005	Bayar belanja BBM untuk Diesel penerangan dan kompor, tgl. 10 Oktober 2015, Nota bon 04		Rp 273.000	Rp 7.429.000
10/11/2015	5.2.2.11.02	006	Bayar belanja Untuk Konsumsi Rapat, tgl. 4 September 2015, Nota Bon 05		Rp 250.000	Rp 7.179.000
10/11/2015	5.2.2.11.01	007	Bayar belanja konsumsi rutin guru dan staf untuk bin Oktober 2015, nota Bon 06		Rp 325.000	Rp 6.854.000
10/11/2015	5.2.2.03.02	008	Bayar belanja 2 galon Air minum dan 2 kotak air aqua gelas, tgl. 1 November 2015, nota bon 07		Rp 80.000	Rp 6.774.000
10/11/2015	5.2.2.01.06	009	Bayar belanja BBM untuk Diesel penerangan dan kompor		Rp 273.000	Rp 6.501.000
10/11/2015	5.2.2.11.01	010	Bayar belanja untuk konsumsi rutin guru dan staf bulan November 2015		Rp 325.000	Rp 6.176.000
12/11/2015	5.2.2.01.03	011	Bayar belanja 8 bh lampu TL Philips dan Hanoch		Rp 300.000	Rp 5.876.000
13/11/2015	5.2.2.11.02	012	Bayar belanja konsumsi rapat guru untuk semester ganjil, Tgl. 13 November 2015		Rp 300.000	Rp 5.576.000
30/12/2015	5.2.2.01.06	013	Bayar belanja 2 galon Air minum dan 2 kotak air aqua gelas, untuk Desember 2015		Rp 80.000	Rp 5.496.000
30/12/2015	5.2.2.01.03	014	Bayar belanja BBM untuk Diesel penerangan dan kompor, untuk Desember 2015		Rp 273.000	Rp 5.223.000
30/12/2015	5.2.2.11.01	015	Bayar belanja untuk konsumsi rutin guru dan staf, untuk Desember 2015		Rp 325.000	Rp 4.898.000
30/12/2015	5.2.2.06.02	016	Belanja foto copy 98 lembar, @ Rp. 1.000,- laporan Bosda TW.4		Rp 98.000	Rp 4.800.000
31/12/2015	5.2.1.02.02	017	Bayar honor Guru dan staf untuk bulan Juli s/d Desember 2015		Rp 4.800.000	Rp -
			JUMLAH	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	Rp -
			Saldo Kas akhir Desember 2015			NIHIL

Pada hari ini Kamis tanggal 31, Buku kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai Rp -
 Saldo Bank Rp -
 Jumlah Rp -



Sebuku, 31 Desember 2015

Dibuat oleh.

Bendahara SMP Negeri 2 Sebuku

Rosaliah, S.Pd

Nip. 19801212 200902 2 003

BUKU PEMBANTU KAS UMUM
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
BULAN NOVEMBER (TRIWULAN IV)

NAMA SEKOLAH : SMPN 3 SEBUKU
 DESA / KEC. : LULU / SEBUKU

KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

NO	TANGGAL	NO KODE	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					(Debit)	(Kredit)	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
01	06/11/2015			Penerimaan Dana Bos Daerah Triwulan IV	Rp 2,325,000.00	-	Rp 2,325,000.00
02	10/11/2015	5.2.2.11.01	01	Bayar PeLunasan Komsumsi/Snack Pegawai dan Guru (Oktober - November)		Rp 600,000.00	Rp 2,325,000.00
03	10/11/2015	5.2.2.01.05	02	Bayar Alat dan Bahan Kebersihan (November)	-	Rp 66,000.00	Rp 2,259,000.00
04	10/11/2015	5.2.2.01.01	03	Bayar ATK (November)		Rp 416,000.00	Rp 1,843,000.00
05	10/11/2015	5.2.2.33.02	04	Bayar Jam Dinding (November)	-	Rp 100,000.00	Rp 1,743,000.00
06	10/11/2015	5.2.1.02.02	05	Bayar Honorarium Rutin Tenaga Kependidikan (Oktober - November)	-	Rp 420,000.00	Rp 1,323,000.00
07	10/11/2015	5.2.1.01.03	06	Bayar Honorarium Tim Kegiatan Kependidikan (Oktober - November)	-	Rp 200,000.00	Rp 1,123,000.00
	30/11/2015	JUMLAH PENUTUPAN			Rp 2,325,000.00	Rp 1,802,000.00	Rp 523,000.00

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp. 523,000.00
 Terdiri dari :
 - Saldo Uang Tunai Rp. 523,000.00
 - Saldo Bank Rp. 0.00
Jumlah Rp. 523,000.00

Mengetahui :
 Kepala Sekolah,


 PALEMBO, S.Pd.

NIP 19650516 200912 1 002

Sebuku, 30 November 2015
 Bendahara Dana BOS,


 KASNI DAR, S.Pd.

NIP. 19830327 201001 2 006

42414.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMPN.3 SEBUKU

Jl.PEMDA RT.02 Desa Lulu Kec.Sebuku Kab.Nunukan Prov Kal-Tara,77491

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP. NEGER.3 SEBUKU

Nomor : 424/02/SMP.3/1/2015

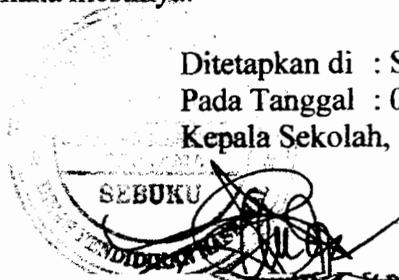
TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SMPN 3 SEBUKU

- : Bahwa untuk memperlancarkan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOSDA Sekolah, dipandang perlu mengangkat Tim Manajemen Bosda Sekolah di SMPN 3 Sebuku Tahun Anggaran 2015.
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362)
- : 4. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
- : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 101 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- : Tim Manajemen BOSDA Sekolah SMP. Negeri 3 Sebuku
1. Penanggung jawab,
Kepala Sekolah : **Palembo, S.Pd.**
2. Anggota,
A. Bendahara BOSDA Sekolah : **Kasnidar. S.Pd.**
B. Pembantu Bendahara BOSDA : -
Orang Tua Peserta didik : **Malik**
Komite Sekolah : **Joko**
- : Segala Pembiayaan Yang Berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di Adakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal
- : Keputusan ini akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

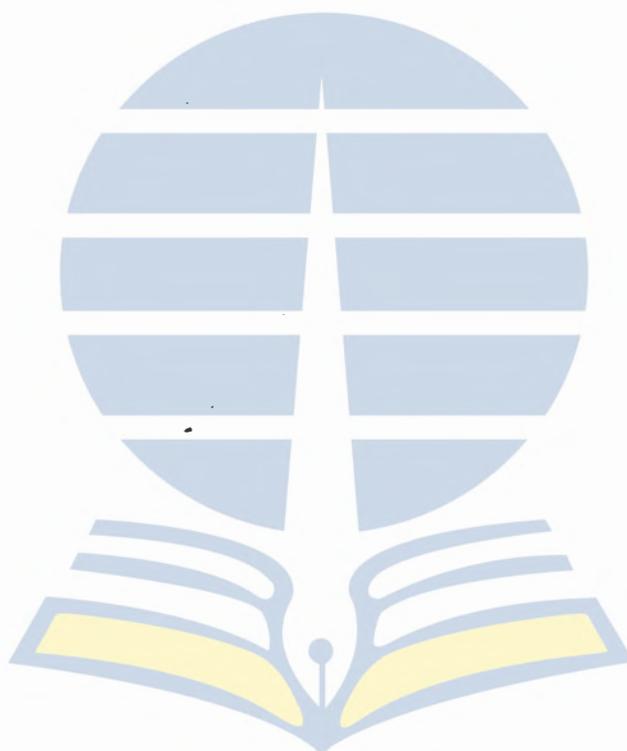
Ditetapkan di : Sebuku
Pada Tanggal : 05 Januari 2015
Kepala Sekolah,



Palembo S/Pd

Nip. 19650516200312 1 002

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN SEBATIK**



KWITANSIB.K NO. 3
Kode Rek**Sudah terima dari** : Bendahara SMP Negeri 1 Sebatik**Uang sebanyak** : **Rp 1,800,000****Untuk** : Bayar Gaji Penjaga Sekolah 1 Orang Oktober -
Desember 2015**TERBILANG** : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Sebatik, 12/11/2015

<p>Setuju dibayar ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS</p>  <p>M. NASIR, S.Pd NIP. 19691231 2003012 1 032</p>	<p>Dibayar Lunas Bendahara 12/11/2015</p>  <p>ANDI SUAIB, S.Pd NIP. 19821111 200902 2 002</p>	<p>Diterima Oleh :</p>  <p>ANDI SUAIB, S.Pd NIP. 19821111 200902 2 002</p>
--	--	---

SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SEBATIK
 / KECAMATAN : TANJUNG KARANG / SEBATIK
 KANTON : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NO. INDIKATOR	NO.KODE	NO.BUKTI	URAIAN PENERIMAAN	PENERIMAAN (DEBET)				JUMLAH (Rp)
				PPN	Pph 21	Pph 22	Pph 23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-Dec-15	5.2.2	1	Honor penanggung Jawab	-	235,000.00	-	-	235,000.00
1-Dec-15	5.2.2	2	Honor pembantu Bendahara	-	60,000.00	-	-	60,000.00
1-Dec-15	5.2.3	3	Konsumsi Rapat	17,000.00				17,000.00
1-Dec-15	5.2.4	4	Pengadaan Lemari Obat	138,000.00				138,000.00
1-Dec-15	5.2.5	5	Penggandaan Soal & LJK Us 1 Th 2015/2016	124,800.00				124,800.00
JUMLAH				279,800.00	295,000.00	-	-	574,800.00

Nunukan, Desember 2015

Bendahara

Andi Suaib, S.Pd
 NIP.19821111 200902 1 002



KWITANSI

B.K NO. 18
Kode Rek 5.2.1.01.03

Sudah terima dari : Bendahara SMPN 2 SEBATIK

Uang sebanyak : **Rp 530,000**

Untuk : Bayar pergantian gaji tenaga TU Honor 2 Orang Triwulan IV

TERBILANG : **Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah**

Sebatik, 30/12/2015

 <p>Seluruh dibayar ATASAN LANGSUNG REMEGANG KAS PEMERINTAH KABUPATEN SEBATIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AR RAHMAN MAMING, S.Pd NIP. 19740125 200604 1 007</p>	<p>Dibayar Lunas Bendahara 30/12/2015</p>  <p>RUDIANTO, S.Pd NIP. 19841014 201001 1 005</p>	<p>Diterima Oleh :</p>  
--	--	---

BUKU KAS TUNAI
BOSDA TRIWULAN IV BULAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 TULIN ONSOI
KECAMATAN : TULIN ONSOI
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENGELUARAN(RP)
16/11/2015		Pindahan	-			Pindahan	-
		Terima Tunai	30.375.000				
				16/11/2015	1	konsumsi rutin (02-10-2015)	1.000.000
				16/11/2015	2	Beli ember 10 bh @ Rp.35.000 (07-10-2015)	350.000
				16/11/2015	3	Belanja serok sampah 15 bh@Rp.25.000 (08-10-2015)	375.000
				16/11/2015	4	Tinta print colour 6 bh @ Rp.60.000 (09-10-2015)	360.000
				16/11/2015	5	Belanja densol kaleng 15 bh@Rp.25.000 (10-10-2015)	375.000
				16/11/2015	6	Belanja solar 25 ltr@ Rp.12.000 (11-10-2015)	300.000
				16/11/2015	7	Belanja baigon redset 10 bh @Rp.35.000 (12-10-2015)	350.000
				16/11/2015	8	Belanja tinta print black 6 bh @ Rp.60.000 (13-10-2015)	360.000
				16/11/2015	9	Pembelian kertas f4 10 rim@60.000(15-10-2015)	600.000
				16/11/2015	10	Pembelian kertas A4 2 rim@55.000(17-10-2015)	110.000
				16/11/2015	11	Pembelian minyak gosok 10 btl@20.000(18-10-2015)	200.000
				16/11/2015	12	Pembelian obat merah 10 btl@20.000(19-10-2015)	200.000
				16/11/2015	13	Pembelian minyak kampak 10 btl@20.000(20-10-2015)	200.000
				16/11/2015	14	Pembelian handiplas 10 ktk@20.000(21-10-2015)	200.000
				16/11/2015	15	Pembelian alkohol 10 btl@20.000(22-10-2015)	200.000
				16/11/2015	16	Pembelian oli mesin 4 ltr@50.000(23-10-2015)	200.000
				16/11/2015	17	Belanja solar 25 @ Rp.12.000 (24-10-2015)	300.000
				16/11/2015	18	Belanja keranjang sampah 10 bh@Rp.30.000 (26-10-2015)	300.000
				16/11/2015	19	konsumsi rutin (02-11-2015)	1.000.000
				16/11/2015	20	Pembelian keset kaki 4 bh@25.000' (5-11-2015)	100.000
				16/11/2015	21	Pembelian densol kaleng 4 klg@25.000(10-11-2015)	100.000
				16/11/2015	22	Pembelian serok sampah 4 bh@25.000(12-11-2015)	100.000
				16/11/2015	23	Pembelian sabun cuci tangan 3 bh@20.000(15-11-2015)	60.000
				17/11/2015	24	Pembelian sabun sunlight 3 bh@20.000(17-11-2015)	60.000

			20/11/2015	25	Pembelian sabun rinso 2 bks@20.000(20-11-2015)	40.000
			21/11/2015	26	Pembelian kertas jilid 2 rim@60.000(21-11-2015)	120.000
			22/11/2015	27	Pembelian len. agung 2 ktk@60.000(22-11-2015)	120.000
			23/11/2015	28	Pembelian spidol white board 2 ktk@120.000(23-11-2015)	240.000
			24/11/2015	29	Pembelian tinta spidol 2 ktk@180.000(24-11-2015)	360.000
			25/11/2015	30	Pembelian tinta printer black 6 ktk@60.000(25-11-2015)	360.000
			26/11/2015	31	Pembelian tinta printer colour 4 ktk@60.000(26-11-2015)	240.000
			27/11/2015	32	Pembelian buku besar 4 bh@20.000(27-11-2015)	80.000
			01/12/2015	33	Belanja kran air 11 bh@Rp.25.000 (01-12-2015)	275.000
			02/12/2015	34	konsumsi rutin (02-12-2015)	1.000.000
			03/12/2015	35	Belanja lampu philips 10@ Rp.50.000 (03-12-2015)	500.000
			05/12/2015	36	Belanja listrik kabel tunggal 1 roll (5-12-2015)	500.000
			06/12/2015	37	Belanja By Fresh 15 bh @Rp.20.000 (06-12-2015)	300.000
			07/12/2015	38	Belanja Clear Pembersih kaca 10 btl @Rp.35.000 (7-12-2015)	350.000
			08/12/2015	39	Pembayaran racun rumput 10 ltr@50.000(8-12-2015)	500.000
			08/12/2015	40	Belanja sapu lidi 14 bh @Rp.15.000 (8-12-2015)	210.000
			09/12/2015	41	Belanja ember 10 bh @Rp.35.000 (09-12-2015)	350.000
			17/12/2015	42	Belanja Baskom 15 bh @Rp.35.000 (17-12-2015)	525.000
			18/12/2015	43	Belanja solar 30 @ Rp.12.000 (18-12-2015)	360.000
			19/12/2015	44	Pembelian obat merah 25 btl@20.000(19-12-2015)	500.000
			20/12/2015	45	Pembelian minyak kampak 17 btl@20.000(20-12-2015)	340.000
			21/12/2015	46	Pembelian handiplas 22 ktk@20.000(21-12-2015)	440.000
			22/12/2015	47	Pembelian alkohol 12 btl@20.000(22-12-2015)	240.000
			31/12/2015	48	SPJ BOSDA 175 fbr@1.000(31-12-2015)	175.000
			31/12/2015	49	Pembayaran honor tim bosda bendahara (31-12-2015)	1.350.000
			31/12/2015	50	honorarium tim BOSDA Kepala Sekolah(31-12-2015)	1.350.000
			31/12/2015	51	honorarium 9 ORG Non PNS guru dan pegawai(31-12-2015)	12.150.000
		Penerimaan	30.375.000			
					Pengeluaran s.d Etulan ini	30.375.000
					Saldo	0
		Penutupan	30.375.000		Penutupan	30.375.000

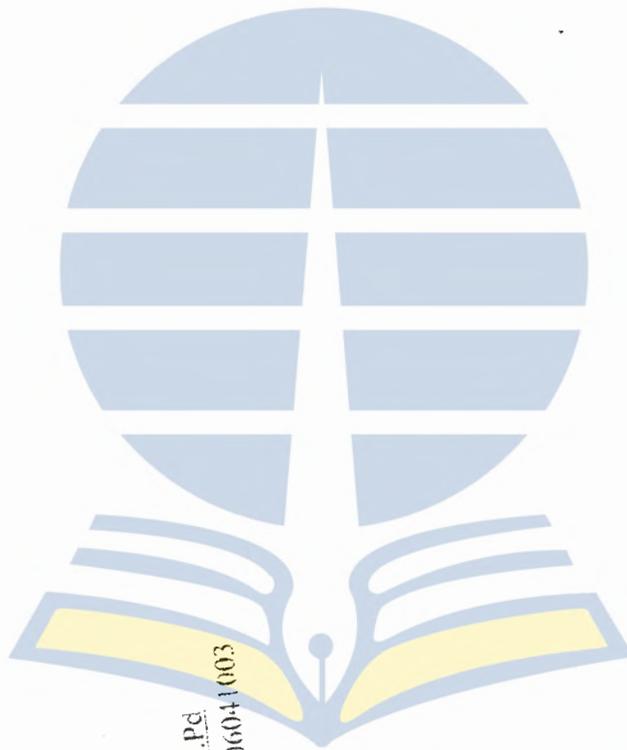
Tulin Onsoi, 31 Desc

Bendahara



ARISON LUTHER
NIP. 1988011420141

42414.pdf



Mengetahui,
Kepala Sekolah



AMIL SYUKUR, S. Pd
NIP. 197404112006041003

KWTANSI

Bukti Kas No : **5.2.2.02.02**
 Mata Anggaran : **BOSDA TRIWULAN IV**
OKTOBER-DESEMBER 2015

Sudah terima dari : Bendahara SMP Negeri 2 Tulin Onsoi
 Uang Sebanyak : Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah x
 Untuk Pembayaran : Bayar honor pegawai tidak tetap bulan
oktober s/d Desember 2015.
 Terbilang Rp. : 3.420.000,-
 Tulin Onsoi, 19 Des. 2015



Setujui dibayar
 Tanggal, 19/12/2015
 Bendahara Sekolah

[Handwritten Signature]

HARDA, S.Pd
 NIP. 19820504 201001 2 013



Tanda tangan
 yang menerima

[Handwritten Signature]
Pdt. Paulus Sattu

No. _____
 Telah terima dari Bendahara SMPN 2 Tulin Onsoi
 Uang sejumlah Tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah,
 Untuk pembayaran Bayar honor pegawai tidak tetap
Bulan oktober s/d Desember 2015.
Tulin Onsoi, 19/12.2015
yang menerima
Rp. 3.420.000,-
Pdt. Paulus Sattu.

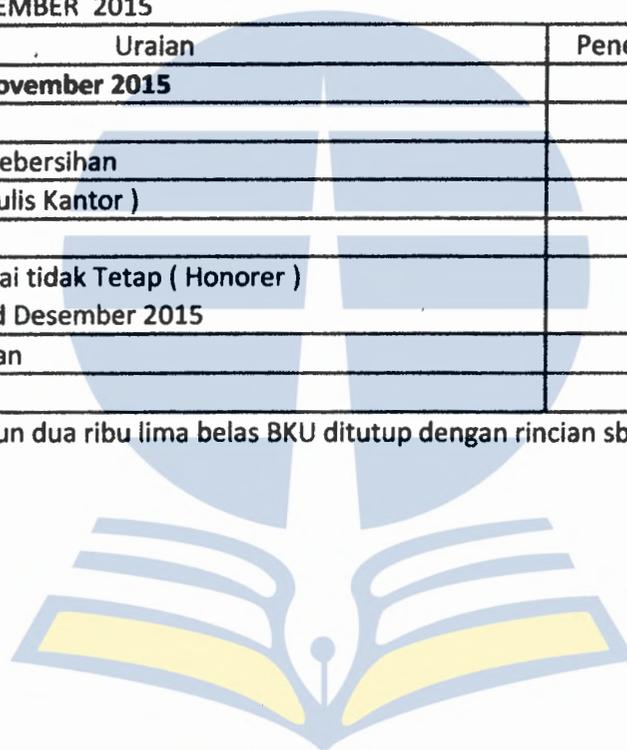
BUKU KAS UJIAN
BULAN DESEMBER 2015

MA SEKOLAH : SMP NEGERI 2
 AMATAN : TULIN ONSOI
 KUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
 WULAN : IV PERIODE OKTOBER s/d DESEMBER 2015

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan / Debet	Pengeluaran / Kredit	Saldo
31/12/2015			Saldo tanggal 30 November 2015	Rp4.366,000	Rp0,000	Rp4.366,000
01/12/2015	5.2.2.01.05	018	Belanja Peralatan Kebersihan		Rp230,000	Rp4.136,000
03/12/2015	5.2.2.01.01	019	Belanja ATK (Alat tulis Kantor)		Rp341,000	Rp3.795,000
05/12/2015	5.2.2.03.02	020	Belanja Air Minum		Rp165,000	Rp3.630,000
19/12/2015	5.2.2.02.02	021	Bayar honor Pegawai tidak Tetap (Honorer) Bulan : Oktober s/d Desember 2015		Rp3.420,000	Rp210,000
19/12/2015	5.2.2.06.02	022	Belanja Penggandaan		Rp210,000	Rp0,000

Pada hari ini Kamis tanggal 31 bulan Desember tahun dua ribu lima belas BKU ditutup dengan rincian sbb :

Uang Tunai : Rp. 4.336.000
 Saldo Bank : Rp. 4.336.000
 Saldo Tunai : Rp. -
 Jumlah Penutup : Rp. -



Tulin Onsoi, 31 Desember 2015
 Bendahara

Harda, S. Pd
 Nip. 19840504 201001 2 013



**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN LUMBIS OGONG**



BUKU KAS UMUM TAHUN 2015 (DATA BERTARAF TRIWULAN III)

Jama Sekolah : SMPN 1 Lumbis Ogong
 Kecamatan : Lumbis Ogong
 Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

PENERIMAAN				Pengeluaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah	Tanggal	Uraian	No Bukti	Jenis Biaya	Jumlah
6/11/2015	Saldo Kas Umum Akhir	1	Rp.	6/11/2015	Pembayaran Biaya Tenaga Guru Honor 2 Orang	1	Belanja @ Pegawai	Rp. 1,440,000
	Bulan November 2015			6/11/2015	Bayar Intensif Bendahara Bosda	2	Belanja @ Pegawai	Rp. 300,000
				6/11/2015	* Belanja Makan dan Minum Harian Kantor	3	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 300,000
6/11/2015	Penerimaan Bosda Triwulan III	2	Rp. 4,350,000	6/11/2015	* Belanja ATK Keperluan Sekolah	4	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 790,000
				6/11/2015	* Belanja Alat Kebersihan Sekolah	5	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 360,000
				6/11/2015	* Belanja Listrik dan Bahan Bakar Mesin Lampu	6	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 760,000
				6/11/2015	* Belanja Fotocopy dan Pengandaan	7	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 250,000
				6/11/2015	* Belanja Pembelian Pulsa Data Internet	8	Belanja @ Brg & Jasa	Rp. 150,000
	Jumlah Penerimaan		Rp. 4,350,000		Jumlah Peengeluaran (4 - 9)			Rp. 4,350,000
	Saldo Kas Tunai		Rp. <i>Nihil</i>		Saldo Akhir Bulan			Rp. <i>Nihil</i>

Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan Keadaan sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum	Rp.	<i>Nihil</i>
Saldo Bank	Rp.	<i>Nihil</i>
Saldo Kas Tunai	Rp.	<i>Nihil</i>
Jumlah	Rp.	<i>Nihil</i>

Mengetahui,
Komite Sekolah



BUDI

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMPN 1 Lumbis Ogong


Musa, S.S.
Nip. 197707052009021004

Samunti, 14 November 2015

Bendahara Sekolah

Sri Wahyuni, S.Pd

Nip. 19900911 201503 2 003

**REKAPITULASI
BULAN JULI s.d SEPTEMBER 2015**

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Lumbis Ogong
Desa/Kecamatan : Tau Lumbis/Lumbis Ogong
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No.Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah	Tanggal	No.Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-11-2015			Terima Dana Bosda Triwulan III	Rp. 3.525.000	10-11-2015	5.2.1.02.02	1	Bayar Honorarium Guru Honorer 1 Orang Bulan Juli-September	Rp. 750.000
			Periode Bulan Juli s.d September		10-11-2015	5.2.1.02.02	2	Bayar Honorarium Pegawai Kebersihan 1 Org Bulan Juli-September	Rp. 660.000
			2015		10-11-2015	5.2.2.01.01	3	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 300.000
					10-11-2015	5.2.2.01.03	4	Bayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Rp. 200.000
					10-11-2015	5.2.2.01.05	5	Bayar Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	Rp. 240.000
					10-11-2015	5.2.2.01.06	6	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Rp. 375.000
					10-11-2015	5.2.2.06.02	7	Bayar Belanja Penggandaan	Rp. 250.000
					10-11-2015	5.2.2.06.02	8	Bayar Belanja Makan Minum Rapat	Rp. 300.000
					10-11-2015	5.2.2.11.01	9	Bayar Belanja Makan Minum Rutin	Rp. 450.000
			Jumlah Penerimaan	Rp. 3.525.000				Pengeluaran	Rp. 3.525.000
			Jumlah Penutupan	Rp. 3.525.000				Penutupan	Nilai



Tau Lumbis, 10 November 2015
Bendahara


JANSEN HERMAWAN
Nip. 19890205 201503 1 004

**BUKTI KAS DAN BUKTI
BULAN JULI s.d SEPTEMBER 2015**

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Lumbis Ogong
 Desa/Kecamatan : Tau Lumbis/Lumbis Ogong
 Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

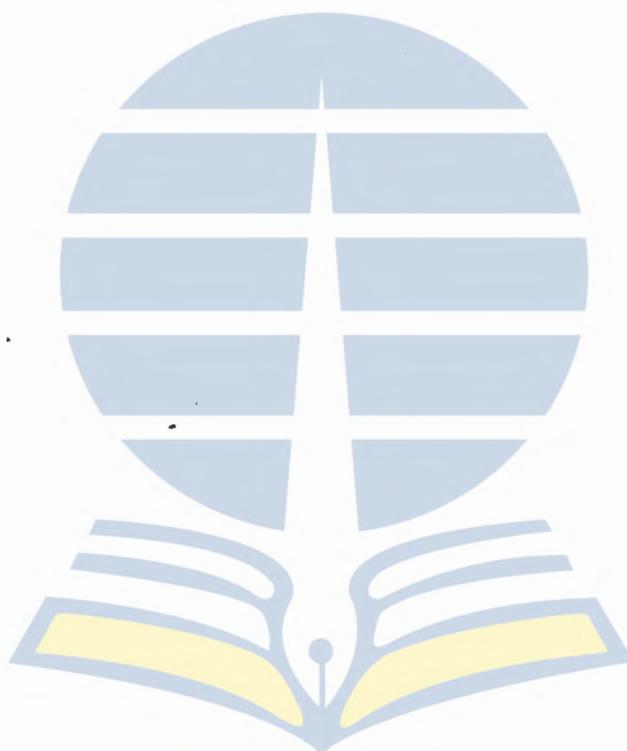
Tanggal	No.Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah	Tanggal	No.Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-11-2015			Terima Dana Bosda Triwulan III	Rp. 3.525.000	10-11-2015	5.2.1.02.02	1	Bayar Honorarium Guru Honorer 1 Orang Bulan Juli-September	Rp. 750.000
			Periode Bulan Juli s.d September		10-11-2015	5.2.1.02.02	2	Bayar Honorarium Pegawai Kebersihan 1 Org Bulan Juli-September	Rp. 660.000
			2015		10-11-2015	5.2.2.01.01	3	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 300.000
					10-11-2015	5.2.2.01.03	4	Bayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Rp. 200.000
					10-11-2015	5.2.2.01.05	5	Bayar Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih	Rp. 240.000
					10-11-2015	5.2.2.01.06	6	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Rp. 375.000
					10-11-2015	5.2.2.06.02	7	Bayar Belanja Penggandaan	Rp. 250.000
					10-11-2015	5.2.2.06.02	8	Bayar Belanja Makan Minum Rapat	Rp. 300.000
					10-11-2015	5.2.2.11.01	9	Bayar Belanja Makan Minum Rutin	Rp. 450.000
			Jumlah Penerimaan	Rp. 3.525.000				Pengeluaran	Rp. 3.525.000
			Jumlah Penutupan	Rp. 3.525.000				Penutupan	Nihil



Tau Lumbis, 10 November 2015
 Bendahara

JANSEN HERMAWAN
 Nip. 19890205 201503 1 004

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN SEMBAKUNG**



**BUKU KAS UMUM
BULAN mei 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Tanggal	No Bukti	Uraian Penerimaan	PENERIMAAN	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN
		saldo bulan lalu				
		Penerimaan			Pengeluaran Bulan ini	
					Pengeluaran s/d Bulan ini	
					Saldo	
		Penutupan			Penutupan	



sembakung, 28 mei 2015
Bendahara

Dahlia Fitri Yuliana, S.Pd
Nip. 198301072011012001

BUKU KAS UMUM
BULAN juni 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Tanggal	No Bukti	Uraian Penerimaan	PENERIMAAN	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN
6/26/2015		saldo bulan lalu	Rp. 15.525.000,-	27-Jun-15	belanja pegawai triwulan 1	Rp6,210,000
				27-Jun-15	belanja listrik	Rp1,935,000
				27-Jun-15	belanja makan minum kantor	Rp921,000
				27-Jun-15	Belanja kebersihan	Rp2,661,500
				27-Jun-15	belanja ATK	Rp2,322,500
				27-Jun-15	belanja pengandaan	Rp1,475,000
		Penerimaan	Rp. 15.525.000,-		Pengeluaran Bulan ini	Rp. 15.525.000,-
					Pengeluaran s/d Bulan ini	Rp. 15.525.000,-
					Saldo	Rp. 0,-
		Penutupan	Rp. 15.525.000,-		Penutupan	Rp. 15.525.000,-



Mengetahui
Kepala sekolah

Baharuddin, A.Md.Pd
Nip. 196701141989031010

sembakung, 28 juni 2015
Bendahara

Dahlia Fitri Yuliana, S.Pd
Nip. 198301072011012001

**BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 TEPIAN
 DESA/KECAMATAN : SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

Tanggal	No Bukti	Uraian Penerimaan	PENERIMAAN	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENGELUARAN
01/07/2015		SALDO bulan lalu	0,-				
		Penerimaan	0,-			Pengeluaran Bulan Ini	
						Pengeluaran s/d Bulan Ini	
						Saldo	
		Penutupan	0,-			Penutupan	



sembakung, 31 JULI 2015
 Bendahara

JAMALUDIN.Ama.Pd
 Nip. 196603101989091002

BUKU KAS UMUM
BULAN agustus 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 TEPIAN
DESA/KECAMATAN : SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

Tanggal	No Bukti	Uraian Penerimaan	PENERIMAAN	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENGELUARAN
01/08/2015		SALDO bulan lalu	0,-				
30/08/2015		Penerimaan	0,-			Pengeluaran Bulan Ini	
						Pengeluaran s/d Bulan ini	
						Saldo	
		Penutupan	0,-			Penutupan	

Mengetahui
Kepala sekolah



Nip 197511282006041014

sembakung, 31 agustus 2015
Bendahara

JAMALUDIN.Ama.Pd

Nip. 196603101989091002

BUKU KAS UMUM
BULAN september 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 TEPIAN
DESA/KECAMATAN : SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

Tanggal	No Bukti	Uraian Penerimaan	PENERIMAAN	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENGELUARAN
01/09/2015		SALDO bulan lalu	0,-				
30/09/2015		Penerimaan	0,-			Pengeluaran Bulan Ini	
						Pengeluaran s/d Bulan Ini	
						Saldo	
		Penutupan	0,-			Penutupan	

Mengetahui
Kepala Sekolah



SMPN 2 TEPIAN
HAMDHANIS.Pd
Nip 19731282006041014

sembakung, 30 september 2015
Bendahara



JAMALUDIN.Ama.Pd
Nip. 196603101989091002



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 SEMBAKUNG
NPSN : 30405238 – NSS : 1016041002



Jl. Lapangan Galih Gaharu RT.02 Desa Tepian Kec. Sembakung Kab. Nunukan - Kaltara

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMPN 2 SEMBAKUNG KABUPATEN NUNUKAN

Nomor : 01/SK-BS/SMPN-2/2015

Tentang : Penunjukan Pemegang Kas Sekolah/Bendahara

Menimbang :

- a. Bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah perlu dilaksanakan secara jujur dan transparan.
- b. Perlunya cek and balancing yang baik
- c. Terjadinya pergantian Bendahara SMPN 2 Sembakung

Mengingat :

1. Buku petunjuk Teknis Departemen Pendidikan Tahun 2009 tentang penggunaan dan pelaporan dana BOS.
2. Surat edaran Dirjen pajak Dept. Keuangan RI NO.SE-02/P1/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Perpajakan bagi penerima dana Bantuan Operasional Sekolah oleh Bendaharawan Sekolah atau penanggung jawab pengelolaan penggunaan dana BOS dimasing-masing unit penerima BOS serta pengelolaan dana pendidikan lainnya.

Memperhatikan :

1. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan
2. Hasil keputusan rapat antara kepala sekolah , dewan guru dan komite sekolah pada tanggal 20 Mei 2015.
3. Kemampuan, kecakapan dan kejujuran yang bersangkutan dalam hal pengelolaan keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Mei 2015 mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama : Jamaludin Ama, Pd
2. NIP : 196603101989091002
3. Pangkat Golongan : Penata / 3c
4. Unit Kerja : UPTD
5. Jabatan : Bendahara UPTD Sembakung

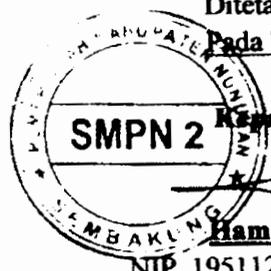
Kedua : kepada yang bersangkutan agar bersama kepala sekolah dan komite sekolah dapat mengelola keuangan sekolah guna terlaksananya semua program sekolah

Ketiga : apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembakung

Pada Tanggal : 20 Mei 2015



Kepala Sekolah

Hamdhani, S.Pd

NIP. 1951128 200604 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nunukan
2. Kepala UPTD Kec. Sembakung
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

KAS UMUM
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH
BULAN OKTOBER TAHUN 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
 KEL. / KEC. : LUBOK BUAT / SEMBAKUNG

KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

NO	TANGGAL	NO KODE	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
					(Debit)		(Kredit)			
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}		{7}		{8}	
1	01/10/2015			Saldo	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	31/10/2015			JUMLAH	Rp	-	Rp	-	Rp	-

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas : Rp. 0,00

Mengetahui :

Kepala Sekolah,



Rahayu, S.Pd.

NIP. 198610182011001 2 001

Sembakung, 31 Oktober 2015

Bendahara

MASNI, S.Si

NIP. 19820102 201101 2 005

KAS UMUM
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH
BULAN NOVEMBER TAHUN 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
 KEL. / KEC. : LUBOK BUAT / SEMBAKUNG

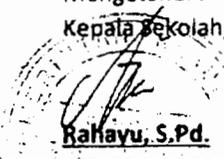
KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

NO	TANGGAL	NO KODE	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					(Debit)	(Kredit)	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
1	01/11/2015			Saldo	Rp -	Rp -	Rp -
	10/11/2015			Pencairan dana BOSDA Tw. II, III dan IV	Rp 10.350.000,00	Rp -	Rp 10.350.000,00
	10/11/2015	5.2.1.02.02	01	Honorim Pegawai	Rp -	Rp 750.000,00	Rp 9.600.000,00
	10/11/2015	5.2.2.06.02	02	Pengadaan pelaporan bendahara	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 9.300.000,00
	10/11/2015	5.2.2.11.04	03	Konsumsi Ujian Nasional	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 9.000.000,00
	10/11/2015	5.2.1.02.03	04	Honor Pengawas US	Rp -	Rp 330.000,00	Rp 8.670.000,00
	10/11/2015	5.2.2.06.02	05	Pengadaan soal ujian Semester Genap	Rp -	Rp 200.000,00	Rp 8.470.000,00
	10/11/2015	5.2.2.11.04	06	Konsumsi ujian Semester Genap	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 8.170.000,00
	10/11/2015	5.2.1.02.03	07	Honor Penulisan Rapor	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 7.870.000,00
	10/11/2015	5.2.2.06.02	08	Pengadaan Formlir Penerimaan Siswa baru	Rp -	Rp 200.000,00	Rp 7.670.000,00
	10/11/2015	5.2.2.11.04	09	Belanja kertas	Rp -	Rp 340.000,00	Rp 7.330.000,00
	10/11/2015	5.2.2.01.01	10	Belanja Tinta Print	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 7.030.000,00
	10/11/2015	5.2.2.01.06	11	BBM	Rp -	Rp 450.000,00	Rp 6.580.000,00
	31/11/2015			JUMLAH	Rp 10.350.000,00	Rp 3.770.000,00	Rp 6.580.000,00

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas : Rp. 6.580.000,00

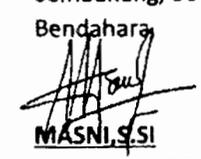
Mengetahui :
 Kepala Sekolah,


 Rahayu, S.Pd.

NIP.19861019 201001 2 001

Sembakung, 30 November 2015

Bendahara


 MASNI, S.Si

NIP. 19820102 201101 2 005

KAS UMUM
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN 2015

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
 KEL. / KEC. : LUBOK BUAT / SEMBAKUNG

KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

NO	TANGGAL	NO KODE	NO BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO
					(Debit)	(Kredit)	(Debit)	(Kredit)	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}
1	01/12/2015			Saldo	Rp 3.450.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.450.000,00
	19/12/2015	5.2.1.02.02	01	Honorium pegawai	Rp -	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00	Rp -	Rp 2.700.000,00
	19/12/2015	5.2.2.06.02	02	Pengadaan Pelaporan Bendahara	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 2.400.000,00
	19/12/2015	5.2.1.02.03	03	Honor Pengawas Ujian Smster Ganjil	Rp -	Rp 330.000,00	Rp 330.000,00	Rp -	Rp 2.070.000,00
	19/12/2015	5.2.1.02.03	04	Honor Penulisan Rapor	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 1.770.000,00
	19/12/2015	5.2.2.06.02	05	Pengadaan Ujian Semester ganjil	Rp -	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp -	Rp 1.570.000,00
	19/12/2015	5.2.2.11.04	06	Konsumsi Ujian Semester ganjil	Rp -	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Rp -	Rp 1.270.000,00
	19/12/2015	5.2.2.01.01	07	Belanja Kertas	Rp -	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00	Rp -	Rp 1.100.000,00
	19/12/2015	5.2.2.01.01	08	Belanja Tinta Print	Rp -	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp -	Rp 950.000,00
	19/12/2015	5.2.2.01.01	09	Belanja Catrig	Rp -	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 450.000,00
	19/12/2015	5.2.2.01.06	10	BBM	Rp -	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Rp -	Rp -
	31/12/2015			JUMLAH	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00	Rp -	Rp -

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
 Saldo Buku Kas : Rp. 0,00



Sembakung, 31 Desember 2015
 Bendahara,

 MASNI, S.SI
 NIP. 19820102 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEMBAKUNG

Alamat : Jalan Masjid An-Nur Rt 3 Desa Tagul Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop Kal-Tara 77153 email Smpn4sembakung@gmail.com



**BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG
DESA / KECAMATAN : TAGUL / SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KAL-TARA

TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH (RP)	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tidak ada Penerimaan	0				Tidak ada Pengeluaran	0
								Pengeluaran	0
								Saldo	0
			Penutupan	0				Penutupan	0

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan November tahun dua ribu limabelas buku kas tunai ditutup dengan keadaan saldo sbb :

Saldo Bank = Rp. 0.- = Rp. 0.-
Saldo Tunai = Rp. 0.- = Rp. 0.-



Bendahara

La Ode Indaharia, S.Ag
NIP.19740809 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEMBAKUNG

Alamat : Jalan Masjid An-Nur Rt 3 Desa Tagul Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop Kal-Tara 77153 email Smpn4sembakung@gmail.com



**BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG
DESA / KECAMATAN : TAGUL / SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KAL-TARA

TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH (RP)	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tidak ada Penerimaan	0				Tidak ada Pengeluaran	0
								Pengeluaran	0
								Saldo	0
			Penutupan	0				Penutupan	0

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan November tahun dua ribu limabelas buku kas tunai ditutup degan keadaan saldo sbb :

Saldo Bank = Rp. 0.- = Rp. 0.-
Saldo Tunai = Rp. 0.- = Rp. 0.-

Mengetahui / menyetujui
Kepala Sekolah

La Ode Indaharja, S.Ag
NIP.19740809 200604 1 015

Bendahara

La Ode Indaharja, S.Ag
NIP.19740809 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN



SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SEMBAKUNG

Alamat : Jalan Masjid An-Nur Rt 3 Desa Tagul Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop Kal-Tara 77153 email Smpn4sembakung@gmail.com

**BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 4 SEMBAKUNG
DESA / KECAMATAN : TAGUL / SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KAL-TARA

TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH (RP)	TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN PENGELUARAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tidak ada Penerimaan	0				Tidak ada Pengeluaran	0
								Pengeluaran	0
								Saldo	0
			Penutupan	0				Penutupan	0

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan November tahun dua ribu limabelas buku kas tunai ditutup dengan keadaan saldo sbb :

Saldo Bank = Rp. 0.- = Rp. 0.-
Saldo Tunai = Rp. 0.- = Rp. 0.-



Bendahara

La Ode Indaharia, S.Ag
NIP.19740809 200604 1 015

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
BUKU KAS UMUM
BULAN : OKTOBER 2015

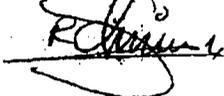
NAMA SEKOLAH : SMPN 5 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : PELAJU/SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

Tanggal	No Kode	No Bukti	Penerimaan	jumlah	Tanggal	No Kode	No Bukti	Pengeluaran	Jumlah
01.10.2015			Saldo bulan lalu	-					
31.10.2015			Penerimaan bulan ini	-	31.10.2015			Pengeluaran bulan ini	-
			Penutupan	-				Saldo	-
				-				Penutupan	-

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu lima belas buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo sbb:

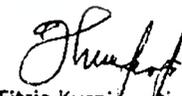
Saldo Bank Rp -
 Saldo Tunai Rp -

Mengetahui/ Menyetujui
 Kepala Sekolah



Drs. Safaruddinsyah
 196609092000121001

Dibuat Oleh
 Bendahara Sekolah



Fitria Kurniawati, S.Pd
 199905082014032006

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2015

NAMA SEKOLAH : SMPN 5 SEMBAKUNG
DESA/KECAMATAN : PELAJU/SEMBAKUNG
KABUPATEN : NUNUKAN
PROPINSI : KALAMANTAN UTARA

Tanggal	No Kode	No Bukti	Penerimaan	jumlah	Tanggal	No Kode	No Bukti	Pengeluaran	Jumlah
09.11.2015			Saldo bulan lalu	-					
11.11.2015			Diterima transfer dana BOSDA TW IV	1.657.000					
30.11.2015			Penerimaan bulan ini	1.657.000	30.11.2015			Pengeluaran bulan ini	-
			Penutupan	1,657.000				Saldo	1.657.000
								Penutupan	1.657.000

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu lima belas buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo sbb:

Saldo Bank Rp -
 Saldo Tunai Rp 1.657.000

Rp 1.657.000

Mengetahui/ Menyetujui
 Kepala Sekolah


 Drs. Safaruddinsyah
 196609092000121001

Dibuat Oleh
 Bendahara Sekolah


 Fitria Kurniawati, S.Pd
 199905082014032006

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
BUKU KAS UMUM
BULAN : DESEMBER 2015

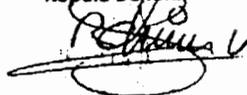
NAMA SEKOLAH : SMPN 5 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : PELAJU/SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROPINSI : KALIMANTAN UTARA

Tanggal	No Kode	No Bukti	Penerimaan	jumlah	Tanggal	No Kode	No Bukti	Pengeluaran	Jumlah
01.12.2015			Saldo bulan lalu	1.657.000	01.12.2015			Dibayar lunas honorarium guru honor bulan Oktober sd Desember 2015	662.800
								Dibayar lunas konsumsi	644.200
								Dibayar lunas alat kebersihan	100.000
								Dibayar lunas BBM	250.000
31.12.2015			Penerimaan bulan ini	1.657.000	31.12.2015			Pengeluaran bulan ini	1.657.000
			Penutupan	1.657.000				Saldo	-
								Penutupan	1.657.000

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo sbb:

Saldo Bank Rp -
 Saldo Tunai Rp -

Mengetahui/ Menyetujui
 Kepala Sekolah


 Drs. Safaruddinsyah
 196609092000121001

Dibuat Oleh
 Bendahara Sekolah


 Fitria Kurniawati, S.Pd
 199905082014032006

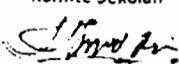
BUKU KAS UMUM
 BULAN APRIL S/D JUNI 2015 (DANA BOS DAERAH TRIWULAN II)
 BULAN : NOPEMBER 2015

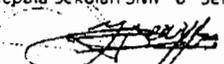
ma Sekolah : SMP 6 Sembakung
 camatan : Sembakung
 bupaten : Nunukan
 ynsi : Kalimantan Utara

PENERIMAAN				Pengeluaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tanggal	Uraian	No Bukti	Jumlah	Tanggal	Uraian	No Bukti	Jenis Biaya	Jumlah
				16-11-15	* Honor Bulanan Guru Honor Sekolah	1	Belanja @ Jasa	Rp. 1,500,000
10-10-15	Saldo Kas Umum Akhir Bulan	1	Rp. -	16-11-15	* Insentif Bendahara Bosda	2	Belanja @ Jasa	Rp. 330,000
	Oktober 2015				Total Belanja Pegawai			Rp. 1,830,000
				16-11-15	* Belanja ATK Keperluan Sekolah	3	Belanja @ Pegawai	Rp. 955,000
				16-11-15	* Belanja Fotocopy dan Pengandaan	4	Belanja @ Pegawai	Rp. 500,000
6-11-15	Terima Dana Bos Daerah dari	2	Rp. 4,575,000	16-11-15	* Belanja Makan dan Minum Harian Kantor	5	Belanja @ Jasa	Rp. 350,000
	BPD Mansalong untuk Triwulan			16-11-15	* Belanja Alat Kebersihan Sekolah	6	Belanja @ Jasa	Rp. 300,000
	II Tahun 2015			16-11-15	* Belanja Listrik dan Bahan Bakar Mesin Lampu	7	Belanja @ Jasa	Rp. 350,000
				16-11-15	* Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8	Belanja @ Jasa	Rp. 190,000
				16-11-15	* Belanja Pulsa Data Internet	9	Belanja @ Jasa	Rp. 100,000
					Total Belanja Barang dan Jasa			Rp. 2,745,000
	Jumlah Penerimaan		Rp. 4,575,000		Jumlah Peeluaran (4 - 9)			Rp. 4,575,000
	Saldo Kas Tunai		Rp. Nihil		Saldo Akhir Bulan			Rp. Nihil

Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2015 Buku Kas Umum ditutup dengan Keadaan sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum	Rp.	Nihil
Saldo Bank	Rp.	Nihil
Saldo Kas Tunai	Rp.	Nihil
Jumlah	Rp.	Nihil

Mengetahui,
 Komite Sekolah

 TUKADIN

Mengetahui,
 Kepala Sekolah SMP 6 Sembakung

 Daniel S.Thi
 Nip. 197712122006041006

Pagar, 11 Nopember 2015

Bendahara Sekolah

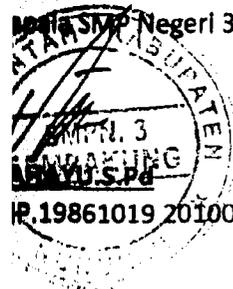
 Murlianto, S.Pd
 Nip.197805072007011013

**BUKU PEMBANTU BANK
BOS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
BULAN NOVEMBER 2015**

JAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : LUBOK BUAT/SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

TANGGAL	NO. KODE	NO BUKTI	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
11/11/2015			Saldo	Rp -	Rp -	Rp -
15/11/2015			PENCAIRAN BOSDA TW II 2015	Rp 3.450.000,00	Rp -	Rp 3.450.000,00
16/11/2015			PENCAIRAN BOSDA TW III 2015	Rp 3.450.000,00	Rp -	Rp 6.900.000,00
16/11/2015			PENCAIRAN BOSDA TW IV 2015	Rp 3.450.000,00	Rp -	Rp 10.350.000,00
30/11/2015			Penarikan dana Bosda TW I, II, III, IV 2015	Rp -	Rp 10.350.000,00	Rp -
30/11/2015			SALDO	Rp 10.350.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp -

Mengetahui,
 Kepala SMP Negeri 3 Sembakung



Sembakung, 30 NOVEMBER 2015
 Bendahara


 MASNI, S. Si

NIP. 19820102 201101 2 005

**BUKU PEMBENTU PAJAK
BULAN DESEMBER 2015**

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
 DESA/KECAMATAN : LUBOK BUAT/SEMBAKUNG
 KABUPATEN : NUNUKAN
 PROVINSI : KALIMATAN UTARA

TANGGAL	NO. KODE	NO. BUKTI	URAIAN	DEBID				KREDIT	SALDO
				PPn	PPh21	PPh22	PPh23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/12/2015	411121	.	PAJAK BULAN OKTOBER						Rp 100.000,00
07/11/2015	411121	03	HONOR PENGAWAS SEMESTER GANJIL		Rp 16.500,00				Rp 116.500,00
07/11/2015	411121	04	HONOR PENULISAN RAPOR		Rp 15.000,00				Rp 131.500,00
07/11/2015			BAYAR PAJAK					Rp 131.500,00	Rp -

Mengetahui,
Kepala SMP Negeri 3 Sembakung



19861019 201001 2 001

Sembakung, 31 Desember 2015

Bendahara,

MASNI, S.Si

NIP.19820102 201101 2 005

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **SENIN** tanggal **DUA NOVEMBER** tahun **2015** yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan **No. 822.3/1220/DISDIK-II/VIII/2014** tanggal **01 JUNI 2014**

Nama : Rahayu, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah

melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama : Masni, S.Si
Jabatan : Bendahara

yang berdasarkan Surat Keputusan No. **421.3/03/SMPN3-SBKG/I/2015** tanggal **05 Januari 2015** ditugaskan dengan pengurusan uang **Bantuan Operasional Sekolah Pusat dan Daerah**

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah:

a) Uang kertas bank, uang logam	Rp 0,-
b) Saldo Bank	Rp 0,-
c) Surat Berharga dll	Rp
Jumlah Rp	0,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp 0,00
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku	Rp 0,-

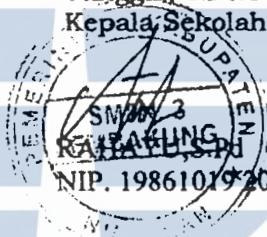
Tanggal, 02 November 2015

Bendahara/Pemegang Kas

Kepala Sekolah



MASNI, S.Si
NIP. 19820102 201101 2 005



NIP. 19861019 201001 2 001

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Oktober 2015
 Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : Masni,S.Si
 Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 30 September 2015
 Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp. 0,-
 Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp 0,-
Saldo Buku (A = D - K) Rp 0,-
Saldo Kas (B) Rp 0,-

Saldo kas B terdiri dari:

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 50.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 20.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 10.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 5.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 2.000,- Lembar Rp
- Lembaran uang kertas Rp 1.000,- Lembar Rp

Sub Jumlah (1) Rp 0,-

2. Keping uang logam Rp 1.000,- Keping Rp
- Keping uang logam Rp 500,- Keping Rp
- Keping uang logam Rp 200,- Keping Rp
- Keping uang logam Rp 100,- Keping Rp

Sub Jumlah (2) Rp

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll **Sub Jumlah (3) Rp 0,-**

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp 0,-

Perbedaan (A-B) Rp 0,-

Penjelasan Perbedaan Sisa Saldo Dana Bantuan Oprasional Pusat yang terdapat di rekening yang sama

Yang diperiksa,
Bendahara/Pemegang Kas



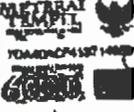
MASNI,S.Si
NIP. 19820102 201101 2 005

Tanggal, 31 Oktober 2015

Yang Memeriksa,
Kepala Sekolah



NIP. 19861019 201001 2 001

 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NO.6 SEMBAKUNG KECAMATAN SEMBAKUNG		
KWITANSI		
		Nomor Bukti : 3 Tahun : 2015
Sudah Terima dari	: Bendahara Sekolah Menengah Pertama No. 6 Sembakung	
Banyaknya Uang	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Seribu Lima Ratus Ribu Rupiah </div>	
Untuk Pembayaran	: Biaya pembayaran Tambahan Gaji Honor Sekolah sebanyak 5 Orang Untuk Bulan Januari s/d Maret 2015	
Terdibayar	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Rp. 1.500.000,- </div>	
Sebulu dibayar Absen Langsung Kepala Sekolah	Dibayar Lunas Bendahara Sekolah	Tanda Tangan Penerima
 DANIEL S.TM Nip. 197712122006041006	 Murtanto, S.Pd Nip. 197409072007011003	 



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG**

Alamat : Lubuk Buat Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltara



Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Nunukan
di-
Nunukan

SURAT PENGANTAR

Nomor: 421.3/025 /SMPN3-SBKG/XI/2015

NO	Jenis Surat / Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Periode II : April – Juni 2015 a/n : SMP Negeri 3 Sembakung	Satu (Rangkap)	Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembakung, 31 Desember 2015
Kepala Sekolah,



* RAHAYU, S.Pd
Pegawai muda Tk.I

Nip. 19861019 201001 2 001

**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG**

Alamat : Lubuk Buat Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltara



Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Nunukan
di-
Nunukan

SURAT PENGANTAR

Nomor: 421.3/027/SMPN3-SBKG/XII/2015

Jenis Surat	Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
Surat	Laporan Penggunaan Dana Operasional Sekolah Periode III : Juli – September 2015 SMP Negeri 3 Sembakung	Satu (Rangkap)	Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembakung, 31 Desember 2015

Kepala Sekolah,



RAHAYU, S.Pd

Penata muda Tk.I

Nip. 19861019 201001 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 SEMBAKUNG
Alamat : Lubuk Buat Kec. Sembakung Kab. Nunukan Prop. Kaltara



Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan
 Kab. Nunukan
 di-
 Nunukan

SURAT PENGANTAR

Nomor: 421.3/29 /SMPN3-SBKG/XII/2015

Jenis Surat / Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1. Berkas Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Durasi Periode IV : Oktober - Desember 2015 di : SMP Negeri 3 Sembakung	Satu (Rangkap)	Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sembakung, 31 Desember 2015
 Kepala Sekolah,

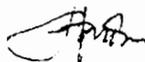

RAHAYU, S.Pd
 Penata Muda Tk. I
 Nip. 19861019 201001 2 001

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) BOS DAERAH
PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2015

Nama Sekolah : SMP 6 Sembakung
Desa Kecamatan : Desa Pagar Kecamatan Sembakung
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara
Tahun : I, II, III, IV Tahun 2015

PENERIMAAN				PENGELUARAN DALAM TIAP TRIWULAN			
No Urut	No Kode	Uraian	Jumlah	Triwulan I Jan s/d Maret	Triwulan II April S/D Juni	Triwulan III Juli S/d September	Triwulan IV Okto S/d Desember
	1	Program Sekolah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.2	Pengembangan Standar Isi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.3	Pengembangan Standar Proses	Rp 6,200,000	Rp 1,455,000	Rp 1,455,000	Rp 1,645,000	Rp 1,645,000
	5.2.2.01.01	* Belanja ATK Keperluan Sekolah	Rp 3,800,000	Rp 910,000	Rp 955,000	Rp 950,000	Rp 985,000
	5.2.2.06.02	* Belanja Fotocopy dan Pengandaan	Rp 2,400,000	Rp 545,000	Rp 500,000	Rp 695,000	Rp 660,000
	1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.5	Pengembangan Srana dan Prasarana Sekolah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.6	Standar pengelolaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	1.7	Standar pembiayaan	Rp 12,100,000	Rp 3,120,000	Rp 3,120,000	Rp 2,930,000	Rp 2,930,000
	5.2.1.02.02	* Belanja Pegawai Tidak tetap / Honorer	Rp 6,000,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
	5.2.1.01.03	* Biaya Intensif Bendahara Bosda	Rp 1,320,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000	Rp 330,000
	5.2.2.11.01	* Belanja Makan dan Minum Harian Kantor	Rp 1,400,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 350,000
	5.2.2.01.05	* Belanja Alat Kebersihan Sekolah	Rp 1,200,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000
	5.2.2.01.06	* Belanja Listrik dan Bahan Bakar Mesin Lampu	Rp 1,400,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 350,000
	5.2.2.05.03	* Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Rp 380,000	Rp 190,000	Rp 190,000	Rp	Rp
	5.2.2.03.01	* Belanja Pulsa Data Internet	Rp 400,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 100,000
	1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian					
Jumlah Penerimaan			Rp 18,300,000	Rp 4,575,000	Rp 4,575,000	Rp 4,575,000	Rp 4,575,000

Mengetahui,
Komite Sekolah


TUKADIN

Menyetujui,
Kepala Sekolah


Daniel S.Th

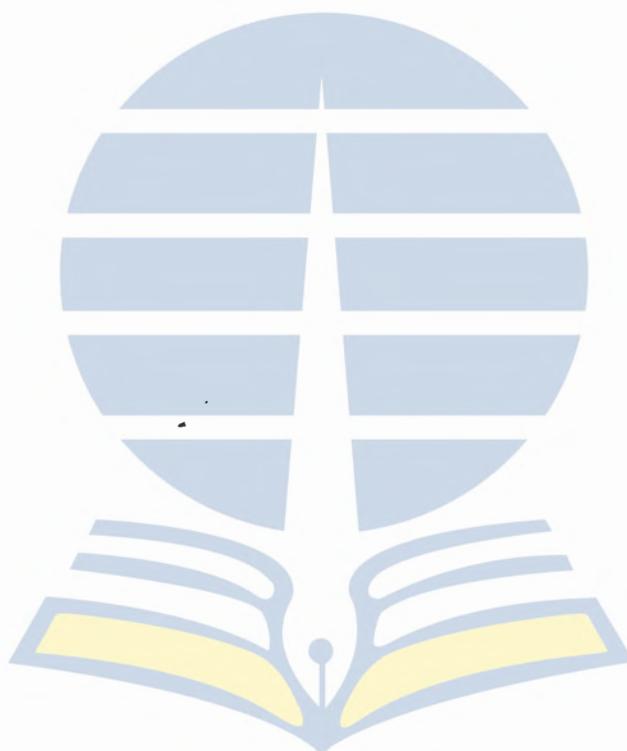
Nip.197712122006041006

Dibuat
Bendahara / Penanggungjawab Kegiatan


Mudianto, S.Pd

Nip.197805072007011013

DOKUMEN SMPN DI KECAMATAN KRAYAN



BUKU KAS TUNAI
Bulan : DESEMBER 2015

SMPN 1 Krayan
Kecamatan Bawan / Krayan
Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara

No. Kode	No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (RP)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (RP)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	Saldo kas bulan lalu (Nopember)	7,034,000.00	20/11/2015		1	Dibayar Honorarium Honorer Guru/ Pegawai Tidak Tetap Non PNS Bulan Desember 2015	Rp 2,145,000.00
				20/11/2015		2	Dibayar Honorarium Tim BOSDA Penanggung Jawan BOSDA dan Bendahara Bulan Desember 2015	Rp 715,000.00
				20/11/2015		5	Dibayar FC Soal Ulangan Semester I Siswa Kls. VII s.d IX Bulan Desember 2015	Rp 2,574,000.00
				20/11/2015		7	Dibayar Konsumsi Guru / Pegawai Bulan : Desember 2015	Rp 1,600,000.00
		Penerimaan bulan ini	7,034,000.00				Pengeluaran bulan ini	7,034,000.00
		Penutupan	7,034,000.00	31/12/2015			Saldo Penutupan	7,034,000.00

Tanggal tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo, sbb :

Rp -
Rp -
Rp -
Rp -

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Sekolah
Yayup Matias, S.Pd
NIP. 19631110 198502 1 002



Dibuat Oleh :
Bendahara Sekolah,
Robert Balang, S.Pd
NIP. 19581206 198403 1 005



KWITANSI

Dibayar Dari

: BENDAHARA BOSDA SMPN 1 KRAYAN

Dibayar

: # Empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah #

Dibayar

: Pelunasan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Non PNS bulan :
Oktober dan Nopember 2015

RP.

: 4.290.000;

Dibayar

Sekolah,

Matias, S.Pd

NIP. 1951110 198502 1 002

Dibayar Lunas

Tanggal, 20 Nopember 2015

Bendahara,

Robeh Balang, S.Pd

NIP. 19581206 198403 1 005

Tanda tangan

Yang menerima,

5000
LIMA RIBU RUPIAH

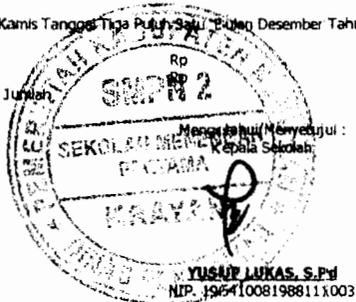
Buku Kas Tunai
Bulan: DESEMBER 2015

Kabupaten : Pulang Pisang, Krayan
Provinsi : Kalimantan Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/12/2015	-	-	Saldo tahun lalu (November 2015)	20,250,000.00	1/12/2015		1	Dibayar Honorarium TU, Perpus, dan Penjaga Sekolah	Rp 1,395,000.00
1/12/2015	-	-	Penarikan Tunai dana BOSDA Triwulan IV 2015 dari rekening Capem Krayan	6,750,000.00	1/12/2015		2	Dibayar belanja kebersihan/peralatan Sekolah (Gayung plastik 2 Bh et. 15.000, Densol kaleng 1 bh et. 60.000, Bayfres 1 bh et. 45.000, Tisu Kotak 3 bh et. 25.000, Baygon 1 bh et. 52.000 dan Lap Tangan 2 bh et. 30.000)	Rp 367,000.00
					1/12/2015		3	Dibayar Belanja bahan bakar minyak/pelumas (BBM bensin 70 Ltr et. 30.000 dan Oli Genset 10 Ltr et. 40.000)	Rp 2,500,000.00
					1/12/2015		4	Dibayar 4 Lbr Materai 6000 et.8000 , 2 Lbr Materai 3000 et. 4000	Rp 40,000.00
					1/12/2015		5	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy (FC Ulangan harian 200 lbr et.1.000, Cetak Soal Semester 158 lbr et. 1.000, penjiwaan SPJ BOSDA 4 Exs. Et. 10.000, FC administrasi laporan-laporan 500 lbr et. 1.000	Rp 898,000.00
					1/12/2015		6	Dibayar kegiatan ekstrakurikuler siswa (Seni Budaya dan Kerohanian)	Rp 600,000.00
							7	Dibayar Belanja Makan dan Minum (Gula 8 kg et.20.000, Susu 5 klg et. 25.000, Roti Lapis 8 bks et. 20.000, Konsumsi Rapat 1 Kl et. 505.000)	Rp 950,000.00
1/12/2015			Penerimaan bulan ini	6,750,000.00	31/12/2015			Pengeluaran bulan ini	6,750,000.00
			Penutupan	6,750,000.00				Saldo Penutupan	6,750,000.00

Saldo hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo, sbb :

Saldo Bank Rp
Saldo Tunai Rp
Jumlah Rp



Dibuat Oleh :
Bendahara Sekolah,

MARSELINA S.Pd
MARSELINA S.Pd
NIP. 198403352009022004

KWITANSI

Dibayar Dari : BENDAHARA BOSDA SMPN 4 KRAYAN

Satu juta lima puluh ribu rupiah

Dibayar Untuk : Melunasi Honorarium Guru / Pegawai Honor Bulan Oktober - Des 2015

RP. : 1.050.000;

Sesuai dibayar
kepada Sekolah,



LASTILO,SE

NIP. 19740531 200902 1 001

Dibayar Lunas

Tanggal, 2 Desember 2015

Bendahara,

JUANLI MARTHEN, S.Th

NIP. 19770525 201001 1 003

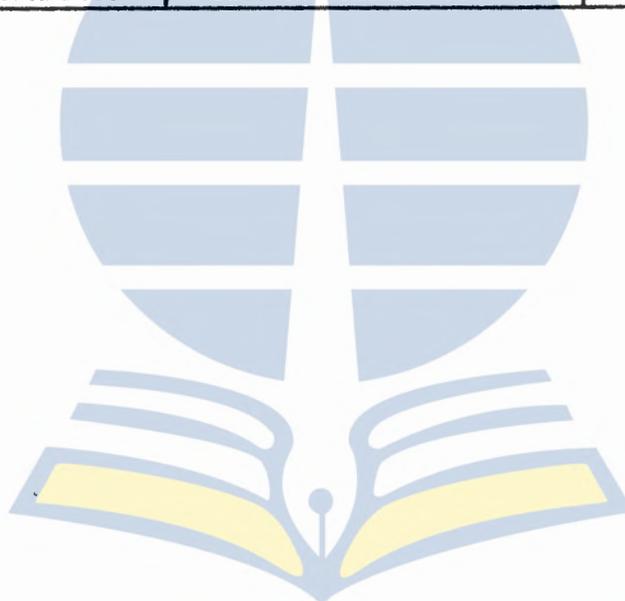
Tanda tangan
Yang menerima,



PEBDEADF543053076



6000
RUPIAH

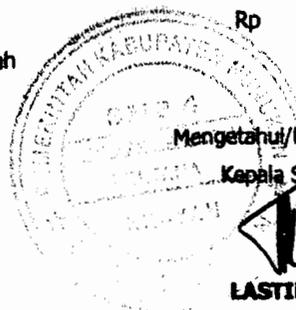
Buku Kas Tunai 2015

Nama Sek : SMP 4 Krayan
 Desa/Kec : Long Midang / Krayan
 Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (RP)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/2012	-	-	Saldo Bulan Lalu (Nopember)	Rp (2.285.000,00)	02/12/2015	02/12/2015	1	Dibayar Honorarium Pegawai Honororer Tidak Tetap / Non PNS 7 Orang Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 1.050.000,00
					02/12/2015	02/12/2015	2	Dibayar FC Soal Kelas 2 s/d 9 Ulangan Semester I dan FC Laporan Bulanan Bulan Okt-Des 2015	Rp 485.000,00
					02/12/2015	02/12/2015	3	Dibayar Konsumsi Guru/Pegawai Bulan Okt - Des 2015	Rp 750.000,00
12/2015			Penerimaan bulan ini	Rp 2.285.000,00				Pengeluaran bulan ini	Rp 2.285.000,00
				Rp -	31/12/2015			Saldo	Rp -
			Penutupan	Rp 2.285.000,00				Penutupan	Rp 2.285.000,00

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo, sbb :

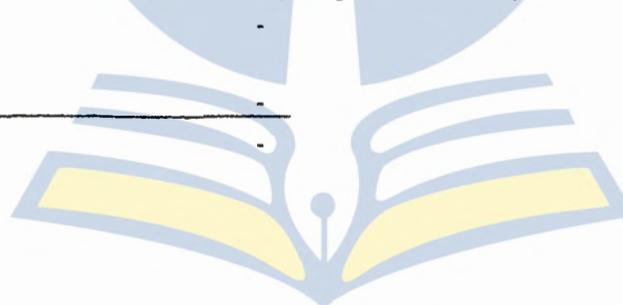
Saldo Bank	Rp	-
Saldo Tunai	Rp	-
Jumlah	Rp	-



Mengetahui/Menyetujui :
 Kepala Sekolah

LASTILO, SE

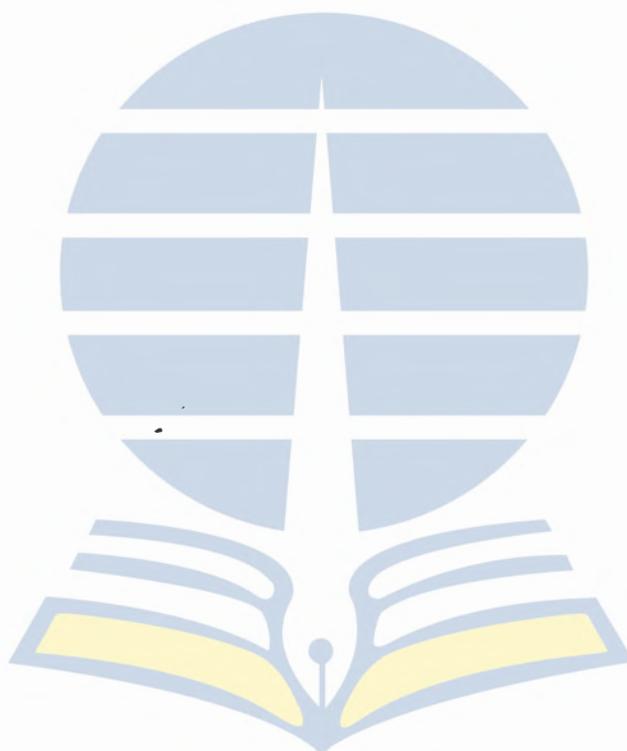
NIP. 19740531 200902 1 001



Dibuat Oleh :
 Bendahara Sekolah,

JUANLI MARTHEN, S.Th
 NIP. 19770525 201001 1 003

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN KRAYAN SELATAN**



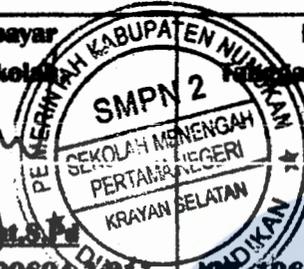
KWITANSI

Dibayar Oleh : BENDAHARA BOSDA SMPN 2 KRAYAN SELATAN

Jumlah : # Lima ratus dua puluh lima ratus rupiah #

Untuk Pembayaran : Pembayaran Honorarium PNS Tim Boda Tingkat Sekolah Bln. Okt - Des 2015

Jumlah RP. : 525.000;

<p>Selesai Dibayar Tempat Sekolah</p>  <p>Tempat Dibayar</p>  <p>DEKATRAH KABUPATEN NUNUKAN SMPN 2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KRAYAN SELATAN DIKOTAKAN</p>	<p>Dibayar Lunas tanggal, 7 Desember 2015 Bendahara,</p>  <p>Kuitansi</p>	<p>Tanda tangan Yang menerima,</p>  <p>PTERRAI TEMPEL FB6ADC069357399</p>  <p>5000 RUPIAH</p>
--	--	--

BUKU KAS LUNAS
Bulan : **DESEMBER 2015**

: SMIPN 2 Krayan Selatan
: Binuang / Krayan Selatan
: Nunukan
: Kalimantan Utara

No. Kode	No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (RP)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (RP)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	Saldo Bulan Lalu (Nopember)	Rp 2.625.000,00	07/12/2015		1	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap / Non PNS Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 525.000,00
				07/12/2015			Dibayar Honorarium PNS Tim Bosda Tingkat Sekolah Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 525.000,00
				07/12/2015			Dibayar ATK Kantor Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 210.000,00
				07/12/2015		2	Dibayar FC Soal Kelas 1 s/d 6 Ulangan Semester I	Rp 240.000,00
				07/12/2015		3	Dibayar Konsumsi Guru/Pegawai Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 1.125.000,00
		Penerimaan bulan ini	Rp 2.625.000,00				Pengeluaran bulan ini	Rp 2.625.000,00
			Rp -	31/12/2015			Saldo	Rp -
		Penutupan	Rp 2.625.000,00				Penutupan	Rp 2.625.000,00

Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo, sbb :

	Rp	-
	Rp	-
	Rp	-
Jumlah	Rp	-

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Sekolah

Kolon Dawat, S.Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
NIP. 19761221 200604 1 011

Dibuat Oleh :
Bendahara Sekolah,


Kapitan

NIP. 19660325 200701 1 014

BASTAKAN UNIVERSITAS TERBUKA (BUT UNIVERSITAS)

BUKU KAS LUNAS

Bulan: DESEMBER 2015

lok : SMP 3 Krayan Selatan
 IC : Long Layu / Krayan Selatan
 ban : Nunukan
 Kalimantan Utara

No. Voucher	No. Bukti	Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Pengeluaran	Jumlah (Rp)
2/2012	-	Saldo Bulan Lalu (Nopember)	Rp 8.775.000,00				Dibayar Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap / Non PNS 7 Bulan April s.d Juni 2015	Rp 1.170.000,00
2/2015		Pencairan Dana BOSDA Tw II, III dan IV 2015 dari Bank BPD Unit Krayan	Rp 8.775.000,00				Dibayar Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap / Non PNS Bulan Juli s.d September 2015	Rp 1.170.000,00
							Dibayar Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap / Non PNS Bulan Oktober s.d Desember 2015	Rp 1.170.000,00
							Dibayar Alat Tulis Kantor Bulan April 2015	Rp 430.000,00
							Dibayar Alat Tulis Kantor Bulan Juli 2015	Rp 540.000,00
							Dibayar Alat Tulis Kantor Bulan Oktober 2015	Rp 430.000,00
							Dibayar Peralatan Kebersihan Bulan April 2015	Rp 110.000,00
							Dibayar Belanja Fc Laporan Bulanan dan Soal Semester Akhir Bulan Juni 2015	Rp 390.000,00
							Dibayar Belanja Fc Laporan Bulanan dan Soal Tengah Semester Bulan September 2015	Rp 390.000,00
							Dibayar Belanja Fc Laporan Bulanan dan Soal Semester Ganjil Bulan Desember 2015	Rp 500.000,00
							Dibayar Belanja Konsumsi Guru dan Staf Bulan April - Juni 2015	Rp 825.000,00
							Dibayar Belanja Konsumsi Guru dan Staf Bulan Juli - Sept 2015	Rp 825.000,00
							Dibayar Belanja Konsumsi Guru dan Staf Bulan Okt - Des 2015	Rp 825.000,00
12/2015		Penerimaan bulan ini	Rp 8.775.000,00	31/12/2015			Pengeluaran bulan ini	Rp 8.775.000,00
		Perutupan	Rp 8.775.000,00				Saldo	Rp 8.775.000,00
							Perutupan	Rp 8.775.000,00

Ini kami Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas, Buku Kas Tunai ditutup dengan keadaan saldo, sbb :

bank
 tunai

Jumlah

Rp
 Rp
 Rp



Dibuat oleh :
 Kepala Sekolah
 NIP. 1986014 198803 1 013

Dibuat Oleh :
 Bendahara Sekolah,
 AGUTINUS SE
 NIP. 19740827 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 3 KRAYAN SELATAN

Alamat : Jl. Pendidikan Desa Long Budung Kec. Krayan Selatan 77456

DAFTAR PENERIMA HONORER GURU / PEGAWAI

BULAN : OKTOBER s/d DESEMBER 2015

Nama	Jenis Kepegawaian	Oktober	November	Desember	Jumlah	Tanda Tangan	
2	3	5	6	7	8	9	
Emefri Yanthi	TU	85.000	85.000	85.000	195.000	1	<i>[Signature]</i>
Faridus, A.Ma.Th	Guru Mapel	85.000	85.000	85.000	195.000		2 <i>[Signature]</i>
Harvini, S.Pd	Guru Mapel	85.000	85.000	85.000	195.000	3	<i>[Signature]</i>
Makel, S.Pd	Guru Mapel	85.000	85.000	85.000	195.000		4 <i>[Signature]</i>
Banda Long	Guru Mapel	85.000	85.000	85.000	195.000	5	<i>[Signature]</i>
Desi Sopian	Guru Mapel	85.000	85.000	85.000	195.000		6 <i>[Signature]</i>
JUMLAH		390.000	390.000	390.000	1.170.000		

Long Layu, 8 Desember 2015



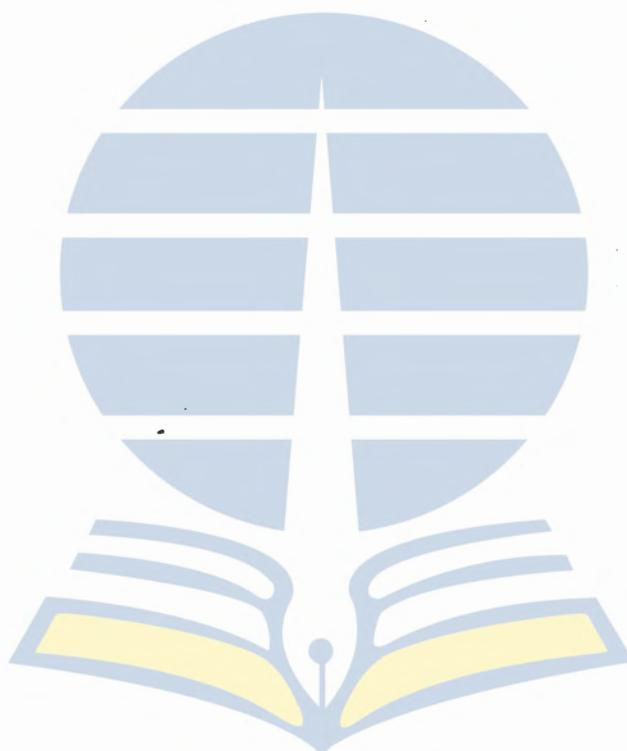
NIP. 19660814 198803 1 013

Bendahara Bosda,

Agustinus, SE

NIP. 19740827 201001 1 006

**DOKUMEN SMPN DI
KECAMATAN SEIMENGGARIS**





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 SEI MENGGARIS

Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Tabur Lestari, Kec. Sei Menggaris, Kab. Nunukan – Kaltara

K W I T A N S I

Kode Rek. :
 Mata Anggaran : BOS

Diterima Dari : Bendahara SMP Negeri 2 Sei Menggaris
 Uang Sebanyak : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
 Untuk Pembayaran : Baju Olahraga Sekolah....

Terbilang :

Seimenggaris, 21 November 2015

<p>Setuju Dibayar Kepala Sekolah</p>  <p>Drs. Tada Stanis Laus, M.Pd NIP. 19660503 200212 1 005</p>	<p>Dibayar Lunas Bendahara</p>  <p>HARTATI, S.Pd</p>	<p>Tanda Tangan Menerima</p>  <p>Muh. Yasin Seimenggaris</p>
---	--	--



No. 01
 Telah terima dari *Adrian Baso Lambagi*
 Uang sejumlah *Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*
 Untuk pembayaran *Baju olah raga Sekolah*
 21 Desember 2015

 Rp. 1.280.000

M. YASIN



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 SEI MENGGARIS

Alamat : Jl. Diponegoro, Desa Tabur Lestar Kec. Sei Menggari, Kab. Nunukan – Kaltara

KWITANSI

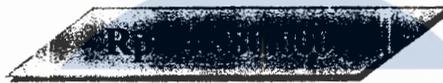
Buku Kas No. : 5.2.1.02.02
 Mata Anggaran : BOS PUSAT

Diterima Dari : Bendahara SMP Negeri 2 Sei Menggaris

Yang Sebanyak : Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Gaji Guru Honorar

Terbilang :



Sei Menggaris, 10 Nopember 2015

Setuju Dibayar
Kepala Sekolah

Drs. Tada Stanis Laus, M.Pd
 NIP. 19660503 200212 1 005

Dibayar Lunas
Bendahara

HARTATI, S.Pd

Tanda Tangan
ng Menerima



Bukti Terlampir



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks. Gabungan Dinas II, Nunukan-77482, Kaltim, Telp. (0556) 24584, Fax. (0556) 24584

Nomor : 893/ 226 /DISDIK-II/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin melaksanakan
Penelitian

Kepada :
Yth. **Kepala UPT PPDM**
Dinas Pendidikan
Kecamatan Sembakung

Di-
TEMPAT

Menindaklanjuti surat permohonan saudara tanggal 09 Februari 2016 perihal permohonan izin melakukan penelitian di **UPT PPDM Disdik Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan**, maka bersama ini kami memberikan persetujuan kepada :

Nama : **LISRAN, S.AP**
NIM : 500647451
Jenjang : Program Pasca Sarjana (S2)
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Judul Penelitian : **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan**
Waktu penelitian : Bulan Februari s/d April 2016

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nunukan, 25 Maret 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat kab. Nunukan
2. Inspektorat Kabupaten Nunukan
3. Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Nunukan, 9 Pebruari 2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**
di Dinas Pendidikan Kab.Nunukan

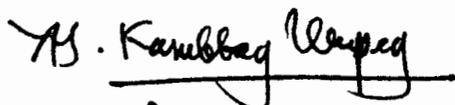
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab.Nunukan
di-
Nunukan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini pendidikan S2, maka dengan ini saya atas nama Lisran,S.AP/ NIM.500647451 sebagai siswa Ilmu Adminsitrasi Bidang Magister Administrasi Publik (MAP) UPPJ-Samarinda, dengan ini ingin melakukan penelitian sebagai syarat untuk menempuh S2 tersebut. Berdasarkan judul penelitian yang telah diajukan ke Dosen Pembimbing 1 tentang "*Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan*", maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat menerima kami dalam melakukan penelitian dimaksud. Adapun bahan pertimbangan Bapak kami lampirkan Kartu mahasiswa.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Yang bermohon.


Lisran, S.AP
NIM.500647451


- Dapat di Bantu



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 42414.pdf
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kompleks Rusunawa RT 05 Nunukan Selatan – Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (77482)
Telp./Faks. (0556) 22831

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072.05/ 83 /BKBP-I

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ;
- b. Memperhatikan : Surat Pokjar Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda Universitas Terbuka Nomor 15/POKJAR-S2/UT/Nnk/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Ijin Penelitian ;

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN,

memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : LISRAN
- b. Nomor Induk Kependudukan : 640502522805740003
- c. Alamat : Jl. Imam Bonjol RT. 016 Kel. Nunukan Tengah
Kecamatan Nunukan
- d. Pekerjaan : PNS
- e. Nama Lembaga/Penanggung Jawab : Universitas Terbuka
Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT)
Samarinda
- f. Alamat Lembaga/Penanggung Jawab : Jl. Antasari Baru Sei Sembilan Kel Selisun
Kecamatan Nunukan Selatan

- untuk : 1. Melakukan kegiatan penelitian/survey/riset dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS SLTP/SMP di Kabupaten Nunukan."
2. Lokasi Penelitian : Se-Kabupaten Nunukan
3. Masa Penelitian : 101 (seratus satu) hari terhitung mulai tanggal 22 April s/d 31 Juli 2016

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi terkait dan/atau Camat/Lurah/Kepala Desa lokasi penelitian/survey/riset ;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud ;

3. **Wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengindahkan norma/aturan adat istiadat setempat ;**
4. **Setelah selesai penelitian/survey/riset dilaksanakan, diminta untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Bupati Nunukan c.q. Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ;**
5. **Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama masa penelitian/survey/riset ;**
6. **Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian/survey/riset belum selesai dilaksanakan, maka Rekomendasi Penelitian ini dapat diperpanjang setelah Pemegang Rekomendasi ini melapor kembali kepada Bupati Nunukan c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, disertai alasan/keterangan tertulis bahwa penelitian/survey/riset belum selesai pada waktunya ; dan**
7. **Rekomendasi Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila Pemegang Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan yang berlaku.**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nunukan
pada tanggal 22 April 2016

KEPALA

JOKO SANTOSA, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670927 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Nunukan
c.q. Ka Bag. Pemerintahan Setkab Nunukan
2. Yth. KAPOLRES Nunukan Kab. Nunukan
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Nunukan
4. Yth. Sekretaris Pokjar UPBJJ Universitas Terbuka di Samarinda
5. Yth. Kepala Dines Pendidikan Kab. Nunukan
6. Yang bersangkutan
7. — Arsip —



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 197 / III /2015**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DAN PENGALOKASIAN BOSDA
JENJANG SD NEGERI DAN SMP NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam untuk kelancaran dalam penanganan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nunukan Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri melalui Program BOSDA Tahun Anggaran 2015 dan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR 9 TAHUN) yaitu Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi SD Negeri dan SMP Negeri se Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa nama Sekolah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak untuk mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Sekolah Penerima dan Pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 Bulan : November 2015
 TRIWULAN IV

Sekolah : SMP Negeri 2 Sebatik
 Desa/Kecamatan : Balansiku / Sebatik
 Kabupaten : Nunukan
 Propinsi : Kalimantan Utara

Format BOS-K6
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN 10%	PPh. 21	PPh. 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	12
2/12/2015			Saldo Pajak bulan lalu	-	-	-	-	-	-
2/12/2015		14	Pajak pembelian taplak meja	Rp 130,850.00	-	-	-	-	Rp 130,850.00
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			Jumlah	130,850	-	-	-	-	Rp 130,850.00



Sebatik, 30 November 2015
 Bendahara

RUDIANTO, S.Pd
 NIP. 19841014 201001 1 005

BUKU KAS UMUM BOSDA BULAN DESEMBER 2015 TRIWULAN IV

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SEBATIK
Desa / Kecamatan : Balansiku / Sebatik
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara

Format BOS-K3
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah

NO. BUKTI	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
	1/12/2015	Saldo Kas Tunai Triwulan III	-	-	-
	1/12/2015	Saldo Kas Bank Triwulan IV	-	-	-
	1/12/2015	Saldo Kas Tunai Triwulan IV	Rp 1,650,000.00	-	Rp 1,650,000.00
18	30/12/2015	Bayar pergantian gaji tenaga TU Honor 2 Orang Triwulan IV	-	Rp 530,000.00	Rp 1,120,000.00
19	30/12/2015	Bayar pergantian Insentif Kasek, Bendahara, Operator Triwulan IV	-	Rp 1,120,000.00	Rp -
		JUMLAH	Rp 1,650,000.00	Rp 1,650,000.00	Nihil

Buku Kas-Umum ditutup pada tanggal 31 Desember 2015 dengan saldo terdiri dari : Rp. 0

Saldo Kas Tunai
 Saldo Bank
 Jumlah
 Perbedaan

Rp -
 Rp -

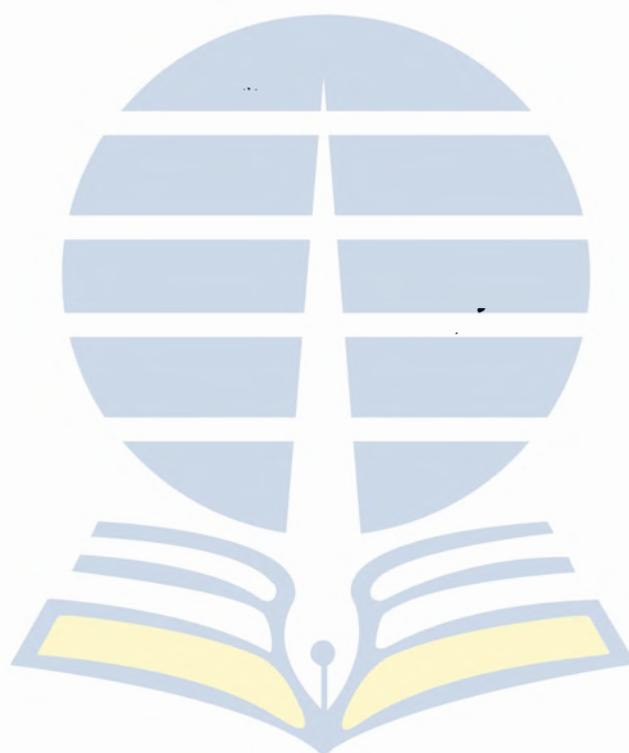
 Rp -
 Rp -

Kepala Sekolah,


ADY RAHMAN MAMING, S.Pd
 NIP.19740125 200604 1 007

Sebatik, 31 Desember 2015
 Bendahara


RUDIANTO, S.Pd
 NIP. 19841014 201001 1 005



KECAMATAN SEBATIK BARAT
DOKUMEN SMPN DI

BUKU PEMBANTU PAJAK
 Bulan : Oktober s/d Desember 2015
 BOS DAERAH TRIWULAN 4 TAHUN 2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sebaik Barat
 Desa/ Kecamatan : Setabu/Kecamatan Sebatik Barat
 Kabupaten : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Pengeluaran	Saldo
				PPN	PPH21	PPH22	PPH23	(Kredit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09/11/2015		045/SMPN-1SB/2015	Belanja Kipas Angin	510.000					Rp 510.000
09/11/2015		046/SMPN-1SB/2015	Belanja ATK umum	246.700					Rp 756.700
01/12/2015		050/SMPN-1SB/2015	Insentif penanggung jawab BOSDA Juli s/d Desember 2015		163.500				Rp 920.200
01/12/2015		051/SMPN-1SB/2015	Insentif bendahara BOSDA Juli s/d Desember 2015		148.500				Rp 1.068.700

Jumlah Pajak yang Dibayarkan
 Bulan Oktober s/d Desember 2015 =

Rp **1.068.700**

Sebatik Barat, 01 Desember 2015
 Bendahara

Teguh Prastyo, S.Pd.
 Nip. 19861119 201001 1 001

Mengetahui
 Kepala Sekolah
 Misfahuddin Adnan, S.Pd.
 NIP. 19740330 200604 1 002

BUKU PEMBANTU BANK
BOS DAERAH TRIWULAN 4 TAHUN 2015

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sebatik Barat
Desa/ Kecamatan : Sebatik Barat
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara
Bulan : November 2015

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5				6	7
01/11/2015			Saldo Kas Bulan Lalu	-					
06/11/2015			Terima Dana BOSDA Triw 4 Thn 2015	20.175.000					
					09/11/2015			Tarik Tunai BOSDA Triw 4 Thn 2015	20.175.000
								Pengeluaran	20.175.000
								Saldo	
			Penutupan	20.175.000				Penutupan	20.175.000

Pada hari Senin Tanggal 09 November 2015 buku pembantu bank ditutup dengan keadaan / posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Pembantu Bank Rp

Mengetahui
Penanggung Jawab/Kepala Sekolah

Misfahuddin Adnan, S.Pd.
NIP. 19740330 200604 1 002

Sebatik Barat, 09 November 2015
Dibuat oleh,
Bendahara

Teguh Prastyo, S.Pd.
Nip. 19861119 201001 1 001

**BUKU KAS UMUM
BOSDA TRIWULAN 4 TAHUN 2015**

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sebatik Barat
Desa/ Kecamatan : Sebatik Barat
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara
Bulan : Desember 2015

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5				6	7
01/12/2015			Saldo Kas Bulan Lalu	2.690.000					
					01/12/2015	049/SMPN-1SB/2015		Honorarium Rutin Tenaga Guru honorer Non PNS Desember 2015	1.650.000
					01/12/2015	050/SMPN-1SB/2015		Insentif penanggung Jawab BOSDA (Kepala Sekolah) Desember 2015	545.000
					01/12/2015	051/SMPN-1SB/2015		Insentif bendahara BOSDA bulan Desember 2015	495.000
								Pengeluaran	2.690.000
								Saldo	-
			Penutupan	2.690.000				Penutupan	2.690.000

Pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2015 buku kas umum ditutup dengan keadaan / posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp -
terdiri dari :

Saldo Bank	Rp	-
Saldo kas tunai	Rp	-
Jumlah		NIHIL

Mengetahui
Penanggung Jawab/Kepala Sekolah

Misfahuddin Adnan, S.Pd.
NIP. 19740930 200604 1 002

Sebatik Barat, 01 Desember 2015
Dibuat oleh,
Bendahara

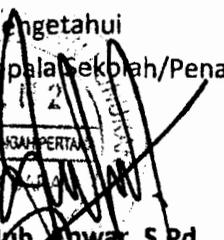
Teguh Prastyo, S.Pd
Nip. 19861119 201001 1 001

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : November 2015

Sekolah : SMPN 2 SEBATIK BARAT
 Desa/Kec : Liang Bunyu / Sebatik Barat
 Kota : Nunukan
 Provinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh. 21	PPh. 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	7	12
			Honorarium Tim atau Panitia PNS kegiatan kependidikan		Rp 45,000			Rp 45,000	
24/112015			Konsumsi Rapat Ujian Semester Ganjil				Rp 20,000	Rp 20,000	Rp -
24/112015			Konsumsi kegiatan kesiswaan				Rp 60,000	60,000	Rp -
			Jumlah	-	45,000	-	80,000	125,000	Rp -

Mengetahui
 Kepala Sekolah/Penanggung Jawab

Moh. Anwar, S.Pd
 NIP. 19820901 201001 1 007



Sebatik Barat, 30 November 2015
 Bendahara Sekolah


Rini Zainal, SE
 NIP 19841118 201001 2 001

Sekolah : SMPN 2 SEBATIK BARAT
 Desa/Kecamatan : Liang Bunyu/Sebatik Barat
 Kota : Nunukan
 Propinsi : Kalimantan Utara
 Triwulan : IV (Empat)
 Sumber Dana : BOS Daerah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1/12/2015		BKT.01/XII	Saldo Kas Tunai Bulan November	Rp 2,280,000		Rp 2,280,000
1/12/2015	5.2.1.02.02	1	Honorarium rutin tenaga honorer non PNS untuk tenaga pendidik dan kependidikan		Rp 1,100,000	Rp 1,180,000
1/12/2015	5.2.1.01.03	2	Honorarium Tim atau Panitia PNS kegiatan kependidikan		Rp 450,000	Rp 730,000
1/12/2015	5.2.1.01.03	3	Bayar Surat Kabar		Rp 150,000	Rp 580,000
1/12/2015	5.2.2.02.04	4	Bayar bensin genset		Rp 520,000	Rp 60,000
1/12/2015	5.2.2.06.02	5	Bayar Foto Copy dan Jilid		Rp 60,000	Rp -
			JUMLAH	Rp 2,280,000	Rp 2,280,000	Rp -

Pada hari Selasa 1 Desember 2015 buku kas tunai ditutup dengan Saldo

Terdiri dari :

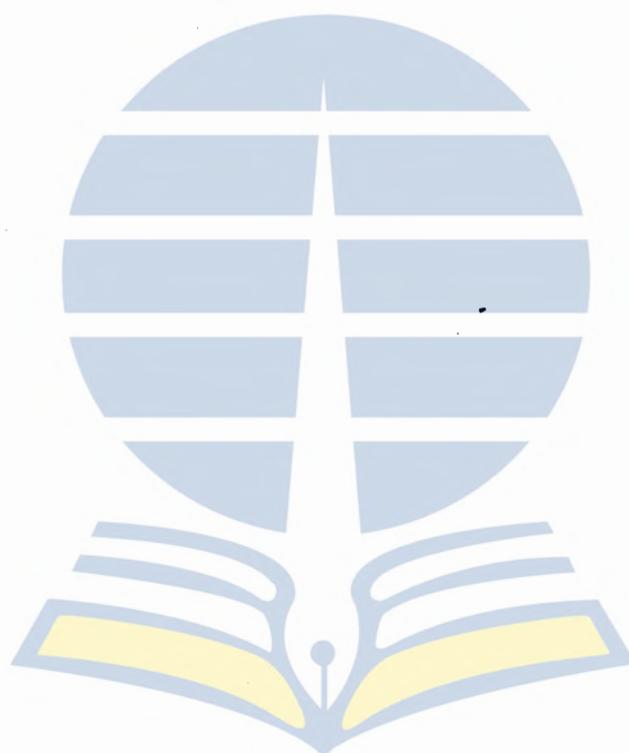
Saldo Kas Tunai	Rp	.
Saldo Bank	Rp	.
Jumlah	Rp	.

Mengetahui
 Kepala Sekolah/Penanggung Jawab

 Muh. Anwar, S.Pd
 NIP. 19820901 201001 1 007

Sebatik Barat, 1 Desember 2015
 Bendahara Sekolah


 Rini Zainal, SE
 NIP 19841118 201001 2 001



KECAMATAN SEBATIK TENGAH
DOKUMEN SMPN DI

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SEBATIK TENGAH
 JL. Sultan Hasanuddin, Ds. Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah 77445

KUITANSI

Bukti Kas No. : 18
 Mata Anggaran : Belanja Barang dan
 Jasa

Sudah terima dari : Bendahara SMP Negeri 1 Sebatik Tengah

Uang sebanyak : Rp3.260.000

Untuk :
 Dibayarkan Honorarium Pegawai bulan Desember 2015

TERBILANG : Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

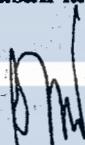
Aji Kuning, 22-Dec-15

Dibayar Lunas,
 22/12/2015
Bendahara



NURJANNAH, S.Pd.I
 NIP.19830811 200902 2 005

Setuju dibayar,
Kepala Sekolah/
Atasan langsung



MUSMULIADI, SH
 NIP. 19611127 200604 1 010

Tanda Tangan
Yang Menerima



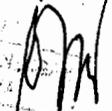
ANDI JAMALUDDIN

**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI BOSDA
BULAN : DESEMBER 2015**

Sekolah : SMP Negeri 1 Sebatik Tengah
 Desa/Kec : Aji Kuning / Sebatik Tengah
 Kota/Kabupaten : Nunukan
 Propinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1-Dec-15			Saldo bulan lalu			12.830.000
1-Dec-15	5.2.1.02.02	BK.011	Dibayarkan pembelian obat-obatan p3k		300.000	12.530.000
5-Dec-15	5.2.2.03.03	BK.012	Dibayarkan Pembelian Voucher Listrik elektronik Bulan Desember	-	500.000	12.030.000
6-Dec-15	5.2.2.01.05	BK.013	Dibayarkan biaya pembelian alat kebersihan	-	600.000	11.430.000
7-Dec-15	5.2.2.01.01	BK.014	Dibayarkan biaya belanja Alat Tulis Kantor Bulan Desember		900.000	10.530.000
21-Dec-15	5.2.2.06.02	BK.015	Dibayarkan biaya konsumsi rapat dinas	-	270.000	10.260.000
22-Dec-15	5.2.2.06.02	BK.016	Dibayarkan biaya konsumsi tamu	-	300.000	9.960.000
22-Dec-15	5.2.2.15.01	BK.018	Pembelian Meja Siswa 13 Buah @Rp.500.000 = Rp.6.500.000,-		6.500.000	3.460.000
22-Dec-15	5.2.2.01.05	BK.019	Dibayarkan Honorarium Pegawai bulan Desember 2015	-	3.260.000	200.000
22-Dec-15	5.2.2.29.16	BK.020	Dibayarkan biaya konsumsi tamu	-	200.000	-

Menyetujui,
 Plt. Kepala sekolah


 MUSMULIADI, SH
 NIP. 19711127 20604 1 010

SebatikTengah, 31 Desember 2015

Dibuat,
 Bendahara


 NURJANNAH, S.Pd.I
 NIP.19830811 200902 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SMP NEGERI 2 SEBATIK TENGAH**

KWITANSI

Bukti Kas No. : BKK19

Mata Anggaran :

Sudah terima dari : Penanggungjawab BOSDA SMP Negeri 2 Sebatik Tengah

Uang Sebanyak : Satu juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Untuk : Pembayaran Honorarium Penanggungjawab BOSDA dan Staf Perpustakaan Bulan Juli s/d September

TERBILANG Rp. 1,740,000.00

Setuju dibayar, Penanggungjawab	Lunas dibayar, 01 Desember 2015 Pembantu Bendahara	Yang menerima
 M. NURIKHSAN RIDWAN, S. Pd NIP. 19711127 200604 1 010	 DARMI, S.Pd NIP. 19800720 200902 2003	 HARLINDAH

BUKU PEMBANTU BANK
Bulan : OKTOBER s/d DESEMBER

Kelompok : SMP Negeri 2 Sebatik Tengah
 Kecamatan : Bukit Harapan / Sebatik Tengah
 Desa : Nunukan
 Kabupaten : Kalimantan Utara

Format BOS-K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
01 November 2015			Sisa Saldo Akhir Bulan September 2015	0.00	06 November 2015			Penarikan Tunai dari Bank Kaltim	4,350,000.00
06 November 2015		BKM02	Terima Dana Bosda TW IV Melalui Bank Kaltim	4,350,000.00					
								Pengeluaran	4,350,000.00
								Saldo	0.00
			Penutupan	4,350,000.00				Penutupan	4,350,000.00

Mengetahui,
 Penanggungjawab



M. NURIKHSAN RIDWAN, S. Pd
 NIP. 19791023 200803 1 001

Sebatik Tengah, 01 Desember 2015
 Pembantu Bendahara



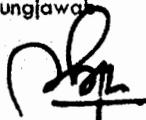
DARMI, S. Pd
 NIP. 19800720 200902 2 003

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
Bulan : OKTOBER s/d DESEMBER

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Sebatik Tengah
Desa/Kecamatan : Bukit Harapan/Sebatik Tengah
Kabupaten : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Timur

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Jumlah (RP)
				PPN (10%)	PPh. 21 (5%)	PPh. 22 (1,5 %)	PPh 23 (2%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 November 2015	411121 900	BKK12	Penyetoran PPN atas Pembelian ATK	186,000.00	-	-	-	186,000.00
	411121 100	BKK15	Penyetoran PPh 21 atas Honorarium Penanggung jawab BOSDA	-	22,500.00	-	-	22,500.00
JUMLAH								208,500.00

Mengetahui
Penanggungjawab



M. NURIKHSAN RIDWAN, S. Pd
NIP. 19791023 200803 1 001

Sebatik Tengah, 01 Desember 2015
Pembantu Bendahara



DARMI, S. Pd
NIP. 19800720 200902 2 003

BUKU KAS UMUM

Bulan : DESEMBER

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Sebatik Tengah
 Alamat : Bukit Harapan / Sebatik Tengah
 Kecamatan : Nunukan
 Kabupaten : Kalimantan Utara

No. Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Desember 2015			Sisa Saldo Akhir Bulan November 2015	1,740,000.00	01 Desember 2015	5.2.1.01.03	BKK19	Pembayaran Honorarium Penanggung jawab BOSDA dan Staf Perpustakaan Bulan April s/d Juni	1,740,000.00
								Pengeluaran	1,740,000.00
								Saldo	0.00
			Penutupan	1,740,000.00				Penutupan	1,740,000.00

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas buku Kas Umum ditutup dengan keadaan posisi buku sebagai berikut

Saldo Kas Umum : Rp. **4,350,000.00**

Terdiri dari

Saldo Kas Tunai : Rp. **0.00**

Saldo Bank : Rp. **0.00**

Saldo Akhir Min : Rp. **-**

Mengetahui
Kepala sekolah,

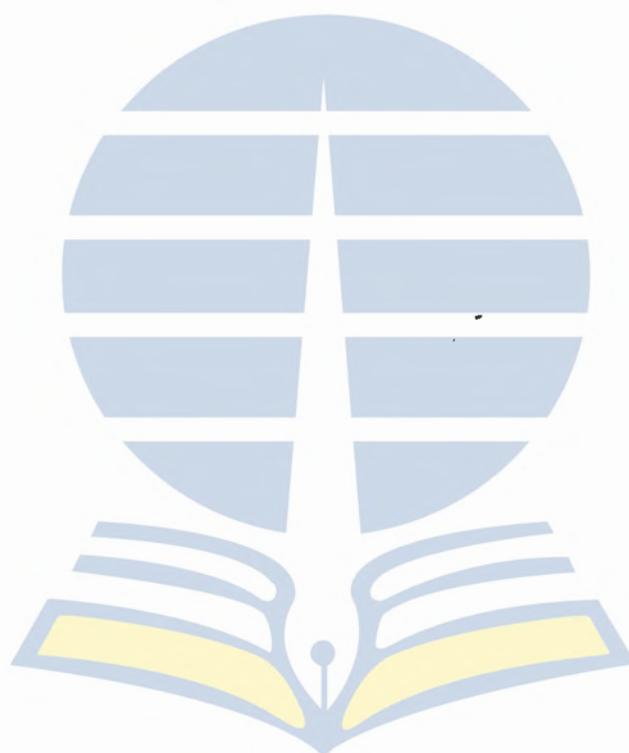


M. NURIKHSAN RIDWAN, S. Pd
NIP. 19791023 200803 1 001

Sebatik Tengah, 01 Desember 2015
Pembantu Bendahara



DARMI, S. Pd
NIP.19800720 200902 2 003



KECAMATAN SEBATIK UTARA
DOKUMEN SMPN DI

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SEBATIK UTARA

Alamat : Jl. Manunggal 34 Desa Pancang Kec. Sebatik Utara kode Pos 77483 Nunukan

Bukti Kas No. : BKK 060 /SMPN 1 SETARA/BOSDA /2015

Kode Rekening :

: Penanggung Jawab BOSDA SMP Negeri 1 Sebatik Utara

: Lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah

: Pemb. honorarium panitia dan pengawas Ulangan Umum semester 1

: Rp 5.540.000,00

<p>Lunas dibayar Tgl, 10 Desember 2015 Bendahara Pembantu</p>  <p>MASNI, S.S NIP. 19760815 200604 2 034</p>	<p>Tanda Tangan Yang Menerima</p>  <p>Dra. Hj. Sumiaty Nip. 19670705 199512 2 001</p>
--	---



BUKU KAS PEMBANTU PAJAN
Bulan : OKTOBER s/d DESEMBER

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sebatik Utara
Desa/Kecamatan : Bukit Harapan / Sebatik Utara
Kabupaten : Nunukan
Propinsi : Kalimantan Utara

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)				Jumlah (RP)
				PPN (10%)	PPh. 21 (5%)	PPh. 22 (1,5 %)	PPh 23 (4%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 November 2015	411121 900	BKK053	Penyetoran PPN atas Pengadaan Papan Tulis	945,000.00				945,000.00
30 November 2015	411121 900	BKK055	Penyetoran PPN atas Pembelian Alat Kebersihan	767,500.00				767,500.00
27 November 2015	411121 900	BKK058	Penyetoran PPN atas Pembelian Lemari	280,000.00				280,000.00
27 November 2015	411121 100	BKK060	Penyetoran PPh 21 atas Honorarium Panitia dan pengawas Ulum I		235,000.00	126,000.00		361,000.00
27 November 2015	411124 100	BKK061	Penyetoran PPh 23 atas Komsumsi Panitia dan pengawas Ulum I				162,000.00	162,000.00
11 November 2015	411121 100	BKK065	Penyetoran PPh 21 atas Honorarium Penanggung jawab BOSDA		110,000.00	382,500.00		492,500.00
JUMLAH								3,008,000.00

Mengetahui
Kepala sekolah


SUKARDI, S. Pd
NIP. 19641009 198703 1 012

Sebatik Utara, 10 Desember 2015
Pembantu Bendahara



MASNI, SS
NIP. 19760815 200604 2 034

BUKU PEMBANTU BANK
 Bulan : OKTOBER s/d DESEMBER

42414.pdf

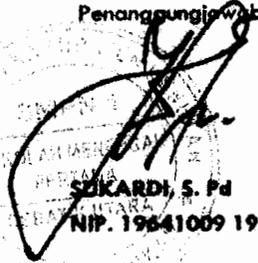
Format BOS-K5
Ditisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di sekolah

Daftar Sekolah
 s/Kecamatan
 upatan
 ini

: SMP Negeri 1 Sebatik Utara
 : Bukit Harapan / Sebatik Utara
 : Nunukan
 : Kalimantan Utara

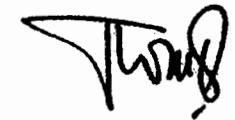
Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Penerimaan	Jumlah (Rp)	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian Pengeluaran	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Oktober 2015			Sisa Saldo akhir Bulan September 2015	0.00	10 November 2015			Penarikan Tunai dari Bank Kaltim	56,100,000.00
10 November 2015		BKM04	Terima Dana Bosda TW IV Melalui Bank Kaltim	56,100,000.00					
								Pengeluaran	56,100,000.00
								Saldo	0.00
			Penutupan	56,100,000.00				Penutupan	56,100,000.00

Mengetahui,
 Penanggungjawab

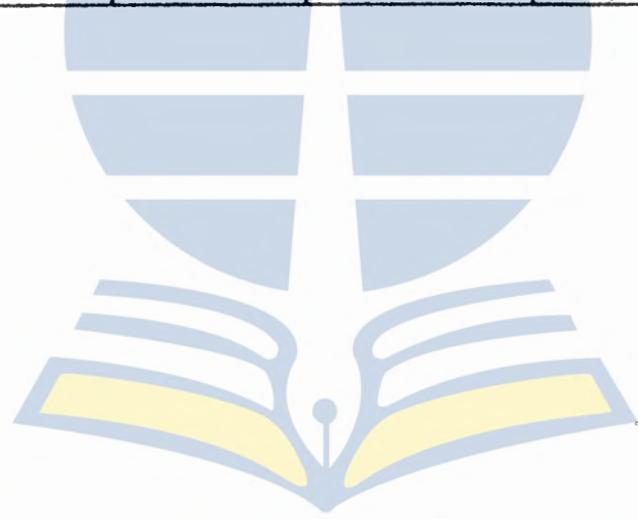


SRIKARDI, S. Pd
 NIP. 19641009 198703 1 012

Sebatik Utara, 10 Desember 2015
 Pembantu Bendahara



MASNI, SS
 NIP. 19760815 200604 2 034



Pada Hari Ini, Kepala Sekolah Mengetahui Saldo (Rekening Lira Waku Lira Waku Saldo Kas Umum) sebagai berikut: **Rekening Bank**
Saldo Kas Umum

Rp. 30,940,700.00

Jumlah Penerimaan	: Rp.	30,940,700.00
Jumlah Pengeluaran	: Rp.	30,940,700.00
Saldo	: Rp.	0.00

Terdiri dari		
Saldo Tunai	: Rp.	0.00
Saldo Bank	: Rp.	0.00

Mengetahui
Kepala sekolah,

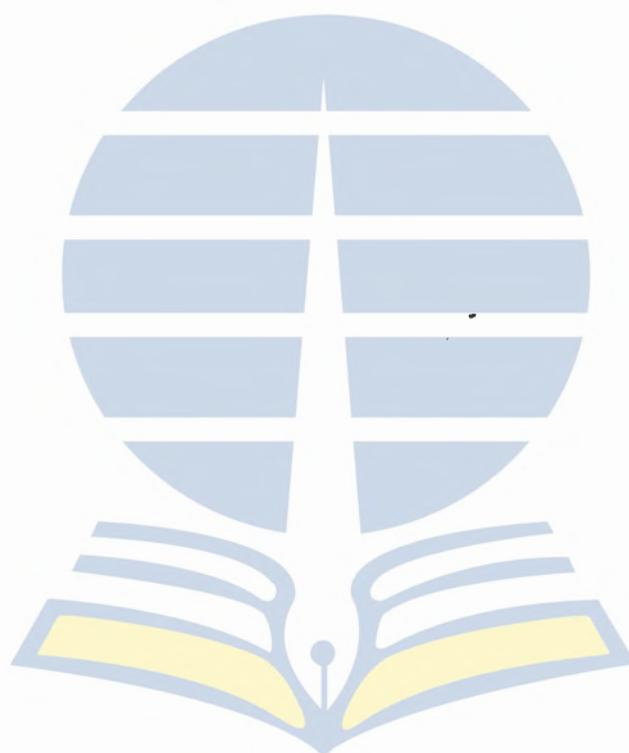


PSIKARDI, S. Pd
NIP. 19641009 198703 1 012



Sebatik Utara, 10 Desember 2015
Pembantu Bendahara

MASNI, SS
NIP. 19760815 200604 2 034



KECAMATAN LUMBIS

DOKUMEN SMPN DI

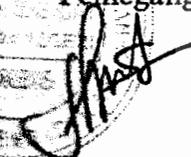
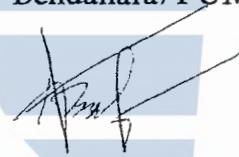
KWITANSI

Bukti Kas : 6 / BOSDA / 2015
 Mata anggaran : 2015

Telah terima dari : Bendahara/PUMK SMPN 2 Lumbis
 Banyaknya Uang : Seratus lima puluh ribu rupiah
 Untuk Pembayaran : Belanja Penggandaan dan foto kopi Januari s.d. Maret 2015

Lumbis, 09 Juli 2015

Terbilang : Rp. 250.000

Setuju dibayar Atasan Langsung Pemegang kas  Anes Pera, S.S 197209132006041009	Dibayar Lunas Tgl. 09-07-2015 Bendahara/PUMK  Robertus SB Rengga, S.Pd NIP. 198304192007011002	Tanda Tangan Penerima  BIRO JASA DAN USAHA SOLO KONVEKSI GROUP Alamat Toko "SKG" Jl. Panembahan RT X Malilau, Malilau Kota Kahim Telp. (631) 2072 598, 085 257 665 373
--	--	--

Tuan Toko
 SMPN 2 LUMBIS

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
200 Lbr	Fotokopy seal GAS	500	100.000
100 Lbr	Foto kopi seal UAN	500	50.000
110 Lbr	Foto kopi ADMINISTRAS	500	55.000
3 Jilid	Sekolah	15.000	45.000
	Tiga buah Pengjilidan		
	SPJ bosda		
			250.000

Jumlah Rp. 250.000

BIRO JASA DAN USAHA
 SOLO KONVEKSI GROUP
 Alamat Toko "SKG"
 Jl. Panembahan RT X Malilau, Malilau Kota Kahim
 Telp. (631) 2072 598, 085 257 665 373

Tanda Terima

 Hormat kami,



KECAMATAN TULUNGAGUNG
DOKUMEN SMPN DI

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waji Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/199 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Car Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 2);
 3. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/120/II/2015 tentang Penetapan Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Swasta Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau Sederajat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Penerima dan Pengalokasian BOSDA jenjang SD Negeri dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015, yaitu yang nama sekolahnya dan besaran alokasi dana BOSDA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Proses penyaluran BOSDA jenjang SD Negeri dan SMP Negeri disalurkan langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan setiap Triwulan periode 3 (tiga) bulan dalam Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Daerah harus mengelola dana BOSDA secara akuntabel dan transparan, serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA yang diterimanya.

- KEEMPAT** : Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana BOSDA setiap akhir Triwulan Periode 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yaitu Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/Mi/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.16.63 dan Tahun Anggaran 2015. Dengan pembebanan anggaran :
- Belanja Pegawai :
Kode Rekening : 5.2.1.04.01 Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS SD/SMP Negeri.
 - Belanja Barang dan Jasa :
Kode Rekening : 5.2.2.22.01 Belanja barang dana BOS SD/SM Negeri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2015.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI NUNUKAN,


BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Pelaporan)
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala DPKAD Kabupaten Nunukan
5. Kepala BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Kaltim di Nunukan
6. Masing-masing Sekolah yang bersangkutan

KEC. SEMBAKUNG IENTANG SMP

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATA	SISWA	NAMA BANK	NOMOR KIRING	ALOKASI DANA (Rp)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
99	SMPN 1 SEMBAKUNG	JL. LAPANGAN RT.001, ATAP	Sembakung	207	BPD (BANK KALTIM)	13124551	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 62.100.000
100	SMPN 2 SEMBAKUNG	Jl. Lapangan Gali Gaharu, Desa Tepian	Sembakung	32	BPD (BANK KALTIM)	00929264	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 9.600.000
101	SMPN 3 SEMBAKUNG	Jl. Lapangan, Lubok Bunt	Sembakung	46	BPD (BANK KALTIM)	13125197	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 13.800.000
102	SMPN 4 SEMBAKUNG	Jl. Masjid An-nur, Tegul	Sembakung	18	BPD (BANK KALTIM)	13125286	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 5.400.000
103	SMPN 5 SEMBAKUNG	Jl. Lapangan, Desa Pelaju	Sembakung	22	BPD (BANK KALTIM)	13128123	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 6.600.000
104	SMPN 6 SEMBAKUNG	Jl. Lapangan Sepak Bola, Desa Pagar	Sembakung	61	BPD (BANK KALTIM)	13125031	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 18.300.000
JUMLAH				386				Rp 115.800.000

KEC. LUMBIS IENTANG SD

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATA	SISWA	NAMA BANK	NOMOR KIRING	ALOKASI DANA (Rp)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
105	SDN 001 LUMBIS	Jl. Lapangan Aji Kuring, Desa Mansalong	Lumbis	194	BPD (BANK KALTIM)	13124901	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 34.920.000
106	SDN 002 LUMBIS	LIBANG	Lumbis	48	BPD (BANK KALTIM)	13122309	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 8.640.000
107	SDN 003 LUMBIS	LOKASI 1 PEGATASON, DS. SALUDAN	Lumbis	80	BPD (BANK KALTIM)	13125006	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 14.400.000
108	SDN 004 LUMBIS	Jl. Pembangunan, Desa PA'LOO	Lumbis	64	BPD (BANK KALTIM)	1312066	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 11.520.000
109	SDN 005 LUMBIS	KALAMPISING	Lumbis	165	BPD (BANK KALTIM)	1312091	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 29.700.000
110	SDN 006 LUMBIS	DESA TG. HILIR	Lumbis	87	BPD (BANK KALTIM)	13125065	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 15.660.000
111	SDN 007 LUMBIS	Jl. Lapangan Sepak Bola, Desa Patal	Lumbis	191	BPD (BANK KALTIM)	1312171	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 34.380.000
112	SDN 008 LUMBIS	BERINGIN	Lumbis	74	BPD (BANK KALTIM)	1312228	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 13.320.000
113	SDN 009 LUMBIS	Jl. Rabansyah, MANSALONG	Lumbis	242	BPD (BANK KALTIM)	1312198	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 43.560.000
114	SDN 010 LUMBIS	DESA BULAN-BULAN	Lumbis	54	BPD (BANK KALTIM)	13125138	15.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 9.720.000
JUMLAH				1199				Rp 215.820.000

KEC. LUMBIS IENTANG SMP

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMAT.	SISWA	NAMA BANK	NOMOR KIRING	ALOKASI DANA (Rp)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115	SMPN 1 LUMBIS	JL. PEMBANGUNAN, MANSALONG	Lumbis	460	BPD (BANK KALTIM)	1312007	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 138.000.000
116	SMPN 2 LUMBIS	JL. PEMBANGUNAN RT.002, DESA PATAL	Lumbis	35	BPD (BANK KALTIM)	13125073	25.000 X 12 Bulan / Siswa	Rp 10.500.000
JUMLAH				495				Rp 148.500.000

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Se Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 13);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1143/XII/2014 tentang Standarisasi Barang / Jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSDA jenjang SD dan SMP atau Sederajat Tahun Anggaran 2015, Yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan/pedoman bagi Sekolah Penerima Dana BOSDA Jenjang SD dan SMP atau Sederajat Anggaran 2015.

**DAFTAR REKAP PESERTA UJIAN NASIONAL
JENJANG SMP/MTS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KABUPATEN NUNUKAN**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Peserta UN Terdaftar	Jumlah Peserta Tidak Mengikuti UN	Jumlah Peserta Mengikuti UN	Jumlah Peserta Tidak Lulus UN	Jumlah Lulus Ujian
1	SMPN 1 Nunukan	254	3	251	-	251
2	SMPN 2 Nunukan	274	4	270	-	270
3	SMPN 3 Nunukan	70	4	66	-	66
4	SMPN 1 Nunukan Selatan	215	2	213	-	213
5	SMPN 1 Krayan	98	1	97	-	97
6	SMPN 2 Krayan	24	-	24	-	24
7	SMPN 3 Krayan	20	-	20	-	20
8	SMPN 1 Krayan Selatan	8	-	8	-	8
9	SMPN 2 Krayan Selatan	12	-	12	-	12
10	SMPN 3 Nunukan Selatan	19	1	18	-	18
11	SMPN 1 Sebatik Utara	230	2	228	3	225
12	SMPN 1 Sebatik Barat	86	-	86	-	86
13	SMPN 1 Sebatik	48	1	47	-	47
14	SMPN 1 Sebuku	43	-	43	-	43
15	SMPN 1 Lumbis	149	1	148	-	148
16	SMPN 1 Sembakung	65	2	63	-	63
17	SMPN 1 Lumbis Ogong	19	-	19	-	19
18	SMPN 4 Sembakung	6	2	4	-	4
19	SMPN 4 Krayan	8	-	8	-	8
20	SMPN 3 Krayan Selatan	16	-	16	-	16
21	SMPN 1 Sei. Menggaris	23	1	22	-	22
22	SMPN 2 Sembakung	9	-	9	-	9
23	SMPN 2 Tulin Onsoi	25	-	25	-	25
24	SMPN 2 Lumbis Ogong	14	2	12	-	12
25	SMPN 2 Sebatik Barat	42	1	41	-	41
26	SMPN 3 Sembakung	12	1	11	-	11
27	SMPN 1 Tulin Onsoi	128	3	125	-	125
28	SMPN 2 Sebuku	22	-	22	-	22
29	SMPN 1 Sebatik Tengah	88	-	88	-	88
30	SMPN 2 Sebatik	17	-	17	-	17
31	SMPN 2 Nunukan Selatan	40	-	40	-	40
32	SMPN 3 Lumbis Ogong	8	-	8	-	8
33	SMPN 2 Sebatik Tengah	16	-	16	-	16
34	SMPN 2 Lumbis	12	-	12	-	12
35	SMPN 5 Sembakung	6	-	6	-	6
36	SMPN 6 Sembakung	20	6	14	-	14

37	SMPN 2 Sei. Menggaris	43	-	43	-	43
38	SMPN 3 Sebuku	10	1	9	-	9
39	SMP PGRI Nunukan	24	2	22	-	22
40	SMP Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan	62	2	60	-	60
41	SMP Muhammadiyah Nunukan	26	-	26	-	26
42	SMP IT Nur Islam Selisun	26	1	25	-	25
43	MTs Al Khairaat Nunukan	61	1	60	-	60
44	MTs YIIPS Sebatik Timur	82	-	82	-	82
45	SMPK Fransisco Yashinta Nunukan Selatan	43	-	43	-	43
46	MTs Al Ikhlas Nunukan	34	1	33	-	33
47	SMP Mutiara Bangsa Sebatik	41	1	40	-	40
48	MTs Nurul Iman Sebatik Timur	12	-	12	-	12
49	SMP IT Ibnu Sina Nunukan	16	-	16	-	16
50	MTs Haji Bedurahim Sebatik Utara	28	-	28	-	28
51	MTs Ma'arif NU 01	10	-	10	-	10
TOTAL		2,664	46	2,618	3	2,615

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabid. Pendidikan Dasar & SLB,

Sapto Hari S., M. Pd

NIP. 197401011999021001



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIÅAN
(SPP-TU)

Nomor : **0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015** Tahun **2015**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.449.645.000,00
JUMLAH			4.449.645.000,00

Terbilang : *Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*

NUNUKAN, 2 Nopember 2015
Bendahara Pengeluaran Diknas

Ibrahim, S.IP

NIP. 19720718 199803 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)

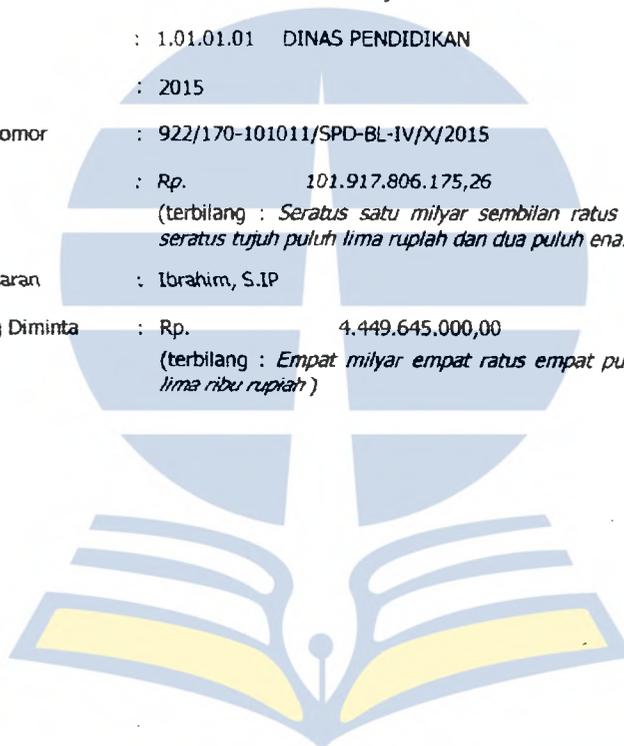
Nomor : **0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015** Tahun 2015

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD **DINAS PENDIDIKAN**
 Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 33, tentang Penjabaran Perubahan APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.01 | Urusan Wajib Pendidikan |
| b. SKPD | : 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN |
| c. Tahun Anggaran | : 2015 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 922/170-101011/SPD-BL-IV/X/2015 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 101.917.806.175,26 | (terbilang : Seratus satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah dan dua puluh enam sen) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : Ibrahim, S.IP | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 4.449.645.000,00 | (terbilang : Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) |



NUNUKAN, 2 Nopember 2015
Bendahara Pengeluaran Diknas



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)

Nomor : **0098./SPP-TU/101011.16.63/VI/2015** Tahun **2015**

RINCIAN

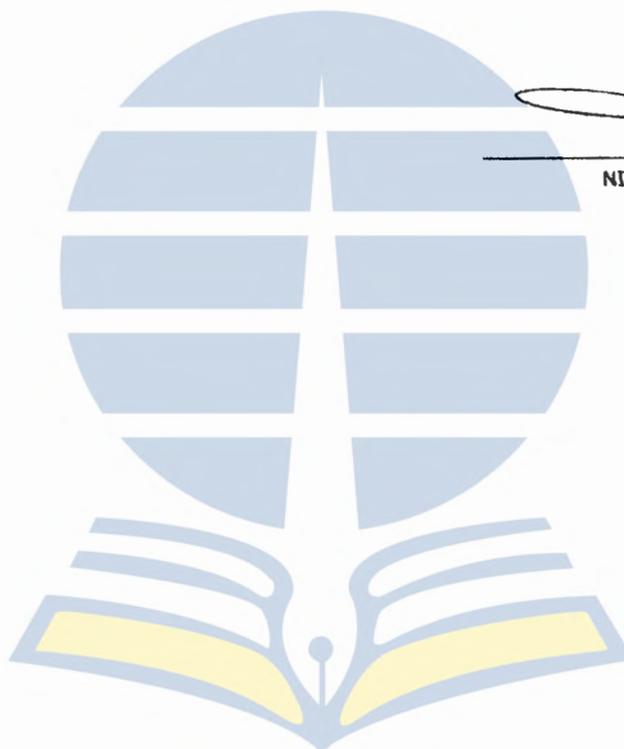
RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	1.483.215.000,00
JUMLAH			1.483.215.000,00

Terbilang : *Satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah*

NUNUKAN, 8 Juni 2015
BENDAHARA PENGELUARAN

IBRAHIM, S.IP

NIP. 19720718 199803 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAN
(SPP-TU)

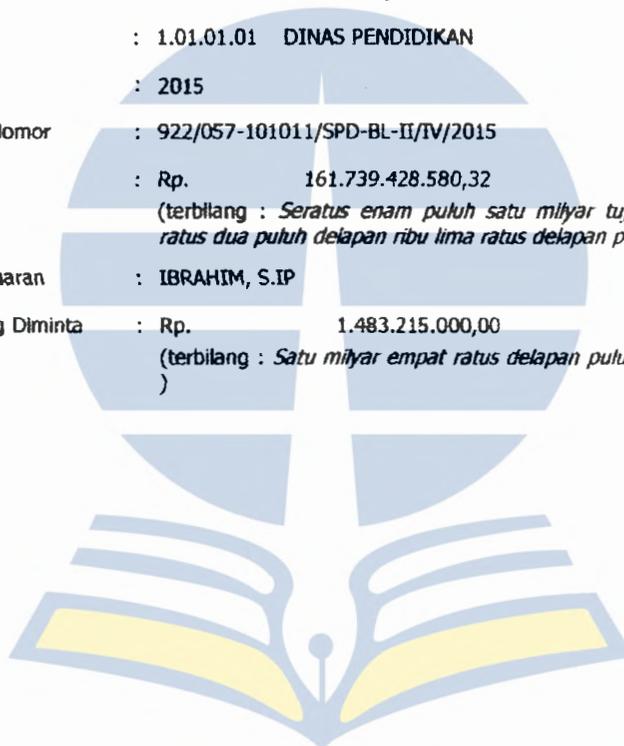
Nomor : 0098./SPP-TU/101011.16.63/VI/2015 Tahun 2015

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD **DINAS PENDIDIKAN**
 Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 38, tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| a. Urusan Pemerintahan | : 1.01 | Urusan Wajib Pendidikan |
| b. SKPD | : 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN |
| c. Tahun Anggaran | : 2015 | |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 922/057-101011/SPD-BL-II/IV/2015 | |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp. 161.739.428.580,32 | (terbilang : Seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah dan tiga puluh dua sen) |
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : IBRAHIM, S.IP | |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp. 1.483.215.000,00 | (terbilang : Satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) |



NUNUKAN, 8 Juni 2015
BENDAHARA PENGELUARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG PERSEDIAAN (TU)**

42414.pdf

Tahun Anggaran : 2015		No. SPM : 0575/SPM-TU/101011.16.63/XI/20	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN		Potongan - potongan :	
Supaya menerbitkan SP2D kepada :		No.	KODE REKENING
S K P D	DINAS PENDIDIKAN		
Bendahara / Pihak Ketiga *)		U R A I A N	NILAI
	IBRAHIM,S.Ip (Bendahara Pengeluaran)		
No.Rekening Bank	0091405512		
Nama Bank	BANK KALTIM CABANG NUNUKAN		
NPWP	00.408.804.3.723.000		
Dasar Pembayaran	922/170-101011/SPD-BL-IV/X/2015		
Untuk Keperluan : Bantuan Operasional Sekolah BOSDA Jenjang SDN/SMPN Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 2015.			
1. Belanja Tidak Langsung **)			
2. Belanja Langsung **)			
Pembebanan pada Kode Rekening :		Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	
KODE REKENING	URAIAN	No.	KODE REKENING
1.01.16.63.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		
	NILAI	U R A I A N	NILAI
	4.449.645.000,00		
JUMLAH			
	4.449.645.000,00	SPM yang Dibayarkan	
		Jumlah yang Diminta	4.449.645.000,00
		Jumlah Potongan	0,00
		Jumlah yang Dibayarkan	4.449.645.000,00
		Uang Sejumlah Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah	
Jumlah SPP yang Diminta	Rp. 4.449.645.000,00	NUNUKAN, 2 Nopember 2015	
	Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah	Pengguna Anggaran,	
Nonor dan Tanggal SPP	: 0575/SPP-TU/101011.16.63/XI/2015 dan 2 Nopember 2015		
		Ir. JAINUDDIN PALANTARA	
		NIP. 19610111 199303 1 003	



REKAM JEJAK PERPUSTAKAAN
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Nama : ...
2. NIM : ...
3. Alamat : ...
4. No. Telp : ...
5. Email : ...

6. Nama Mata Kuliah : ...
7. Nama Dosen : ...
8. Nama Asisten : ...
9. Nama Praktikan : ...

10. Nama Asisten Praktikum : ...
11. Nama Asisten Praktikum : ...
12. Nama Asisten Praktikum : ...

13. Nama Asisten Praktikum : ...
14. Nama Asisten Praktikum : ...
15. Nama Asisten Praktikum : ...

16. Nama Asisten Praktikum : ...
17. Nama Asisten Praktikum : ...
18. Nama Asisten Praktikum : ...

19. Nama Asisten Praktikum : ...
20. Nama Asisten Praktikum : ...
21. Nama Asisten Praktikum : ...





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 0575/SPM-TU/101011.16.63/XI/2015
Tanggal : 2 November 2015
SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Daerah : Kuasa BUD
Nomor : 06839/TU/2015
Tanggal : 3 November 2015
Tahun Anggaran : 2015

Bank / Pos : BANK KALTIM CAB. NUNUKAN (Kasda)

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 009 130 0010 Uang sebesar Rp. 4.449.645.000,00
(terbilang : Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Kepada : IBRAHIM,S.Ip (Bendahara Pengeluaran)
NPWP : 00.408.804.3.723.000
No. Rekening Bank : 0091405512
Bank / Pos : BANK KALTIM CABANG NUNUKAN
Keperluan Untuk : Bantuan Operasional Sekolah BOSDA Jenjang SDN/SMPN Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV 2015.

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.01.16.63.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.449.645.000,00
JUMLAH			4.449.645.000,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

Infomasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 4.449.645.000,00
Jumlah Potongan Rc. 0,00
Jumlah yang Dibayarkan Rp. 4.449.645.000,00

Uang Sejumlah Empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

NUNUKAN, 3 November 2015
Kuasa Bendahara Umum Daerah



Lampiran: Foto Wawancara



Foto 1 : Wawancara bersama bapak Ir.Zainuddin Palantara selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan



Foto 2 : Wawancara bersama bapak Ahkmad,S.IP.,M,Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan



Foto 3 : Wawancara bersama bapak Sapto Hari Sampurno, M.Pd selaku Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan



Foto 4: Wawancara bersama bapak Jamaluddin selaku PPTK BOSDA



Foto 5: Wawancara bersama bapak Ibrahim,S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan



Foto 6 : Wawancara bersama Kepala SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman



Foto 7 : Selesai wawancara bersama Kepala SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman



Foto 8 : Wawancara bersama Bapak Baharuddin, S.Pd selaku Kepala SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman



Foto 10 : Selesai wawancara bersama Komite SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman



Foto 9 : Wawancara bersama Komite SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman

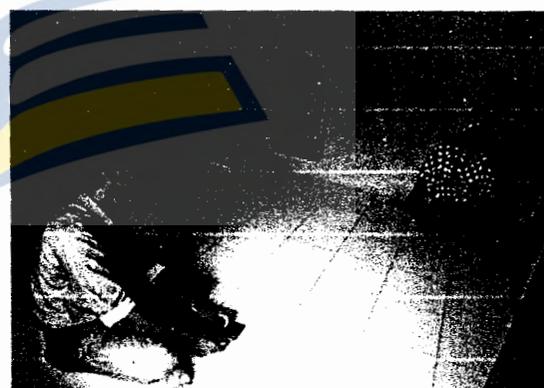


Foto 11 : Wawancara bersama Bendahara SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman



Foto 12 : Selesai wawancara bersama Bendahara SMPN 1 Kecamatan Sembakung di rumah kediaman

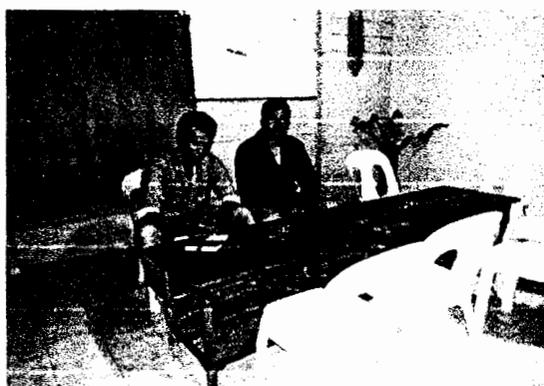


Foto 15 : Wawancara bersama Kepala SMPN 4 Kecamatan Sembakung di Penginapan



Foto 13 : Saat peneliti berangkat bersama Kepala SMPN 4 dari ibu kota Kecamatan Sembakung (Desa Atap) ke Desa Tagul



Foto 16 : Wawancara bersama A.Hamid Rahim mantan Komite SMPN 4 Kecamatan Sembakung

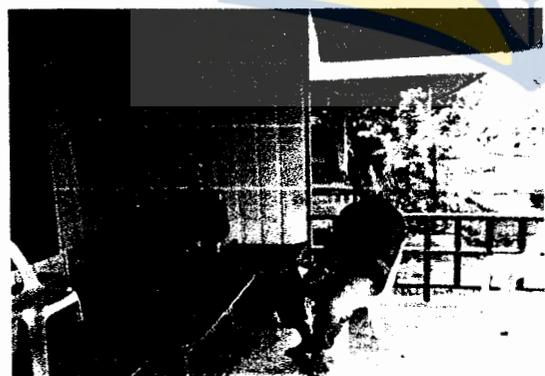


Foto 14: Wawancara bersama Imbul selaku Komite SMPN 2 di Penginapan Desa Atap Kecamatan Sembakung



Foto 17:Selesai wawancara bersama Imbul selaku Komite SMPN 2 di Penginapan Desa Atap Kecamatan Sembakung



Foto 18 : Wawancara bersama Hamdhani, S.Pd selaku Kepala SMPN 2 di ruang kerja SMPN 2 Desa Tepian Kecamatan Sembakung



Foto 19 : Selesai wawancara bersama Hamdhani, S.Pd selaku Kepala SMPN 2 di ruang kerja SMPN 2 Desa Tepian Kecamatan Sembakung

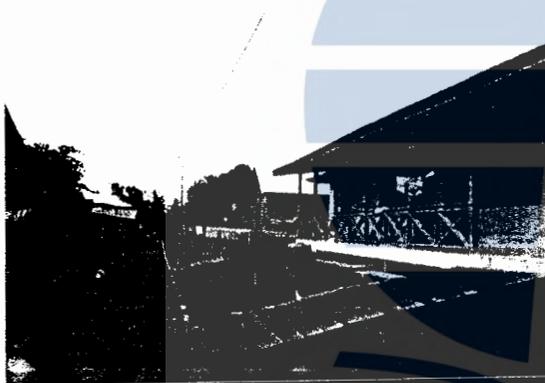


Foto 20 : Perumahan Guru SMPN 4 di Desa Tagul Kecamatan Sembakung

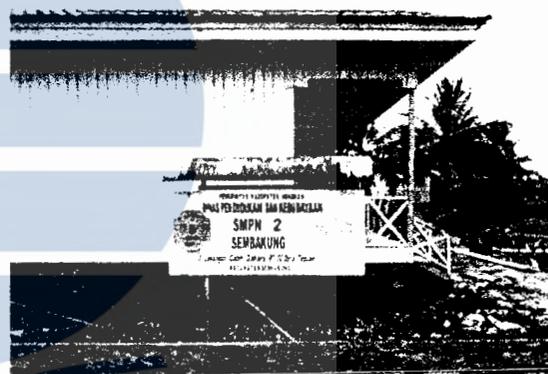


Foto 21 : Gedung SMP 2 di Desa Tepian Kecamatan Sembakung



Foto 22 : Gedung SMP 2 di Desa Tepian Kecamatan Sembakung



Foto 23 : Gedung SMPN 4 di Desa Tagul Kecamatan Sembakung



Foto 24 : Saat berada di pelabuhan POS Dishub di Desa Atap menuju Desa Tagul Kecamatan Sembakung



Foto 25 : Saat tiba di Desa Tagul (SMPN 4) Kecamatan Sembakung



Foto 26 : Suasana Desa Tagul Kecamatan Sembakung



Foto 27 : Sarana dan prasarana SMP 2 di Kecamatan Sembakung



Foto 28 : Saat perjalanan dari Desa Tepian (SMPN 2) ke Desa Atap (SMPN 1) Kecamatan Sembakung



Foto 29 : Saat perjalanan dari Desa Tepian (SMPN 2) ke Desa Atap (SMPN 1) Kecamatan Sembakung



Foto 30 : Saat berada di gedung SMPN 2
Desa Tepian Kecamatan Sembakung

